LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

Timotius Kaidel
Bupati

Mohamad Djumpa
Wakil Bupati

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Aru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat disusun. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban ini memuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu kewajiban dimaksud bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Daerah.

LKPJ ini menyajikan ringkasan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tahun 2025, yang mencakup: (1) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; (2) Realisasi pengelolaan keuangan daerah (pendapatan dan belanja); (3) Hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang telah diambil; serta (4) Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun sebelumnya.

Penyusunan LKJP Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 merupakan Laporan Pertanggungjawaban awal periodesasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang memberikan informasi capaian pembangunan di daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yakni tahun 2025-2029.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi aktif dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa capaian yang diraih selama tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan, sinergi, dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran legislatif, perangkat daerah, serta seluruh lapisan masyarakat. Meski telah banyak keberhasilan yang dicapai, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang memerlukan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam memantapkan strategi kebijakan pembangunan daerah pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Mutiara Indah Cendrawasih Lestari yang kita cinta bersama.

Sekian dan Terima Kasih.

Dobo, 31 Maret 2026

BUPATI KEPULAUAN ARU,

TIMOTIUS KAIDEL

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ---------- *i*

DAFTAR ISI ---------- *iii*

DAFTAR TABEL ---------- *v*

DAFTAR GAMBAR ---------- *viii*

BAB I PENDAHULUAN ---------- **I-1**

1.1. Dasar Hukum ---------- I-2

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah ---------- I-6

1.3. Gambaran Umum Daerah ---------- I-16

1.3.1. Data Geografis Wilayah ---------- I-16
1.3.2. Gambaran Aspek Demografis ---------- I-22
1.3.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil ---------- I-23
1.3.4. Kondisi Ekonomi ---------- I-26
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan-------- I-31
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja ---------- I-38
1.3.7. Realisasi Pembiayaan ---------- I-41
1.3.8. Penyerapan Realisasi Anggaran ---------- I-42

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ---------- **II-1**

2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ---------- II-3

2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ---------- II-7

2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ---------- II-9

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ---------- **III-1**

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan ---------- III-1

3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja ---------- III-1
3.1.1.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)-------- III-1
3.1.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 ---------- III-16
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ---------- III-57
3.1.3. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ---------- III-46
3.1.4. Pelaksanaan Urusan Pilihan ---------- III-137
3.1.5. Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum --------- III-154

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN ---------- **IV-1**

BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN ---------- **V-1**

BAB VI PENUTUP ---------- VI-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
1.1	Keterkaitan Pokok Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Aru 2025-2029	I-9
1.2	Matriks Rumusan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi dan Misi beserta Target Capaian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029	I-10
1.3	Program Prioritas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029	I-13
1.4	Luasan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru	I-17
1.5	Topografi Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru	I-18
1.6	Jenis Batuan Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru	I-18
1.7	Jenis Tanah Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru	I-19
1.8	Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Kepulauan Aru	I-19
1.9	Jenis Tutupan Lahan di Kabupaten Kepulauan Aru	I-20
1.10	Kompisi Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025	I-23
1.11	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Usia Tahun 2021-2025	I-24
1.12	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Agama Tahun 2021-2025	I-26
1.13	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Pekerjaan Tahun 2021-2025	I-27
1.14	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Pendidikan Tahun 2021-2025	I-28
1.15	Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 Tahun 2021-2025 (dalam Juta Rp.)	I-30
1.16	Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010 Tahun 2021-2025 (dalam Juta Rp.)	I-31
1.17	Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2021-2025	I-32
1.18	PNS berdasarkan Jabatan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025	I-35
1.19	PPPK berdasarkan Jabatan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023-2025	I-35
1.20	PNS berdasarkan Golongan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025	I-36

1.21 PPPK berdasarkan Golongan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025 ---------- I-36

1.22 PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025 ---------- I-37

1.23 PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025 ---------- I-37

1.24 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-39

1.25 Rincian Target, Realisasi dan Capaian PAD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-40

1.26 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-41

1.27 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retrbusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-43

1.28 Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-43

1.29 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-44

1.30 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Transfer Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-45

1.31 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-46

1.32 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-47

1.33 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- I-48

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 ---------- II-6

2.2. Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 ---------- II-8

2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggarn 2024---------- II-10

3.1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 ---------- III-2

3.2. Indikator Pembentukan IPM Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-7

3.3. PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-8

3.4. Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Kemsiskinan, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-10

3.5. Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi ---------- III-12

3.6. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ---------- III-14

3.7. Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ---------- III-14

3.8.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 ----------	III-16
3.9.	Rasio Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 ----------	III-18
3.10.	Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 ----------	III-18
3.11.	Indeks Risiko Bencana Tahun 2024-2025 ----------	III-21
3.12.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) ----------	III-22
3.13.	Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 --	III-23
3.14.	Kontribusi PDRB Kabupaten kepulauan Aru terhadap PDRB Provinsi Maluku Tahun 2024-2025 ----------	III-38
3.15.	Indeks Infrastruktur Daerah (IID) Tahun 2024-2025 ----------	III-53
3.16.	Penilaian Evaluasi SAKIP Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-54
3.17.	Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 -------	III-58
3.18.	Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025	III-103
3.19.	Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 ----------	III-138
3.20.	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 ----------	III-154

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR **Halaman**

1.1	Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Aru ----------	I-17
1.2	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Aru ----------	I-20
1.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025 ----------	I-24
1.4	Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 ----	I-25
1.5	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2025 ----------	I-26
1.6	PNS berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025 ----------	I-34
1.7	Realisasi Penyerapan Anggaran Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 ----------	I-50
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-4
3.2	Indeks Daya Saing Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 -	III-6
3.3	Indeks Pembangunan Manusia (IMP) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-7
3.4	PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 --	III-8
3.5	Persentase Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-10
3.6	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-11
3.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Aru ----------	III-13
3.8	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-15
3.9	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-19
3.10	Akes Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Tahun 2024-2025 ----------	III-20
3.11	Indeks Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 --	III-25
3.12	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-25
3.13	Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur Tahun 2024-2025 ----------	III-26
3.14	Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-27
3.15	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ----------	III-28
3.16	Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 -	III-29
3.17	Prevalensi Balita Stunting Tahun 2024-2025 ----------	III-30
3.18	Prevalensi HIV AIDS Tahun 2024-2025 ----------	III-31

3.19 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2024-2025 ---- III-32
3.20 Skor Literasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ------ III-33
3.21 Skor Numerasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---- III-34
3.22 Indeks Daya Saing Kabupaten Kepulaua Aru dan Daerah Lainnya di Provinsi Maluku Tahun 2025 ---------- III-37
3.23 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025---------- III-39
3.24 Rasio PDRB Akomodasi, Makanan dan Minuman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-40
3.25 LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-41
3.26 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-42
3.27 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 - III-43
3.28 Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-44
3.29 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-45
3.30 Jumlah Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-46
3.31 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-47
3.32 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-49
3.33 Nilai Tukar Pembudidayaan perikanan (NTPi) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 ---------- III-50
3.34 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Kepulauan Aru TAHUN 2024-2025 ---------- III-51
3.35 Konektivitas Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025. ---------- III-52
3.36 Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024-2025 ---------- III-56

- B A B I -

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru nomor 2 tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2025, tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pertama juga dalam pemerintahan baru yang memuat prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025 menjadi instrument penting untuk menilai tingkat pencapaian target kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional, LKPJ juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui LKPJ, DPRD dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta percepatan pembangunan daerah ke depannya.

LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan prinsip transparansi,

akuntabilitas, objektivitas, dan partisipatif. Data dan informasi yang disajikan bersumber dari laporan kinerja perangkat daerah, laporan keuangan daerah, serta hasil evaluasi internal terhadap capaian program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan terukur mengenai hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan langkah strategis pada tahun berikutnya.

1.1. DASAR HUKUM

1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4350).

2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Kepala Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025 disusun berlandaskan pada pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
32) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Aru 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 Nomor 6);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 Nomor 2);

34) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025);
35) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025;
36) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029;

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama-sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai haparan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029, sebagai berikut.

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029 yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

"Kepulauan Aru yang Maju, Mandiri, dan Harmonis Berbasis Ekosistem Ekonomi Laut Arafura yang Mendunia"

Rumusan visi Kabupaten Kepulauan Aru 2025-2029 ini mencakup empat pokok visi yakni masyarakat Aru yang "MAJU", "MANDIRI", "HARMONIS", dan "MENDUNIA" melalui pemantapan pendidikan, kesehatan, infrastruktur perhubungan dan ekonomi kerakyatan. Penjelasan visi dari pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru adalah:

- **Kepulauan Aru yang Maju** adalah kondisi Kepulauan Aru dengan tingkat pendapatan masyarakat yng terus meningkat setiap tahunnya di Maluku dan perkembangan ekonomi yang pesat dan inklusif, iklim dan kegiatan investasi yang tinggi, peluang kerja dan berusaha terbuka luas, angka kemiskinan yang rendah,

serta distribusi pendapatan yang merata dan adaptasi teknologi mewarnai sebagian besar kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

- **Kepulauan Aru** yang **Mandiri** adalah kehidupan Kepulauan Aru dengan sumberdaya manusia yang **unggul** dan berdaya saing tinggi dengan spirit etos kerja yang mumpuni, infrastruktur sarana prasarana yang berkualitas dan merata, kemampuan dan kemandirian fiskal yang tinggi serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan public inovatif, profesional dan bersih.
- **Kepulauan Aru yang Harmonis** adalah kondisi Kepulauan Aru dengan masyarakat beragam yang damai, berakar budaya kuat, hidup berdampingan dan saling menghargai, mengedepankan etika dan nilai-nilai moral keagamaan, dan budaya leluhur, serta mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara bijak, berkeadilan dan berkelanjutan untuk jangka panjang.
- **Kepulauan Aru yang Mendunia** adalah kondisi Kepulauan Aru yang ditandai dengan interaksi ekonomi lokal/domestik dan global yang terbuka, sejumlah komoditas unggulan perikanan daerah menjadi komoditas utama ekspor Indonesia yang digemari pasar dunia dengan permintaan yang tinggi, potensi pariwisata Bahari dikenal pelancong dunia dan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara, sehingga menjadi hub ekosistem global Laut Arafuru.

2. Misi

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029 untuk percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

Misi-1: Memperkuat pondasi transformasi ekonomi daerah yang produktif dan inklusif berbasis ekosistem ekonomi biru dan ekonomi hijau.

- Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan.
- Sasaran : Meningkatnya poduktivitas dan daya saing sektor unggulan berbasis ekonomi berkelanjutan.

Misi-2: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah kepulauan dan daratan.

- Tujuan : Meningkatkan konektivitas dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pelayanan dan pengembangan wilayah desa dan perkotaan.
- Sasaran : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur konektivitas serta infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Misi-3: Memperkuat pondasi transformasi sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera.

- Tujuan : Menciptakan kualitas SDM cerdas, unggul, sehat dan kompetitif yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi.
- Sasaran : Meningkatnya kualitas keluarga dan sumberdaya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing.

Misi-4: Adaptasi teknologi untuk pondasi transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif, profesional dan bersih.

- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
- Sasaran I : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik yang berkualitas, adil dan terjangkau.
- Sasaran II : Meningkatnya implementasi inovasi dan penguatan demokrasi daerah yang partisipatif.

Misi-5: Memperkuat ketahanan dan adaptasi sosial budaya masyarakat lokal.

- Tujuan : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai dan berbudaya sebaga identitas daerah.
- Sasaran : Meningkatnya rasa aman, ketertiban dan stabilitas daerah serta terpeliharanya nilai seni dan budaya daerah.

Misi-6: Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas mitigasi bencana.

- Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim.
- Sasaran : Meningkatnya kapasitas daerah dalam mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta perubahan iklim.

Misi-7: Memperkuat peran strategis daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan strategis ekosistem Laut Arafura.

- Tujuan : Menguatkan kontribusi daerah dalam pengelolaan WPP 718 dan Laut Arafura secara berkelanjutan melalui kolaborasi nasional dan internasional.
- Sasaran : Terwujudnya kerja sama strategis daerah dengan pemerintah pusat dan mitra internasional dalam pengelolaan WPP 718.

Rumusan tujuan dan sasaran untuk setiap rumusan misi tersebut menggambarkan langkah-langkah yang ditujuh dengan mengimplementasikan misi untuk mencapai visi yang ditunjukkan dengan kondisi akhir jangka menengah yang terukur dan realistis melalui indikator dari setiap sasaran yang hendak dicapai hingga Tahun 2029 yang akan datang. Selengkapnya kondisi akhir dan target tahunan setiap indikator sasaran jangka menengah Kabupaten Kepulauan Aru 2025-2029, diimplifikasi dalam matriks berikut ini.

Tabel 1.1

Keterkaitan Pokok Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Aru 2025-2029

Visi	Misi
Maju	1. Memperkuat pondasi transformasi ekonomi daerah yang produktif dan inklusif berbasis ekosistem ekonomi biru dan ekonomi hijau
	2. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah kepulauan dan daratan
Mandiri	3. Memperkuat pondasi transformasi sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera
	4. Adaptasi teknologi untuk pondasi transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif, profesional dan bersih
Harmonis	5. Memperkuat ketahanan dan adaptasi sosial budaya masyarakat lokal
	6. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas mitigasi bencana
Mendunia	7. Memperkuat peran strategis daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan strategis ekosistem Laut Arafura

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah/lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut.

Tabel 1.2

Matriks Rumusan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi dan Misi beserta Target Capaian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DATA DASAR TAHUN 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
MAJU	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan		Laju pertumbuhan ekonomi	5,45	5,02	5,94	6,34	6,54	6,74	6,84
		Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor unggulan berbasis ekonomi berkelanjutan	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Maluku	7,50	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
			Indeks ekonomi hijau	N/A	50,00	52,00	53,00	54,00	56,00	58,00
			Indeks ekonomi biru	N/A	50,00	52,00	53,00	54,00	56,00	58,00
	Meningkatkan konektivitas dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pelayanan dan pengembangan wilayah desa dan perkotaan		Indeks Daya Saing Daerah	2,46	2,90	3,10	3,30	3,40	3,50	3,60
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur konektivitas serta infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Daerah	53.33	53.85	54.35	54.85	55.35	55.85	55.85
MANDIRI	Menciptakan kualitas SDM cerdas, unggul, sehat dan kompetitif yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi		Indeks Pembangunan Manusia	69,00	69,32	70,29	70,80	71,51	72,08	72,20
		Meningkatnya kualitas keluarga dan sumberdaya manusia yang sehat, unggul	Angka Partisispasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun	98,00	99,00	99,05	99,10	99,15	99,20	99,30

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DATA DASAR TAHUN 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		dan berdaya saing	Angka Partisispasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun	98,00	95,00	95,67	95,50	96,00	96,50	97,00
			Usia harapan hidup	63,29	64,01	64,61	65,21	65,81	66,41	67,01
			Indeks pembangunan keluarga	Na	50,50	50,506	50,512	50,518	50,524	50,518
			Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Na	55,00	58,00	62,00	65,00	70,00	75,00
	Terwujudnya Kesejahteraan sosial masyarakat secara merata dan berkeadilan		PDRB per kapita	43,62	44,09	44,55	45,02	45,48	45,95	46,41
			Tingkat kemiskinan	23,39	19,61	17,99	16,73	14,97	14,04	14,00
		Menurunnya angka kemiskinan, ketimpangan sosial dan pengangguran secara berkelanjutan	Gini rasio	0.292	0.278	0.264	0.262	0.245	0.229	0.212
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10	1,78	1,71	1,64	1,61	1,56	1,50
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	53,11 (CC)	55,10 (CC)	57,25 (CC)	60,30 (CC)	63,50 (B)	65,50 (B)	70,00 (BB)
		Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik yang berkualitas, adil dan terjangkau	Nilai SAKIP	56,6 (CC)	58,00 (CC)	60,00 (CC)	63,00 (CC)	66,00 (B)	68,00 (B)	70,00 (BB)
			Indeks Pelayanan Publik	2,40	2,42	2,50	2,60	2,80	3,00	4,01
		Meningkatnya implementasi inovasi dan penguatan demokrasi daerah yang partisipatif	Indeks Inovasi daerah	8,40 Kurang Inovatif	13,80 Kurang Inovatif	15,60 Kurang Inovatif	20,00 Kurang Inovatif	25,50 Kurang Inovatif	30,00 Inovatif	35,00 Inovatif
			Indeks Demokrasi Daerah	72,41	-	-	-		85,00	-
HARMONIS	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun,		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Na	75,00	75,40	75,80	76,20	76,60	77,00

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DATA DASAR TAHUN 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	damai dan berbudaya sebaga identitas daerah	Meningkatnya rasa aman, ketertiban dan stabilitas daerah serta terpeliharanya nilai seni dan budaya daerah	Indeks Keamanan dan ketertiban	Na	70,00	73,00	76,00	80,00	83,00	86,00
			Indeks pembangunan Kebudayaan	Na	50.00	50,40	50,80	51,20	51,60	52, 00
	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam mengahadapi perubahan iklim		Indeks kualitas lingkungan hidup	59,22	82,41	82,58	82,75	82,93	83,10	83,41
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana	183,8	182	181	180	179	178	178
MENDUNIA	Menguatkan kontribusi daerah dalam pengelolaan WPP 718 dan Laut Arafura secara berkelanjutan melalui kolaborasi nasional dan internasional		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	3,26	3,76	4,14	4,55	5,00	5,50	6,05
		Terwujudnya kerja sama strategis daerah dengan pemerintah pusat dan mitra internasional dalam pengelolaan WPP 718.	Persentase perjanjian kerja sama (MoU) yang dihasilkan	Na	-	40%	40%	70%	100	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029

4. Program Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi wilayah kepulauan. Adapun program prioritas dimaksud, dapat dilihat sebagai berukut.

Tabel 1.3
Program Prioritas Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru 2025-2029

No	Prioritas (Program Unggulan)	Dukungan Program Prioritas Nasional (PP), PHTC dan PSN	Fokus	Pelaksana Perangkat Daerah/Dinas
1	ARU CERDAS	• Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi (PP) • Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi (PHTC) • Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PSN) • Digitalisasi Pendidikan (PSN)	Penyelenggaraan Pendidikan Terjangkau dan Berkualitas	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan • Dinas Komunikasi dan Informatika • Seluruh Kecamatan
2	ARU SEHAT	• Pelayanan kesehatan dan Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat (PP) • Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil (PHTC) • Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten (PHTC) • Makan Bergizi Gratis (PSN) • Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PSN)	Pelayanan Kesehatan Merata dan Berkualitas	• Dinas Kesehatan • RSUD Cenderawasih Dobo • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Pengendalian Penduduk dan KB • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3	ARU PRODUKTIF dan MAJU	• Penyediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani (PHTC) • Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha (PP) • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional (PHTC) • Hilirisasi, Industrialisasi dan Digitalisasi (PSN) • Koperasi Merah Putih (PSN)	Pengembangan UMKM Komoditas Unggulan	• Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pertanian • Dinas Perikanan • Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro • Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Penanaman Modal dan PTSP • Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan • Dinas Perhubungan

No	Prioritas (Program Unggulan)	Dukungan Program Prioritas Nasional (PP), PHTC dan PSN	Fokus	Pelaksana Perangkat Daerah/Dinas
				• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Semua Kecamatan
4	ARU MERATA	• Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan dan Rakyat yang Membutuhkan (PP) • Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (PHTC) • Perumahan dan Permukiman (PSN) • Konektivitas dan Kawasan (PSN))	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Daratan dan Kepulauan	• Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	ARU HARMONIS	• Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah (PP) • Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PSN)	Insentif Ketua RW/RT dan Pengelola Rumah Ibadah	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Satpol PP • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) • Badan Kesbangpol
6	ARU SEJAHTERA dan INKLUSIF	• Pemberantasan Kemiskinan (PP) • Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam termasuk SDA Maritim (PP) • Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut (PHTC) • Swasembada Pangan (PSN) • Swasembada Air (PSN) • Swasembada Energi (PSN) • Hilirisasi, Industrialisasi dan Digitalisasi (PSN) • Pengentasan Kemiskinan (PSN)	Pemberantan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	• Dinas PUPR • Dinas Perumahan Permukiman • Dinas Perhubungan • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas P3A • Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Perikanan • Dinas Pertanian • Semua Kecamatan
			Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Daerah	• Dinas Penanaman Modal dan PTSP • Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Sekretariat Daerah • Bagian Kerjasama Antar Wilayah Sekrtariat Daerah • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan • Semua Kecamatan

No	Prioritas (Program Unggulan)	Dukungan Program Prioritas Nasional (PP), PHTC dan PSN	Fokus	Pelaksana Perangkat Daerah/Dinas
7	ARU AKUNTABEL	• Reformasi Politik, Reformasi Hukum dan Reformasi Birokrasi (PP) • Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara (PHTC)	Penyelenggaraan Pemerintahan Bersih dan Melayani	• Sekretariat Daerah (Bagian Umum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Adminitrasi Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa, Bagian Perekonomian, Bagian Kesra) • Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM • Inspektorat Kabupaten • Semua Kecamatan • Semua OPD
8	ARU BERSIH dan INDAH	• Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan dan Rakyat yang Membutuhkan (PP) • Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (PHTC) • Perumahan dan Permukiman (PSN) • Konektivitas dan Kawasan (PSN) • Pengelolaan Sampah (PSN)	Pembangunan Perkotaan yang Bersih dan Tertata Rapih	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perhubungan • Dinas Komunikasi dan Informatika • UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Semua Kecamatan
9	ARU MODEREN	• Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi (PP) • Hilirisasi, Industrialisasi dan Digitalisasi (PSN)	Adaptasi Transformasi Digital Sosial Ekonomi Masyarakat	• Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan • Dinas Komunikasi dan Informatika • Sekretariat Daerah • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Semua Kecamatan
10	ARU AMAN dan TENTRAM	• Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah (PP) • Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga (PP) • Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba (PP) • Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif (PP)	Pengendalian Stabilitas Ketertiban dan Keamanan Penduduk	• Satuan Polisi Pamong Praja • Dinas Komunikasi dan Informatika • Sekretariat Daerah • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Ketahanan Pangan • Semua Kecamatan
11	ARU UNGGUL dan PRODUKTIF	• Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi (PHTC)	Beasiswa Pendidikan Sarjana dan Vokasi	• Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas (Program Unggulan)	Dukungan Program Prioritas Nasional (PP), PHTC dan PSN	Fokus	Pelaksana Perangkat Daerah/Dinas
		• Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi (PHTC) • Sekolah Rakyat (PSN)		• Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM • Sekretariat Daerah • Semua Kecamatan
12	ARU MENDUNIA	• Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam termasuk SDA Maritim (PP) • Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif (PP) • Hilirisasi, Industrialisasi dan Digitalisasi (PSN)	Perkuatan Kerjasama Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam pengelolaan pengelolaan WPP 718 dan Laut Arafura secara berkelanjutan	• Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan • Dinas PUPR • Dinas Perhubungan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Komunikasi dan Informatika • Sekretariat Daerah • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan. Aru • Dinas Perikanan • Semua Kecamatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029

1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.3.1. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Aspek kondisi geografis perlu digambarkan untuk memperoleh beberapa informasi terkait dengan aspek fisik dasar daerah yang meliputi kondisi topografi dan kemiringan lereng, aspek geologi, aspek jenis tanah, aspek hidrologi dan aspek klimatologi. Selain aspek fisik daerah, aspek geografi juga memuat potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk aspek perubahan iklim

❖ Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Kepulauan Aru secara astonomis terletak antara koordinat 5°-8° Lintang Selatan dan 133°5'-136°5' Bujur Timur dengan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara.

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Aru memiliki luas wilayah sebesar 809.473 Ha terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan 117 (seratur tujuh belas) desa dan 2 (dua) kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Aru Tengah yaitu 192.414 Ha, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Aru Utara yaitu 26.919 Ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 687 pulau, 28 pulau berpenghuni dan sisanya 659 pulau tidak berpenghuni. Sebagian besar pulau di Kabupaten Kepulauan Aru termasuk kategori pulau kecil dengan lima (5) pulau yang berukuran relatif besar. Kelima

pulau tersebut adalah Pulau Wokam, Pulau Kobror, Pulau Maekor, Pulau Trangan, dan Pulau Kola. Kota Dobo sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Aru berada di Pulau Wamar.

Tabel 1.4

Luasan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru

Kode	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas (Ha)
			Desa	Kelurahan	
81.07.01	Pulau-Pulau Aru	Dobo	13	2	69,235
81.07.02	Aru Utara	Marlasi	12	-	26,919
81.07.03	Aru Utara Timur	Kobamar	9	-	50,232
81.07.04	Sir-Sir	Leiting	9	-	61,422
81.07.05	Aru Tengah	Benjina	22	-	192,414
81.07.06	Aru Tengah Timur	Koijabi	13	-	102,944
81.07.07	Aru Tengah Selatan	Longgar	7	-	45,337
81.07.08	Aru Selatan	Jerol	15	-	104,075
81.07.09	Aru Selatan Utara	Tabarfane	7	-	78,901
81.07.10	Aru Selatan Timur	Meror	10	-	77,996
81.07	**Kepulauan Aru**		**117**	**2**	**809.473**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru & Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PBW), 2025

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Aru

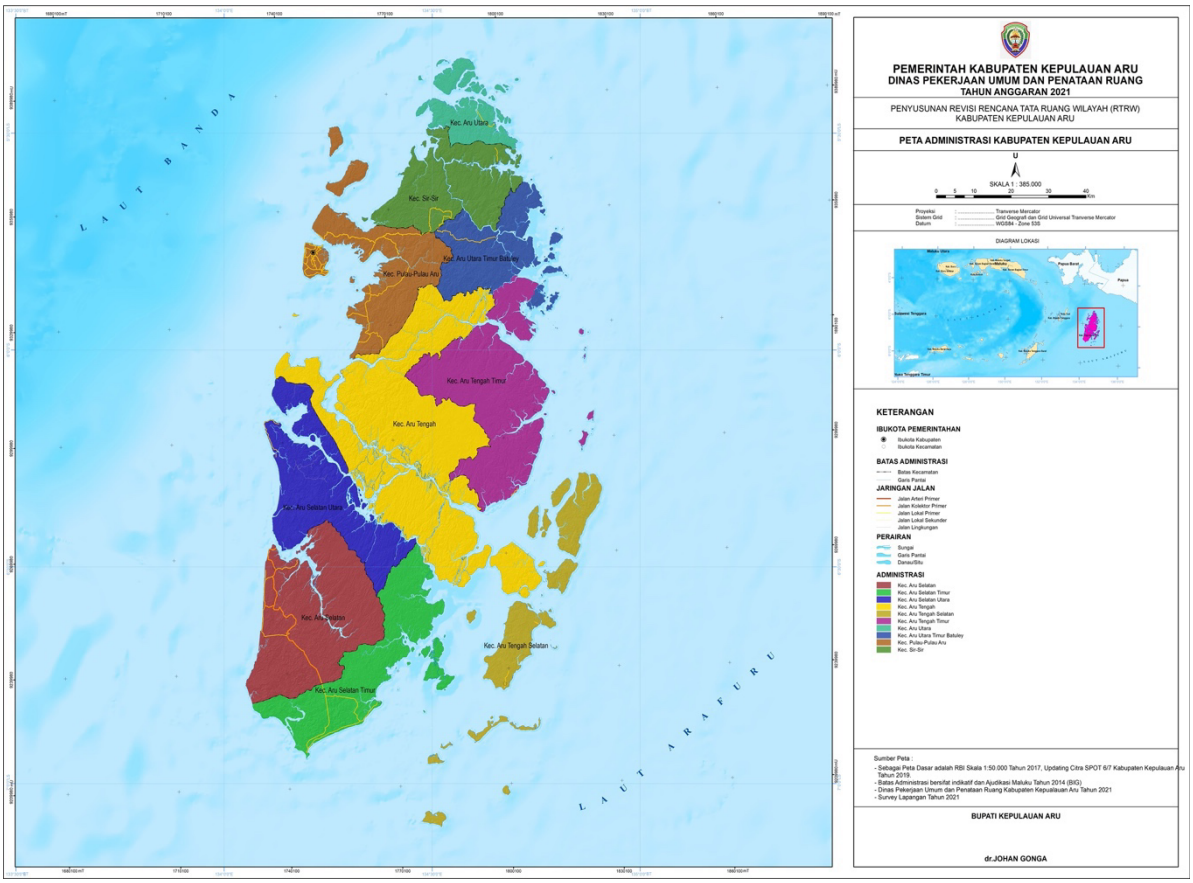

Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2043

❖ Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Aru pada umumnya datar dengan lahan berupa rawa-rawa dan ketinggian permukaan berkisar antara 0-80 mdpl, tergolong wilayah dataran rendah serta datar, dimana 2 kecamatan (Aru Selatan dan Aru Selatan Utara berada pada ketinggian 2 mdpl).

Tabel 1.5
Topografi Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru

No	Topografi (MDPL)	Luas (HA)	Persentase (%)
1.	0-20	318.781	39,38
2.	20-40	329.062	40,65
3.	40-60	122.522	15,14
4.	60-80	36.801	4,55
5.	>80	2.307	0,29
Kepulauan Aru		**809.136,04**	**809.473**

Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2043

❖ Geologi

Struktur geologi batuan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru sangat bervariasi. Struktur geologi memiliki pengaruh terhadap pola dan struktur batuan serta penyebaran bahan galian. Adapun jenis-jenis batuan yang dapat ditemukan di Kabupaten Kepulauan Aru antara lain :

Tabel 1.6
Jenis Batuan Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru

No	Geologi/Batuan	Luas (HA)	Persentase (%)
1.	Alluvial	99.165	12,25
2.	Anggota Jambulenga,Formasi Manumbai	303.496	37,49
4.	Formasi Koba	264.483	32,67
5.	Formasi Tanah Merah	114.874	14,19
6.	Formasi Wasir	27.455	3,39
Kepulauan Aru		**809.473**	**100,00**

Sumber : Integrasi Kebijakan Satu Peta (KSP) Angka Tahun 2024

❖ Jenis Tanah

Tanah menurut ahli geologi adalah suatu benda padat berdimensi tiga terdiri dari panjang lebar dan dalam yang merupakan kulit bumi. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru di Klasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu :

- Jenis Tanah Kambisol Distrik dengan bahan induk gambingan, napal, konglomerat;
- Jenis Tanah Oksisol Eutrik;

  Jenis Tanah Renzina dengan bahan induk gamping terumbu dan pecahan koral.

Tabel 1.7
Jenis Tanah Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru

No	Jenis Tanah	Luas (HA)	Persentase (%)
1.	Kombisol Distrik	358.205	44,25
2.	Oksisol Eutrik	163.468	20,19
3.	Renzina	287.800	35,55
Kepulauan Aru		**809.473**	**100,00**

Sumber : Integrasi Kebijakan Satu Peta (KSP) Angka Tahun 2024

❖ Klimatologi

Sesuai klasifikasi Schmid dan Ferguson (1951), iklim di Kabupaten Kepulauan Aru termasuk tipe C dengan nilai Q 0,333 dan curah hujan tahunan 2.000 - 3.000 mm. Jumlah hari hujan rata-rata 105 hari per tahun dan curah hujan tertinggi terjadi antara Januari - Maret dengan jumlah rata-rata 9 bulan basah dan 2 bulan kering. Karena dibayangi Pulau Irian Bagian Selatan, Australia Bagian Utara dan Laut Arafura, keadaan iklim dipengaruhi oleh kondisi wilayah-wilayah tersebut, sehingga musim timur optimum terjadi dari April - September. Sedangkan musim barat berlangsung antara Oktober - Maret. Pada musim peralihan atau panca roba, kedua musim tersebut terjadi pada Maret - April dan September-Oktober.

Tabel 1.8
Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Kepulauan Aru

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
1	Januari	149,9	13	80
2	Februari	300,0	20	50
3	Maret	589,2	23	61
4	April	419,2	23	56
5	Mei	366,9	20	56
6	Juni	125,0	17	38
7	Juli	65,5	24	28
8	Agustus	120,9	13	52
9	September	183,7	18	62
10	Oktober	208,8	18	71
11	November	115,3	7	38
12	Desember	201,8	19	37

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Aru

❖ Penutupan Lahan

Sebagai salah satu wilayah perbatasan negara, secara umum perkembangan lahan terbangun di Kabupaten Kepulauan Aru relatif lambat. Perkembangan lahan terbangun yang relatif cepat hanya terjadi di Ibukota Kabupaten (Dobo) dan Ibukota Kecamatan (Benjina dan Jerol). Kawasan terbangun tiap tahunnya makin bertambah sedangkan kawasan belum terbangun yang mengalami konversi menjadi kawasan terbangun tiap tahunnya adalah hutan, semak belukar, dan tanah terbuka. Konversi lahan ini lazim dijumpai pada kawasan perkotaan. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Kepulauan

Aru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9
Jenis Tutupan Lahan di Kabupaten Kepulauan Aru

Tutupan Lahan	Luas (M2)	Luas (Ha)
Hutan	717.023,59	88,62
Kebun Campuran	197,21	0,02
Lahan Terbuka	231,13	0,03
Perkebunan	1.771,10	0,22
Permukiman	1.521,80	0,19
Semak Belukar	80.547,52	9,95
Sungai	7.843,69	0,97
Kepulauan Aru	809.136,04	100

Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2043

Gambar 1.2
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Aru

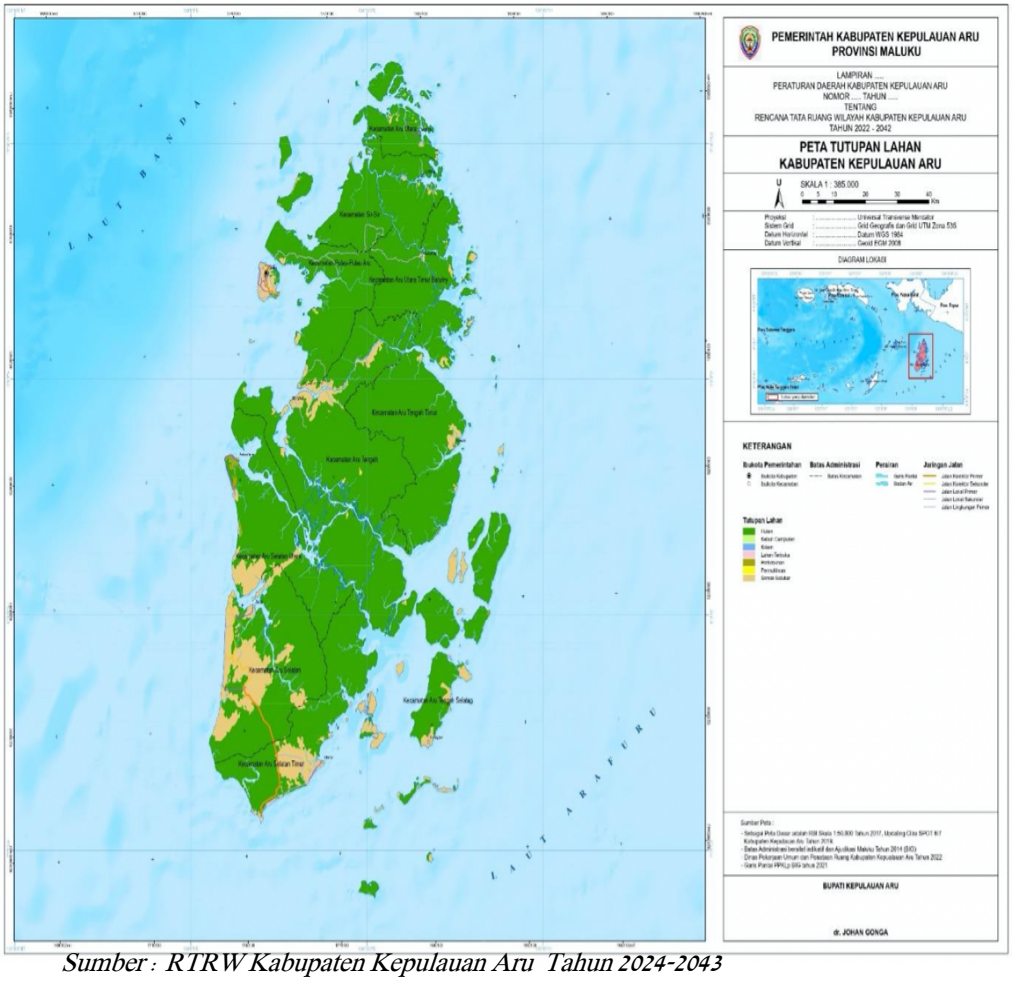

Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2043

❖ Aspek Bencana

Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru ditinjau dari aspek tektonik berada pada zona subduksi tektonik antara Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia, tepatnya berada di cekungan paling tenggara dari Lempeng Eurasia yang tepat berada di garis subduksi. Kondisi ini menyebabkan wilayah Kepulauan Aru memiliki

kerawanan tinggi terhadap bencana tektonik berupa gempa bumi dan tsunami.

Berdasarkan Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi Maluku (Pemda Maluku, 2020) wilayah Kepulauan Aru memiliki risiko gempa bumi tingkat "sedang" dan "tinggi". Wilayah dengan kerawanan tinggi adalah bagian barat Pulau Kola dan Pulau Wokam, bagian barat daya Pulau Trangan, dan pulau-pulau kecil di bagian timur gugusan Kepulauan Aru. Sementara itu area yang termasuk kawasan rawan bencana tsunami di Kepulauan Aru seluas 2.741,42 km2 dengan kriteria sedang seluas 738,27 km2 dan kriteria tinggi sebesar 2.003,15 km2. Luas kawasan ini terbesar kedua di Provinsi Maluku setelah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.

Kerawanan bencana hidrometeorologis di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dipengaruhi oleh kondisi musim. Pada musim hujan kejadian bencana banjir, genangan, angin puting beliung, dan ombak tinggi menjadi prevalen. Banjir dan genangan sering terjadi di Kota Dobo. Angin puting beliung dan angin ribut sering menimbulkan kerusakan misalnya di wilayah Kota Dobo dan Kota Benjina. Tanah longsor jarang terjadi di Kepulauan Aru. Sementara itu bencana kekeringan juga rawan terjadi di Kepulauan Aru. Saat musim kemarau akibat mata air lokal yang digunakan masyarakat berkurang debitnya.

Bencana sosial seperti konflik di Kepulauan Aru memiliki prevalensi yang kecil apalagi jika dibandingkan dengan daerah lain di Maluku. Konflik horizontal antar warga jarang terjadi di masyarakat Kepulauan Aru. Namun konflik vertikal antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta non pemerintah beberapa kali terjadi di wilayah Kepulauan Aru.

Berdasarkan hasil analisis wilayah-wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru memiliki risiko multi bencana berupa risiko bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor. Kawasan dengan risiko paling tinggi terdapat di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Aru Tengah Selatan, dan Aru Selatan sedangkan yang relatif memiliki tingkat risiko sedang adalah wilayah kecamatan di bagian dalam, hal penting yang perlu ditekankan dalam penetapan kawasan rawan bencana di Kabupaten Kepulauan Aru adalah wilayah pesisir (zona pantai dan pesisir) terutama di Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Aru Selatan yang memiliki risiko terjadi tsunami cukup tinggi. Sesuai analisis kerawanan bencana hal ini disebabkan adanya pusat-pusat gempa di seluruh wilayah pesisir kawasan timur dan sebelah barat wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

Secara garis besar kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu berupa kawasan yang memiliki risiko multi bencana yaitu bencana gempa, banjir dan longsor, terdiri atas :

- Kawasan dengan risiko paling tinggi terdapat di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kecamatan Sir- Sir, Kecamatan Aru Tengah Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan; dan
- Kawasan yang relatif memiliki tingkat risiko sedang adalah wilayah kecamatan Aru

Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Utara dan Kecamatan Aru Selatan Timur.

Kejadian bencana di Kabupaten Kepulauan Aru menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah : bencana banjir, gelombang pasang/abrasi dan gempa bumi.

Dari sejarah kejadian bencana menunjukkan bahwa masih sedikit sekali jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Kepulaun Aru. Meski demikian ada beberapa potensi bencana alam yang harus di waspadai antara lain :

- Banjir;
- Cuaca Ekstrim dan Abrasi;
- Gelombang Ekstrim dan Abrasi;
- Gempa bumi;
- Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Kekeringan;
- Tanah Longsor; dan
- Tsunami.

Meskipun dari beberapa risiko bencana di atas masih berupa potensi bencana, namun memerlukan kesiap-siagaan sehingga pada saat bencana-bencana alam tersebut terjadi, maka daerah sudah mampu menghadapi resiko-resiko bencana dimaksud.

1.3.2. GAMBARAN ASPEK DEMOGRAFIS

Demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Demografi Kabupaten Kepulauan Aru mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah, struktur, dan distribusi penduduk serta perubahan yang terjadi seiring waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan.

Penduduk merupakan faktor kunci dalam pembangunan wilayah karena peran penduduk tidak hanya menjadi pelaku pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik demografi penduduk, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagai bagian dari penilaian sumber daya manusia untuk membantu kebijakan sektoral yang tepat dan arah pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember tahun 2025 semester kedua sebesar 115.513 jiwa di 10 wilayah kecamatan. Komposisi penduduk menurut kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.10
Komposisi Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk Per Km²	Luas Wilayah
1.	Pulau-Pulau Aru	28.162	27.122	55.284	59,99	69,235
2.	Aru Selatan	4.340	4.230	8.570	9,86	26,919
3.	Aru Tengah	7.572	6.929	14.501	10,18	50,232
4.	Aru Utara	3.602	3.363	6.966	12,66	61,422
5.	Aru Utara Timur	2.748	2.594	5.342	17,09	192,414
6.	Sir-Sir	1.926	1.748	3.674	6,85	102,944
7.	Aru Tengah Timur	2.805	2.582	5.387	7,86	45,337
8.	Aru Tengah Selatan	3.423	3.187	6.610	21,77	104,075
9.	Aru Selatan Timur	2.556	2.549	5.105	9,38	78,901
10	Aru Selatan Utara	2.170	1.902	4.072	8,16	77,996
Kabupaten Kepulauan Aru		**59.310**	**56.203**	**115.511**	**17,51**	**809.473**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 10.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Utara Timur dan Kecamatan Aru Tengah Selatan. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan data BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru setiap tahunnya meningkat dari tahun 2021 sebanyak 106.496 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,41 persen, hingga mencapai 115.511 jiwa di tahun 2025 dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2,65 persen. Berdasarkan gambar berikut, jumlah penduduk tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif. Hal ini berarti bahwa pada tahun tertentu pertumbuhan penduduk dapat meningkat lebih tinggi, sementara pada tahun lainnya dapat menurun atau tumbuh lebih lambat. Perubahan laju pertumbuhan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah kelahiran, jumlah kematian, serta perpindahan penduduk masuk dan keluar daerah. Oleh karena itu, meskipun jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya, namun tingkat pertumbuhannya dapat mengalami naik turun.

Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025

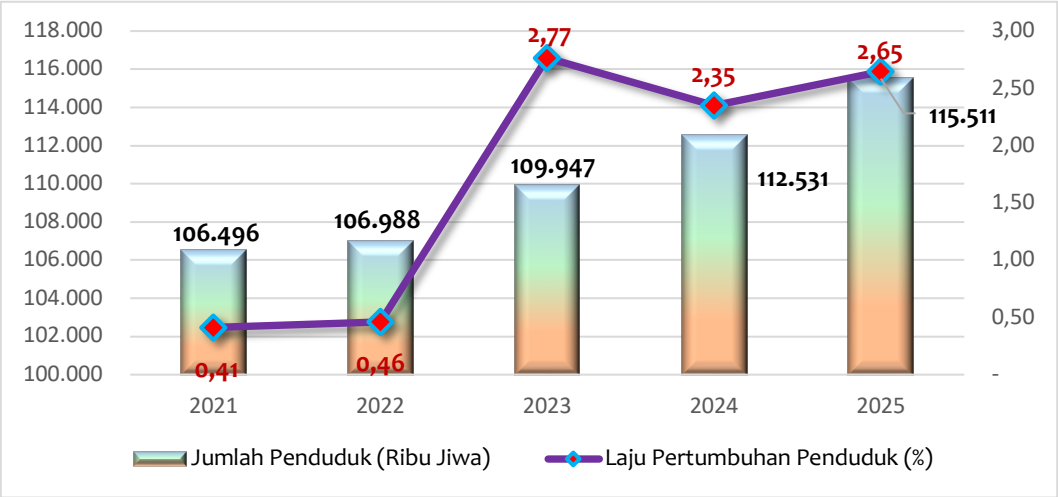

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Aru, 2025 (data diolah)

Komposisi penduduk Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun 2025 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu penduduk kelompok usia 15 sampai dengan 64 tahun yang memiliki jumlah terbesar 74.047 jiwa atau 64,10 persen. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, sedangkan penduduk kelompok usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 35.373 jiwa atau 30,62 persen dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 6.093 jiwa atau 5,27 persen. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat disajikan pada tabel berikut ini, yang menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru relatif kecil disebabkan oleh rendahnya tingkat kelahiran, adanya perpindahan penduduk ke daerah lain, serta keterbatasan peluang ekonomi dapat mempengaruhi lambatnya pertambahan jumlah penduduk.

Tabel 1.11
Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Usia Tahun 2021-2025

No	Klasifikasi Umur	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	0-4	9.552	8.754	8.655	8.280	8.322
2	5-9	12.877	11.878	12.948	13.225	13.350
3	10-14	12.824	13.439	13.526	13.624	13.701
4	15-19	9.923	9.699	9.859	11.071	12.065
5	20-24	9.657	9.254	9.523	9.435	9.496
6	25-29	8.265	8.903	9.160	9.400	9.597
7	30-34	7.897	8.142	7.859	7.862	8.171
8	35-39	7.536	8.017	8.024	8.008	7.970
9	40-44	6.622	6.861	7.164	7.259	7.349
10	45-49	5.873	6.245	6.264	6.414	6.512
11	50-54	4.474	4.715	4.981	5.115	5.407
12	55-59	3.542	3.734	3.926	4.220	4.241
13	60-64	2.804	2.789	2.982	3.055	3.237
14	65-69	1.917	1.958	2.072	2.206	2.460
15	70-74	1.395	1.284	1.438	1.612	1.599
16	75+	1.338	1.316	1.566	1.745	2.034
Total Penduduk		**106.496**	**106.988**	**109.947**	**112.531**	**115.513**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Aru, 2025

Metode analisis yang memperhatikan karakteristik umur penduduk diwakili oleh piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan suatu metode yang menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida ini terdiri dari dua diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan.

Gambar 1.4
Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

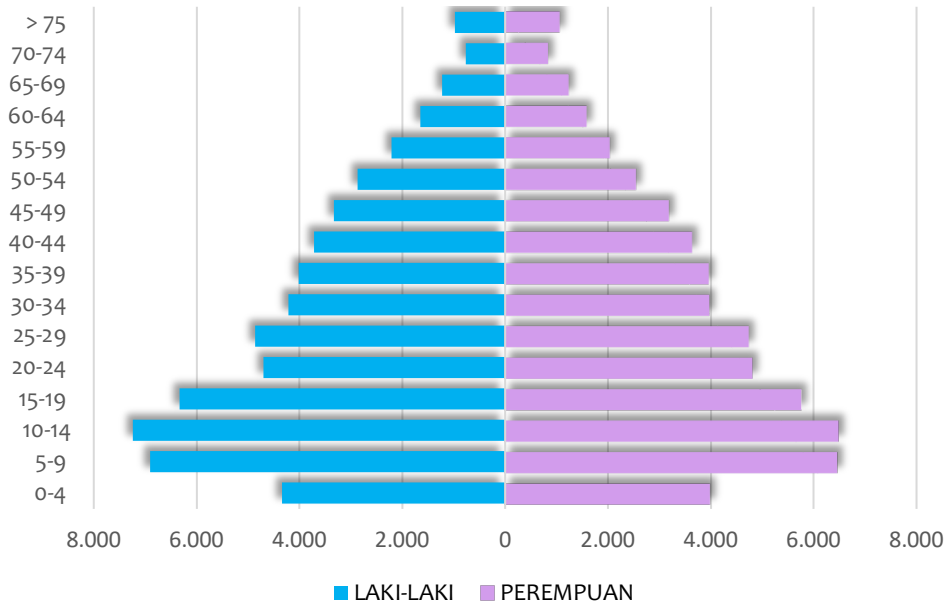

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Aru, 2025 dan data Diolah

Komposisi penduduk berdasarkan usia sekolah adalah pengelompokan penduduk menurut umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk yang berada pada usia yang seharusnya mengikuti pendidikan pada setiap tingkat sekolah.

Secara umum, usia sekolah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu usia PAUD/TK (3-6 tahun), Sekolah Dasar (7-12 tahun), Sekolah Menengah Pertama (13-15 tahun), dan Sekolah Menengah Atas (16-18 tahun). Melalui komposisi ini dapat diketahui jumlah penduduk yang membutuhkan layanan pendidikan pada setiap jenjang, sehingga pemerintah dapat merencanakan penyediaan sarana prasarana pendidikan secara lebih tepat. Komposisi penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan usia sekolah Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.5
Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2025

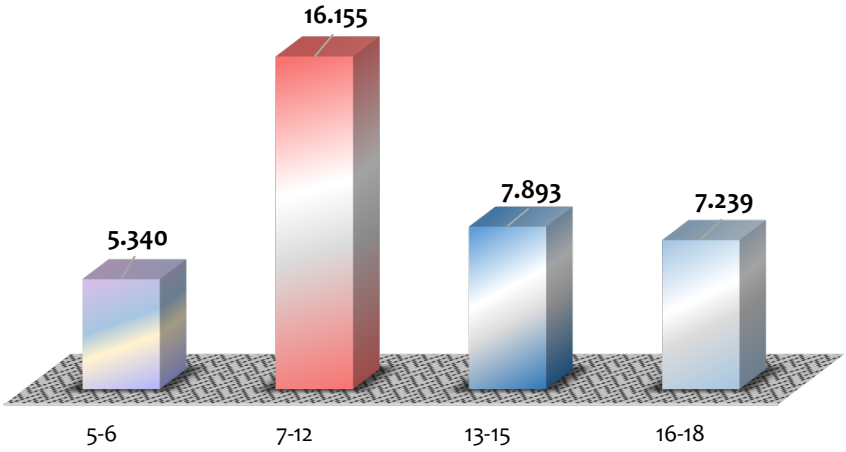

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Aru, 2025 dan data Diolah

Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah pengelompokan penduduk menurut agama yang dianut oleh masyarakat. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk berdasarkan agama, seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Informasi mengenai komposisi penduduk berdasarkan agama penting untuk memahami keberagaman masyarakat serta untuk mendukung perencanaan pembangunan di bidang sosial dan keagamaan, termasuk penyediaan sarana peribadatan dan kegiatan keagamaan di daerah. Komposisi penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan agama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.12
Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Agama Tahun 2021-2025

AGAMA	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Islam	31,15	31,15	31,62	31,42	31,32
Kristen Protestan	59,15	59,15	58,72	58,88	58,98
Kristen Katholik	9,62	9,62	9,58	9,63	9,65
Hindu	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Budha	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Konghucu	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	0	0	0	0	0
KEPULAUAN ARU	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Aru, 2025 dan data Diolah

Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan adalah penduduk menurut jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penduduk terlibat dalam berbagai sektor pekerjaan, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, industri, serta pekerjaan lainnya.

Melalui komposisi ini dapat diketahui struktur tenaga kerja dan sektor ekonomi

yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Informasi tersebut juga penting untuk perencanaan pembangunan, khususnya dalam peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan sektor ekonomi daerah. Berdasarkan jenis pekerjaan tahun 2025, penduduk Kabupaten Kepulauan Aru cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 11 jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, yang paling banyak adalah penduduk dengan status belum/tidak bekerja sebanyak 27,85 persen. Komposisi penduduk Kabupaten Kepulauan Aru menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.13
Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2021-2025

PEKERJAAN	TAHUN									
	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Belum/Tidak bekerja	29.059	27,29	30.133	28,16	30.778	27,99	31.335	27,85	31.916	27,63
Aparatur Pejabat Negara	3.507	3,29	3.695	3,45	3.975	3,62	3.544	3,15	3.617	3,13
Tenaga Pengajar	856	0,80	872	0,82	879	0,80	856	0,76	860	0,74
Wiraswasta	7.847	7,37	8.026	7,50	8.186	7,45	8.648	7,68	8.632	7,47
Pertanian dan Peternakan	11.430	10,73	10.903	10,19	11.203	10,19	8.930	7,94	8.882	7,69
Nelayan	5.813	5,46	7.199	6,73	7.970	7,25	11.466	10,19	12.001	10,39
Agama dan kepercayaan	84	0,08	110	0,10	114	0,10	121	0,11	129	0,11
Pelajar dan Mahasiswa	31.092	29,20	28.698	26,82	28.952	26,33	30.149	26,79	31.679	27,42
Tenaga Kesehatan	105	0,10	116	0,11	218	0,20	120	0,11	122	0,11
Pensiunan	299	0,28	291	0,27	313	0,28	316	0,28	328	0,28
Pekerjaan lainnya	16.404	15,40	16.945	15,84	17.359	15,79	17.046	15,15	17.345	15,02
JUMLAH PENDUDUK	**106.496**	**100**	**106.988**	**100**	**109.947**	**100**	**112.531**	**100**	**115.511**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Aru, 2025

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan adalah penduduk menurut tingkat pendidikan yang telah ditempuh atau ditamatkan oleh masyarakat. Tingkat pendidikan biasanya meliputi tidak atau belum sekolah, tidak tamat sekolah dasar, tamat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga pendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana.

Melalui komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat. Penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia serta sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.14
Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Pendidikan
Tahun 2021-2025

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tidak/ Belum sekolah	19.446	20.674	21.275	21.483	20.668
Belum tamat SD/setara	17.580	17.049	16.554	16.635	16.305
Tamatan SD	30.576	28.906	29.679	30.129	31.371
SMP/Setara	12.748	11.896	12.186	12.978	13.672
SMA/Setara	20.213	22.126	23.604	24.142	26.031
D1/D2	562	548	506	476	454
D3/Sarjana Muda	888	987	1.026	1.058	1.089
D4/S1	4.249	4.683	4.984	5.483	5.759
S2	102	119	133	143	159
S3	2	2	4	4	3
TOTAL PENDUDUK	**106.496**	**106.988**	**109.947**	**112.531**	**115.511**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Aru, 2025

2. KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian merupakan gambaran umum mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam periode tertentu. Kondisi ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis kondisi perekonomian biasanya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu indikator utama untuk melihat kondisi perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi. Melalui PDRB dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah serta sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian.

Selain PDRB, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari perkembangan berbagai sektor ekonomi, seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, dan sektor jasa. Perkembangan sektor-sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah.

Kondisi perekonomian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, investasi serta kebijakan pemerintah daerah. Jika faktor-faktor tersebut berkembang dengan baik, maka perekonomian daerah cenderung mengalami pertumbuhan yang positif.

Dengan memahami kondisi perekonomian secara menyeluruh, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun

2024 sebesar Rp4.761,49 miliar dan tahun 2025 mencapai Rp5.123,71 miliar. Begitu pula dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2024 sebesar Rp2.755,77 miliar dan tahun 2025 menjadi Rp2.895,39 milliar. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut, pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang bervariasi namun masih lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp3.016,46 miliar atau sebanyak 58,87 persen, sama halnya dengan PDRB ADHK pada sektor yang sama yakni sebesar Rp1.715,98 miliar atau sebanyak 59,27 persen. Nilai dan kontribusi PDRB ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.15
Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Kabupaten Kepulauan Aru
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010
Tahun 2021-2025 (dalam Juta Rp.)

KATEGORI	URAIAN	2021		2022		2023		2024		2025	
		(Miliard Rp)	(%)	(Miliard Rp)	(%)	(Miliard Rp)	(%)	(Milirad Rp)	(%)	(Milirad Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.080,28	56,69	2.325,15	57,49	2.588,61	58,35	2.772,81	58,23	3.016,46	58,87
B	Pertambangan dan Penggalian	32,93	0,90	34,88	0,86	37,21	0,84	39,05	0,82	40,30	0,79
C	Industri Pengolahan	110,04	3,00	123,95	3,06	131,79	2,97	141,84	2,98	159,82	3,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	0,03	1,26	0,03	1,30	0,03	1,37	0,03	1,43	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,98	0,19	7,42	0,18	8,06	0,18	8,31	0,17	8,72	0,17
F	Konstruksi	292,41	7,97	308,22	7,62	337,01	7,60	359,61	7,55	389,82	7,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	307,83	8,39	341,58	8,44	373,43	8,42	406,72	8,54	435,15	8,49
H	Transpotrtasi dan Pergudangan	43,95	1,20	51,60	1,28	59,11	1,33	63,01	1,32	66,84	1,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,47	0,42	17,06	0,42	18,64	0,42	20,21	0,42	22,12	0,43
J	Informasi dan Komunikasi	34,78	0,95	37,00	0,91	40,11	0,90	42,76	0,90	44,51	0,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	32,98	0,90	36,20	0,89	36,31	0,82	37,39	0,79	40,01	0,78
L	Real Estat	7,36	0,20	7,66	0,19	81,16	0,18	8,52	0,18	8,85	0,17
M,N	Jasa Perusahaan	5,25	0,14	5,65	0,14	5,99	0,14	6,33	0,13	6,72	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	495,74	13,51	527,18	13,03	552,99	12,47	594,23	12,48	608,94	11,88
P	Jasa Pendidikan	90,00	2,45	95,14	2,35	98,64	2,22	105,69	2,22	107,69	2,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,28	2,27	91,92	2,27	103,07	2,32	114,89	2,41	124,62	2,43
R,S,T,U	Jasa Lainnya	29,39	0,80	32,98	0,82	35,89	0,81	38,79	0,81	41,71	0,81
PDRB ADHB		**3.669,83**	**100,00**	**4.044,35**	**100,00**	**4.436,33**	**100,00**	**4.761,49**	**100,00**	**5.123,71**	**100,00**

Sumber: BPS Kab. Kep. Aru, 2025 (data diolah)

Tabel 1.16
Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Kabupaten Kepulauan Aru
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010
Tahun 2021-2025 (dalam Juta Rp.)

KATEGORI	URAIAN	2021		2022		2023		2024		2025	
		(Miliar Rp)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	(Milira Rp)	(%)	(Milira Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.361,37	57,77	1.447,98	58,18	1.538,26	58,86	1.618,48	58,73	1.715,98	59,27
B	Pertambangan dan Penggalian	19,03	0,81	19,52	0,80	20,09	0,77	20,75	0,75	20,99	0,73
C	Industri Pengolahan	70,61	2,99	76,96	3,09	79,54	3,04	83,61	3,03	91,15	3,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,85	0,04	0,89	0,04	0,91	0,03	0,91	0,03	0,95	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,17	0,18	4,35	0.14	4,64	0,18	4,72	0,17	4,83	0,17
F	Konstruksi	157,80	6,69	161,10	6.47	167,84	6,42	173,71	6,30	182,71	6,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	198,99	8,44	212,72	8,56	222,85	8,53	238,44	8,65	247,58	8,55
H	Transpotrtasi dan Pergudangan	28,79	1,22	30,60	1.25	32,17	1,23	34,08	1,24	36,40	1,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,88	0,42	10,57	0.44	11,22	0,43	11,81	0,43	12,46	0,43
J	Informasi dan Komunikasi	26,94	1,14	28,08	1.12	29,66	1,13	31,22	1,13	32,79	1,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,38	0,90	21,43	0,87	21,15	0,81	21,59	0,78	22,58	0,78
L	Real Estat	5,18	0,21	5,34	0,20	5,60	0,21	5,76	0,21	5,90	0,20
M,N	Jasa Perusahaan	3,69	0,15	3,88	0,16	4,00	0,15	4,15	0,15	4,34	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	317,44	13,47	327,82	13,14	329,62	12,61	351,52	12,76	358,27	12,37
P	Jasa Pendidikan	58,77	2,49	61,34	2,45	63,53	2,43	66,97	2,43	67,15	2,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,51	2,23	55,79	2,25	59,94	2,29	64,64	2,35	66,88	2,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	19,32	0,82	21,20	0,84	22,29	0,85	23,41	0,85	24,43	0,84
PDRB ADHK		**2.356,73**	**100,00**	**2.489,55**	**100,00**	**2.613,29**	**100,00**	**2.755,77**	**100,00**	**2.895,39**	**100,00**

Sumber: BPS Kab. Kep. Aru, 2025 (data diolah)

Tabel 1.17
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Kepulauan Aru
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2021-2025

KATEGORI	URAIAN	2021		2022		2023		2024		2025	
		ADHB(%)	ADHK(%)	ADHB(%)	ADHK(%)	ADHB(%)	ADHK(%)	ADHB(%)	ADHK(%)	ADHB(%)	ADHK(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	56,69	57,77	57,49	57,48	58,35	58,86	58,23	58,73	58,87	59,27
B	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,81	0,86	0,86	0,84	0,77	0,82	0,75	0,79	0,73
C	Industri Pengolahan	3,00	2,99	3,06	3,06	2,97	3,04	2,98	3,03	3,12	3,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
F	Konstruksi	7,97	6,69	7,62	7,62	7,60	6,42	7,55	6,30	7,61	6,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,39	8,44	8,44	8,44	8,42	8,53	8,54	8,65	8,49	8,55
H	Transportasi dan Pergudangan	1,20	1,22	1,28	1,28	1,33	1,23	1,32	1,24	1,30	1,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43
J	Informasi dan Komunikasi	0,95	1,14	0,91	0,91	0,90	1,13	0,90	1,13	0,87	1,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,90	0,90	0,89	0,89	0,82	0,81	0,79	0,78	0,78	0,78
L	Real Estat	0,20	0,21	0,19	0,19	0,18	0,21	0,18	0,21	0,17	0,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,13	0,15	0,13	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,51	13,47	13,03	13,03	12,47	12,61	12,48	12,76	11,88	12,37
P	Jasa Pendidikan	2,45	2,49	2,35	2,35	2,22	2,43	2,22	2,43	2,10	2,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,27	2,23	2,27	2,27	2,32	2,29	2,41	2,35	2,43	2,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,80	0,82	0,82	0,82	0,81	0,85	0,81	0,85	0,81	0,84
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kab. Kep. Aru, 2025 (data diolah)

3. SUMBER DAYA ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri dari dua kategori pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS memiliki nomor induk pegawai secara nasional serta memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, dan jaminan pensiun. Dalam pelaksanaan tugasnya, PNS berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Selain PNS, terdapat pula Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK memiliki hak berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masa kerjanya disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian kerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, keberadaan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, profesional, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Total ASN Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 mencapai 5.687 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 2.869 orang dan PPPK sebanyak 2.818 orang. ASN berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.6

PNS berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025

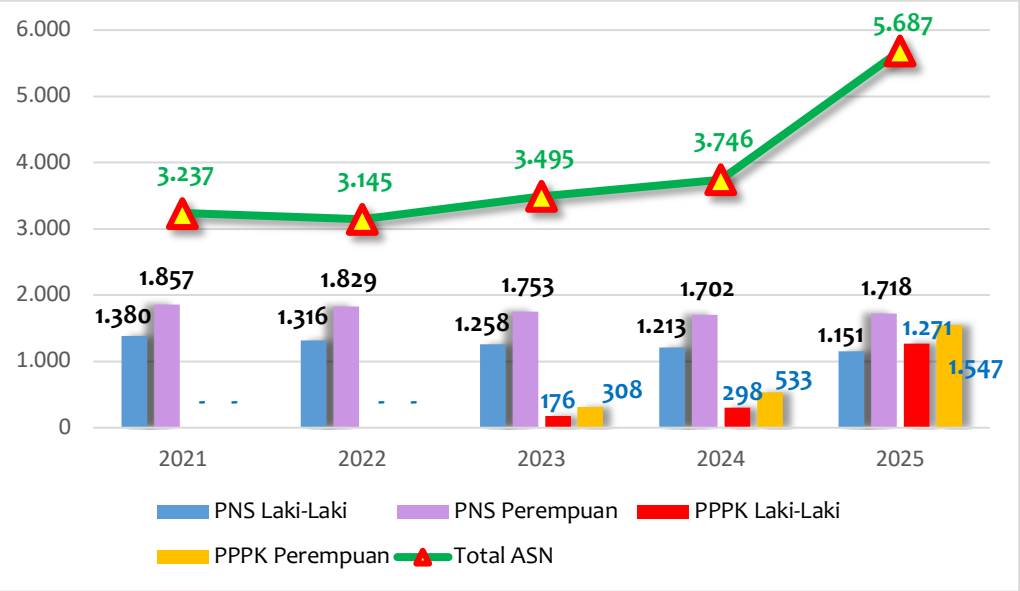

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah PNS Kabupaten Kepulauan Aru setiap tahunnya mengalami penurunan yakni 3.237 orang di tahun 2021, tahun 2022 sebanyak 3.145 orang, tahun 2023 sebanyak 3,011 orang, tahun 2024 sebanyak 2.915 orang, dan 2.869 orang di tahun 2025. Sedangkan untuk PPPK terhitung mulai dari tahun 2023 sebanyak 484 orang, tahun 2024 sebanyak 831 orang dan tahun 2025 mencapai 2.818 orang. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah PNS Kabupaten Kepulauan Aru cenderung mengalami penurunan, sedangkan jumlah PPPK justru mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam sistem kepegawaian ASN.

Penurunan jumlah PNS umumnya disebabkan oleh adanya pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahun, sementara jumlah penerimaan PNS relatif terbatas. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah PNS agar lebih efisien dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

Disisi lain, jumlah PPPK mengalami peningkatan karena pemerintah membuka lebih banyak formasi bagi tenaga profesional melalui skema perjanjian kerja. Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis lainnya. Dengan adanya PPPK, pemerintah dapat merekrut tenaga yang memiliki kompetensi tertentu secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan demikian, penurunan jumlah PNS yang diiringi dengan peningkatan jumlah PPPK merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menata komposisi ASN agar lebih efektif, profesional, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun komposisi ASN berdasarkan jabatan di Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan pembagian pegawai sesuai dengan jenis jabatan yang diduduki dalam

struktur organisasi pemerintahan. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan setiap fungsi pemerintahan dapat berjalan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan kompetensi pegawai. ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK yang bekerja dalam berbagai jabatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.18
PNS berdasarkan Jabatan
di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025

NO	JABATAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-	-	-
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-	-	-
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	29	36	40	36	32
4	Administrator	168	156	161	179	177
5	Pengawas	294	115	120	131	120
6	Eselon V	-	-	-	-	-
7	Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-	-	-
8	Jabatan Fungsional Guru	1.164	1.169	1.006	1.045	972
9	Jabatan Fungsional Medis	473	493	485	465	502
10	Jabatan Fungsional Teknis	235	295	265	267	281
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	874	881	934	792	785
TOTAL		**3.237**	**3.237**	**3.011**	**2.915**	**2.869**

Sumber: BKPSDM Kab. Kep. Aru, 2025

Tabel 1.19
PPPK berdasarkan Jabatan
di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023-2025

NO	JABATAN	2023	2024	2025
1	Jabatan Fungsional Guru	254	351	524
2	Jabatan Fungsional Medis	-	126	156
3	Jabatan Fungsional Teknis	-	124	194
4	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	230	230	1.944
TOTAL		**484**	**831**	**2.818**

Sumber: BKPSDM Kab. Kep. Aru, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pembagian ASN berdasarkan jabatan bertujuan untuk menciptakan sistem birokrasi yang terstruktur dan profesional. Jabatan pimpinan tinggi berperan dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan, jabatan administrasi bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan, sedangkan jabatan fungsional berfokus pada pelayanan berbasis keahlian. Dengan pembagian ini, kinerja ASN diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pembagian ASN berdasarkan golongan menunjukkan jenjang kepangkatan yang

mencerminkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta tanggungjawab pegawai. Semakin tinggi golongan seorang pegawai, maka semakin besar pula tanggungjawab, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.20

PNS berdasarkan Golongan
di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	PNS Golongan I	9	10	6	6	5
2	PNS Golongan II	834	879	648	575	514
3	PNS Golongan III	2.011	1.946	1.992	1.989	2.012
4	PNS Golongan IV	383	310	365	345	338
TOTAL PNS		**3.143**	**3.237**	**3.145**	**3.011**	**2.869**

Sumber: BKPSDM Kab. Kep. Aru, 2025

Tabel 1.21

PPPK berdasarkan Golongan
di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	PPPK Golongan I	-	-	-	-	3
2	PPPK Golongan III	-	-	-	-	5
3	PPPK Golongan V	-	-	19	41	1.278
4	PPPK Golongan VII	-	-	97	169	270
5	PPPK Golongan IX	-	-	342	579	1.215
6	PPPK Golongan X	-	-	26	42	47
TOTAL PPPK		**-**	**-**	**484**	**831**	**2.818**

Sumber: BKPSDM Kab. Kep. Aru, 2025

Dari tabel diatas, PNS terbanyak Tahun 2025 berada pada golongan III sebanyak 2.012 orang, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 1.989 orang. Sedangkan PNS yang paling sedikit berada pada golongan I sebanyak 5 orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun, selain itu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah jarang membuka formasi penerimaan PNS untuk golongan I, karena sebagian besar kebutuhan pegawai saat ini mensyaratkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Penurunan jumlah PNS golongan I juga dipengaruhi oleh perubahan kualifikasi pendidikan dalam rekrutmen ASN, di mana sebagian besar formasi lebih diarahkan kepada lulusan diploma dan sarjana yang biasanya masuk dalam golongan II maupun golongan III. Akibatnya, jumlah pegawai pada golongan I semakin sedikit dari tahun ke tahun.

Berbeda dengan PNS, untuk PPPK Tahun 2025 mengalami peningkatan pada semua golongan. Golongan dengan jumlah terbanyak berada pada golongan V sebanyak 1.278 orang, diikuti dengan golongan IX sebanyak 1.215 orang. Sedangkan untuk PPPK dengan golongan yang paling sedikit berada pada golongan I sebanyak 3 orang. Golongan PPPK yang paling sedikit umumnya terdapat pada golongan dengan kualifikasi pendidikan rendah atau kebutuhan jabatan yang lebih terbatas. Hal ini terjadi karena

sebagian besar formasi PPPK yang dibuka pemerintah lebih difokuskan pada jabatan tertentu, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga profesional. Jabatan-jabatan tersebut umumnya berada pada golongan dengan persyaratan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga jumlah pegawai pada golongan tersebut menjadi lebih banyak.

Sebaliknya, pada golongan yang memiliki kebutuhan jabatan lebih sedikit atau kualifikasi yang jarang dibuka dalam rekrutmen PPPK, jumlah pegawainya menjadi relatif kecil.

Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan menggambarkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Tingkat pendidikan ASN sangat berpengaruh terhadap jenis jabatan, tanggungjawab pekerjaan, serta kompetensi yang dimiliki oleh pegawai.

Pegawai dengan tingkat pendidikan dasar hingga menengah biasanya menjalankan tugas-tugas yang bersifat administratif dan operasional. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan diploma dan sarjana umumnya mengisi jabatan teknis maupun profesional yang membutuhkan keahlian tertentu. ASN berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.22

PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	SD/Sederajat	2	2	2	2	2
2.	SLTP/Sederajat	12	12	11	9	7
3.	SLTA/Sederajat	965	929	876	777	680
4.	Diploma I/Akta I	23	17	12	12	6
5.	Diploma II/Akta II	133	124	113	103	81
6.	Diploma III/Akta III	359	345	357	357	368
7.	Diploma IV/Akta IV	93	91	44	47	27
8.	S1/Sarjana	1.579	1.567	1.521	1.529	1.499
9.	S2/Pasca Sarjana	71	58	75	78	199
10.	S3/Doktor.Ph.D	-	-	-	1	1
TOTAL		**3.237**	**3.145**	**3.011**	**2.915**	**2.869**

Sumber: BPKSDM Kabupaten Kepulauan Aru, 2025

Tabel 1.23

PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	SD/Sederajat	-	-	-	-	3
2.	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	5
3.	SLTA/Sederajat	-	-	19	41	1.278
4.	Diploma I/Akta I	-	-	-	-	-
5.	Diploma II/Akta II	-	-	-	-	-
6.	Diploma III/Akta III	-	-	97	169	270
7.	Diploma IV/Akta IV	-	-	2	5	13

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
8.	S1/Sarjana	-	-	340	574	1.200
9.	S2/Pasca Sarjana	-	-	26	42	49
10.	S3/Doktor.Ph.D	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**484**	**831**	**2.818**

Sumber: BPKSDM Kabupaten Kepulauan Aru, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jumlah PNS dengan tingkat golongan II dan III, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa golongan II dan golongan III Tahun 2025, banyak dipenuhi oleh PNS berpendidikan SLTA sebanyak 680 orang atau 23,70 persen, angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 777 orang, sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 1.499 orang atau 52,25 persen merupakan jumlah terbanyak dari tingkat pendidikan lainnya.

Selain PNS, PPPK dengan tingkat golongan paling banyak pada tahun 2025 yakni berada pada PPPK yang berpendidikan SLTA/sederajat sebanyak 1.278 orang atau 45,35 persen dari total PPPK, kemudian diikuti oleh PPPK dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 1.200 orang atau 42,58 persen. PPPK merupakan pilihan bagi individu yang ingin bekerja di sektor publik dengan masa kerja terbatas. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, PPPK menawarkan kesempatan untuk berkontribusi dalam pelayanan publik dan mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak.

Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan ini, menunjukkan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintahan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai, maka diharapkan semakin baik pula kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan ASN melalui berbagai program pengembangan kompetensi dan pendidikan lanjutan.

4. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pengawasan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan dapat dihimpun secara optimal dan digunakan secara efektif untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Dalam sistem keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah menjadi bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah sendiri pada umumnya bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber yang berasal dari potensi daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pendapatan ini menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian daerah.

Selain itu, daerah juga memperoleh pendapatan dari pemerintah pusat melalui berbagai bentuk transfer, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Transfer tersebut bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp847.265.695.315,71 atau 91,15 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp929.450.061.934,97. Rincian pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.24
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	42.350.061.249,97	35.645.693.127,71	84,16
2	Pendapatan Transfer	882.100.000.685,00	778.604.582.015,00	88,26
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	5.499.777.507,00	109,99
PENDAPATAN DAERAH		**929.450.061.934,97**	**847.265.695.315,71**	**91,15**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah (konsolidasi), 2026 (data unaudited)

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari potensi ekonomi daerah. PAD merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD menjadi salah satu komponen penting dalam APBD karena digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi PAD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 sebesar Rp35.645.693.127,71 atau 84,16 persen dari target sebesar Rp42.350.061.249,97. Realisasi PAD tersebut terdiri

dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp7.688.526.719,00 atau 100,70 persen, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp2.653.456.506,00 atau 79,14 persen, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.088.433.363,00 atau 108,83 persen, serta realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp19.215.276.539,71 atau 74,56 persen. Rincian PAD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.25

Rincian Target, Realisasi dan Capaian PAD
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pajak Daerah	7.634.868.480,00	7.688.526.719,00	100,70
2	Retribusi Daerah	3.352.484.748,00	2.653.456.506,00	79,14
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.593.950.289,00	6.088.433.363,00	108,83
4	Lain-lain PAD yang Sah	25.768.757.732,97	19.215.276.539,71	74,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.350.061.249,97**	**35.645.693.127,71**	**84,16**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah (konsolidasi), 2026 (data unaudited)

Pada tabel di atas, terlihat PAD yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga penerimaan yang seharusnya diperoleh pemerintah daerah menjadi lebih kecil dari yang direncanakan. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat atau aktivitas ekonomi daerah yang menurun juga dapat mempengaruhi besarnya penerimaan dari pajak daerah maupun retribusi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah, belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah, seperti pendapatan objek pajak yang belum lengkap, sistem pemungutan yang kurang efektif, serta keterbatasan pengawasan dalam penagihan pajak dan retribusi daerah. Di samping itu, perubahan kebijakan atau regulasi juga dapat mempengaruhi besaran penerimaan daerah.

Apabila PAD tidak mencapai target, maka hal tersebut dapat berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, seperti memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan pendataan potensi pendapatan, serta memperkuat pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah agar realisasinya dapat lebih optimal.

PAD mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari Pemerintah Pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonominya.

Secara umum, PAD bersumber dari beberapa komponen utama yakni:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Secara umum, pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Jenis pajak yang dipungut dapat berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki. Dengan pengelolaan pajak daerah yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi pajak daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 sebesar Rp7.688.526.719,00 atau 100,70 persen dari target sebesar Rp7.634.868.480,00. Selengkapnya mengenai rincian pajak daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.26
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	221.644.647,00	221,64
2	Pajak Restoran	200.000.000,00	324.576.218,00	162,28
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	46.670.182,00	93,34
4	Pajak Reklame	125.000.000,00	143.760.288,00	115,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.500.000.000,00	3.890.967.944,00	86,46
6	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	500.000.000,00	386.383.158,00	77,27
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	435.000.000,00	427.574.435,00	98,29
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.212.534.175,00	1.508.776.822,00	124,43
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	512.334.305,00	738.173.025,00	144,08
PAJAK DAERAH		**7.634.868.480,00**	**7.688.526.719,00**	**100,70**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah (konsolidasi), 2026 (data unaudited)

Pencapaian pajak daerah yang melebihi target dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah, seperti

pertumbuhan usaha hotel, restoran, perdagangan, atau sektor jasa lainnya yang menjadi objek pajak daerah. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga turut berkontribusi terhadap tingginya realisasi penerimaan pajak.

Faktor lain yang mendukung adalah peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemungutan pajak, seperti perbaikan sistem administrasi pajak, pendataan objek pajak yang lebih akurat, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran pajak juga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Dengan realisasi pajak daerah yang melebihi target, pemerintah daerah memiliki tambahan kapasitas fiskal yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga menjadi indikator bahwa pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah berjalan secara efektif dan optimal.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang terpenting selain pajak. Retribusi daerah dipungut sebagai imbalan atas pelayanan yang secara langsung diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut berkewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 sebesar Rp2.653.456.506,00 dengan capaian 79,14 persen dari target sebesar Rp3.352.484.748,00 yang meliputi realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp554.338.000,00 dengan capaian sebesar 93,67 persen dari target sebesar Rp591.794.900,00 dan realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.099.118.506,00 dari target sebesar Rp2.460.689.848,00 dengan capaiannya sebesar 85,30 persen. Sementara retribusi perizinan tertentu tidak terealisasi.

Berdasarkan realisasi per objek retribusi tersebut, menunjukkan bahwa retribusi di Kabupaten Kepulauan Aru belum optimal. Hal ini tergambar dari realisasi retribusi daerah yang belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Penyebabnya adalah fasilitas yang belum memadai, perencanaan pelayanan yang belum optimal, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan kurangnya kesadaran masayarakat akan pentingnya retribusi. Adapun rincian PAD Retribusi Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.27
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retrbusi Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Retribusi pelayanan persampaahan/kebersihan	50.000.000,00	97.955.000,00	195,91
2	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	200.000.000,00	45.740.000,00	22,87
3	Retribusi pelayanan pasar	341.794.900,00	410.643.000,00	120,14
Retribusi Jasa Umum		591.794.900,00	554.338.000,00	93,67
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	70.189.848,00	16.370.000,00	23,32
2	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	490.500.000,00	898.870.021,00	183,25
3	Retribusi tempat pelelangan	1.500.000.000,00	1.001.873.685,00	66,79
4	Retribusi pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	131.292.800,00	65,64
5	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	100.000.000,00	50.712.000,00	50,71
6	Retribusi penyeberangan Air	100.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha		2.460.689.848,00	2.099.118.506,00	85,30
1	Retribusi persetujuan bangunan gedung	300.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu		300.000.000,00	0,00	0,00
RETRIBUSI DAERAH		**3.352.484.748,00**	**2.653.456.506,00**	**79,14**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah (konsolidasi), 2026 (data unaudited)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp6.088.433.363,00 atau dengan capaian sebanyak 108,83 persen dari target sebesar Rp5.593.950.289,00 Adapun rincian pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.28
Target, Realisasi dan Capaian
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.593.950.289,00	6.088.433.363,00	108,83
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		**5.593.950.289,00**	**6.088.433.363,00**	**108,83**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah (konsolidasi), 2026 (data unaudited)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan salah satu komponen dalam PAD yang mencakup berbagai penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan ini berfungsi sebagai sumber tambahan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Meskipun kontribusinya seringkali tidak sebesar pajak daerah atau retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, lain-lain PAD yang sah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan daerah serta memperkuat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp20.768.884.746,39 dengan capaian sebanyak 80,59 persen dari target yang telah ditentukan sebesar Rp25.768.757.732,97. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dikarenakan kurang optimalnya kinerja dari Tim TPTGR Daerah. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.29
Rincian Target, Realisasi dan Capaian
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	87.859.968,00	∞
2	Jasa giro	2.699.997.599,97	55.541.497,51	2,05
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.068.760.133,00	810.182.462,20	13,35
4	Pendapatan BLUD	17.000.000.000,00	18.261.692.612,00	107,42
LAIN-LAIN PAD YANG SAH		**25.768.757.732,97**	**19.215.276.539,71**	**75,56**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah (konsolidasi), 2026 (data unaudited)

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya. Pendapatan ini diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta membantu pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan PAD yang diperoleh dari kemampuan daerah sendiri, pendapatan transfer merupakan dana yang dialokasikan

oleh pemerintah yang lebih tinggi untuk mendukung kapasitas fiskal daerah.

Dengan adanya pendapatan transfer, pemerintah daerah dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pendapatan transfer menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat penting dalam memdukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 sebesar Rp806.120.224.681,00 dengan capaian sebanyak 91,87 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp882.100.000.685,00. Adapun rincian Pendapatan Transfer baik target maupun realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.30
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Transfer
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Transfer Pemerintah Pusat				
1.	**Dana Perimbangan**	**760.471.958.994,00**	**698.642.618.446**	**91,87**
1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	11.410.525.994,00	10.202.762.081,00	89,41
1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	595.799.838.000,00	596.137.395.124,00	100,05
1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	20.812.897.000,00	17.165.605.061,00	82,47
1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	132.448.698.000,00	75.136.856.180,00	56,72
2.	**Dana Desa**	**100.692.588.000,00**	**95.318.496.508,00**	**94,66**
2.1	Dana Desa	100.692.588,00	95.318.496.508,00	94,66
3.	**Dana Insentif Fiskal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Dana Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
Transfer Antar Daerah				
1.	**Pendapatan Bagi Hasil**	**20.935.453.691,00**	**12.562.159.100,00**	**60,00**
1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.935.453.691,00	12.562.159.100,00	60,00
PENDAPATAN TRANSFER		**882.100.000.685,00**	**806.120.224.681,00**	**91,38**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang, 2026 (hasil konsolidasi, data unaudited)

Pada tabel di atas, terlihat bahwa capaian realisasi komponen Pendapatan Transfer terbesar berasal dari Transfer Pemerintah Pusat yakni komponen Dana Perimbangan. Persentase realisasi dana perimbangan terhadap pendapatan transfer adalah sebesar 91,87 persen, realisasi Dana Desa terhadap pendapatan transfer sebesar 11,82 persen, sedangkan Insentif Fiskal terhadap Pendapatan Transfer adalah 0,00 persen.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan selain PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah biasanya berasal dari berbagai penerimaan yang

tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Jenis pendapatan ini dapat berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau lembaga tertentu, bantuan keuangan, pendapatan dari kerja sama dengan pihak lain, serta penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendapatan ini memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menambah kapasitas fiskal daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun kontribusinya tidak selalu sebesar sumber pendapatan lainnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap menjadi bagian penting dalam struktur pendapatan daerah.

Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, sumber pendapatan ini dapat mendukung stabilitas keuangan daerah serta memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 yakni berasal dari pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.31
Rincian Target, Realisasi dan Capaian
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.000.000.000,00	5.499.777.507,00	109,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**5.000.000.000,00**	**5.499.777.507,00**	**109,99**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah (konsolidasi), 2026 (data unaudited)

5. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinarja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk menadanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Tujuan belanja daerah adalah untuk memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat, semakin banyak pendapatan daerah yang diperoleh, maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerah. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam menyumbang pendapatan asli daerah melalui pembayaran pajak daerah hingga retribusi daerah.

Dengan pengelolaan belanja daerah yang baik dan terarah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp743.782.611.457,36 atau 79,02 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp941.207.714.298,97. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.32
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI		**672.530.486.999,97**	**509.756.893.839,84**	**75,79**
1	Belanja Pegawai	405.286.695.914,90	326.576.229.951,05	80,57
2	Belanja Barang dan Jasa	255.604.439.931,40	176.068.193.498,79	68,88
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	10.826.445.153,67	7.112.470.390,00	65,69
5	Belanja Bantuan Sosial	812.906.000,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL		**107.213.457.399,00**	**78.542.275.126,52**	**73,25**
1	Belanja Modal Tanah	600.000.000,00	250.000.000,00	41,66
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.569.160.028,00	15.658.131.228,00	66,43
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.283.108.168,00	32.425.103.888,54	65,79
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.678.509.203,00	30.126.690.009,98	89,45
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	82.680.000,00	82.350.000,00	99,60
BELANJA TIDAK TERDUGA		**100.184.000,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA TRANSFER		**161.363.585.900,00**	**155.483.442.491,00**	**96,35**
1	Belanja Bantuan Keuangan	161.363.585.900,00	155.483.442.491,00	96,35
BELANJA DAERAH		**941.207.714.298,97**	**743.782.611.457,36**	**79,02**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah (konsolidasi), 2026 (data unaudited)

6. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah digunakan sebagai mekanisme untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Dengan demikian, pembiayaan daerah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara optimal.

Dalam struktur APBD, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan sumber dana yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran daerah, yang dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan piutang daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan merupakan penggunaan dana yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah atau lembaga lainnya, pembayaran pokok utang daerah, serta pemberian pinjaman kepada pihak lain.

Pada tahun 2025, anggaran penerimaan pembiayaan untuk komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp12.757.652.364,00 berdasarkan hasil realisasi sementara, anggaran tersebut terealisasi sebesar 100 persen. Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kepulauan Aru terealisasi sebesar 100 persen dari anggaran yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00,-.

Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.33
Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	SURPLUS/DEFISIT	**(11.757.652.364,00)**	**78.016.171.237,03**	**(663,53)**
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.757.652.364,00	12.757.652.364,29	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12.757.652.364,00	12.757.652.364,29	100,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	1) Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	**11.757.652.364,00**	**11.757.652.364,29**	**100,00**
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**00,00**	**89.773.823.601,32**	**0,00**

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah (konsolidasi), 2026 (data unaudited)

1) Penyerapan Realisasi Anggaran

Penyerapan realisasi anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya suatu kebijakan pemerintah. Dengan demikian diperlukan penyerapan anggaran secara maksimal guna membantu dalam mensejahterakan masyarakat. Tolak ukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa dilihat dari tinggi rendahnya penyerapan anggaran dari OPD tersebut. Pengukuran kinerja suatu pemerintahan lebih difokuskan pada kemampuan suatu instansi pemerintahan dalam menyerap realisasi anggaran dengan baik. Adanya penyerapan realisasi anggaran yang rendah atau lambat, maka instansi dapat dinilai kurang baik dalam menjalankan rencana yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, penyerapan realisasi anggaran secara maksimal menjadi poin penting dalam mencapai kinerja yang baik dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Penyerapan anggaran dapat dilihat dari dua aspek yaitu yang pertama membandingkan realisasi anggaran dengan pagu anggaran secara sederhana. Sedangkan aspek yang kedua yaitu dengan melihat proporsionalitas persentase penyerapan anggaran. Penyerapan realisasi anggaran berdasarkan OPD di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 1.7
Realisasi Penyerapan Anggaran Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

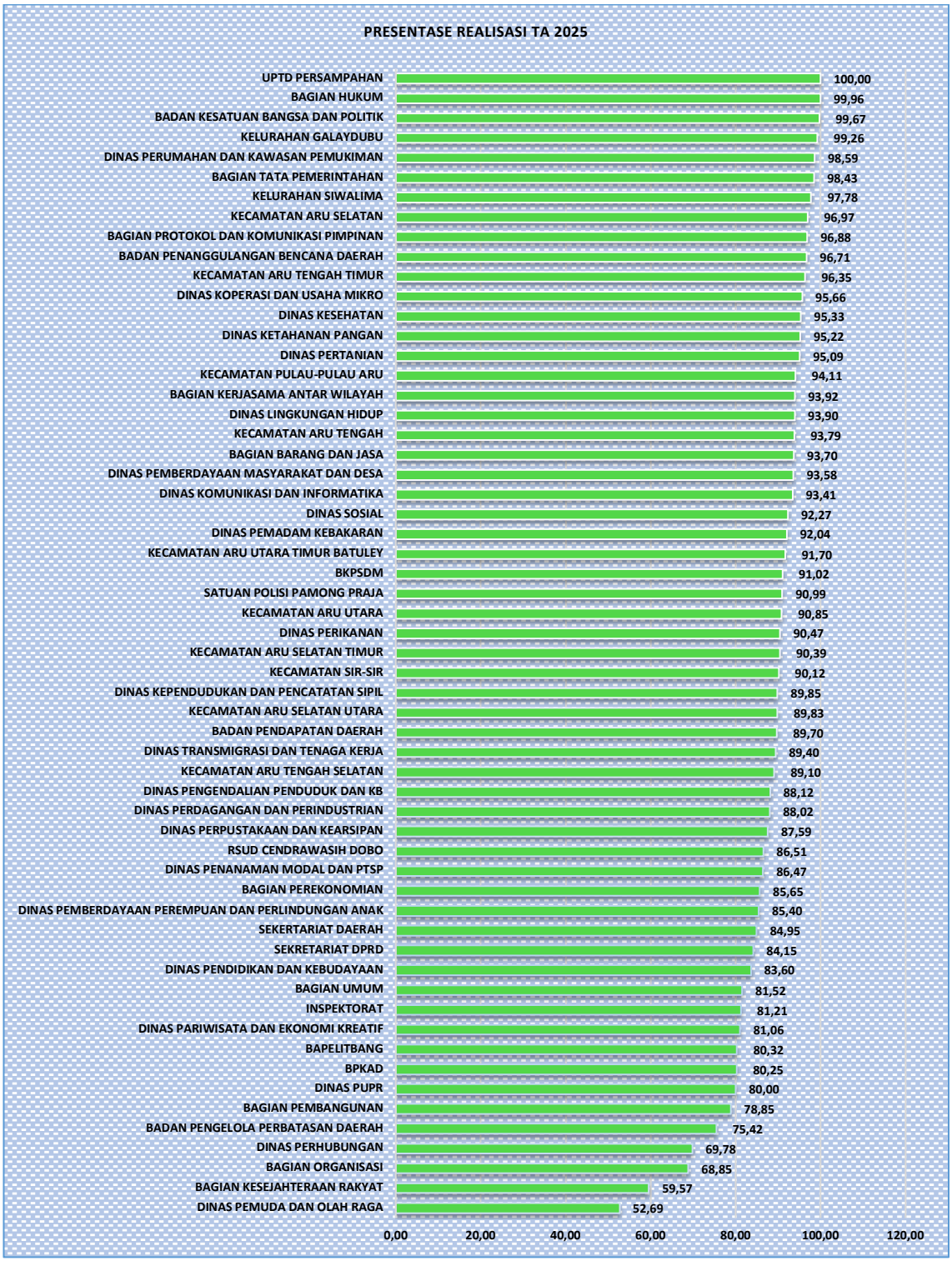

Sumber: BPKAD, 2026 (data diolah) sebelum hasil Audit BPK RI

- B A B II -

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berasaskan fungsi:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berlandaskan beberapa prinsip utama yakni :

1. Akuntabilitas: Setiap penggunaan dana daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui laporan keuangan yang transparan;
2. Efisiensi: Penggunaan anggaran harus memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal;
3. Keadilan: Alokasi anggaran harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara proporsional dan merata;
4. Transparansi: Proses perencanaan dan penggunaan anggaran harus mudah diakses dan dipahami oleh publik.

Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan desentraliasi, yaitu memberikan otonomi lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Keuangan daerah yang dikelola dengan baik dapat menjadi landasan inovasi dan pembangunan, tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Arah kebijakan perubahan anggaran periode 2025 mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029 sebagai landasan atau pedoman untuk mengukur kinerja. Arah kebijakan anggaran tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan anggaran dilakukan dalam rangka memberikan gambaran objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. Adapun nomenklatur pendapatan dan belanja berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Penggunaan prinsip pendataan dan aplikasi pendataan dan perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Selanjutnya untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, secara operasional disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tahap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan, yang di dalam prosesnya merupakan kolaborasi kinerja antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang adaptif dapat dilakukan Perubahan APBD agar dapat menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025, didasarkan pada kriteria yang memenuhi unsur untuk dilakukannya Perubahan APBD Tahun 2025, beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai latar belakang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2025 antara lain :

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD tahun berjalan dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD;
2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan, serta faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran;
3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan, dan adanya kegiatan lanjutan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025; dan

4) Keadaan darurat yaitu keadaan luar biasa, yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 persen.

2.1. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kinerja pendapatan daerah secara umum diukur dengan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan persentase kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri meliputi penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama PAD yang merupakan indikator kekuatan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai kegiatan operasional baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. PAD merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pendapatan Daerah Tahun 2025 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah adalah :

1) Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2) Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak dan retribusi daerah;
3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, dan instansi terkait lainnya;
4) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5) Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
6) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7) Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;

8) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Transfer;
9) Optimalisasi peningkatan PAD melalui kajian dan pendataan potensi sumber-sumber pajak/retribusi baru, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak/retribusi, pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penagihan piutang pajak/retribusi;
10) Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sampai ditingkat desa/kelurahan, peningkatan kualitas sarana prasarana pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah;
11) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
12) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan transfer dengan cara mengirimkan pembauran data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun 2025 diarahkan pada :

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang profesional;
3) Mengintensifkan pemungutan pajak daerah bersinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan pemasukan penerimaan pajak daerah, pembentukan dan sinkronisasi data dengan pihak terkait serta pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dimana kepada wajib pajak diharuskan melunasi kewajiban pajaknya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan layanan publik tertentu dari pemerintah daerah;
4) Mengevaluasi regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara regulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.
5) Mengefektifkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diadakan penyesuaian/perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
7) Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan

pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;

8) Meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp980.713.426.066,00 menjadi Rp929.450.061.934,97 meningkat sebanyak Rp53.005.711.767,- atau sebesar 5,33 persen yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan Rp71.923.738.687,00,- menjadi Rp82.255.918.773,04,- naik sebanyak Rp10.332.180.086,04,- atau 14,37 persen;
2. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari Rp939.834.110.197,00,- menjadi Rp957.989.885.160,00,- meningkat sebanyak Rp18.155.774.963,00,- atau 1,93 persen; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00,- menjadi Rp7.000.000.000,00,- meningkat sebanyak Rp2.000.000.000,00,- atau 40,00 persen.

Perubahan target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2025

URAIAN	APBD TAHUN 2025		BERTAMBAH/BERKURANG	
	MURNI	PERUBAHAN	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**54.451.502.854**	**42.350.061.250**	**(12.101.441.604)**	**-22,22**
Pajak Daerah	9.794.715.851	7.634.868.480	(2.159.847.371)	-22,05
Retribusi Daerah	4.761.754.900	3.352.484.748	(1.409.270.152)	-29,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.915.188.467	5.593.950.289	678.761.822	13,81
Lain-lain PAD yang sah	34.979.843.636	25.768.757.733	(9.211.085.903)	-26,33
Pendapatan Transfer	**921.261.923.212**	**882.100.000.685**	**(39.161.922.527)**	**-4,25**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	805.773.702.000	861.164.546.994	55.390.844.994	6,87
Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.795.633.212	20.935.453.691	6.139.820.479	41,50
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0**	**0**
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**980.713.426.066**	**929.450.061.935**	**(51.263.364.131)**	**-5,23**

Sumber: BPKAD Kab. Kep. Aru, 2025 (data diolah)

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun 2025 difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi: (1) Perencanaan yang tepat; (2) Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas; (3) Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel; (4) Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif; dan (5) Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin. Sedangkan arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 adalah:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan Kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Menguatkan program-program kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 lebih diarahkan pada pemulihan perekonomian masyarakat, juga diarahkan pada penuntasan program kegiatan yang dipastikan dapat tercapai output yang terukur dan berdampak langsung kepada pelayanan publik. Selain itu, optimalisasi stimulus sebagai daya dukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025, mengalami perubahan dari Rp994.213.426.066,- menjadi Rp941.207.714.299,- berkurang sebesar Rp53.005.711.767,- atau 5,33 persen, yang meliputi:

1. Belanja Operasi sebesar Rp693.594.256.221,- menjadi Rp 672.530.487.000,- berkurang sebesar Rp21.063.769.221,- atau 3,04 persen;
2. Belanja Modal sebesar Rp135.997.422.931,- menjadi Rp107.213.457.399,- berkurang sebesar Rp28.783.965.532,- atau sebesar 21,17 persen;
3. Belanja Tidak Terduga dari Rp500.184.000,- mengalami perubahan menjadi Rp100.184.000,- atau berkurang sebesar Rp400.000.000 atau sebanyak 79,97 persen; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp164.121.562.914,- berkurang menjadi Rp161.363.585.900,-

yakni sebesar Rp2.757.977.014,- atau sebanyak1,68 persen.

Perubahan target belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2025

URAIAN	APBD TAHUN 2025		BERTAMBAH/BERKURANG	
	MURNI	PERUBAHAN	Rp.	%
Belanja Operasi	**693.594.256.221**	**672.530.487.000**	**(21.063.769.221)**	**-3,04**
Belanja Pegawai	407.754.617.671	405.286.695.915	(2.467.921.756)	-0,61
Belanja Barang dan Jasa	252.740.447.515	255.604.439.931	2.863.992.416	1,13
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	32.749.191.035	10.826.445.154	(21.922.745.881)	-66,94
Belanja Bantuan Sosial	350.000.000	812.906.000	462.906.000	132,26
Belanja Modal	**135.997.422.931**	**107.213.457.399**	**(28.783.965.532)**	**-21,17**
Belanja Modal Tanah	1.500.000.000	600.000.000	(900.000.000)	-60
Belanja Modal peralatan dan Mesin	18.671.243.523	23.569.160.028	4.897.916.505	26,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.877.122.633	49.283.108.168	(26.594.014.465)	-35,05
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.866.376.775	33.678.509.203	(6.187.867.572)	-15,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	82.680.000	82.680.000	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	**500.184.000**	**100.184.000**	**(400.000.000)**	**79,97**
Belanja Tidak Terduga	500.184.000	100.184.000	(400.000.000)	-79,97
Belanja Transfer	**164.121.562.914**	**161.363.585.900**	**(2.757.977.014)**	**-1,68**
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	164.121.562.914	161.363.585.900	(2.757.977.014)	-1,68
JUMLAH BELANJA DAERAH	**994.213.426.066**	**941.207.714.299**	**(53.005.711.767)**	-5,33

Sumber: BPKAD Kab. Kep. Aru, 2025 (data diolah)

2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan Daerah dan pengeluaran pembiayaan Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit atau surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan Daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.

Salah satu sumber penerimaan daerah selain Pendapatan Daerah adalah Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan bersumber dari SILPA. Mempedomani Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa SILPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan target anggaran Pembiayaan Netto Tahun 2025 sebesar Rp13.500.000.000,- berubah menjadi Rp11.757.652.364,- atau berkurang sebesar Rp1.742.347.636 atau sebesar 12,91 persen. Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2025

URAIAN	APBD TAHUN 2025		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	MURNI	PERUBAHAN	RP	%
Penerimaan Pembiayaan	**15.000.000.000**	**12.757.652.364**	**(2.242.347.636)**	**-14,95**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000	12.757.652.364	(2.242.347.636)	-14,95
Pengeluaran Pembiayaan	**1.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**(500.000.000)**	**-33,33**
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	(500.000.000)	-33,33
PEMBIAYAAN NETO	**13.500.000.000**	**11.757.652.364**	**(1.742.347.636)**	**-12,91**

Sumber: BPKAD Kab. Kep. Aru, 2025 (data diolah)

- B A B III -

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan daerah serta dari pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mencapai tujuan Pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029. Capaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan, terbagi dalam 8 bagian, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum.

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja

Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan tahun pertama dimulainya RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam rencana pembangunan Daerah ditetapkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk tahun 2025-2029 meliputi penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Seluruh indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2025. Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 dapat diuraikan dari capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah (IKU Daerah) tahun 2025.

3.1.1.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029 menetapkan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, yang capaian hasil keberhasilan kinerjanya pada Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

NO	Tujuan/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan (1) : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan						
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,45	5,02	5,07	100,99	Tercapai
	Tujuan (2) Meningkatkan konektivitas dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pelayanan dan pengembangan wilayah desa dan perkotaan						
2	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	2,46	2,70	2,79	103,33	Tercapai
	Tujuan (3) : Menciptakan kualitas SDM cerdas, unggul, sehat dan kompetitif yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi						
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,00	69,32	69,73	100,59	Tercapai
	Tujuan (4)Terwujudnya Kesejahteraan sosial masyarakat secara merata dan berkeadilan						
4	PDRB perkapita	Rp.Juta	43,62	44,09	44,43	100,77	Tercapai
5	Persentase Kemiskinan	Persen	23,39	19,61	23,10	84,89	Belum Tercapai
	Tujuan (5) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas						
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53,11 (CC)	55,10 (CC)	56,16 (CC)	101,92	Tercapai
	Tujuan (6)Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai dan berbudaya sebaga identitas daerah						
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	Na	75,00	-	-	Kepulauan Aru tidak menjadi Lokasi Survei
	Tujuan (7) Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam mengahadapi perubahan iklim						
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,22	82,41	54.42	66,04	Belum Tercapai
	Tujuan (8) Menguatkan kontribusi daerah dalam pengelolaan WPP 718 dan Laut Arafura secara berkelanjutan melalui kolaborasi nasional dan internasional						
9	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persen	3,86	3,76	4,59	122,07	Tercapai

Sumber : BPS, OPD Kabupaten Kepulauan Aru 2026, data diolah Bapelitbang Kepulauan Aru Tahun 2026

Berdasarkan gambaran capaian kinerja indikator tujuan pembangunan daerah tahun 2025, sebanyak 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama diatas 6 (enam) indikator tercapai melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029, sedangkan 2 (dua) Indikator Kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD, dan 1 (satu) indikator yang belum dapat dihitung akibat dari Kabupaten Kepulauan Aru bukan merupakan Lokasi survei indikator dimaksud. Capaian Indikator Kinerja Utama diatas 100 persen adalah indikator-indikator yang tercapai melebihi target yang ditetapkan, sedangkan capaian indikator-indikator di bawah 100 persen adalah indikator-indikator yang belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 tersebut didukung dengan

kebijakan dan prioritas daerah yang diimplementasikan dalam program/kegiatan pada tahun 2025. Penjabaran gambaran pencapaian kinerja pada setiap indikator tujuan pembangunan daerah atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Provinsi Maluku Tahun 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru harus disesuikan dengan target yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga target mengalami penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Pada RPJMD, target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah sebesar 5,02 persen, dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Aru, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,07 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0,5 persen dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Namun jika dibandingkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024 dengan capaian tahun 2025, maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mengalami pelemahan 0,38 persen dari angka 5,45 persen di tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru menempati peringkat ke-1 untuk kabupaten/kota dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, yakni pada angka 4,56 persen. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kepulauan Aru:

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

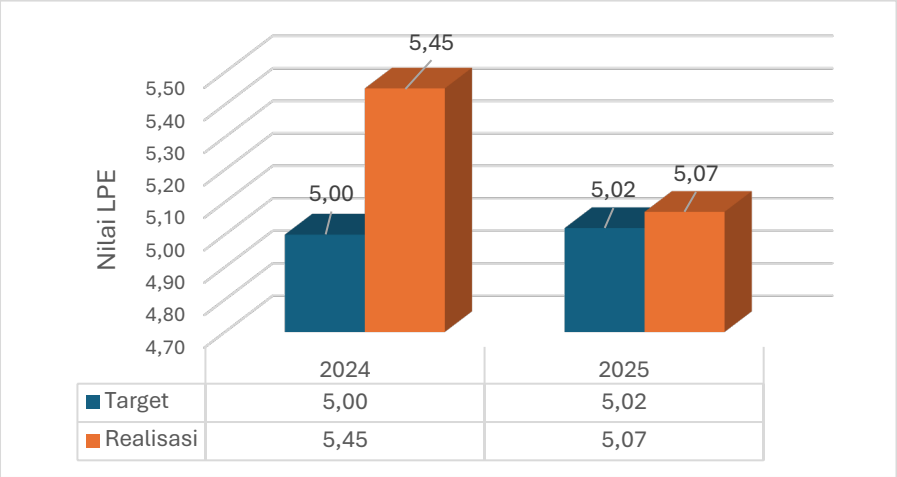

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026 dan data dioleh oleh Bapelitbang,2026

Pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Aru juga menghadapi segala bentuk ancaman dan risiko yang berasal dari kondisi global, nasional, maupun regional. Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintahan Pusat juga berdampak besar dalam hal pelemahan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Aru, karena baik pemerintah daerah maupun sektor swasta masih sangat tergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan pengurangan belanja modal, efek multiplier melemah yang artinya pendapatan masyarakat menurun, perputaran uang berkurang di masyarakat dan daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikian, pemerintah daerah harus menciptakan perekonomian yang Tangguh, sehingga lebih memperkuat perekonomian masyarakat agar tidak mudah terpuruk akibat situasi gejolak perekonomian. Salah satu prasyarat dalam mewujudkan perekonomian daerah tangguh adalah dengan membangun perekonomian daerah yang berdaya saing. Perekonomian berdaya saing diwujudkan dengan mengoptimalkan kapasitas dan potensi ekonomi daerah sesuai potensi unggulan daerah agar lebih meningkat produktivitasnya, didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang juga semakin produktif. Disisi lain, perwujudan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan tersebut tetap berprinsip pada perekonomian inklusif, artinya suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabaupaten Kepulauan Aru.

2. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah atau negara dalam menciptakan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indeks ini menilai berbagai aspek penting seperti kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, stabilitas ekonomi, inovasi, serta tata kelola pemerintahan. Semakin baik kinerja pada komponen-komponen tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat daya saingnya. Indeks daya saing juga menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, karena dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu wilayah dalam menghadapi persaingan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, peningkatan indeks daya saing mencerminkan keberhasilan pembangunan yang terarah dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 sebesar 2,79 poin, angka ini meningkat 0,33 poin dari tahun 2024 yakni 2,46 poin, menunjukkan bahwa ada upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemampuan local menghadapi persaingan pembangunan yang lebih luas. Walaupun nilai IDSD Kabupaten Kepulauan Aru dalam kajian sebelumnya tergolong lebih rendah dibanding rata-rata nasional maupun provinsi, indikator-indikator dasar seperti pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kegiatan perekonomian menunjukkan arah perbaikan yang berkelanjutan. Misalnya, sektor pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarpulau dan peningkatan akses layanan dasar turut mendukung terciptanya lingkungan usaha yang lebih kondusif. Di samping itu, peningkatan indeks pembangunan manusia (sebagai bagian dari komponen daya saing) menunjukkan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Pencapaian-pencapaian ini mencerminkan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru telah bergerak maju dalam mewujudkan daya saing daerah yang lebih baik, dengan terus meningkatkan efisiensi tata kelola pembangunan dan memaksimalkan potensi lokal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan Indeks daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.2
Indeks Daya Saing Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

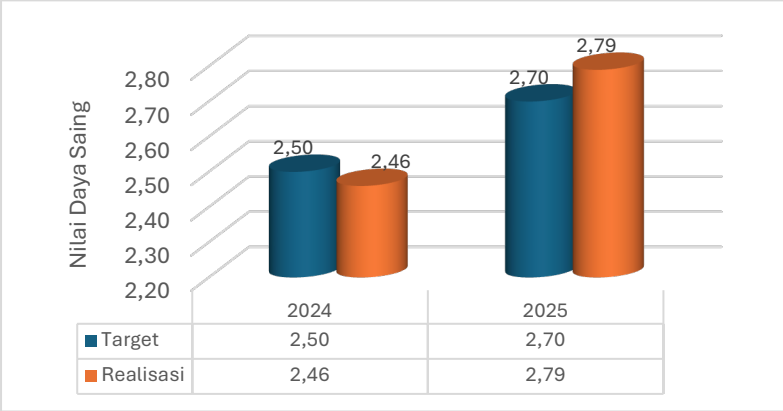

Sumber: BRIN RI, 2026 dan data dioleh oleh Bapelitbang,2026

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1) Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)
2) Pengetahuan (*knowledge*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :
   a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
   b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
3) Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 mencapai 69,73 dari target 69,32 atau mencapai target dengan capaian 101,85 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 69,00 poin, maka terdapat kenaikan 0,73 poin. Dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan

Aru menempati peringkat ke-8 untuk Kabupaten dan kota. Berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Aru.

Gambar 3.3
Indeks Pembangunan Manusia (IMP) Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

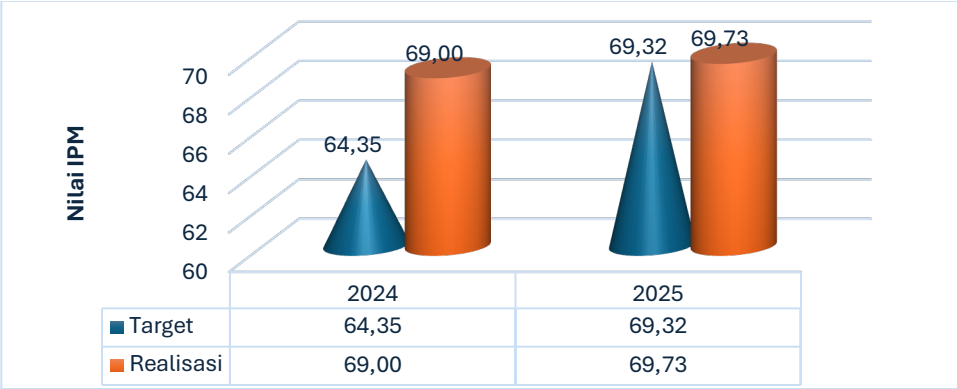

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2026 dan data dioleh oleh Bapelitbang 2026

Komponen-komponen yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Pembentukan IPM Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2024	2025
Umur Panjang dan Sehat			
- Usia Harapan Hidup	Tahun	70,40	70,60
Pengetahuan			
- Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,91	12,51
- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,21	9,46
Standar Hidup Layak			
- Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan)	Rp.000	8.488	8.650

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026

4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah. Ini dihitung dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB per kapita, menunjukkan bahwa rata-rata penduduk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, yang berpotensi mengarah pada tingkat hidup yang lebih baik.

Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu

wilayah secara rata-rata telah meningkat. PDRB Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 sebesar 44,43 juta rupiah. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan, yakni 43,62 juta rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Aru mengalami peningkatan 0,81 juta rupiah dari tahun 2024 yakni sebesar 43,62 juta rupiah. Berikut merupakan rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024-2025.

Tabel 3.3
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025

TAHUN	2024*	2025**
Nilai PDRB (Milyar Rp)		
ADHB	4.761,49	5.123,71
ADHK	2.755,77	2.895,39
PDRB Per Kapita (Juta Rp)		
✓ ADHB	43,62	44,43
✓ ADHK	24,34	25,07
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,45	5,07
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK (%)	3,72	2,99
Jumlah Penduduk (ribu orang)	112.531	115.513

Sumber: BPS Kab. Kep. Aru, 2026, Bapelitbang data Diolah, 2026
*Ket : *) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Pada tabel di atas, PDRB per Kapita Kabupaten Kepulauan Aru, dapat dilihat bahwa ADHB dan ADHK menunjukkan peningkatan. Peningkatan PDRB per kapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk, sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud. Terlihat pada gambar capaian dan target PDRB per Kapita Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024-2025

Gambar 3.4
PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

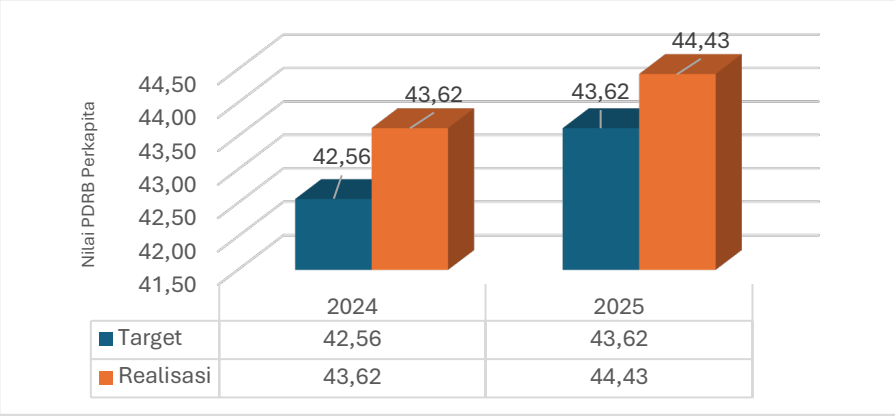

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026 dan data dioleh oleh Bapelitbang 2026

5. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Maret 2025 mencapai 22.250 ribu jiwa, berkurang sebesar 200 ribu jiwa, dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 22.450 ribu jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Maret 2025 sebesar Rp 673.363 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp29.251 atau meningkat sebesar 4,34 persen, dibandingkan kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp 664.112. Persentase kemiskinan tahun 2025 sebesar 23,10 persen mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 0,29 persen dari 23,39 persen. Namun jika dibandingkan dengan target yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029 realisasi belum tercapai karena persentase kemiskinan ditargetkan sebesar 19,61 persen. Penyebab tidak tercapainya target penurunan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Aru dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan yang tersebar dan akses transportasi yang masih terbatas, sehingga distribusi barang, layanan publik, serta program bantuan sosial menjadi kurang optimal. Biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga kebutuhan pokok relatif mahal dan menekan daya beli masyarakat. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sektor perikanan dan sumber daya alam membuat pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi cuaca. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan air, jalan, listrik, dan jaringan komunikasi di beberapa wilayah terpencil, juga menghambat pertumbuhan usaha dan investasi. Rendahnya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan turut membatasi peluang kerja yang lebih produktif, sehingga sebagian masyarakat masih berada dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kepulauan Aru Maret 2025 sebesar 3,36 poin mengalami penurunan sebesar 1,02 poin dibandingkan Maret 2024 yakni sebesar 4,56 poin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kepulauan Aru Maret 2025

sebesar 0,74 mengalami peningkatan sebesar 0,49 poin dibandingkan Maret 2024 yakni sebesar 1,23 poin. Lebih lengkapnya dapata di lihat pada table berikut:

Tabel 3.4
Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Kemsiskinan, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2024	644.112	22,45	23,39	4,54	1,23
2025	673.363	22,25	23,10	3,36	0,74

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026

Pada level kabupaten, tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 berada posisi ke-3 (tiga) terbawah dari 11 (sebelas) kabupaten/kota yang diikuti oleh Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar, sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Aru berada pada posisi ke-5 (lima) jumlah penduduk miskin.

Perkembangan persentase penduduk di atas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.5.
Persentase Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025

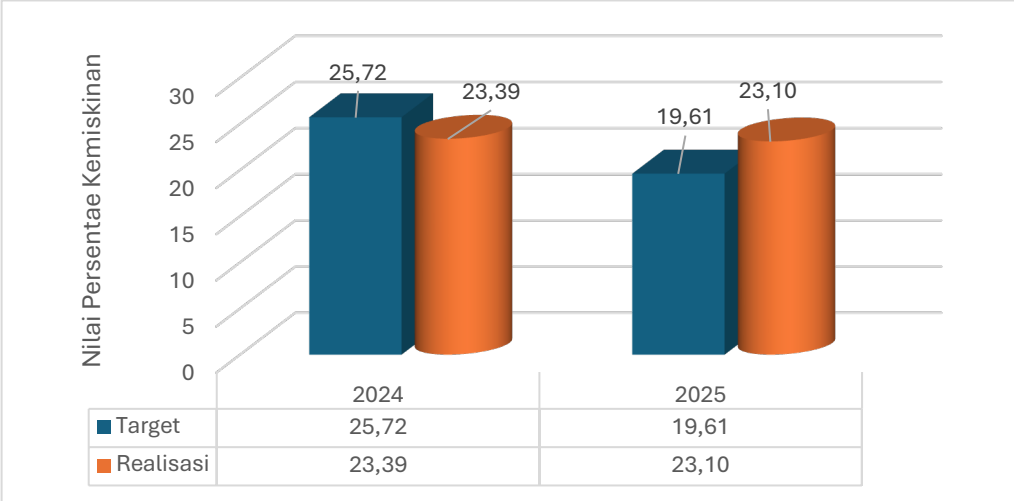

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026 dan data dioleh oleh Bapelitbang 2026

6. Indeks Refomasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai *good and clean governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah

melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Semakin tinggi nilai indeks reformasi birokrasi, maka semakin baik kinerja instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indeks reformasi birokrasi menunjukkan bahwa instansi tersebut berkomitmen terhadap reformasi birokrasi, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 ditargetkan CC (cukup memadai), sedangkan untuk capaiannya Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan predikat CC (Cukup memadai) dengan nilai 56,16. Capaian dimaksud meningkat dari tahun 2024 yang masih berada pada kategori CC (cukup memadai) dengan nilai 53,11.

Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025 sebagaimana grafik berikut.

Gambar 3.6.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

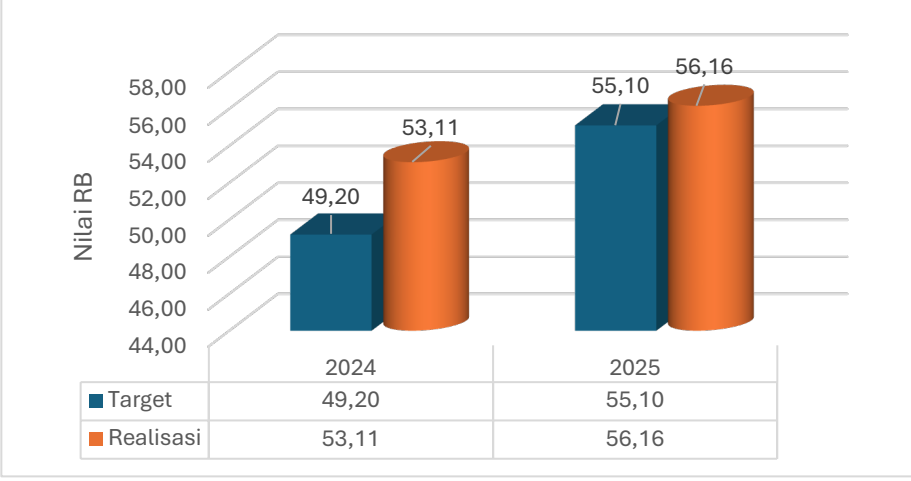

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026 dan data dioleh oleh Bapelitbang 2026

Komponen-komponen penilaian indeks refomasi birokrasi Kabupaten kepulauan Aru tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Penilaian	Bobot Tahun 2024	Nilai Tahun 2024	Bobot Tahun 2025	Nilai Tahun 2025
1	RB General	100	47.07	100	48,84
2	RB Tematik	20	6.04	20	7,32
3	Indeks RB	120	**53.11**	120	**56,16**

Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2026

7. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keharmonisan hubungan antarumat beragama di daerah tersebut. Indeks ini umumnya mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menilai tiga dimensi utama: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Secara umum, kondisi kerukunan di daerah ini menunjukkan kecenderungan yang cukup baik, ditandai dengan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, saling menghormati perbedaan keyakinan, serta minimnya konflik berbasis agama. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, tokoh agama, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Nilai indeks kerukunan umat beragama menjadi penting di Kabupaten Kepulauan Aru, yang memiliki keberagaman agama seperti Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Pada tahun 2025, Kabupaten Kepulauan Aru belum merupakan sampel survei indeks kerukunan umat beragama pada Kementerian Agama, namun jika memperhatikan kondisi daerah dapat dijelaskan bahwa sikap toleransi antarumat beragama di Kabupaten Kepulauan Aru cukup tinggi, masing-masing umat beragama dapat melakukan aktivitas keagamaan dengan baik tanpa ada konflik keagamaan di tahun 2025. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat mampu menjaga hubungan harmonis meskipun berbeda latar belakang agama yang didukung oleh budaya masyarakat dengan menjunjung tinggi persaudaraan dan gotong royong. Selain itu, peran tokoh-tokoh masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah dalam membangun toleransi melalui kebijakan, pembinaan, fasilitasi dialog lintas iman dan memperkuat rasa saling menghormati, serta menjaga

stabilitas dan persatuan di antara keberagaman masyarakat. Selain itu, kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Aru terus dibangun secara karakter melalui pembinaan-pembinaan spiritual di tempat-tempat peribadatan.

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 mencapai 54,42 dari target 82,41. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru tersebut termasuk dalam kategori Buruk. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, yaitu 59,15 dengan kategori sedang, maka terdapat penurunan 4,73 poin. Perkembangan nilai/skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.7.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

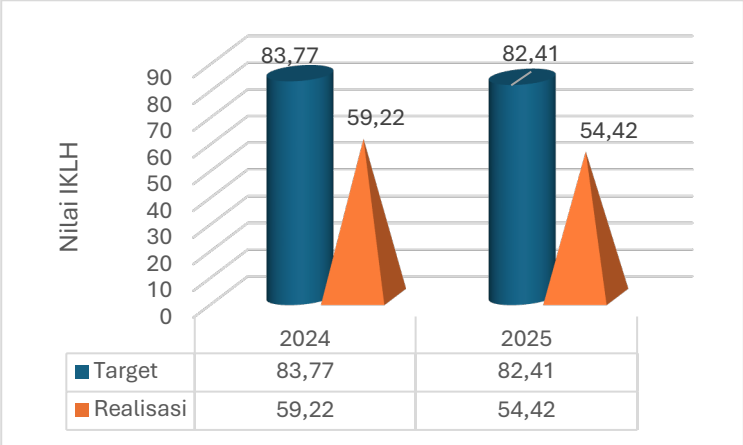

Sumber: Dinas Lingkungan, 2026 dan data Diolah Bapelitbang, 2026

Yang menjadi faktor pengurang dari tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disebabkan oleh adanya indikator yang menjadi dasar perhitungan IKLH tidak mencapai target, yakni Indeks Kualitas Air yang tidak dapat dihitung. Hal ini karena Kabupaten Kepulauan Aru tidak terdapat sungai air tawar. Indeks

Kualitas Udara senilai 81,00 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang memiliki angka sangat baik mencapai angka 98,70. Hal ini dikarenakan definisi operasional dari Indeks Kualitas Lahan yang harus menunjukkan penghijauan dari tajuk ke tajuk. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru hutan lindung masih sangat terjaga dan terlindung dari berbagai aktivitas masyarakat. Komponen–komponen yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR	SKOR
Indeks Kualitas Air (IKA)	-
Indeks Kualitas Udara	81,00
Indeks Kualitas Tutpan Lahan/Vegetasi (IKL)	98,70

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kep.Aru, 2026

9. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 terealisasi sebesar Rp847.265.695.315,71 atau 91,15 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp929.450,061.934,97. Rincian pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Kontribusi terhadap Pedapatan Daerah
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	42.350.061.249,97	35.645.693.127,71	84,16	4,21
2	Pendapatan Transfer	882.100.000.685,00	778.604.582.015,00	88,26	91,90
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	5.499.777.507,00	109,99	0,65
PENDAPATAN DAERAH		**929.450.061.934,97**	**847.265.695.315,71**	**91,15**	

Sumber: BPKAD dan Bapelitbang diolah 2026 sebelum hasil audit BPK

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Pendapatan Daerah berada di bawah 5 persen yakni 4,21 persen. Hal menunjukkan bahwa sumber pendapatan yang dihasilkan langsung oleh daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan persentase dana transfer dari pemerintah pusat yakni sebesar 91,90 persen. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti optimalisasi sektor perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya yang banyak terdapat di wilayah Kepulauan Aru.

Rendahnya kontribusi PAD juga berarti pemerintah daerah memiliki ruang besar untuk memperkuat kebijakan fiskal, meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah, pajak daerah, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meskipun saat ini kontribusi PAD masih minim, hal ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan agar ke depannya Kabupaten Kepulauan Aru semakin mandiri secara ekonomi dan mampu membiayai layanan publik yang lebih baik tanpa terlalu bergantung pada dana transfer.

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan mencapai target tahun 2025 dan mengalami peningkatan di tahun 2025. Realisasi PAD terhadap kontribusi pendapatan sebesar 4,21 persen dari target 3,76 persen. Apabila dibandingkan dengan capain tahun 2024 yang sebesar 3,86 persen,, maka terdapat kenaikan sebesar 0,35 persen. Capaian dan target kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.8.
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

Sumber: BPKAD, 2026 dan data Diolah Bapelitbang, 2026

3.1.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD), merupakan ukuran keberhasilan terhadap penyelenggaraan program Perangkat Daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025–2029, IKD menjadi tolak ukur keberhasilan Program Perangkat Daerah, capaian hasil keberhasilan kinerja pada Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi adalah aspek yang menggambarkan kondisi wilayah dan kondisi penduduk suatu daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. Aspek ini penting karena kondisi geografis mempengaruhi aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, dan potensi ekonomi daerah**.** Beberapa indikator aspek geografi yang ditetpakan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru dapat diuraikan di bawah ini.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan jumlah penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu, yang dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Angka ini dihitung berdasarkan perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan).

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 relatif stabil. Pergerakan jumlah penduduk, selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data Kementerian Dalam Negeri. Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru per kecamatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

No	Kecamatan	2024	2025	Pertumbuhan
1	Pulau – Pulau Aru	54.433	55.284	2,21
2	Aru Selatan	8.216	8.570	1,38
3	Aru Tengah	13.971	14.501	0,70
4	Aru Utara	6.724	6.966	1,43
5	Aru Utara Timur	5.209	5.342	1,85
6	Sir-Sir	3.622	3.674	2,07
7	Aru Tengah Timur	5.185	5.387	1,59
8	Aru Tengah Selatan	6.426	6.610	1,51
9	Aru Selatan Timur	4.844	5.105	2,67
10	Aru Selatan Utara	3.901	4.072	0,83
Jumlah		**112.531**	**115.511**	**1,78**

Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil,2026

Pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, pertumbuhan penduduk Kaupaten Kepulauan Aru berada pada angka 1,78 persen. Pada tahun 2025, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Aru Selatan Timur, diikuti oleh kecamatan Pulau-Pulau Aru sebesar 2,21 persen dan Kecamatan Sir-Sir yakni sebesar 2,07 persen. Jika dibandingkan dengan target yang tersedia dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 belum mencapai target sebesar 2,98 persen, namun harus diwaspadai bahwa laju pertumbuhan penduduk harus diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali dan seimbang, pertumbuhan ekonomi dan pasar, penambahan jumlah tenaga kerja yang produktif dan peningkatan pembangunan daerah, sehingga tidak meningkatkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin serta penambahan pengangguran di daerah.

2. Rasio Penduduk

Rasio penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan kelompok penduduk lainnya dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang digunakan untuk mengetahui struktur dan komposisi penduduk. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kondisi demografi masyarakat, seperti perbandingan antara laki-laki dan perempuan, antara penduduk usia produktif dan tidak produktif, maupun hubungan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Informasi mengenai rasio penduduk sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan fasilitas umum bagi masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, jumlah penduduk yang ber-NIK per 31 Desember tahun 2025 pada semester kedua sebesar 115.511 jiwa di 10 wilayah kecamatan. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD, maka target ini melampui, karena target yang ditetapkan sebesar 113.825. Komposisi penduduk menurut kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Rasio Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah
1.	Pulau-Pulau Aru	28.162	27.122	55.284	69,235
2.	Aru Selatan	4.340	4.230	8.570	26,919
3.	Aru Tengah	7.572	6.929	14.501	50,232
4.	Aru Utara	3.602	3.362	6.964	61,422
5.	Aru Utara Timur	2.748	2.594	5.342	192,414
6.	Sir-Sir	1.932	1.748	3.680	102,944
7.	Aru Tengah Timur	2.805	2.582	5.387	45,337
8.	Aru Tengah Selatan	3.423	3.185	6.608	104,075
9.	Aru Selatan Timur	2.556	2.549	5.105	78,901
10	Aru Selatan Utara	2.170	1.902	4.072	77,996
Kabupaten Kepulauan Aru		**59.310**	**56.203**	**115.511**	**809.473**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu. Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi atau persebaran penduduk di suatu daerah. Semakin besar jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah, maka semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Informasi mengenai kepadatan penduduk sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena dapat menjadi dasar dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, permukiman, serta pengelolaan sumber daya wilayah agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk Per Km²	Persentase Penduduk
1.	Pulau-Pulau Aru	28.162	27.122	55.284	59,99	7,42
2.	Aru Selatan	4.340	4.230	8.570	9,86	4,42
3.	Aru Tengah	7.572	6.929	14.501	10,18	3,53
4.	Aru Utara	3.602	3.362	6.964	12,66	12,55
5.	Aru Utara Timur	2.748	2.594	5.342	17,09	4,66
6.	Sir-Sir	1.932	1.748	3.680	6,85	5,72
7.	Aru Tengah Timur	2.805	2.582	5.387	7,86	47,86
8.	Aru Tengah Selatan	3.423	3.185	6.608	21,77	6,03
9.	Aru Selatan Timur	2.556	2.549	5.105	9,38	4,62
10	Aru Selatan Utara	2.170	1.902	4.072	8,16	3,18
Kabupaten Kepulauan Aru		**59.310**	**56.203**	**115.511**	**17,51**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

4. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi seluruh masyarakat. Indeks ini mencerminkan kondisi ketahanan pangan wilayah dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti ketersediaan bahan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta kualitas konsumsi pangan yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan.

Indeks Ketahanan Pangan kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 sebesar 45,16 poin. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka ada peningkatan sebesar 2,01 poin dari 43,15 poin. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 45,00 poin, maka capaian melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025. Bagi Kabupaten Kepulauan Aru, indeks ketahanan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena kondisi geografis wilayah kepulauan dapat mempengaruhi distribusi pangan, aksesibilitas, serta stabilitas ketersediaan pangan di setiap wilayah. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan perlu didukung melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, serta sistem distribusi pangan yang merata guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Capaian dan target Indeks Ketahanan Pangan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.9
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

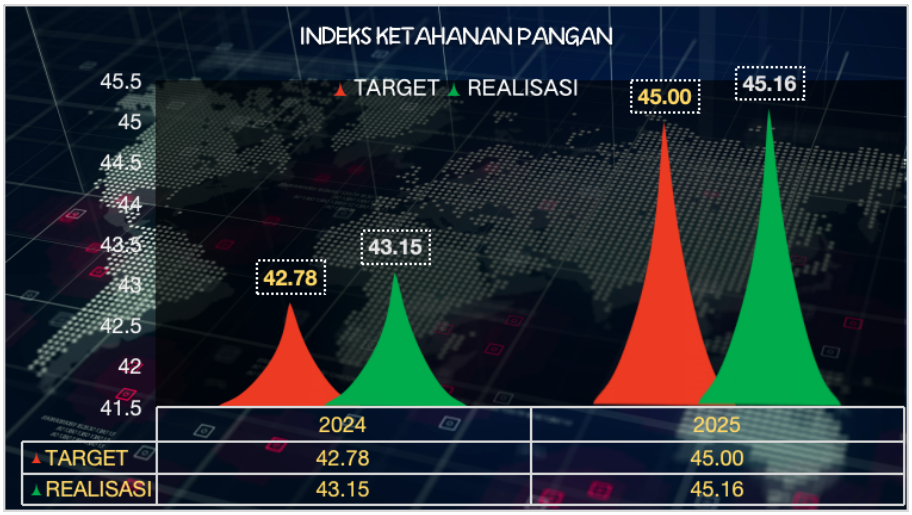

Sumber: Kementerian Ketahahan Pangan RI, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

5. Akes Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Pada tahun 2025, akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum mencapai 52,68 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 52,51 persen. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya perluasan layanan air minum yang dilakukan secara konsisten sepanjang tahun, terutama melalui penambahan jumlah rumah tangga yang terlayani di wilayah-wilayah prioritas yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan air minum mulai memberikan hasil, baik melalui pembangunan maupun peningkatan sarana dan prasarana air bersih, serta dukungan program penyediaan air minum berbasis masyarakat. Namun demikian, capaian ini masih memerlukan perhatian lebih lanjut mengingat akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum yang layak belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, khususnya pada daerah terpencil dan kepulauan. Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan akses air minum melalui; pengembangan infrastruktur air minum, peningkatan kualitas layanan penyedia air minum, serta perluasan cakupan pelayanan terutama pada wilayah yang belum terlayani. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak secara berkelanjutan.

Gambar 3.10
Akes Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Tahun 2024-2025

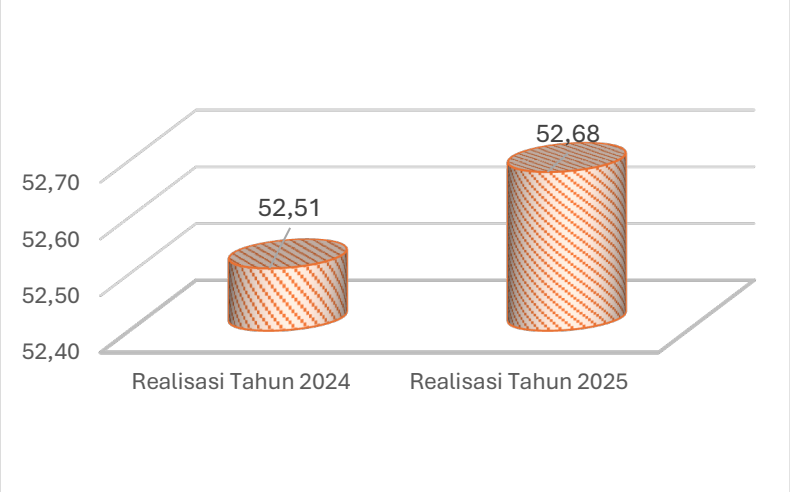

Sumber: Dinas PUPR, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

6. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 182 persen. Adapun realisasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 183,8 persen, dan pada tahun 2025 realisasi masih berada pada angka yang sama, yaitu 183,8 persen, berada pada kelas 2 dengan kategori Risiko Bencana Sedang, berdasarkan data pada *platform* InaRISK (https://inarisk.bnpb.go.id/irbi). Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan, karena tidak terjadi penurunan nilai IRB sesuai yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana daerah masih relatif sama dengan tahun sebelumnya. Tidak berubahnya nilai IRB tersebut disebabkan oleh belum adanya peningkatan signifikan pada komponen kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, serta belum dilakukannya pembaruan kajian risiko bencana dan data pendukung lainnya yang menjadi dasar penghitungan indeks.

Karakteristik IRB sebagai indeks makro menyebabkan nilainya cenderung tetap apabila tidak terdapat intervensi yang terukur pada aspek bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Ke depan, untuk mencapai target penurunan IRB, Pemerintah Daerah akan melakukan langkah-langkah strategis melalui penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, peningkatan program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat seperti pengembangan desa tangguh bencana, penyediaan sistem peringatan dini, serta pembaruan kajian risiko bencana. Selain itu, integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah akan terus ditingkatkan agar upaya penurunan risiko bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur.

Tabel 3.11
Indeks Risiko Bencana Tahun 2024-2025

IRB Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
182,80	182,00	183,80	-

7. Indeks Ketahanan Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan ketahanan terhadap bencana yang ditandai dengan kenaikan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,02, dari 0,33 pada tahun sebelumnya menjadi 0,35. Peningkatan ini

mencerminkan adanya perbaikan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana, meskipun masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Berdasarkan klasifikasi IKD, nilai kurang dari 0,40 termasuk kategori rendah, nilai 0,41–0,80 termasuk kategori sedang, dan nilai lebih dari 0,80 termasuk kategori tinggi. Dengan demikian, capaian IKD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 yang sebesar 0,35 masih berada pada kategori rendah, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Kenaikan nilai IKD tersebut dipengaruhi oleh beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain melalui Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparatur. Selain itu, penetapan Surat Keputusan (SK) Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) turut memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di daerah.

Selanjutnya, penyusunan draf Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana menjadi langkah strategis dalam memperkuat aspek regulasi, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki dasar hukum yang lebih jelas, terarah, dan berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan ketahanan daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas regulasi, serta perluasan implementasi program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, sehingga ketahanan daerah terhadap bencana dapat meningkat secara bertahap menuju kategori yang lebih baik.

Tabel 3.12
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

IKD Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%) Tahun 2025
0,33	0,35	0,35	100

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah berbagai dimensi atau indikator yang digunakan untuk menilai kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu komunitas atau wilayah. Aspek ini mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

dasar, memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang ada dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 sebesar 2,10 persen, meningkat 0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1,87 Persen. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 1,78 persen, maka capaian tahun 2025 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2025 meningkat 1.981 orang menjadi sebanyak 49.301 orang dibandingkan tahun 2024 yakni sebesar 47.657. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 61,64 persen, turun 0,22 persen dibandingkan TPAK tahun 2024 sebesar 61,86 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 48.286 orang atau bertambah 1.503 orang dibandingkan tahun 2024. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan non formal. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

NO	URAIAN	TAHUN	
		2024	2025
1	Penduduk Usia Kerja	77.044	70.981
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,86	61,64
3	Angkatan Kerja	47.657	49.301
4	Bekerja	46.783	48.286
5	Pengangguran	874	1.033
6	Bukan Angkatan Kerja	29.387	30.680
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,87	2,10
8	Tingkat Kesempatan Kerja	98,17	97,94

Sumber: BPS Kab. Kep. Aru, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

2. Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini Rasio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan Tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa.

Perkembangan Indeks Gini Rasio yang dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 0,306 poin menunjukkan bahwa indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 0,278 poin. Selain itu jika dibandingkan dengan tahun 2024 capaian Gini rasio mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 0,014 poin. Peningkatan dan Selisih antara capaian dan target ini menggambarkan bahwa masih terdapat kesenjangan kinerja yang perlu diperbaiki melalui kebijakan dan program yang lebih efektif. Angka 0,306 yang berada di atas target 0,278 mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dalam menekan atau menyesuaikan rasio sesuai sasaran yang direncanakan. Oleh karena itu tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus penguatan sektor-sektor prioritas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal seperti perikanan dan UMKM menjadi langkah penting untuk memperbaiki capaian indikator. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar setiap kebijakan berjalan efektif. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang konsisten, serta komitmen bersama, diharapkan rasio tersebut dapat ditekan hingga mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.11
Indeks Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

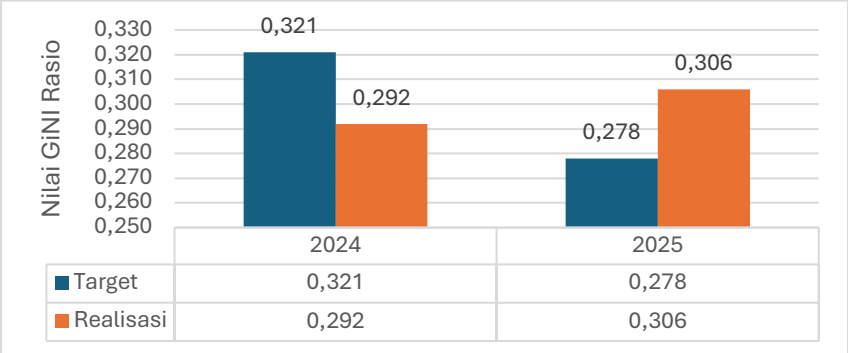

Sumber: BPS Kab.Kep.Aru, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

3. Angka Harapan Hidup

Tolak ukur dari tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 mencapai 70,60 tahun, melampaui target yang ditetapkan yakni 64 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 70,40 tahun (dengan menggunakan dasar penghitungan sensus penduduk 2020), maka capaian AHH tahun 2024 meningkat 0,20 poin atau 0,28 persen.

Capaian di atas menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil. Perbaikan akses dan mutu pelayanan Kesehatan yang telah dilaksanakan berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Kepulauan Aru ke arah yang lebih baik. Adapun tren capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru selama dua tahun terakhir tergambar sebagai berikut.

Gambar 3.12
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

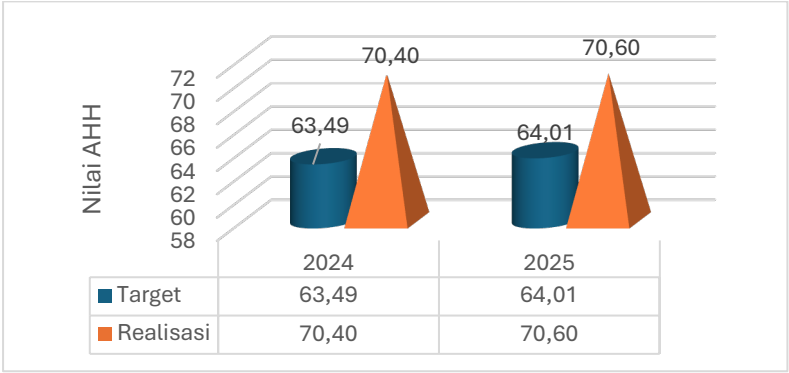

Sumber: BPS Kab. Kep. Aru, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

4. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengukur keberhasilan di bidang pendidikan adalah dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Biasanya masalah yang sangat pokok berkaitan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah akses penduduk terhadap berbagai fasilitas pendidikan yang tersedia, disamping kemampuan ekonomi yang merupakan faktor penentu utama.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya APS berarti menunjukkan adanya keberhasilan bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan Pendidikan.

Pada tahun 2025, Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,40 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yakni sebesar 100 persen mengalami penurunan sebesar 0,6 persen. Sedangkan Kelompok umur 13-15 tahun sebesar 99,50 persen, menurun juga dibandingkan dengan tahun 2025 yakni sebesar 100 persen. Namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2025 makan capian ini melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar yakni sebesar 98,79 persen. Perkembangan Angka partisipasi sekolah tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.13
Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur
Tahun 2024-2025

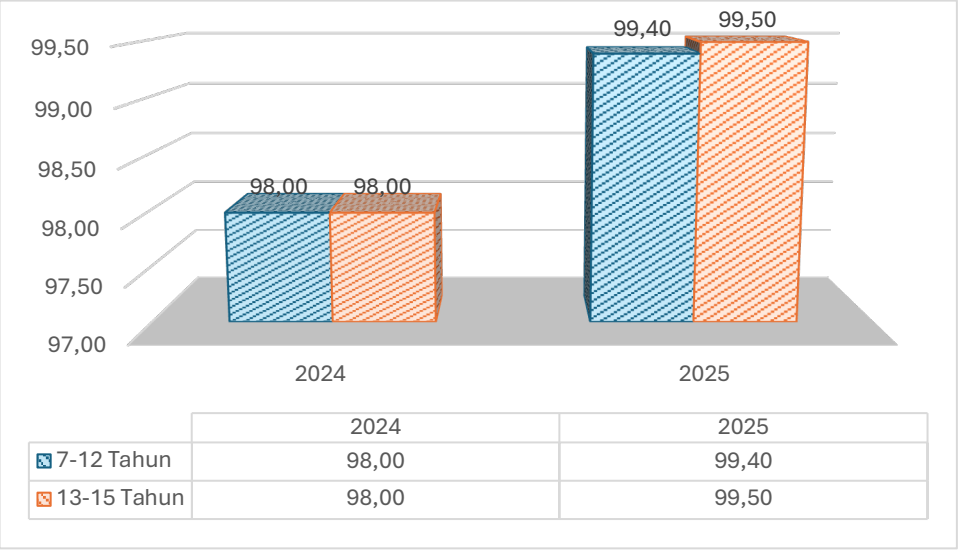

	2024	2025
7-12 Tahun	98,00	99,40
13-15 Tahun	98,00	99,50

Sumber: BPS Kab. Kep. Aru, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

5. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata–Rata Lama Sekolah (RTLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Rata–Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 mencapai 9,46 tahun dari target 9,21 tahun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 9,21 tahun, rata-rata lama sekolah tahun 2025 mengalami peningkatan. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,25 tahun, dari 9,21 tahun menjadi 9,49 tahun pada tahun 2025. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Aru disebabkan bebera faktor yang berkaitan dengan perkembangan sektor pendidikan, meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan setiap tahunnya serta bertambahnya partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan formal. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti penambahan sekolah dan fasilitas belajar, turut mendorong masyarakat untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, berbagai program pemerintah seperti wajib belajar dan bantuan pendidikan juga membantu mengurangi angka putus sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan rata-rata lama sekolah masyarakat meningkat dari tahun ke tahun, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Aru. Perkembangan rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.14
Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

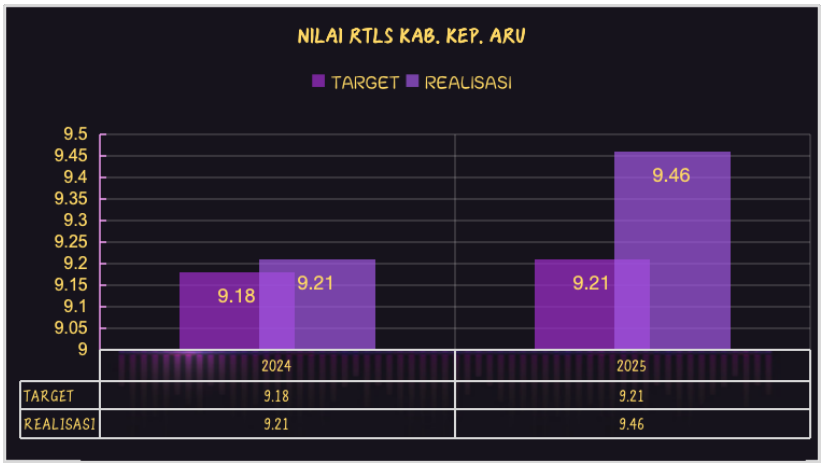

Sumber: BPS Kab.Kep.Aru, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

6. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 mencapai 12,51 tahun dari target 12,78. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahan 2024, harapan lama sekolah juga mengalami penurunan sebesar 0,4 tahun dari nilai 12,91 tahun di tahun 2024. Tidak tercapainya harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Kepulauan Aru dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan akses pendidikan di wilayah tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti jumlah sekolah yang masih terbatas terutama di daerah pulau-pulau kecil, menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, kondisi geografis yang berupa kepulauan membuat akses menuju sekolah sering kali sulit dan membutuhkan biaya serta waktu yang lebih lama. Faktor ekonomi keluarga juga turut mempengaruhi, dimana sebagian anak harus membantu orang tua bekerja sehingga berpotensi mengalami putus sekolah. Kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendukung pembelajaran juga dapat menghambat keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan harapan lama sekolah belum dapat tercapai secara optimal di Kabupaten Kepulauan Aru. Perkembangan harapan lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.15
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

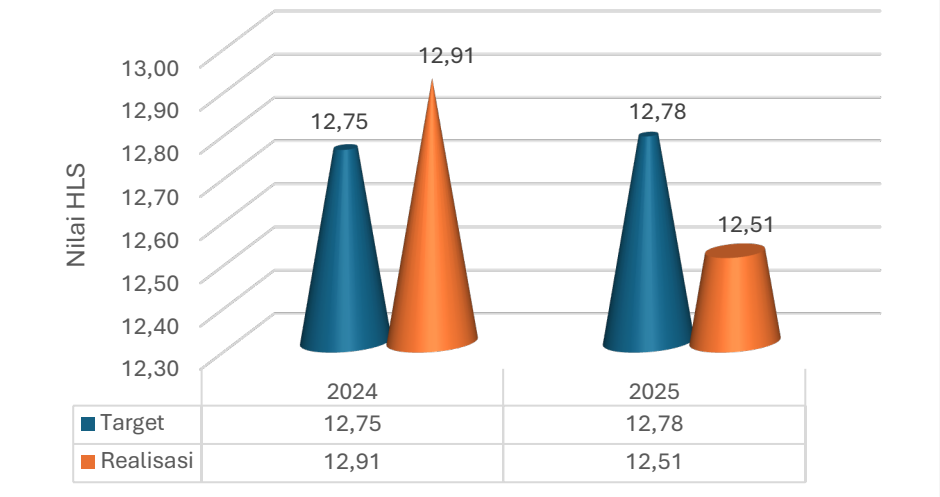

Sumber: BPS Kab.Kep.Aru, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

7. Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM, dan Rata-Rata Lama Sekolah. Sedangkan Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau dapat dikatakan Indeks Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan pencapaian AMH dan Rata-rata Lama Sekolah.

Pada tahun 2025, Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru berada pada angka 10,99 poin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 10,79 poin. Jika dibandingkan dengan target yang dotetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029, maka indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru tercapai dengan target yang dtepakan sebesar 10,85 poin dan mengalami peningkatan 0,20 poin di tahun 2024. Indeks Pendidikan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut.

Gambar 3.16
Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

Sumber: BPS Kab.Kep.Aru, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

8. Prevalensi Stunting

Prevalensi balita stunting adalah persentase atau proporsi anak balita (usia 0-59 bulan) yang mengalami stunting dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (sejak janin hingga usia 2 tahun). Ciri utama stunting dapat dilihat pada kondisi anak dengan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya serta terjadinya kekurangan gizi dalam waktu lama dan bukan hanya sementara.

Di Kabupaten Kepulauan Aru sendiri, Prevalensi Balita Stunting merupakan salah satu permasalahan *urgent* yang harus diperhatikan, sehingga diperlukan keseriusan dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya pencegahan dan penurunan stunting yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan berbagai upaya Intervenasi Spesifik dan Sensitif berupa Program Pencegahan dan Penanganan Balita Stunting terutama balita gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Kepulauan Aru, didukung pula dengan adanya pemanfaatan kader-kader posyandu, dan petugas gizi di setiap Puskesmas dalam melaksanakan monitoring dan pendampingan bagi setiap balita yang mengalami gizi buruk maupun gizi kurang. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna menurunkan angka stunting. Pada tahun 2024, Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Kepulauan Aru berada pada angka 15,64 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2025 yaitu pada angka 6,64 persen. Angka Prevalensi Stunting Tahun 2024-2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.17
Prevalensi Balita Stunting Tahun 2024-2025

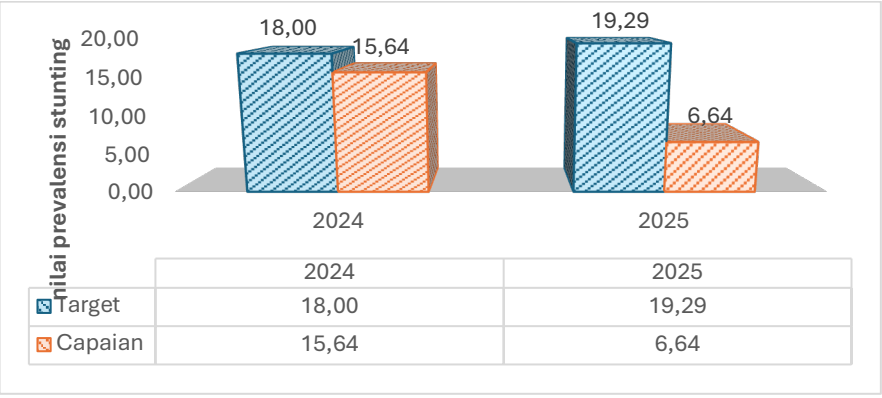

	2024	2025
Target	18,00	19,29
Capaian	15,64	6,64

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

9. Prevalensi HIV/AIDS

Prevalensi HIV AIDS merupakan tren yang lagi marak di bidang kesehatan serta merupakan isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena merupakan masalah yang cukup serius yang berkembang dalam masyarakat saat ini.

Prevalensi HIV/AIDS sendiri adalah jumlah seluruh orang yang hidup dengan HIV atau AIDS dalam suatu populasi pada waktu tertentu, baik yang baru terinfeksi maupun yang sudah lama terdiagnosis. Prevalensi digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran HIV/AIDS di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Data prevalensi biasanya dinyatakan dalam persentase atau per jumlah penduduk tertentu, misalnya per 1.000 atau 100.000 penduduk. Informasi ini sangat penting dalam bidang kesehatan masyarakat karena dapat membantu pemerintah dan tenaga kesehatan dalam merencanakan program pencegahan, pengobatan, serta pengendalian HIV/AIDS agar penyebaran penyakit dapat ditekan dan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV/AIDS dapat ditingkatkan. Di Kabupaten Kepulauan Aru saat ini Prevalensi HIV/AIDS mencapai 0,05 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, angka tersebut mengalami penurunan dari 0,06. Data capaian Prevalensi HIV/AIDS adapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.18
Prevalensi HIV AIDS Tahun 2024-2025

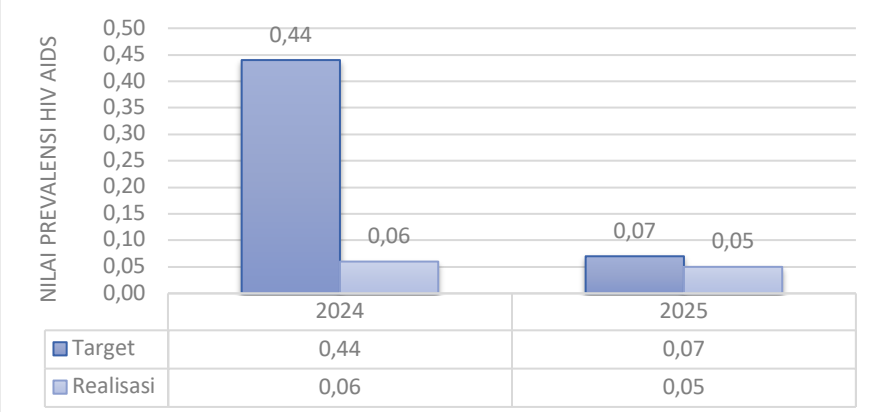

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan adalah tingkat atau persentase jumlah penduduk yang telah terdaftar dan menjadi peserta dalam program jaminan kesehatan dibandingkan dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah. Cakupan ini menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki perlindungan terhadap risiko biaya pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan, baik yang diselenggarakan

oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang terjamin dan terjangkau. Oleh karena itu, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan program perlindungan kesehatan dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru saat ini telah melakukan program bantuan jaminan kesehatan yang merupakan upaya untuk membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu, agar dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang tinggi. Pemerintah daerah biasanya memberikan dukungan melalui program jaminan kesehatan daerah atau dengan membayarkan iuran kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, menjamin pemerataan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit dengan lebih mudah dan terjangkau. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan target unutk Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan adalah sebesar 81,5 Persen dan realisasinya cukup tinggi yaitu sebesar 98,1 persen. Pada tahun 2025 target yang ditetapkan yaitu 94,00 dan realisasinya 100 persen. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah serius dalam menangani jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.19
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Tahun 2024-2025

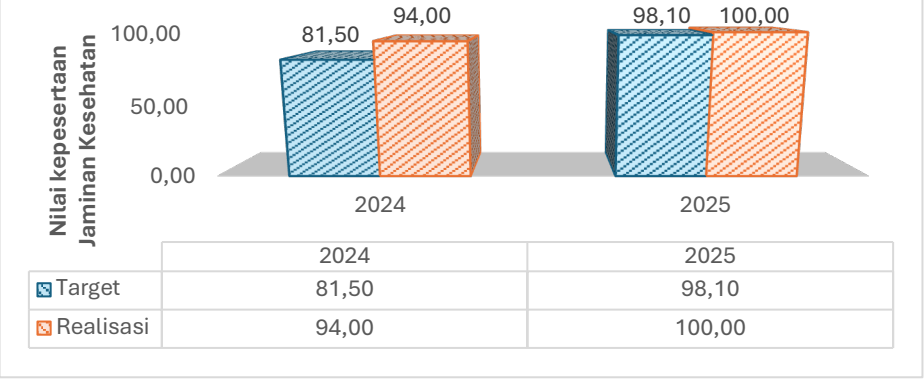

	2024	2025
Target	81,50	98,10
Realisasi	94,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

11. Skor Literasi

Skor literasi merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memahami, menggunakan, serta mengolah informasi yang diperoleh melalui kegiatan membaca dan menulis. Skor Literasi adalah nilai atau ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan siswa dalam membaca, memahami, dan menggunakan informasi dari teks tertulis. Skor ini biasanya diperoleh melalui kegiatan penilaian atau asesmen yang dilakukan di sekolah, baik melalui ujian nasional, asesmen kompetensi, maupun survei pendidikan lainnya. Penilaian literasi pada tingkat sekolah tidak hanya mengukur kemampuan membaca secara teknis, tetapi juga kemampuan memahami isi bacaan, menarik kesimpulan, serta menghubungkan informasi yang diperoleh dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan Raport Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Skor Literasi pada tahun 2024 berada pada angka 46,33 persen. Angka ini meningkat dari target yang ingin dicapai yaitu 43,58 persen. Namun pada tahun 2025, mengalami penurunan yaitu menjadi 43,57 persen dari target yang ingin dicapai yaitu 45,38 persen. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya minat baca siswa, keterbatasan bahan bacaan di sekolah, metode pembelajaran yang kurang mendorong kemampuan literasi, serta kurangnya dukungan lingkungan keluarga dalam membiasakan kegiatan membaca. Oleh karena ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, yaitu dengan memperkuat program literasi sekolah, meningkatkan kompotensi guru dalam mengajarkan kemampuan membaca dan memahami teks serta memastikan proses pembelajaran yang mendorong kemampuan berpikir siswa. Serta upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu mendorong gerakan budaya membaca di masyarakat. Perkembangan Skor Literasi di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.20
Skor Literasi Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

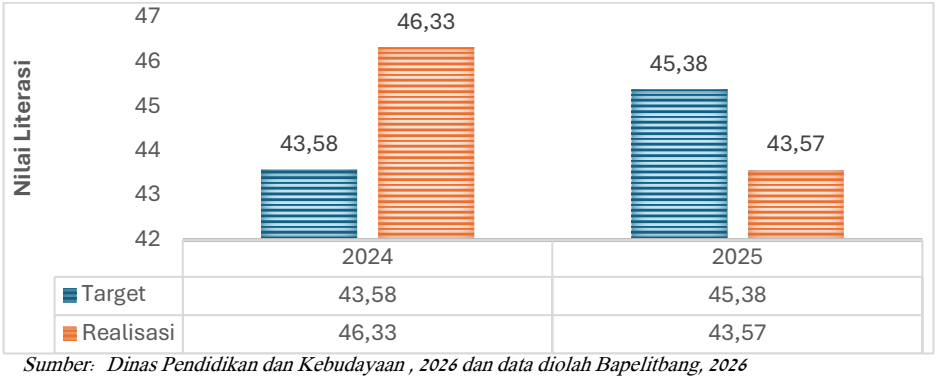

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

12. Skor Numerasi

Skor numerasi adalah nilai atau ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan seseorang, khususnya siswa, dalam memahami dan menggunakan konsep-konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan berhitung, tetapi juga mencakup kemampuan memahami angka, menafsirkan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, serta menggunakan penalaran matematika untuk memecahkan berbagai permasalahan. Skor numerasi biasanya diperoleh melalui kegiatan asesmen atau evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam berpikir logis, menganalisis informasi kuantitatif xdan menerapkan konsep matematika dalam berbagai situasi. Nilai skor numerasi yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah yang baik dalam bidang matematika, sedangkan skor yang rendah dapat menjadi indikator perlunya peningkatan dalam proses pembelajaran dan penguatan kemampuan numerasi.

Kemampuan Numerasi di Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2024 berada pada angka 46,13 persen, meningkat dari target yang ingin di capai yaitu 44,29 persen, namun menurun pada tahun 2025 menjadi 44,28 persen dari target yang ingin di capai yaitu 46,49 persen. Menurunnya nagka numerasi pada sekolah disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan proses pembelajaran, lingkungan belajar serta kondisi siswa. Namun salah satu faktor utama yang berkaitan dengan menurunnya angka numerasi adalah metode pembelajaran matematika yang kurang efektif. Oleh karena itu, menjadi perhatian pemerintah daerah untuk tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian numerasi siswa yaitu dengan memantau hasil asesmen pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan sarana yang memadai. Perkembangan Skor Numerasi di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.21
Skor Numerasi Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

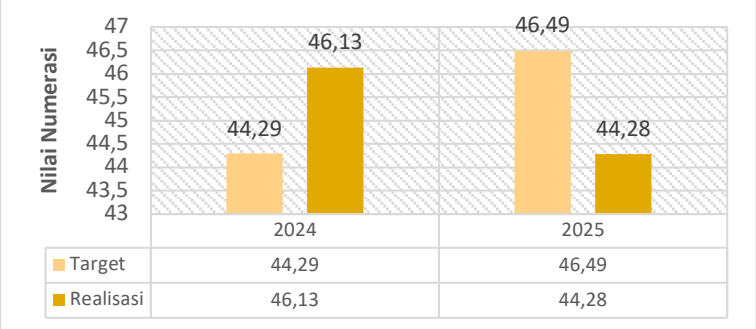

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

13. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbedaan kesempatan dan akses yang dimiliki oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan. Semakin tinggi nilai Indeks Ketimpangan Gender, maka menunjukkan semakin besar kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, nilai indeks yang lebih rendah menunjukkan kondisi kesetaraan gender yang lebih baik. Indeks ini penting digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta peran dalam pembangunan masyarakat.

Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kepulauan Aru untuk tahun 2023 berada pada 0,61 persen dan di tahun 2024 menurun menjadi 0,59 persen hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan semakin berkurang. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan dalam hal akses dan kesempatan bagi perempuan, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2023 dan 2024 belum menetapkan target yang akan di capai, sedangkan untuk Tahun 2025 akan dirilis pada bulan Juli 2026 dengan terget yang ingin dicapai yaitu pada angka 0,52 persen.

14. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Nilai IPG menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki kesempatan dan akses yang setara dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Semakin mendekati angka 100, maka menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil atau semakin setara. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Gender menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam menilai keberhasilan

pembangunan yang responsif gender serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun 2023 mencapai angka 89,16 persen meningkat dari target yang akan dicapai yaitu 67,67 persen, dan pada tahun 2024 mencapai 89,52 meningkat dari target yang ditetapkan yaitu 69,19 persen, sedangkan untuk target di tahun 2025 adalah 89,00 persen, namun realisasi belum ada karena akan dirilis pada bulan Juli 2026.

C. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah mengacu pada berbagai faktor yang menentukan kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Daya saing daerah lebih luas dan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut beberapa aspek kunci daya saing daerah.

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen yang dirancang untuk menilai tingkat daya saing pada level provinsi maupun kabupaten/kota, yang pada hakikatnya mencerminkan tingkat produktivitas daerah. Penilaian indikator ini dinilai oleh Badan Riset dan Inovasi Nnasional (BRIN) pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menyediakan data dasar tahunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan pembangunan. DSD 2025 disusun berdasarkan empat komponen utama daya saing yang kemudian dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing.

Komponen lingkungan pendukung terdiri atas empat pilar: institusi yang menilai dukungan sosial-politik-hukum terhadap aktivitas ekonomi; infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi bernilai tambah; adopsi TIK sebagai pendorong transformasi Industri 4.0; serta stabilitas ekonomi makro yang mencerminkan nilai tambah, akumulasi modal, konsumsi, kinerja ekonomi, dan biaya hidup. Komponen sumber daya manusia terdiri dari dua pilar: kesehatan, yang mencerminkan kualitas hidup melalui angka harapan hidup, dan keterampilan, yang berkaitan dengan penciptaan tenaga kerja produktif sesuai kebutuhan dunia usaha.

Komponen pasar terdiri dari empat pilar: pasar produk, yang mendorong efisiensi produksi; pasar tenaga kerja, yang menekan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja; sistem keuangan, yang mencerminkan kemampuan lembaga finansial memediasi aktivitas

ekonomi; dan ukuran pasar yang memperkuat struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah dari perkembangan iptek; dan komponen ekosistem inovasi terdiri dari dua pilar: dinamika bisnis yang mencerminkan kemudahan masuk (*entry*) dan keluar (*exit*) entitas bisnis, serta kapabilitas inovasi, yang mengukur kemampuan daerah dalam menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.

Pada tahun 2025 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 2,79 poin. Indeks ini meningkat o,33 poin dari indeks tahun 2024 sebesar 2,46 poin. Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 beserta penilaian masing-masing pilar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.22
Indeks Daya Saing Kabupaten Kepulaua Aru dan Daerah Lainnya
di Provinsi Maluku Tahun 2025

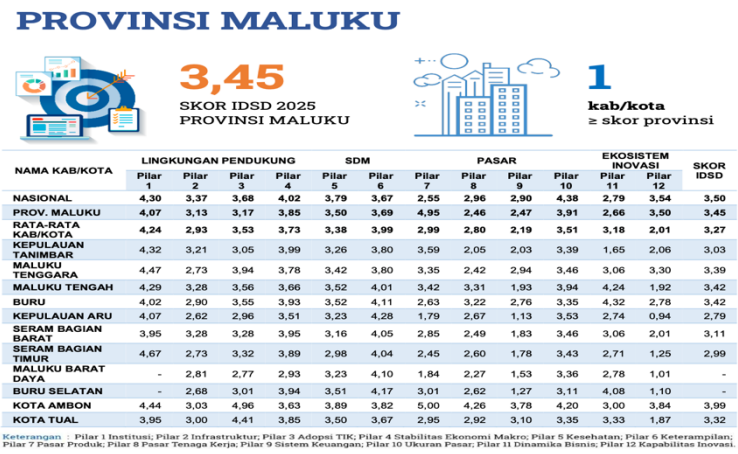

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,30	3,37	3,68	4,02	3,79	3,67	2,55	2,96	2,90	4,38	2,79	3,54	3,50
PROV. MALUKU	4,07	3,13	3,17	3,85	3,50	3,69	4,95	2,46	2,47	3,91	2,66	3,50	3,45
RATA-RATA KAB/KOTA	4,24	2,93	3,53	3,73	3,38	3,99	2,99	2,80	2,19	3,51	3,18	2,01	3,27
KEPULAUAN TANIMBAR	4,32	3,21	3,05	3,99	3,26	3,80	3,59	2,05	2,03	3,39	1,65	2,06	3,03
MALUKU TENGGARA	4,47	2,73	3,94	3,78	3,42	3,80	3,35	2,42	2,94	3,46	3,06	3,30	3,39
MALUKU TENGAH	4,29	3,28	3,56	3,66	3,52	4,01	3,42	3,31	1,93	3,94	4,24	1,92	3,42
BURU	4,02	2,90	3,55	3,93	3,52	4,11	2,63	3,22	2,76	3,35	4,32	2,78	3,42
KEPULAUAN ARU	4,07	2,62	2,96	3,51	3,23	4,28	1,79	2,67	1,13	3,53	2,74	0,94	2,79
SERAM BAGIAN BARAT	3,95	3,28	3,28	3,95	3,16	4,05	2,85	2,49	1,83	3,46	3,06	2,01	3,11
SERAM BAGIAN TIMUR	4,67	2,73	3,32	3,89	2,98	4,04	2,45	2,60	1,78	3,43	2,71	1,25	2,99
MALUKU BARAT DAYA	-	2,81	2,77	2,93	3,23	4,10	1,84	2,27	1,53	3,36	2,78	1,01	-
BURU SELATAN	-	2,68	3,01	3,94	3,51	4,17	3,01	2,62	1,27	3,11	4,08	1,10	-
KOTA AMBON	4,44	3,03	4,96	3,63	3,89	3,82	5,00	4,26	3,78	4,20	3,00	3,84	3,99
KOTA TUAL	3,95	3,00	4,41	3,85	3,50	3,67	2,95	2,92	3,10	3,35	3,33	1,87	3,32

Keterangan : Pilar 1 Institusi; Pilar 2 Infrastruktur; Pilar 3 Adopsi TIK; Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro; Pilar 5 Kesehatan; Pilar 6 Keterampilan; Pilar 7 Pasar Produk; Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja; Pilar 9 Sistem Keuangan; Pilar 10 Ukuran Pasar; Pilar 11 Dinamika Bisnis; Pilar 12 Kapabilitas Inovasi.

Sumber: BRIN RI tahun 2026

2. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Maluku

Kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB Provinsi Maluku menunjukkan seberapa besar peran ekonomi kabupaten dalam struktur perekonomian provinsi, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK).

Pada tahun 2024, kontribusi tercatat sebesar 7,60 persen, yang berarti kabupaten telah memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap total PDRB Provinsi Maluku. Selanjutnya, pada tahun 2025, kontribusi meningkat menjadi 7,73 persen, dan capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 7,48 persen. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 0,25 poin dari target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 lebih baik dari yang direncanakan, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan sektor-sektor unggulan, serta kenaikan nilai produksi dan harga

komoditas. Peningkatan kontribusi dari tahun 2024 ke 2025 serta keberhasilan melampaui target menunjukkan bahwa peran kabupaten dalam perekonomian Provinsi Maluku semakin kuat secara nominal, dan mencerminkan kinerja pembangunan ekonomi daerah yang cukup positif. Perkembangan Kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Kontribusi PDRB Kabupaten kepulauan Aru
terhadap PDRB Provinsi Maluku Tahun 2024-2025

No	Uraian	Target	2024	2025
1.	PDRB Kabupaten (ADHB) (%)	-	4.761,49	5.123,71
2.	PDRB Provinsi Maluku (ADHB) (%)	-	62.647,51	66.313,12
PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (ADHB) (%)		7,48	7,60	7,73

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru & BPS Provinsi Maluku, data diolah Bapelitbang,2026

3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur peran sektor industri dalam struktur perekonomian daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan industri pengolahan terhadap total PDRB. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar pula peranan sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah dari bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi.

Dalam perkembangannya, rasio PDRB industri pengolahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan bahan baku, investasi, infrastruktur, teknologi serta kualitas sumber daya manusia. Peningkatan rasio ini umumnya mencerminkan adanya transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder yang lebih produktif. Sebaliknya, apabila rasio mengalami penurunan, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya perlambatan aktivitas industri atau pergeseran struktur ekonomi ke sektor lain.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penguatan sektor industri pengolahan melalui kebijakan yang mendukung kemudahan investasi, pengembangan kawasan industri, peningkatan daya saing produk, serta penguatan hilirisasi. Dengan demikian, rasio PDRB industri pengolahan diharapkan terus meningkat dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Berikut dapat dilihat target capaian rasio PDRB industri pengolahan tahun 2024-2025 sebagai berikut.

Gambar 3.23
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

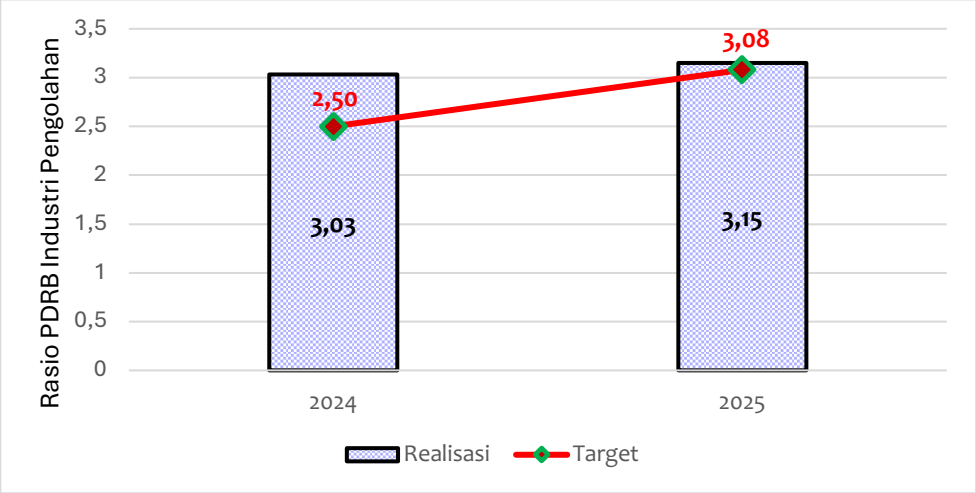

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru , 2026, & Bapelitbang, 2026 (data diolah)

4. Rasio PDRB Akomodasi, Makanan dan Minuman

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor akomodasi, makanan dan minuman merupakan indikator yang digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB daerah. Sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi seperti hotel dan penginapan, serta usaha penyediaan makanan dan minuman seperti restoran, rumah makan, serta jasa boga. Semakin tinggi nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin besar pula peran sektor ini dalam mendukung perekonomian daerah.

Perkembangan rasio PDRB akomodasi, makanan dan minuman sangat dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, mobilitas penduduk, serta pertumbuhan jasa. Peningkatan rasio umum menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap layanan akomodasi dan konsumsi makanan minuman, yang berdampak positif terhadap pendapatan pelaku usaha serta penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan rasio dapat mengindikasikan melemahnya aktivitas ekonomi di sektor jasa, yang bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penguatan sektor ini melalui pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan upaya tersebut, sektor akomodasi, makanan dan minuman diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur perekonomian daerah secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut, yang mana pada tahun 2024 capaian pada rasio PDRB akomodasi, makanan dan minuman di Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 11,81

persen dari target 10,52 persen sedikit mengalami peningkatan, namun pada tahun 2025 capaiannya meningkat hingga 35,94 persen dari target 12,05 persen.

Gambar 3.24
Rasio PDRB Akomodasi, Makanan dan Minuman Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

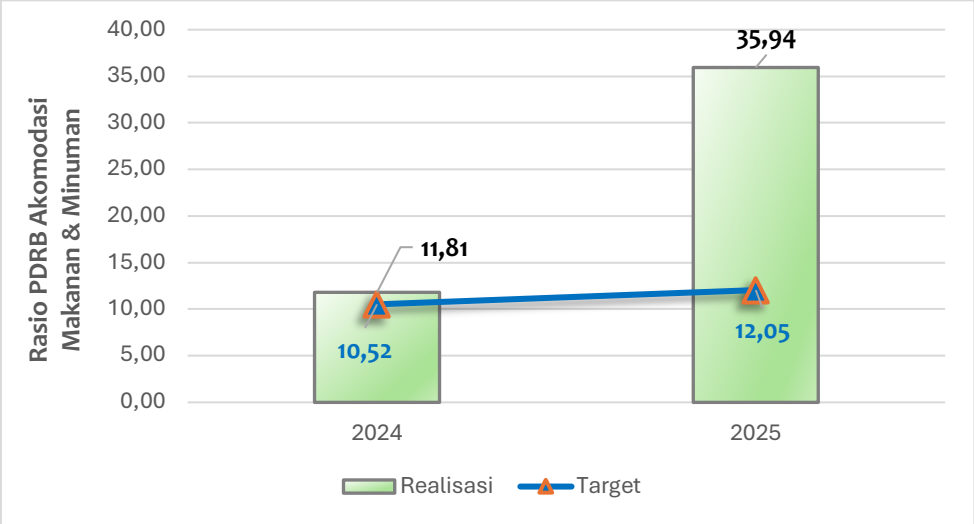

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru , data diolah Bapelitbang, 2026

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

LPE pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kinerja sektor primer yang berperan strategis dalam perekonomian daerah. Sektor ini tidak hanya menjadi penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, tetapi juga menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat, khususnya wilayah perdesaan di Kabupaten Kepulauan Aru.

LPE kategori pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan adanya perbaikan kinerja sektor primer secara berkelanjutan. Peningkatanan ini menandakan bahwa sektor tersebut semakin produktif dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Kenaikan LPE umumnya didorong oleh meningkatnya produksi dan produktivitas pada berbagai subsektor, seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, mendukung kebijakan pemerintah seperti penyederhanaan regulasi, kemudahan distribusi sarana produksi (pupuk), serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi turut mempercepat aktivitas usaha pada sektor ini.

Di Kabupaten Kepulauan Aru LPE pada kategori ini meningkat dari target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.25
LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025

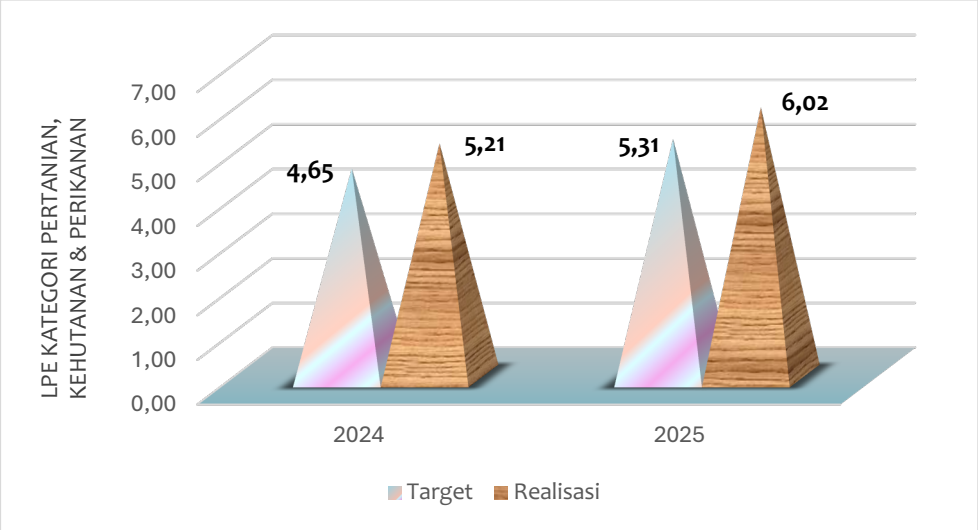

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru , data diolah Bapelitbang, 2026

Tren LPE yang terus meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan semakin resilien dan mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan dinamika pasar. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta pengelolaan yang berkelanjutan, sektor ini berpotensi terus tumbuh dan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Rasio Kewirausahaan

Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB merupakan indikator yang menunjukkan besarnya investasi fisik seperti pembangunan infrastruktur, Gedung, peralatan, dan mesin, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, target PMTB ditetapkan sebesar 27,00 persen dan berhasil terealisasi sebesar 27,86 persen, atau melampaui target sebesar 0,86 poin. Capaian ini mencerminkan bahwa aktivitas investasi di daerah cukup baik, didukung oleh meningkatnya pembangunan dan pengadaan asset tetap yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, pada tahun 2025 target PMTB ditingkatkan menjadi 28,00 persen, namun realisasinya hanya mencapai 26,50 persen, atau belum memenuhi target dengan selisih -1,50 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya perlambatan dalam aktivitas investasi, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penurunan minat investasi,

keterbatasan anggaran, maupun tantangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Kinerja PMTB menunjukkan capaian yang sangat baik pada tahun 2024, namun mengalami penurunan pada tahun 2025, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya mendorong kembali pertumbuhan investasi daerah.

Gambar 3.26
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

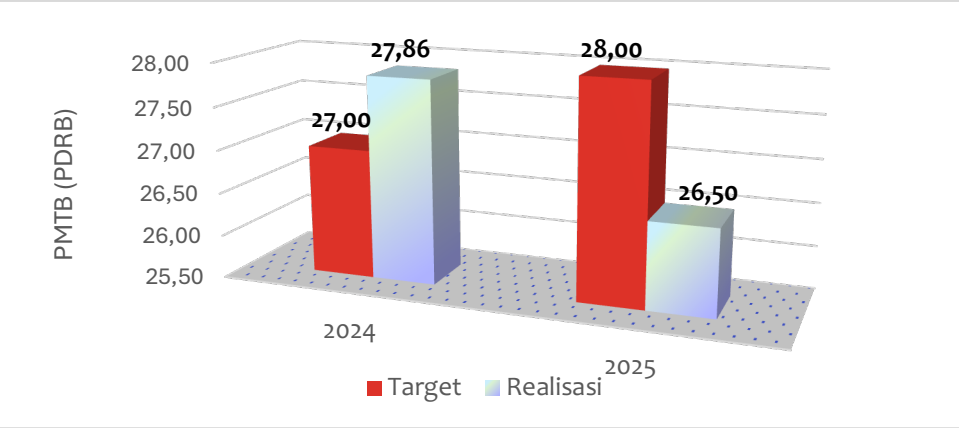

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru, data diolah Bapelitbang, 2026

7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Penanaman Modal

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perizinan penanaman modal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat (pelaku usaha/investor) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). IKM diperoleh melalui survei yang menilai berbagai aspek seperti prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, hingga penanganan pengaduan.

Pada tahun 2024, target IKM ditetapkan sebesar 80,00 persen, sedangkan realisasinya mencapai 90,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan perizinan penanaman modal melampaui target sebesar 10 poin. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas layanan sudah berada pada kategori sangat baik, karena secara umum nilai IKM diatas ±88 persen termasuk mutu pelayanan yang sangat baik. Keberhasilan ini mencerminkan adanya peningkatan dalam kemudahan proses perizinan, kecepatan layanan, transparansi, serta responsivitas aparatur terhadap kebutuhan masyarakat/investor.

Begitu pula dengan tahun 2025, target IKM meningkat menjadi 82,00 persen dan realisasinya mencapai 95,71 persen. Ini berarti capaian kembali melampaui target sebesar 13,71 poin dan menunjukkan tren

peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nilai ini semakin memperkuat bahwa pelayanan perizinan penanaman modal telah berada pada kategori **sangat memuaskan (sangat baik)**. Capaian yang lebih tinggi dari tahun 2024 juga menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam kualitas pelayanan, baik dari sisi sistem (digitalisasi/OSS), sumber daya manusia, maupun standar pelayanan.

Gambar 3.27
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025

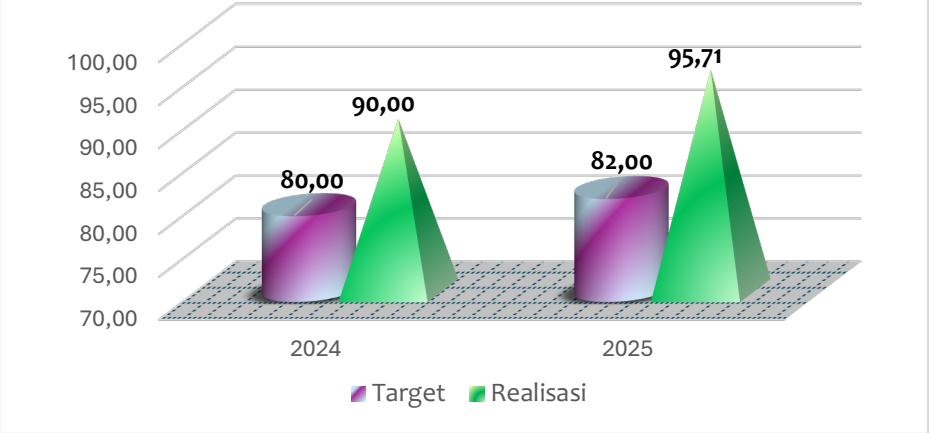

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru, data diolah Bapelitbang, 2026

8. Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten

Jumlah realisasi investasi merupakan indikator yang menunjukkan total nilai investasi yang berhasil masuk dan terealisasi di daerah selama periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pada tahun 2024, target realisasi investasi ditetapkan sebesar Rp31.426 miliar, sementara realisasinya mencapai Rp56.577 miliar. Dengan demikian, capaian tersebut melampaui target secara signifikan, yakni sebesar Rp25.151 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat investor terhadap daerah cukup tinggi, didukung oleh kemudahan perizinan, potensi sumber daya, serta peluang usaha yang menjanjikan. Pada tahun 2025, meskipun target investasi diturunkan menjadi Rp26.000 miliar, realisasi investasi justru meningkat menjadi Rp61.322 miliar. Artinya, capaian tersebut kembali melampaui target dengan selisih Rp35.322 miliar. Peningkatan ini mengindikasikan adanya tren positif dalam arus investasi, serta keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan daya tarik investasi daerah.

Capaian realisasi investasi selama dua tahun tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini menjadi sinyal positif

bagi pertumbuhan ekonomi daerah, karena investasi berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi daerah. Namun demikian, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas investasi agar berdampak luas dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Gambar 3.28
Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

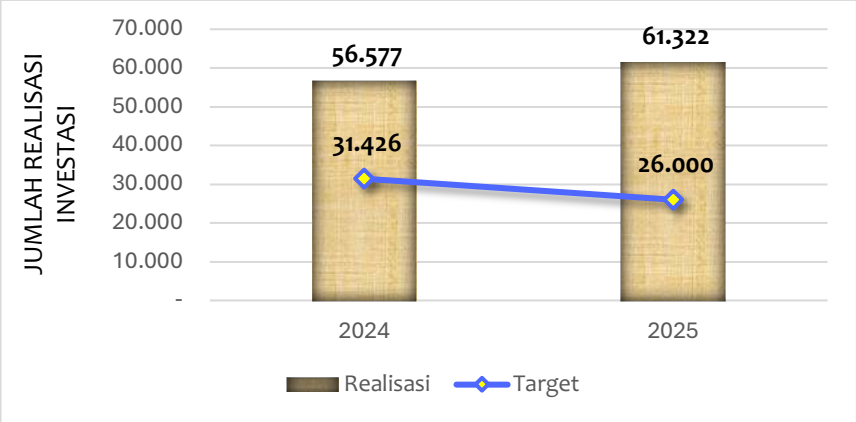

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP dan data diolah Bapelitbang, 2026

9. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kinerja yang positif dan melampaui target dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, kontribusi sektor pariwisata ditargetkan sebesar 11,00 persen, dan realisasinya mencapai 11,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu tumbuh lebih baik dari yang direncanakan, dengan selisih capaian sebesar 0,16 persen di atas target. Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas wisata, baik dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, maupun belanja wisatawan yang berdampak langsung pada sektor-sektor pendukung seperti akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, serta jasa lainnya.

Pada tahun 2025, kinerja sektor pariwisata semakin meningkat. Target kontribusi ditetapkan sebesar 11,27 persen, namun realisasinya mencapai 12,04 persen. Dengan demikian, terdapat kelebihan capaian sebesar 0,77 poin persentase dari target yang ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjadi salah satu sektor unggulan dalam pembentukan PDRB.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mengindikasikan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan pada sektor pariwisata. Keberhasilan melampaui target pada kedua tahun tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan promosi destinasi

wisata, perbaikan infrastruktur, pengembangan event pariwisata, serta meningkatnya minat wisatawan. Dengan tren ini, sektor pariwisata diharapkan terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah di masa mendatang.

Gambar 3.29
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025

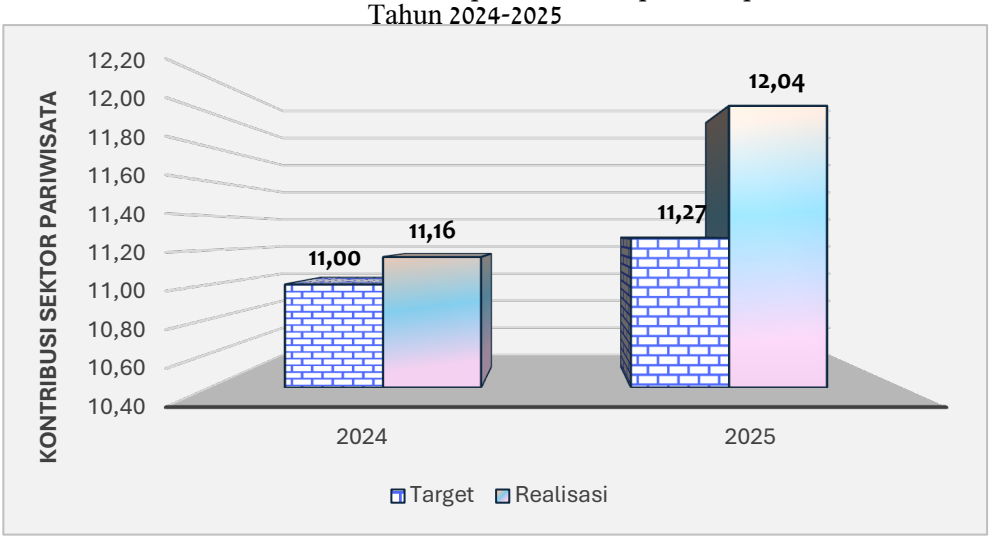

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Aru, data diolah Bapelitbang, 2026

10. Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)

Jumlah kunjungan wisatawan, baik Nusantara maupun Mancanegara, merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja sektor pariwisata di daerah. indikator ini mencerminkan tingkat daya tarik destinasi serta efektivitas promosi dan pengelolaan pariwisata yang dilakukan. Pada tahun 2024, target jumlah kunjungan wisatawan ditetapkan sebanyak 3.085 orang, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 1.645 orang. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan aksesibilitas, belum optimalnya promosi pariwisata, serta faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi minat kunjungan wisatawan.

Berbeda dengan tahun 2024, pada tahun 2025 kinerja sektor pariwisata menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dengan target yang ditetapkan sebesar 1.607 orang, realisasi jumlah kunjungan wisatawan justru mencapai 2.202 orang, sehingga melampaui target yang telah ditentukan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan sektor pariwisata, baik dari sisi promosi, pengembangan destinasi, maupun peningkatan fasilitas dan layanan kepada wisatawan.

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Meskipun pada tahun 2024

target belum tercapai, namun keberhasilan melampaui target pada tahun 2025 menjadi indikasi bahwa sektor pariwisata mulai mengalami pemulihan dan peningkatan kinerja. Kedepannya, upaya peningkatan kualitas destinasi, promosi yang lebih intensif, serta penguatan infrastruktur pariwisata perlu terus dilakukan guna menjaga tren pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Gambar 3.30
Jumlah Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025

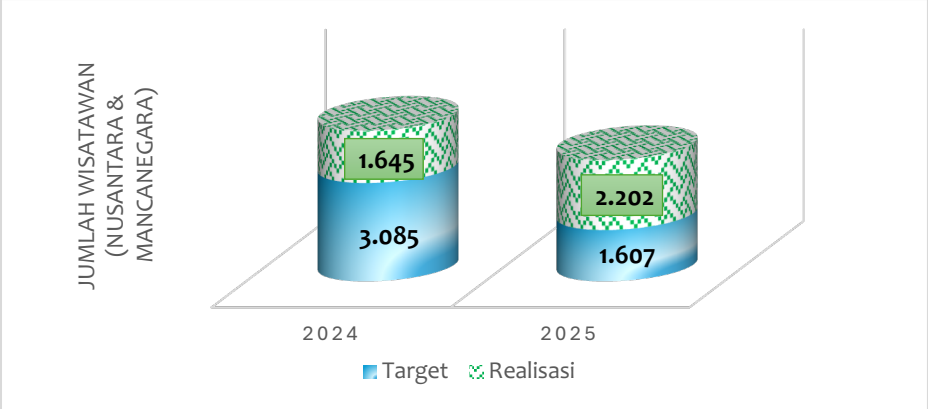

Sumber: Dinas Pariwisata dan data diolah Bapelitbang, 2026

11. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan membandingkan antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang harus dibayar petani untuk kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga. Perhitungan NTP dilakukan dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (Ib). Indeks Yang Diterima Petani (It) merupakan Indeks harga dari produksi pertanian yang dijual oleh petani, seperti padi, jagung, sayuran, buah, perkebunan, peternakan dan perikanan. Indeks Harga Yang DiBayar Petani (Ib) merupakan indeks harga dari barang dan jasa yang dibeli petani, yang terdiri dari: Biaya produksi pertanian (pupuk, bibit, pestisida, alat pertanian); Konsumsi rumah tangga petani (makanan, pakaian, pendidikan, Kesehatan, dan. Kebutuhan lainnya).

Pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas dan meningkatkan NTP melalui berbagai program, antara lain peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian harga input produksi, serta penguatan akses pasar bagi hasil pertanian. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan petani dapat terus meningkat dan sektor pertanian tetap menjadi penopang dalam perekonomian daerah. NTP memiliki pengertian sebagai berikut:

- ✓ NTP > 100 artinya petani mengalami surplus, pendapatan dari hasil pertanian lebih besar daripada pengeluaran;
- ✓ NTP = 100 artinya petani berada pada titik impas (pendapatan sama dengan pengeluaran)
- ✓ NTP < 100 artinya petani mengalami defisit, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.

Pada tahun 2024, target NTP ditetapkan sebesar 104,30 persen, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 101,96 persen. Meskipun nilai tersebut masih berada diatas angka 100 yang berarti petani masih memperoleh surplus, capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani belum optimal, yang dapat disebabkan oleh faktor seperti kenaikan biaya produksi (pupuk, benih dan tenaga kerja) serta fluktuasi harga hasil pertanian. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 kinerja NTP menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dengan target yang sama dari tahun sebelumnya yakni 104,30 persen, realisasi NTP justru mencapai 112,32 persen, sehingga melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan petani, dimana pendapatan yang diterima petani meningkat lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas pertanian, stabilitas biaya produksi, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan akses pasar.

Perkembangan NTP dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Meskipun pada tahun 2024 target belum tercapai, perbaikan signifikan pada tahun 2025 menjadi indikator bahwa sektor pertanian mulai mengalami penguatan, sehingga diharapkan kesejahteraan petani dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Gambar 3.31
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

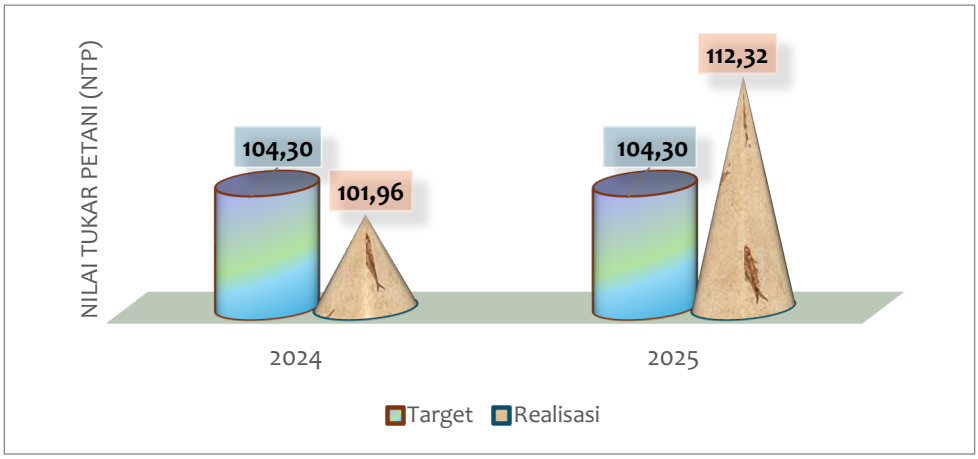

Sumber: Dinas Pertanian dan data diolah Bapelitbang, 2026

12. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dengan membandingkan antara pendapatan yang diterima nelayan dari hasil penjualan ikan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan produksi dan kebutuhan rumah tangga. NTN menunjukkan digunakan utnuk mengetahui apakah pendapatan nelayan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya. NTN memiliki pengertian sebagai berikut :

- NTN > 100 artinya kesejahteraan nelayan meningkat karena pendapatan lebih besar daripada pengeluaran;
- NTN = 100 artinya pendapatan nelayan seimbang dengan pengeluaran;
- NTN < 100 artinya kesejahteraan nelayan menurun karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.

Dengan demikian, NTN menjadi indikator penting untuk melihat kondisi ekonomi nelayan serta sebagai dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, seperti peningkatan produksi perikanan, bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, stabilisasi harga hasil perikanan, serta peningkatan akses pasar bagi nelayan. Dengan adanya target NTN, pemerintah daerah dapat mengukur keberhasilan kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Berikut dapat dilihat NTN di Kabupaten Kepulauan Aru yang belum bisa mencapai target bahkan mengalami penurunan di tahun 2025 dengan capaian 92,10 persen menurun dari target 92,72 persen sedangkan capaian Tahun 2024 sebesar 91,35 persen dari 92,00 persen.

Penurunan NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain menurunnya harga hasil tangkapan pada nelayan, meningkatnya biaya operasional seperti bahan bakar, alat tangkap, dan kebutuhan rumah tangga, serta kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas melaut. Selain itu, keterbatasan akses pasar dan fluktuasi permintaan juga turut mempengaruhi pendapatan nelayan, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun produksi perikanan mungkin tetap berjalan, namun peningkatan biaya yang harus ditanggung nelayan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Akibatnya, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran menjadi terganggu, yang tercermin dari penurunan NTN. Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut, diperlukan upaya strategis dari pemerintah

daerah dan pemangku kepentingan terkait, seperti pengendalian harga input produksi, pemberian subsidi atau bantuan sarana perikanan, peningkatan akses terhadap pasar yang lebih luas, serta penguatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan NTN dapat kembali meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kesejahteraan nelayan dapat terwujud.

Gambar 3.32
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

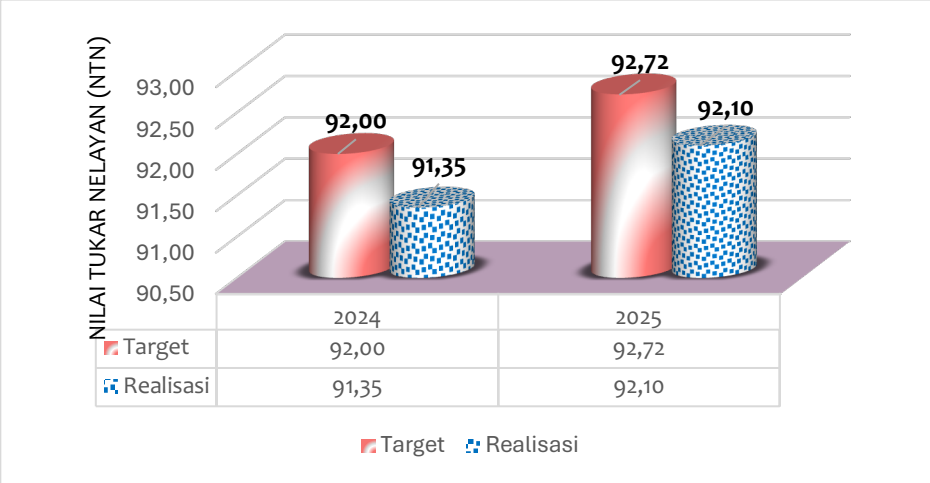

Sumber: Dinas Perikanan dan data diolah Bapelitbang, 2026

13. Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)

NTN pada subsektor pembudidayaan perikanan menunjukkan kinerja yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, target NTN pembudidaya ditetapkan sebesar 98,50 persen, namun realisasinya hanya mencapai 97,30 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan pembudidaya masih berada di bawah harapan, dimana pendapatan mengimbangi pengeluaran yang harus ditanggung. Selanjutnya, pada Tahun 2025, meskipun target NTN pembudidaya mengalami peningkatan menjadi 99,00 persen, realisasi yang dicapai hanya sebesar 97,80 persen. Walaupun terdapat kenaikan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap belum mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan nelayan pembudidaya berlangsung secara terbatas dan masih menghadapi berbagai kendala.

Belum tercapainya target NTN pembudidaya tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya biaya produksi seperti pakan, benih dan sarana budidaya lainnya, serta fluktuasi harga jual hasil perikanan yang cenderung tidak stabil. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca, kualitas lingkungan perairan,

serta keterbatasan akses pasar juga turut mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pembudidaya.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih optimal dan terintegrasi untuk meningkatkan NTN pada subsektor pembudidayaan perikanan, antara lain melalui efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil budidaya, serta perluasan akses pasar. Diharapkan melalui langkah-langkah tersebut, kesejahteraan nelayan pembudidaya dapat meningkat dan target NTN pembudidaya pada tahun-tahun mendatang dapat tercapai secara lebih optimal.

Gambar 3.33
Nilai Tukar Pembudidayaan perikanan (NTPi) Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

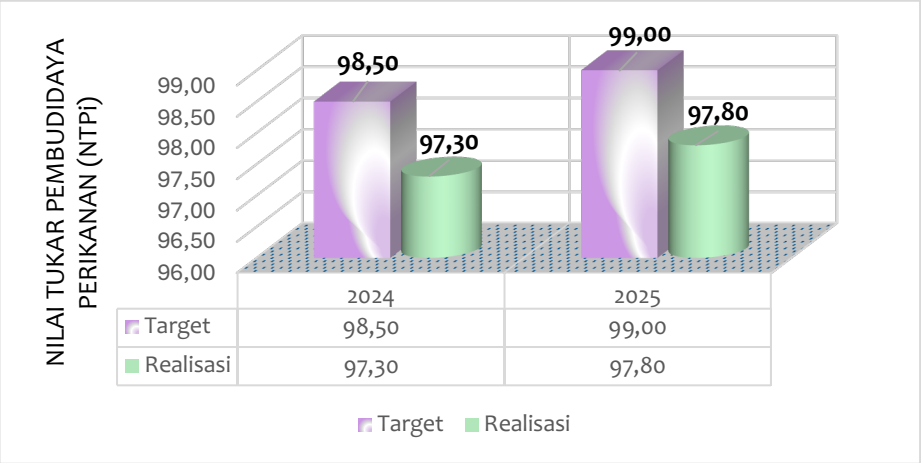

Sumber: Dinas Perikanan dan data diolah Bapelitbang, 2026

14. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif merupakan koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara nyata serta memberikan manfaat bagi anggotanya. Suatu koperasi dikatakan aktif apabila memiliki kepengurusan yang berjalan, anggota yang berpartisipasi, serta melaksanakan kegiatan usaha dan administrasi secara teratur, termasuk menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi aktif juga menunjukkan bahwa lembaga koperasi tersebut mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. dalam pembangunan daerah, keberadaan koperasi aktif menjadi indikator penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan, karena koperasi perperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan simpan pinjam, perdagangan, maupun usaha produktif lainnya, oleh karena itu, pemerintah daerah biasanya melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan koperasi agar koperasi yang ada tetap aktif, berkembang, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 3.34
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2024-2025

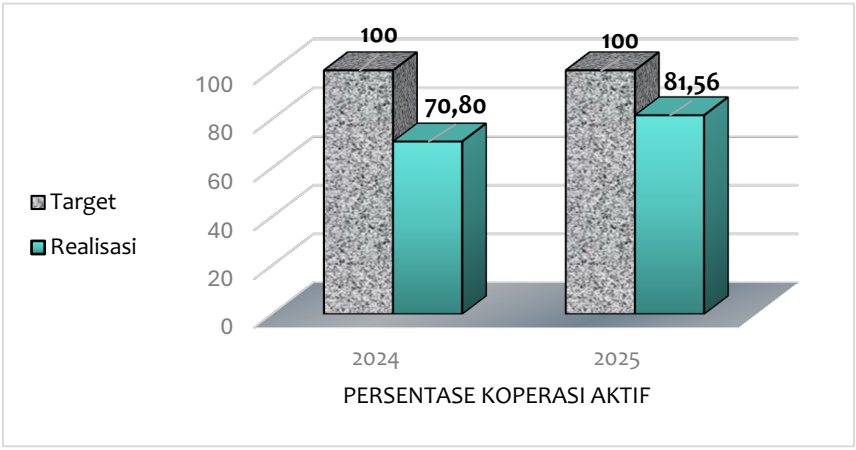

Sumber: Dinas Koperasi & Usaha Mikro dan data diolah Bapelitbang, 2026

15. Rasio Konektivitas Wilayah

Capaian rasio konektivitas wilayah pada tahun 2025 belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 43,24, realisasi hanya sebesar 30,56 sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 70,68% di bawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan konektivitas wilayah, baik melalui pembangunan maupun peningkatan infrastruktur transportasi, belum berjalan optimal sesuai dengan perencanaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah kepulauan yang menantang, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, secara lebih spesifik, tidak tercapainya target rasio konektivitas wilayah juga dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah lintasan penyeberangan yang beroperasi pada tahun 2025. Pada periode tahun 2021–2024 terdapat 7 lintasan penyeberangan, maka pada tahun 2025 hanya tersisa 4 lintasan yang masih beroperasi, yaitu lintasan Tual–Dobo, Dobo–Serwatu, Dobo–Benjina, dan Dobo–Marlasi yang dilayani oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Sementara itu, terdapat 3 lintasan penyeberangan yang tidak lagi beroperasi sejak 1 Januari 2025, yaitu lintasan Saumlaki–Dobo, Dobo–Pomako, dan Dobo–Lamerang, yang sebelumnya dioperasikan oleh PT Dharma Dwipa Utama. Berkurangnya jumlah lintasan penyeberangan tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya tingkat keterhubungan antarwilayah, khususnya dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang antarpulau. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap rendahnya capaian rasio konektivitas wilayah pada tahun 2025 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian indikator tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan melalui percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan rasio konektivitas wilayah secara bertahap sehingga mendukung peningkatan daya saing daerah.

Gambar 3.35
Konektivitas Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025

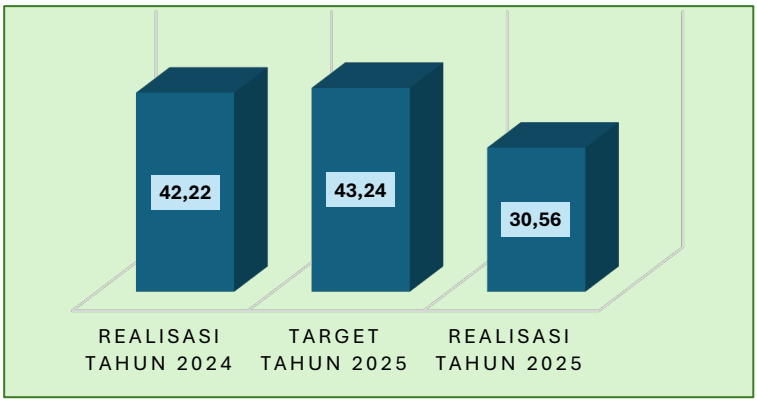

Sumber: Data dioleh Bapelitbang, 2026

16. Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah (IID) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 53,85, namun realisasinya hanya mencapai 51,57, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 95,76 persen dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 53,33, nilai IID mengalami penurunan sebesar 1,76 poin atau sekitar 3,30 persen, serta masih terdapat selisih sebesar 2,28 poin dari target tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penyediaan dan pengembangan infrastruktur daerah belum optimal dalam mendukung peningkatan daya saing wilayah.

Penurunan nilai IID tersebut dipengaruhi oleh menurunnya capaian pada beberapa komponen pembentuk indeks, yaitu infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur transportasi, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur kelistrikan, dan infrastruktur ekonomi. Selain itu, tidak terlaksananya sebagian program prioritas infrastruktur sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran turut memberikan kontribusi terhadap menurunnya kinerja indikator ini.

Secara lebih spesifik, terdapat beberapa Indikator Kinerja Daerah yang tidak mencapai target, yaitu akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum, rumah tangga dengan akses sanitasi aman/layak,

rasio konektivitas wilayah kabupaten, serta Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar masih menghadapi kendala struktural, baik dari sisi keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah kepulauan, maupun belum meratanya jangkauan pelayanan.

Penurunan paling signifikan terjadi pada komponen infrastruktur transportasi, khususnya pada indikator rasio konektivitas wilayah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah lintasan penyeberangan yang beroperasi sejak 1 Januari 2025, dimana terdapat 3 lintasan penyeberangan yang tidak lagi beroperasi, sehingga secara langsung menurunkan tingkat keterhubungan antar wilayah. Kondisi ini berdampak pada menurunnya mobilitas penduduk, terganggunya distribusi barang dan jasa, serta meningkatnya biaya logistik, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap penurunan kinerja infrastruktur secara keseluruhan.

Secara evaluatif, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah masih menghadapi tantangan pada aspek perencanaan yang adaptif, keberlanjutan program, serta ketahanan terhadap perubahan kebijakan fiskal. Hal ini juga mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan konektivitas dan pelayanan dasar masyarakat secara merata.

Tabel 3.15
Indeks Infrastruktur Daerah (IID) Tahun 2024-2025

Tahun 2024	Tahun 2025		
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
53,33	53,85	51,57	(95,76) Tidak mencapai target

D. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum adalah gambaran kondisi dan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah. Aspek ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui layanan publik yang efektif, merata, dan berkualitas. Beberapa indikator aspek pelayanan umum dapat dijelaskan berikut ini:

1. Nilai Sakip

Penyelenggaraan Pemerintah dikelola dalam sebuah sistem manajemen kerja, yang penilaian kualitasnya dapat dilihat melalui penilaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk merencanakan, mengukur, melaporkan dan mengevaluasi kinerja secara terstruktur dan akuntabel, guna memastikan bahwa penggunaan anggaran menghasilkan *output* dan *outcome* yang jelas. Penilaian evaluasi SAKIP Tahun 2025, terdapat 4 (empat) komponen yang dinilai, dengan rincian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Penilaian Evaluasi SAKIP Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024-2025

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	19,23	19,54
2	Pengukuran Kinerja	30	20,23	20,23
3	Pelaporan Kinerja	15	5,33	5,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,83	12,14
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	56,62	57,61
	Tingkat Akuntablitas Kinerja	**100**	CC	CC

Sumber: Bagian Organisasi Setda Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengalami peningkatan setiap tahunnya dari di tahun 2025 sebesar 0,99 poin dari tahun 2024 sebesar 56,62 poin, Sehingga tingkat akuntabilitas kinerja dari tahun 2025 berada pada kategori "CC". Namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 20250-2029, capiannya ini tidak melebihi target artinya targetnya tidak tercapai yakni 58,00 poin. Diharapkan di tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terus memperbaiki 4 (empat) kriteria penilaian yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sehingga target-target yang ada dalam RPJMD dapat dicapai setiap tahunnya. Selain SAKIP di diatas, dalam rangka pencapaian suatu pemerintahan yang bersih pemerintah daerah setiap tahunnya mengoptimalkan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan baik secara internal oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, bahkan kerjasama dengan pihak eksternal bersama BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi dan pihak lainnya. Pemeriksaan internal dan eksternal ini bertujuan

untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

2. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal pembentukan regulasi, penataan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kualitas tata kelola hukum pada instansi pemerintah. Secara umum, Indeks Reformasi Hukum menggambarkan sejauh mana suatu lembaga atau pemerintah daerah mampu menyusun pertauran perundnag-udangan yang berkualitas, melakukan harmmonisasi dan sinkronisasi regulasi, menata dan mengevaluasi peraturan agar tidak tumpeng tindih dan meningkatkan kapasitas hukum dalam penyelenggaraan pemerintah

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 mencapai 97,54 persen meningkat 11,30 persen dari tahun 2024 yakni sebesar 85,24 persen. Peningkatan ini juga melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD yakni 87,07 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pembentukan dan penataan regulasi daerah. Hal ini didukung oleh semakin baiknya proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas penyusunan produk hukum daerah, serta penguatan peran perangkat daerah yang membidangi hukum dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum daerah turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas regulasi. Kondisi ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.36
Nilai Indeks Reformasi Hukum
Tahun 2024-2025

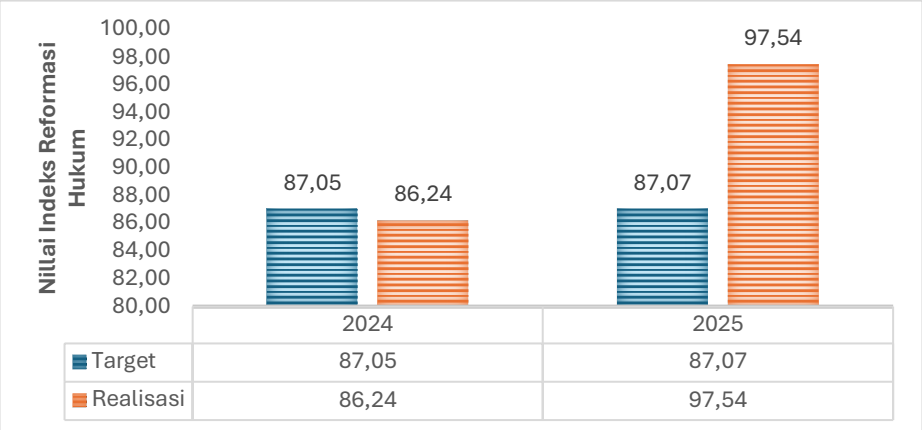

Sumber: Bagian Hukum Setda , 2026 dan data diolah Bapelitbang, 2026

3. Indeks Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi sehingga dampak negatif dapat diminimalkan dan peluang dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks pemerintahan, manajemen risiko merupakan upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan program, kegiatan, maupun pencapaian kinerja organisasi.

Menurut standar yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan, seperti yang diterapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, manajemen risiko merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan memastikan kegiatan organisasi berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unsur utama manajemen risiko adalah Identifikasi risiko (mengenali potensi risiko yang dapat terjadi, Analisis risiko (menilai kemungkinan dan dampak risiko), Evaluasi risiko (menentukan tingkat risiko yang perlu ditangani), Pengendalian risiko (menetapkan langkah untuk mengurangi atau mengatasi risiko) dan Pemantauan dan evaluasi (memastikan pengelolaan risiko berjalan efektif).

Pada tahun 2025 Indeks Managemen Resiko Kabupaten Kepulauan Aru tidak dilakukan penilaian sehingga Indeks managemen resiko masih menggunakan nilai tahun 2024 yakni berada pada level 1 dengan nilai 1.956. Penilaian indeks managemen resiko dinilia oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penjabaran pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.17
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	PENDIDIKAN									
1.01		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**								
			MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN							
1.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100%**	**72,86%**	**72,86%**		
					PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERPENUHI	100%	**72,86%**	**72,86%**		
1.01.01.2.01				**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.01.01.2.01.0001				1. Penyusunan Dokumen Peencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
1.01.01.2.02				**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.01.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1498 Orang/Bulan	1498 Orang/Bulan	100%		
1.01.01.2.02.0005				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-		
1.01.01.2.05				**1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.01.01.2.05.0009				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.01.2.05.0010				2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100%		
1.01.01.2.06				**1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.01.01.2.06.0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.01.01.2.06.0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
1.01.01.2.06.0008				3. Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		
1.01.01.2.06.0009				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%		
1.01.01.2.07				**1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.01.01.2.07.0005				1. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100%		
1.01.01.2.07.0011				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.01.2.08				**1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.01.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
1.01.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%		
1.01.01.2.09				**1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**60.00%**	**60.00%**		
1.01.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	5 unit	50%		
1.01.01.2.09.0006				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	100%		
1.01.01.2.09.0009				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1 Unit	30%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Persentase sekolah PAUD dan tingkat dasar berjalan sesuai standar layanan pendidikan	**65,00%**	**100%**	**65,00%**		
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	**100%**	**99,38%**	**99,38%**		
					Angka Partisipasi Kasar (APK)\ SMP/MTs/sederajat	**100%**	**99,48%**	**99,48%**		
1.01.02				**2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat**	**99,30%**	**99,38%**	**100%**		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	**89,84%**	**96,48%**	**110,73%**		
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	**1,34%**	**1,40%**	**104,47%**		
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	**1,63%**	**1,63%**	**100%**		
					Angka Kelulusan (AL) SD/MI	**100%**	**100%**	**100%**		
					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	**100%**	**100%**	**100%**		
					Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	**100%**	**100%**	**100%**		
1.01.02.2.01				**2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar**	**100%**	**72,92%**	**72,92%**		
1.01.02.2.01.0001				1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	100%		
1.01.02.2.01.0003				2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	100%		
1.01.02.2.01.0006				3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	100%		
1.01.02.2.01.0007				4. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pen-jaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	7 Unit	70 %		
1.01.02.2.01.0025				5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	148 Peserta Didik	148 Peserta Didik	100%		
1.01.02.2.01.0026				6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang	200 Orang	100%		
1.01.02.2.01.0027				7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	100 Orang	100 Orang	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					
1.01.02.2.01.0028				8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	148 Satuan Pendidikan	148 Satuan Pendidikan	100%		
1.01.02.2.01.0029				9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yangMengelola Dana BOS	148 Satuan Pendidikan	148 Satuan Pendidikan	100%		
1.01.02.2.01.0030				10. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148 Orang	148 Orang	100%		
1.01.02.2.01.0031				11. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Paket	2 Paket	100 %	Pembangunan Fisiknya Tidak Terealisasi, Hanya Paket Jasa Konsultasi Perencanaan Dan pembangunan	Kegiatan akan Dianggarkan ditahun 2026
1.01.02.2.01.0034				12. Peningkatan Profesi Pelaku Perbukuan Daerah Pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10 Orang	10 Orang	100%		
1.01.02.2.01.0035				13. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	148 Orang	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.01.0036				14. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.01.0037				15. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	296 Orang	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.01.0038				16. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
1.01.02.2.01.0039				17. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi danadvokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
1.01.02.2.01.0041				18. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	5 Komunitas	100%		
1.01.02.2.01.0042				19. Penyediaan Infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.01.02.2.01.0043				20. Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.01.0047				21. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	-	-	Kegiatan Pembangunan ini tidak ada dalam DPA	Kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran tahun 2026
1.01.02.2.01.0049				22. Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang	100%		
1.01.02.2.01.0050				23. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	148 Satuan Pendidikan	148 Satuan Pendidikan	100%		
1.01.02.2.01.0051				24. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	3 Ruang	80%	Dalam DPA Uang yanhg tersedia hanya untuk 3 Ruangan	Akan dianggrkan sesuai dengan anggaran tahun 2026
1.01.02.2.02				**2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpertisipasi dalam pendidikan menengah pertama**	**100%**	**40,48%**	**40,48%**		
1.01.02.2.02.0001				1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	100%		
1.01.02.2.02.0005				2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Paket	3 paket	100 %		
1.01.02.2.02.0006				3. Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yangTelah Dibangun	1 Paket	1 Paket	-		
1.01.02.2.02.0009				4. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	-	-	Kegiatan Pembangunan ini tidak ada dalam DPA	Kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran tahun 2026
1.01.02.2.02.0012				5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	2 Unit	50%		
1.01.02.2.02.0014				6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang	100%		
1.01.02.2.02.0038				7. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan NonAkademik	100 Peserta Didik	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.01.02.2.02.0040				8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	100%		
1.01.02.2.02.0041				9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	51 Satuan Pendidikan	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.02.0042				10. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	148 Satuan Pendidikan	148 Satuan Pendidikan	100%		
1.01.02.2.02.0043				11. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	10 Orang	100%		
1.01.02.2.02.0048				12. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.02.0049				13. Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.02.0050				14. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.02.0051				15. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
1.01.02.2.02.0052				16. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
1.01.02.2.02.0054				17. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.02.0055				18. Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.02.0058				19. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	56 Satuan Pendidikan	56 Satuan Pendidikan	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Peserta Didik						
1.01.02.2.02.0059				20. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	-	-	Kegiatan Pembangunan ini tidak ada dalam DPA	Kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran tahun 2026
1.01.02.2.02.0060				21. Bimbingan Teknis,Pelatihan,dan/ atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.03				**2.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 yang berpartisipasi dalam PAUD**	**100%**	**18,18%**	**18,18%**		
1.01.02.2.03.0016				1. Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Paud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.03.0018				2. Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	149 Satuan Pendidikan	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.03.0023				3. Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.03.0024				4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.03.0025				5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.03.0026				6. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
1.01.02.2.03.0031				7. Penyediaan Infrastruktur Tik	Jumlah paket infrastruktur TIK yangtersedia	1 Paket	1 Paket	100%		
1.01.02.2.03.0034				8. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademikdan Non Akademik	10 Peserta Didik	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.03.0037				9. Pemberian Layanan Pendampingan Bagi	Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk	1 Kegiatan	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi					2026
1.01.02.2.03.0039				10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	10 Orang	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.03.0047				11. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	127 Satuan Pendidikan	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.04				**2.4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan/Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan**	**100%**	**20%**	**20%**		
1.01.02.2.04.0017				1. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	91 Satuan Pendidikan	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.04.0027				2. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.04.0028				3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi danadvokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.02.2.04.0033				4. Penyediaan Infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	10 Paket	10 Paket	100%		
1.01.02.2.04.0046				5. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yangMenyelenggarakan Proses Belajar	-	-	-	Kegiatan tidak ada di DPA tahun 2025	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.03				**3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL**	**100%**	**50%**	**50%**		
					PERSENTASE SISWA YANG LULUS	**100%**	**50%**	**50%**		
1.01.03.2.01				**3.1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.01.03.2.01.0004				1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20 Orang	20 Orang	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Lokal Pendidikan Dasar	yang Meningkat Kompetensinya					
1.01.03.2.01.0006				2. Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
					PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERSERTIFIKASI	**50,00%**	**69,61%**	**139,22%**		
					GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV	**93,00%**	**72,38%**	**78,04%**		
					PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERSERTIFIKAT	**50,00%**	**69,61%**	**139,22%**		
1.01.04				**4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**RASIO GURU/MURID SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR**	**1:14%**	**1:4**	**122,8%**		
					RASIO GURU/MURID PER KELAS RATA-RATA SEKOLAH DASAR	**1:20%**	**1:4**	**116,6%**		
					RASIO GURU TERHADAP MURID PER KELAS RATA-RATA DASAR	**1:20%**	**5:8**	**483,3**		
					PROPORSI MURID KELAS 1 YANG BERHASIL MENAMATKAN SEKOLAH DASAR	**100%**	**108,1%**	**108,1%**		
1.01.04.2.01				**4.1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Proporsi tenaga pendidik yang ada di wilayah terpencil**	**100%**	**50%**	**50%**		
1.01.04.2.01.0001				1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta-raan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.04.2.01.0002				2. Penataan	Jumlah Laporan Hasil	1 Laporan	1 Laporan	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta-raan	Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan					
1.01.06				**5. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**PRESENTASE PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**100%**	**33,33%**	**33,33%**		
1.01.06.2.01				**5.1 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan**	**100%**	**33,33%**	**33,33%**		
1.01.06.2.01.0002				1. Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	1 Bahasa	100%		
1.01.06.2.01.0003				2. Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan danKesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Publikasi	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
1.01.06.2.01.0006				3. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Peserta Didik	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	Kegiatan akan diaggarkan tahun 2026
	KESEHATAN									
1.02		**DINAS KESEHATAN**								
			MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT							
1.02.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100 %**	**95,97 %**	**95,97 %**		
					PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERPENUHI	**100 %**	**95,97 %**	**95,97 %**		
1.02.01.2.01				**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.02.01.2.01.0001				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%		
1.02.01.2.02				**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100 %**	**79,84 %**	**79,84 %**		
1.02.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	794 Orang	634 Orang	79,84 %	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN di bayar sesuai jumlah orang	Dilakukan penganggaran sesuai jumlah dan kebutuhan
1.02.01.2.06				**1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.01.2.06.0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %		
1.02.01.2.06.0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Yang Disedikan Dan Digandakan	3 Paket	3 Paket	100 %		
1.02.01.2.06.0008				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	10 Laporan	10 Laporan	100 %		
1.02.01.2.06.0009				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pd Yang Terselenggara	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
1.02.01.2.08				**1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan	100 %		
1.02.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %		
1.02.01.2.08.0004				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	480 Laporan	-	-	Tidak ada Realisasi	Dianggarkan Kembali
1.02.01.2.09				**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Yang Terpelihara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	100 %		
1.02.02				**2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	**Usia Harapan Hidup**	64,01	70,60	70,60%	Kekurangan tenaga medis,	Pemerataan tenaga medis,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Jarak layanan kesehatan jauh (terutama di daerah terpencil) Kurangnya pemeriksaan kehamilan	Pemeriksaan kehamilan rutin Edukasi kesehatan reproduksi
					***Total Fertility Rate* (Angka Kelahiran Total)**	100	1893	76,6%	Usia menikah makin tinggi. Kesadaran perencanaan keluarga meningkat.	Edukasi tentang perencanaan keluarga yang tidak hanya menekan jumlah anak, tetapi menyesuaikan dengan kondisi. Kampanye membangun persepsi positif tentang keluarga.
					Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	11	0,5%	Terlambat mencapai fasilitas Kesehatan Terlambat mengenali bahaya dan mengambil Keputusan terlambat mendapatkan pelayanan yang memadai	Meningkatkan akses pelayana kesehatan Meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat
					Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 kelahiran hidup	3,15	15	9 %	Terlambat mencapai fasilitas Kesehatan Terlambat mengenali bahaya dan mengambil Keputusan terlambat mendapatkan pelayanan yang memadai	Meningkatkan akses pelayana kesehatan Meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat
					Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	1,55	1	0%		
					Prevalensi Stunting	19,29	731	6,64%		
					Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	90	7000	9,3%	Puskesmas kurang maksimal dalam penginputan diaplikasi	Dilakukan teguran dan pembinaan untuk memaksimalkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										penginputan
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	840	35,09%	Ketidaktersediaan Vaksin	Permintaan Vaksin Pada Provinsi
					Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100	106.449	93,60%		
					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	100	215	41%	Ketidpatuhan pasien dalam menkonsumsi Obat	Edukasi dan Pemantauan kepatuhan mengkonsumsi obat
					Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	3609	16,49%	Pengelola Program PTM tidak tertip untuk menginput data Skrining di Aplikasi ASIK	Dilakukan Teguran dan pembinaan
					Prevalensi Obesitas >18 Tahun	100	2885	13%	Penginputan puskesmas belum maksimal sehingga mempengaruhi capaian PTM	Untuk tahun 2026 sudah dilakukan Langkah validasi data setiap bulan dan evaluasi Program PTM
					Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100	30 PKM	100 %		
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	76,61	82,51	107,84 %		
					Persentase Tempat Pengelolaan pangan memenuhi syarat	100	35	66%		
					Persentase Fasilitasi kesehatan yang terintegrasi dalam sistem infomasi kesehatan nasional	100	30	100%		
					Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100	3	30%		
					Persentase Fasilitasi Pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	100	30	100%		
					Persentase lanjut usia yang mandiri	100	8379	85%		
					Persentase merokok penduduk pada usia 10-21 tahun	12,04	2998	0,1%		
					Cakupan Penemuan Kasus TB	90	512	84,21		
					Eliminasi Kusta	26	17	65 %	Tidak Ada Petugas Kusta, Petugas yang sdh terlatih dipindakan	Permintaan Penambahan Pegawai dalam pelayanan kusta

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									ke Puskesmas lain	
1.02.02				**2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Daya Tampung Rs Terhadap Jumlah Penduduk**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
					Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.02.2.01.0003				1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	3 Unit	100 %	Ada yang belum dibayarkan 100% karena pekerjaan belum selesai	Dilakukan teguran dan adendum kontrak
1.02.02.2.01.0004				2. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	5 Unit	100 %	Ada yang belum dibayarkan 100% karena pekerjaan belum selesai	Dilakukan teguran dan adendum kontrak
1.02.02.2.01.0006				3. Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	100 %	Ada yang belum dibayarkan 100% karena pekerjaan belum selesai	Dilakukan teguran dan adendum kontrak
1.02.02.2.01.0007				4. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit	7 Unit	100 %		
1.02.02.2.01.0009				5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	3 Unit	100 %	Ada yang belum dibayarkan 100% karena pekerjaan belum selesai	Dilakukan teguran dan adendum kontrak
1.02.02.2.01.0010				6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Unit	7 Unit	100 %	Ada yang belum dibayarkan 100% karena pekerjaan belum selesai	Dilakukan teguran dan adendum kontrak
1.02.02.2.01.0011				7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	100 %	Ada yang belum dibayarkan 100% karena pekerjaan belum selesai	Dilakukan teguran dan adendum kontrak
1.02.02.2.01.0014				8. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	100 %		
1.02.02.2.01.0015				9. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	100 Unit	100 %		
1.02.02.2.01.0023				10. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	30 Paket	30 Paket	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					
1.02.02.2.01.0026				11. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	50 Paket	50 Paket	100 %		
1.02.02.2.02				**2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SPM ibu hamil,ibu bersalin, bayi, balita, anak usia pendidikan dasar,usia produktif,dan usia mencapai target 100%**	**100 %**	**76,83 %**	**76,83 %**		
					Presentase SPM Ibu Hamil	100 %	1018	39,56 %	Pengelola Program belum Semua paham tentang Defenisi Operasional dari Kunjungan bayi	Sosialisasi Defenisi Operasional Kunjungan bayi Kepada Bidan oleh Penanggungjawab Program Anak Dinkes kepada semua Bidan Puskesmas
					Presentase SPM Ibu Bersalin	100 %	1151	45,24 %	Pengelola Program belum Semua paham tentang Defenisi Operasional dari Kunjungan bayi	Sosialisasi Defenisi Operasional Kunjungan bayi Kepada Bidan oleh Penanggungjawab Program Anak Dinkes kepada semua Bidan Puskesmas
					Presentase SPM Bayi Baru lahir	100 %	1625	65,79 %	Pengelola Program belum Semua paham tentang Defenisi Operasional dari Kunjungan bayi	Sosialisasi Defenisi Operasional Kunjungan bayi Kepada Bidan oleh Penanggungjawab Program Anak

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										Dinkes kepada semua Bidan Puskesmas
					Presentase SPM Balita	100 %	9495	86,27 %	Masih terdapat Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Tumbuh Kembang Anak	Pengelola Program sudah dipanggil oleh Dinkes dan Dinkes sudah melakukan OJT bagi pengelola Program Tumbuh Kembang Anak
					Presentase SPM Usia Pendidikan Dasar	100 %	16607	90,17 %		
					Presentase SPM Usia Produktif	100 %	15062	19,77 %	Pengelola Program PTM tidak tertip untuk menginput data Skrining di Aplikasi ASIK Sering terjadi pergantian PJ program	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam
					Persentase SPM hipertensi DM ODGJ,TB dan HIV mencapai target 100% :					
					Presentase SPM Hipertensi	100 %	3609	16,49 %	Pengelola Program PTM tidak tertip untuk menginput data Skrining di Aplikasi ASIK Sering terjadi pergantian PJ program	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam
					Presentase SPM DM	100 %	558	92,08 %		
					Presentase SPM ODGJ	100 %	54	72,92 %	Pengelola Program PTM tidak tertip untuk menginput data Skrining di Aplikasi ASIK Sering terjadi pergantian PJ program	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Presentase SPM TB	100 %	2629	87,17 %		
					Presentase SPM HIV	100 %	2163	70,57 %	Pengelola Program PM tidak tertip untuk menginput data Skrining di Aplikasi ASIK Sering terjadi pergantian PJ program	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam
					Persentase jenis penyakit menular dan tidak menular yang ditangani					
					Persentase jenis Peyakit Tidak Menular :					
					Presentase SPM Hipertensi	100 %	3609	16,49 %	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam
					Presentase SPM DM	100 %	558	92,08 %		
					Persentase jenis Peyakit Menular :					
					Presentase SPM TB	100 %	2629	87,17 %		
					Presentase SPM HIV	100 %	2163	70,57 %		
					Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100 %	70 Desa/1 Kel	58%		
					Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	15%	795	12,12%	Kurang memahami gizi seimbang Ketahanan pangan keluarga lemah Lingkungan kotor	Pemberian ASI eksklusif 6 bulan MP-ASI bergizi seimbang Pemberian makanan tambahan (PMT) Penyuluhan gizi Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
					Persentase Faskes yang mendapatkan operasional kesehatan	100%	30	100%		
					Persentase KLB yang di tangani <24 jam	100%	-	-	Tidak Ada Kasus	Dianggarkan kembali

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.02.02.2.02.0001				1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2573 Orang	1018	39,56 %	Pengelola Program belum Semua paham tentang Defenisi Operasional dari Kunjungan bayi	Sosialisasi Defenisi Operasional Kunjungan bayi Kepada Bidan oleh Penanggungjawab Program Anak Dinkes kepada semua Bidan Puskesmas
1.02.02.2.02.0002				2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar	2544 Orang	1151	45,24 %	Pengelola Program belum Semua paham tentang Defenisi Operasional dari Kunjungan bayi	Sosialisasi Defenisi Operasional Kunjungan bayi Kepada Bidan oleh Penanggungjaw-ab Program Anak Dinkes kepada semua Bidan Puskesmas
1.02.02.2.02.0003				3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2470 Orang	1625	65,79 %	Pengelola Program belum Semua paham tentang Defenisi Operasional dari Kunjungan bayi	Sosialisasi Defenisi Operasional Kunjungan bayi Kepada Bidan oleh Penanggungjawab Program Anak Dinkes kepada semua Bidan Puskesmas
1.02.02.2.02.0004				4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11006 Orang	9495	86,27 %	Masih terdapat Puskesmas yang tidak melaksanakan Program Tumbuh Kembang Anak	Pengelola Program sudah dipanggil oleh Dinkes dan Dinkes sudah melakukan OJT bagi pengelola Program Tumbuh Kembang Anak
1.02.02.2.02.0005				5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18417 Orang	16607	90,17 %		
1.02.02.2.02.0006				6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	76184 Orang	15062	19,77 %	Pengelola Program PTM	Dilakukan Teguran dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				pada Usia Produktif	Kesehatan Sesuai Standar				tidak tertip untuk menginput data Skrining di Aplikasi ASIK Sering terjadi pergantian PJ program	pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam
1.02.02.2.02.0007				7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8677 Orang	7662	88,30 %		
1.02.02.2.02.0008				8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21883 Orang	3609	16,49 %	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam
1.02.02.2.02.0009				9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	558	92,08 %		
1.02.02.2.02.0010				10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	54	72,92 %	Pengelola Program PTM tidak tertip untuk menginput data Skrining di Aplikasi ASIK Sering terjadi pergantian PJ program	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam
1.02.02.2.02.0011				11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3016 Orang	2629	87,17 %		
1.02.02.2.02.0012				12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3065 Orang	2163	70,57 %	Pengelola Program PM tidak tertip untuk menginput data Skrining di Aplikasi ASIK Sering terjadi pergantian PJ program	Dilakukan Teguran dan pembinaan Diusulkan kepada Pemda untuk tidak melakukan pergantian PJ Progam

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.02.02.2.02.0015				13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0017				14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0018				15. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0020				16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0025				17. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0026				18. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0029				19. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0032				20. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0033				21. Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	30 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0034				22. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0042				23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkanpelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	-	Tidak Ada Kasus	Dianggarkan Kembali
1.02.02.2.02.0043				24. Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok Yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	1 Tatatan	1 Tatanan	100 %		
1.02.02.2.02.0045				25. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.02.0046				26. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	1 Dokumen	-	-		
1.02.02.2.02.0048				27. Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.02.2.03				**2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.02.02.2.03.0002				1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Realisasi Anggaran dibayarkan Sesuai dengan Kebutuhan	Dianggarkan Kembali
1.02.02.2.04				**2.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Sakit Dan Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Diawasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.02.2.04.0003				1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	30 Unit	30 Unit	100 %		
1.02.03				**3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi**					
					Persentase Puskesmas Dengan Sdmk Sesuai Standar	30	29	96,67%		
					Persentase Rs Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	1	1	100%		
					Persentase Penerbitan Dan Pemenuhan Komitmen Spp-Irt Sesuai Standar	113	113	100%		
					Persentase Sarana Irtp Yang Memenuhi Ketentuan	47	47	100%		
					Perentase Rs Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	1	1	100%		
					Presentase Tenaga Kesehatan Yang Terintegrasi/Tersertifkasi Kompetensi	990	892	90%		
					Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Di RS	100	83,8%	83,8%		
1.02.03.2.01				**3.2 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Praktik Kesehatan Yang Mendapatkan Perizinan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.03.2.01.0002				1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Realisasi Anggaran dibayarkan Sesuai dengan Kebutuhan	Dianggarkan Kembali

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.02.03.2.02				**3.3 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kepadatan distribusi tenaga kesehatan**	**0 %**	**99,70 %**	**99,70 %**		
1.02.03.2.02.0002				1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Fasyankes)	0 Orang	98 Orang	99,70 %		
1.02.03.2.03				**3.4 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.03.2.03.0001				1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	60 Orang	100 %	Realisasi Anggaran dibayarkan Sesuai dengan Kebutuhan	Dianggarkan Kembali
				4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Apotek Dan Toko Obat Yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan**	30 %	100 %	100%		
					Persentase Penerbitan Dan Pemenuhan Komitmen Spp- Irt Sesuai Standar	113	113	100%		
					Persentase Sarana Irtp Yang Memenuhi Ketentuan	47	47	100%		
1.02.04					**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Dari Lintas Sektor Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Daerah**	21	21	100%		
					Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Dan Vaksin Irl (Imunisasi Rutin Lengkap)	30	30	100%		
					Persentase Apotek, Toko Obat,Optikal,UMOT dan PIRT yang Memiliki Izin	30	30	100%		
					Presentase TTU, TPM dan Damui yang Memenuhi Syarat Kesehatan	100	81	32,66%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.02.04.2.01				**4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat Dan Umot Yang Memiliki Perizinan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.04.2.01.0001				1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-	-
1.02.04.2.03				**4.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase PIRT yang mendapatkan sertifikat produksi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.04.2.03.0001				1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02.04.2.06				**4.3 Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase Pos Market Dan Pirt Yang Dilakukan Pemeriksaan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.04.2.06.0001				1. Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman	Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	100 %	100 %	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan					
1.02.05				**5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Perilaku Hidup Sehat (PHS) (orang)**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
					Presentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.05.2.01				5.1 **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Desa Siaga**	100 %	100 %	100 %		
1.02.05.2.01.0001				1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.02	**KESEHATAN**									
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								
			MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT							
1.02.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI TEPAT WAKTU**	**100 %**	**85,06 %**	**85,06 %**		
1.02.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 PNS 19 CPNS 84 PPPK	144 PNS 19 CPNS 84 PPPK	100 %		
1.02.01.2.05				**1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.01.2.05.0009				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	3 Orang	3 Orang	100 %		
1.02.01.2.06				**1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100 %**	**93,33 %**	**93,33 %**		
1.02.01.2.06.0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.02.01.2.06.0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %		
1.02.01.2.06.0009				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	4 Laporan	80 %		
1.02.01.2.08				**1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100 %**	**67,00 %**	**67,00 %**		
1.02.01.2.08.0002				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8 Laporan	67,00 %	Efisiensi Anggaran	
1.02.01.2.09				**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100 %**	**50 %**	**50 %**		
1.02.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	6 Unit	3 Unit	50 %	Efisiensi Anggaran	
1.02.01.2.10				**1.6 Peningkatan Pelayanan Blud**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.01.2.10.0001				1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit		
1.02.02				**2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PRESENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA RS, PRESENTASE PEMENUHAN DAN KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI RS, PRESENTASE PENGEMBANGAN SDM DAN PENGEMBANGAN LAYANAN DI RS.**	**0,52**	**100 %**	**100 %**		
1.02.02.2.01				**2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.02.2.01.0003				1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah	1 Unit	1 Unit	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Penduduk Minimal 1: 1000					
1.02.02.2.01.0014				2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	90 Unit	90 Unit	100 %		
1.02.02.2.01.0022				3. Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1: 1000 Dan/Atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayananrumah Sakit	1 Unit	0 %	0 %		
1.02.02.2.01.0023				4. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100 %		
1.02.02.2.02				**2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SPM ibu hamil,ibu bersalin, bayi, balita, anak usia pendidikan dasar,usia produktif,dan usila mencapai target 100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.02.02.2.02.0032				1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %		
1.02.03				**3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PRESENTASE TENAGA KESEHATAN YANG TERINTEGRASI/TERSERTIFIKASI KOMPETENSI, PRESENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RS**	**100 %**	**85 %**	**85 %**		
1.02.03.2.02				**3.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Presentase Kepadatan Distribusi tenaga Kesehatan**	**100 %**	**85 %**	**85 %**		
1.02.03.2.02.0002				1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memnuhi standar	20 %	17 %	85 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)					
1.03	**PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
			PENGEMBANGAN SDM SERTA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN							
1.03.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.03.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.03.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Org/Bln	103 Org/Bln	100%		
1.03.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.03.01.2.06.0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
1.03.01.2.06.0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
1.03.01.2.06.0008				3. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	100%		
1.03.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.03.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%		
1.03.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
1.03.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.03.01.2.09.0002				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Operasional atau Lapangan						
1.03.01.2.09.0006				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%		
1.03.01.2.09.0009				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%		
1.03.06				**2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**PERSENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK**	**59,04 %**	**46,11 %**	**78,09 %**	Tidak maksimalnya kinerja Program dan kegiatan bidang karena kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 berpengaruh pada data lapangan terkait survey dan monitoring serta pewasan terhadap kegiatan	Meningkatkan dan dan menempatkan Skala prioritas pembiayaan Pembangunan daerah pada program dan kegiatan yang menjawab kebutuhan prioritas masyarakat
1.03.06.2.01				**2.1 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**52,68 %**	**41,14 %**	**78,09 %**		
1.03.06.2.01.0019				1. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	100 Meter	41,14 Meter	41,14%		
1.03.08				**3. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DALAM KONDISI BAIK**	**3.05**	**1.52**	**50%**		
1.03.08.2.01				**3.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang ditata**	**50%**	**25%**	**50%**		
1.03.08.2.01.0023				1. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),	4 Dokumen	2 Dokumen	50%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					
1.03.09				**4. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANYA**	**PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**	**1.00**	**0.3**	**33,27%**		
1.03.09.2.01				**4.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Frekuensi penataan bangunan dan lingkungan yang diselenggarakan**	**5,26%**	**1,75%**	**33,27%**		
1.03.09.2.01.0007				1. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%		
1.03.10				**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN JALAN**	**29.27%**	**24,56%**	**83,92%**		
1.03.10.2.01.				**5.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**	**61,57%**	**51,67%**	**83,92%**		
1.03.10.2.01.0032				1. Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	1,8 KM	94,16%		
1.03.10.2.01.0033				2. Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	6 KM	5,55 KM	92,50%		
1.03.10.2.01.0040				3. Pembangungan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5 Jembatan	1 Jembatan	20%		
1.03.10.2.01.0043				4. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	200 KM	0 KM	0%		
1.04	**PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**									
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								
			PENGEMBANGAN SDM SERTA DUKUNG SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANA PUBLIK							
1.04.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT**	**100%**	**78,33%**	**78,33%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**					
1.04.01.2.02				**1.1 Adminstrasi Keuangan perangkat daerah**	**persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.04.01.2.02.000.1				1. Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah orng yang menerima gaji dan tunjangan	78 orng/bln	78 org/bulan	100%		
1.04.01.2.06				**1.2 Administasi umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**80,00%**	**80,00%**		
1.04.01.2.06.000.1				1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
1.04.01.2.06.000.2				2. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
1.04.01.2.06.000.5				3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
1.04.01.2.06.000.8				4. Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		
1.04.01.2.06.000.9				5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0%		
1.04.01.2.08				**1.3 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.04.01.2.08.000.1				1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
1.04.01.2.08.000.2				2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, sumber day air dan listrik yang di sediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
1.04.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**33,33%**	**33,33%**		
1.04.01.2.09.01				1. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas pejabat	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 unit	100%		
1.04.01.2.09.02				2. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	-	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.04.01.2.09.07				3. Pemeliharaan aset tetap lainya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	6 Unit	-	-		
			MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR SOSIAL DAN EKOMONI MASYARAKAT SECARA MENYELURUH DAN MERATA PADA SELURUH WILAYAH KEPULAUAN ARU						
1.04.02				**2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA KABUPATEN YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI**	**100%**	0	0		
1.04.02.2.01				**2.1 Pendapatan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota**	**Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi yang berfungsi kembali**					
1.04.02.2.01.000.4				1. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tinggkat kerusakan rumah	1 Dokumen	0	0	Keterlambatan penetapan APBD Tahun anggaran 2025	
1.04.02.2.01.000.9				2. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	1 Dokumen	0	0		
1.04.02.2.03				**2.2 Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota**						
1.04.02.2.03000.4				1. Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	1 Unit rumah	0	0	Keterlambatan penetapan APBD Tahun anggaran 2025	
1.04.02.2.04				**2.3 Pendistribusian dan serah terima rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota**						
1.04.02.2.04.000.5				1. Penatausaha serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	**1 Dokumen**	0	0	Keterlambatan penetapan APBD Tahun anggaran 2025	
1.04.03				**3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**LUAS KAWASAN PERMUKIMAN (<10 HA) YANG TERTANGANI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**	93,20 Ha	0 Ha	0 Ha	Kelengkapan data kawasan kumuh	Kelengkapan data kawasan kumuh yang meliputi : pendataan kembali rumah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										dan PSU, data yang tersedia yaitu data RTLH dari tahun 2017, sehingga perlu dilakukan pendataan kembali
1.04.03.202				**3.1 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh kewenagan kabupaten**	**9.12%**	**0,00%**	**0,00%**	Keterlambatan penetapan APBD Tahun anggaran 2025	
1.04.03.202.001.4				1. Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	3 Dokumen	0	0		
1.04.03.203				**3.2 Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh kewenangan kabupaten**	**90,88%**	**0**	**0**	Keterlambatan penetapan APBD Tahun anggaran 2025	Penetapan APBD sesuia dengan waktu yang ditentukan
1.04.03.2.03.000.7				1. Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	**3 Dokumen**	0	0		
1.04.03.2.03.001.2				2. Pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah baru layak huni yang dibangun untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	2 Lokasi	0	0		
1.04.05				**4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA UTILITAS UMUM KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**					
1.04.05.2.01				**4.1** Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan					
1.04.05.2.01.000.2				1. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi harian	2 Lokasi	0	0		
1.05	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**									

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
			MENYELENGGARAKAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.05.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**					
1.05.01.2.01				**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.05.01.2.01.0001				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		
1.05.01.2.02				**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.05.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	54 Orang	100%		
1.05.01.2.05				**1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.05.01.2.05.0002				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Stel	45 Stel	100%		
1.05.01.2.06				**1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.05.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
1.05.01.2.06.0004				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
1.05.01.2.06.0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
1.05.01.2.06.0008				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		
1.05.01.2.07				5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%		
1.05.01.2.07.0011				6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.05.01.2.08				7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%		
1.05.01.2.08.0001				8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
1.05.01.2.08.0002				9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%		
1.05.01.2.08.0004				10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
1.05.01.2.09				11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	74,51%	74,51%		
1.05.01.2.09.0002				12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100%		
1.05.01.2.09.0009				13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%		
1.05.01.2.09.0011				14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangu nan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	4 Unit	23,52%	Efesiensi Anggaran	Mengoptimalkan Pemakaian Aset
1.05.02				**2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG DITEGAKAN**	50%	50%	50%		
					PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%		
					PERSENTASE CAKUPAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	85%	100%	85%		
1.05.02.2.01				**2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dapat diselesaikan**	100%	99,18%	99,18%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.05.02.2.01.0004				1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengawalan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
1.05.02.2.01.0014				2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	9 Orang	9 Orang	100%		
1.05.02.2.01.0015				3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	450 Lapoan	439 Lapoan	97,55%		
1.05.02.2.02				**2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**100%**	**34,30%**	**34,30%**		
1.05.02.2.02.0011				1. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	40 Laporan	23 Laporan	57,50%	Ketiadaan Dukungan Anggaran	Kegiatan difokuskan kepada aduan yang bersifat mendesak
1.05.02.2.02.0012				2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Laporan	1 Laporan	11,11%	Ketiadaan Dukungan Anggaran	Kegiatan difokuskan kepada aduan yang bersifat mendesak
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
			PENGEMBANGAN SDM SERTA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK							
1.05.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN**	**100 %**	**96,67 %**	**96,67 %**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				DAERAH KABUPATEN KOTA	**SESUAI STANDAR**					
1.05.01.2.01				**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.05.01.2.01.0001				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
1.05.01.2.02				**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.05.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**26 Orang**	**26 Orang**	**100%**		
1.05.01.2.05				**1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.05.01.2.05.0002				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**1 Paket**	**1 Paket**	**100%**		
1.05.01.2.06				**1.4 Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.05.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	**1 Paket**	**1 Paket**	**100%**		
1.05.01.2.06.0002				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**1 Paket**	**1 Paket**	**100%**		
1.05.01.2.06.0004				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**1 Paket**	**1 Paket**	**100%**		
1.05.01.2.06.0005				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**1 Paket**	**1 Paket**	**100%**		
1.05.01.2.06.0008				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**		
1.05.01.2.06.0009				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100%**		
1.05.01.2.08				**1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.05.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**		
				2. Penyediaan Jasa	JumlahPenyediaan Jasa	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.05.01.2.08.0002				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
1.05.01.2.08.0003				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**		
1.05.01.2.08.0004				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	100%		
1.05.01.2.09				**1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase BMD Penunjang Urusan yang Dipelihara**	**100 %**	**80 %**	**80 %**		
1.05.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	100%		
1.05.01.2.09.0002				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	100%		
1.05.01.2.09.0006				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2 Unit	20%	Ketersediaan Anngaran Yang Belum Memadai	
1.05.01.2.09.0010				4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%		
1.05.03				**2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1. PRESENTASE PENDUDUK DI KEPULAUAN ARU YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA** **2. PRESENTASE PENDUDUK DI KEPULAUAN ARU YANG MMEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.05.03.2.02				**2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Presentase Aparat Siaga Bencana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.05.03.2.02.0021				1. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang Ikut Pengembangan Kapasitas TRC	20 Orang	20 Orang	100%		
1.05.03.2.02.0028				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur/Masyarakat yang Ikut Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	12 Kawasan	12 Kawasan	100,00%		
1.05	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**									
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN								
1.05.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**MENYELENGGARAKAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**100**	**100**	**100**		
1.05.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**	**100,00**	**100,00**		
1.05.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	51 Orang	100,00		
1.05.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	100	100	100		
1.05.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**1 paket**	**1 paket**	**100**		
1.05.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
1.05.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
1.05.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
1.05.01.2.06.08				5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100		
1.05.01.2.06.09				6. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	8 laporan	8 laporan	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
1.05.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**	**100**	**100**		
1.05.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100		
1.05.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100		
1.05.01.2.08.03				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100		
1.05.01.2.08.04				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100		
1.05.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100**	**100**	**100**		
1.05.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	100		
			PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MEWUJUKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
1.05.04				**2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Pencegahan, Penanggulaan, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100	100	100		
1.05.04.2.01			Akselerasi partisipasi masyarak-at mewujud-kan keamanan dan ketertiban	**2.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**100,00**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.05.04.2.01.01				1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	1 Dokumen	100		
1.05.04.2.01.06				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	5 Unit	100		
1.05.04.2.03				**2.2 Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase investigasi kejadian kebakaran**	**100**	**100**	**100**		
1.05.04.2.03.01				1. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
1.05.04.2.04				**2.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**	**100**	**100**	**100**		
1.05.04.2.04.02				1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 kecamatan (20 Orang)	2 Kecamatan (20 Orang)	100		
1.06	**SOSIAL**									
		DINAS SOSIAL								
			MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS SOSIAL							
1.06.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
					PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERPENUHI					
1.06.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.06.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	65 %	65 %	100 %		
1.06.01.2.06				**1.2 Aministrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**100 %**	**100 %**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.06.01.2.06.0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %		
1.06.01.2.06.0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan	Jumlah Barang Cetakan Yang Disedikan Dan Digandakan	1 Paket	1 Paket	100 %		
1.06.01.2.06.0008				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
1.06.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.06.01.2.08.0002				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
1.06.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
1.06.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	1 Unit	100 %		
1.06.01.2.09.0009				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100 %		
1.06.04				**2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
					PERSENTASE ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA					
					PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) LAINNYA DILUAR HIV/AIDS DAN NAPZA YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA					
					PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH REHABILITASI SOSIAL					
1.06.04.2.01				**2.1 Rehabilitasi Sosial Dasar**	**Jumlah Jenis Sumbangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**dalam Daerah/ K.Kota yang memilki izin**					
1.06.04.2.01.0005				1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 %	0 %	0 %		
1.06.04.2.01.0006				2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100 %		
1.06.04.2.01.0009				3. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	100 %		
1.06.04.2.02				**2.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bukan korban HIV/Aids dan NAPZA yang di Rehabilitasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
				1. Penyediaan Permakanan	Jumlah makanan yang disediakan	150 Orang	150 Orang	100 %		
				2. Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang disediakan	150 Orang	150 Orang	100 %		
				3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Frekuensi bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	100 Orang	100 Orang	100 %		
				4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraa Sosial yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	50 Orang	50 Orang	100 %		
				5. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang mendapatkan layanan rujukan dan penjangkauan	0 %	0 %	0 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**PERSENTASE PENERIMA MANFAAT YANG MENINGKAT KEMANDIRIAN EKONOMI**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
					PERSENTASE DAERAH YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PENDATAAN DATA FAKIR MISKIN					
					PERSENTASE KELUARGA MISKIN YANG RENTAN PENERIMA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG TERGRADUASI KEMISKINAN					
					PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN					
				3.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan data terpadu Kesejahteraan sosial dan PMKS yang mendapatkan Bantuan (%)**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
				1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	600 Orang	600 Orang	100 %		
				2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 %	0 %	0 %		
				4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**PERSENTASE PENDUDUK KORBAN BENCANA KABUPATEN TERTANGANI SESUAI STANDAR**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
					PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM, SOSIAL DAN ATAU NON ALAM YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA					
					PERSENTASE MASYARAKAT DIDAERAH RAWAN BENCANA YANG MENINGKAT KESIAPSIAGAANNYA					
					PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN/ SASARAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					MENDAPATKAN LAYANAN PEMULIHAN SOSIAL					
					PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG DI EVAKUASI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA PRASARANA TANGGAP DARURAT LENGKAP					
				4.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat, Setelah Tanggap Darurat Bencana Alam**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
				1. Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Makanan Pada Saat Bencana	50 Orang	50 Orang	100 %		

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang non pelayanan dasar berkaitan dengan penyelenggaraan bidang Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan dan Kearsipan.

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di Kabupaten Kepulauan Aru telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan hampir seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025.

Tabel 3.18
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07	**TENAGA KERJA**									
2.07		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**								
			BERKEMBANGNYA INVESTASI DAN KEGIATAN USAHA EKONOMI KREATIF SERTA PARIWISATA BERBASIS UMKM DAN EKONOMI KERAKYATAN							
2.07.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**71%**	**71%**		
2.07.01.2.02				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	100%	91%	91%		
2.07.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	100%		
2.07.01.2.05				1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD Yang Dilayani	100%	100%	100%		
2.07.01.2.05.09				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang	60 Orang	100%		
2.07.01.2.06				1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Berjalan Sesuai Standard	100%	58%	58%		
2.07.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.07.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%		
2.07.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.07.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	60 Orang	3 Orang	5%	Kondisi Keuangan Daerah	Percepatan Proses Permintaan GU
2.07.01.2.07				1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	100%	90%	90%		
2.07.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang Sediakan	3 Unit, 7 Buah	3 Unit, 6 Buah	90%		
2.07.01.08				1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	100%	100%	100%		
2.07.01.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.07.01.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.07.01.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.07.01.2.09				1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	73,33%	73,33%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Daerah						
2.07.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%		
2.07.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	5 Unit	2 Unit	60%		
2.07.01.2.09.07				3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	5 Unit	3 Unit	60%		
2.07.03				**2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**	**Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.07.03.2.01				2.1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100%	100%	100%		
2.07.03.2.01.01				1. Proses Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	48 Orang	128 Orang	267%		
2.07.04				**3. Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten**	**100%**	**0%**	**0%**	**Kondisi Keuangan Daerah**	**Percepatan Proses Permintaan GU**
2.07.04.2.01				3.1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon tenaga kerja yang dilatih	100%	0%	0%	Kondisi Keuangan Daerah	Percepatan Proses Permintaan GU
2.07.04.2.01.01				1. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	Kondisi Keuangan Daerah	Percepatan Proses Permintaan GU
2.07.05				**4. Program Hubungan Industrial**	**Presentase Perusahan Yang Menerapkan Tata Keola Kerja Yang Layak (PP/PKB. LKS Bipartit.Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan**	**100%**	**62%**	**62%**		
2.07.05.2.01				4.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perusahan Yang Menerapkan Tata Keola Kerja Yang Layak (PP/PKB. LKS Bipartit.Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	100%	100%		
2.07.05.2.01.01				1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahan Yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 Perusahan	9 Perusahan	300%		
2.07.05.2.02				4.2. Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupaten/Kota.	Presentase Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Kabupaten Kepulauan Aru Yang Diselesaikan.	100%	54%	54%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.05.2.02.01				1. Pencegahan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahan yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perselisihan	11 Perselisihan	220%		
2.07.05.2.02.02				2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5 Pengaduan	11 Pengaduan	220%		
2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2.08		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
			MENINGKATNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DAN PARTSISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN							
2.08.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.08.01.02				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	100%		
2.08.01.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	14 Orang	100%		
2.08.01.06				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	100%		
2.08.01.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.08.01.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.08.01.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.08.01.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.08.01.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.08.01.07				1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase BMD PD Penunjang Yang Terpenuhi	100%	100%	100%		
2.08.01.07.10				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%		
2.08.01.08				1.4 Penyediaan Jasa	Persentase jasa penunjang urusan	100%	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	yang tersedia					
2.08.01.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.08.01.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.08.01.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.08.01.09				1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%		
2.08.01.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%		
2.08.01.09.09				2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%		
2.08.01.09.10				3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%		
2.08.01.09.11				4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%		
2.08.03				**2. Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani Sesuai Standar**	**20%**	**20%**	**100%**		
2.08.03.01				2.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani Sesuai Standar	20%	38%	100%		
2.08.03.01.02				1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 PD	10 PD	100%		
2.08.03.02				2.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani Sesuai standar	25%	25%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.08.03.02.02				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	100%		
2.08.04				**3. Program Peningkatan Khusus Keluarga**	**Persentase Kelompok Usaha Perempuan**	**5%**	**5%**	**100%**		
2.08.04.01				3.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Perempuan Yang Mengikuti Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kelompok	4 Kelompok	100%		
2.08.04.01.03				1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.08.07.				**4. Program Perlindungan Khusus Anak**	**Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per 100 Anak**	**15%**	**15%**	**100%**		
2.08.07.01				4.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Terlayani Sesuai Standar	35 Kasus	35 Kasus	100%		
2.08.07.01.04				1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	50 Orang	100%		
2.09	**PANGAN**									
2.09		**DINAS KETAHANAN PANGAN**								
			MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI DAERAH BERBASIS SEMBERDAYA UNGGULAN DAERAH							
2.09.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.09.01.2.02				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	100%		
2.09.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	100%		
2.09.01.2.06				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Berjalan Sesuai Standar	100%	100%	100%		
2.09.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yg disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						
2.09.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.09.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.09.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.09.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Paket	1 Paket	100%		
2.09.01.2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	1 Paket	1 Paket	100%		
2.09.01.2.08				1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	100%	100%	100%		
2.09.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
2.09.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan jasa listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
2.09.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
2.09.01.2.09				1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Yang Terpelihara	100%	100%	100%		
2.09.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	100%		
2.09.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%		
2.09.03				**2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)**	**100 %**	**39%**	**39%**		
2.09.03.2.01				2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah	Jumlah Dokumen Ketersediaan Informasi Penyediaan Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan						
2.09.03.2.01.15				1. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.09.03.2.04				2.2. Pelaksanaan Capaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		
2.09.03.2.04.01				1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.09.03.2.04.02				2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga-man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.09.04				**3. Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Jumlah Dokumen Kerawanan Pangan Yang Dihasilkan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**		
2.09 04 2.02				3.1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan Yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2 09 04 2.02.03				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.09.05				**4. Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase Jaminan Keamanan Pangan**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.09.05.2.01				4.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengujian Mutu Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2 09 05 2.01.07				1. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.09.05.2.01.09				2. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
2 .10 .05				**1. Program Penyelesaian Gantikerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah**	**100%**	**100%**	**100%**		
2 .10.05.2.01				1.1 Penyelesaian Masalah	Jumlah Dokumen Penyelesaian	100%	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ganti Kerugiandan Santunan Tanah Untukpembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masalah Ganti Kerugian Dan Santuan Tanah Untuk Pembangunan					
2.10.05.2.01.02				1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugiandan Santunan Tanah Untuk pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
			PENGEMBANGAN SDM SERTA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK							
2.11.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.11.01.2.01				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	100%	100%	100%		
2.11.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	37 Orang	37 Orang	100%		
2.11.01.2.02.04				2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi Pd	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.11.01.2.05				1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD Yang Dilayani	100%	100%	100%		
2.11.01.2.05.09				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti	4 Orang	4 Orang	100%		
2.11.01.2.05.10				2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Memahami Peraturan Perundangan	35 Orang	35 Orang	100%		
2.11.01.2.06				1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%		
2.11.01.2.06.02				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.11.01.2.06.03				2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT PD Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.11.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.11.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.11.01.2.06.08				5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.11.01.2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100%		
2.11.01.2.08				1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%		
2.11.01.2.08.02				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.11.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.11.01.2.09				1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%		
2.11.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 Unit	7 Unit	100%		
2.11.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	100%		
2.11.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%		
2.11.03				**2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Indeks Lingkungan Hidup**	**80,30%**	**40,15%**	**50%**		
2.11.03.2.01				2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan	26,77%	26,77%	100%		
2.11.03.2.01.01				1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.11.03.2.02				1.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan penanggulangan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan	26,77%	0%	0%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.11.03.2.02.01				1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	0 Laporan	0%		
2.11.04				**3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Persentase Pengembangan Ruang Terbuka Hijau**	75,00%	75,00%	100%		
2.11.04.2.01				3.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Taman yang Dipelihara	75,00%	75,00%	100%		
2.11.04.2.01.04				1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Ha	6 Ha	100%		
2.11.05				**4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3**	**50%**	**0%**	**0%**		
2.11.05.2.01				4.1. Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Ketersediaan tempat pengelolaan limbah B3	100%	0%	0%		
2.11.05.2.01.02				1. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	0 Laporan	0%		
2.11.06				**5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)**	**Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota**	**55,70%**	**0%**	**0%**		
2.11.06.2.01				5.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Dan/ Kegiatan Yang Di Bina Dan Diawasi	55,70	0%	0%		
2.11.06.2.01.05				1. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang	Jumlah Badan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi	20 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
2.11.08				**6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pelatihan**	**50%**	**50%**	**100%**		
2.11.08.2.01				6.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat	50%	50%	100%		
2.11.08.2.01.02				1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.11.08.2.01.04				2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	1 Lembaga	100%		
2.11.10				**7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Pengaduan yang diselesaikan**	**85%**	**0%**	**0%**		
2.11.10.2.01				7.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentasae Pengaduan Yang ditindak lanjuti	85%	0%	0%		
2.11.10.2.01.01				1. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	0 Pengaduan	0%		
2.11.11				**8. Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani**	**24,34%**	**23,34%**	**100%**		
2.11.11.2.03				8.1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta yang Mendapat Pembinaan dan Pengawasam	23,34%	23,34%	100%		
2.11.11.2.01.02				1. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	5 Unit	5 Unit	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Melaksanakan Penilaian Kerja					
2.11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
		UPTD PERSAMPAHAN								
2.11.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.11.01.2.06				1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%		
2.11.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%		
2.11.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%		
2.11.01.2.08				1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%		
2.11.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100%		
2.11.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.11.01.2.08.03				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Orang	12 Orang	100%		
2.11.01.2.08.04				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.11.01.2.09				1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Yang Dipelihara	100%	100%	100%		
2.11.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%		
2.11.11				**2. Program Pengelolaan Persampahan**	**Presentase Capaian Sampah perkotaan yang tertangani**	**73,01 %**	**67,15 %**	**91,97%**		
2.11.11.2.01				2.1. Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah Perkotaan Yang Tertangani	54.240%	52,866%	94,00%		
2.11.11.2.01.1				1. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF,	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	56,240%	52,866%	94,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	peraturan perundangan					
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
2.12		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK							
2.12.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**87,5%**	**87,5%**		
2.12.01.2.02				1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	100%		
2.12.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	43 Orang	43 Orang	100%		
2.12.01.2.05				1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD Yang Dilayani	100%	100%	100%		
2.12.01.2.05.09				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	100%		
2.12.01.2.06				1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Berjalan Sesuai Standar	100%	100%	100%		
2.12.01.2.06				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	21 Paket	21 Paket	100%		
2.12.01.2.06				2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	100%		
2.12.01.2.07				1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpelihara	100%	67%	67%		
2.12.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	67%	1 Paket kegiatan (pengadaan server) tidak dapat dicairkan	Diadakan di Tahun 2025
2.12.01.2.08				1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	75%	75%		
2.12.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	202 Lembar	50 Lembar	25%		
2.12.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%		
2.12.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%		
2.12.01.2.09				1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD Penunjang Urusan Yang Terpelihara	100%	83,33%	83,33%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Daerah						
2.12.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Kendaraan	1 Kendaraan	100%		
2.12.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Peralatan	10 Peralatan	50%		
2.12.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	100%		
2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2.13		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
2.13.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.13.01.02				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	100%		
2.13.01.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	45 Orang	100%		
2.13.01.06				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	92,31	92,31%		
2.13.01.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (BBM Genset)	1 Paket	1 Paket	100%		
2.13.01.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.13.01.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.13.01.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	9 Laporan	69,23%		
2.13.01.08				1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%		
2.13.01.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.13.01.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%		
2.13.01.08.03				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%		
2.13.01.08.04				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.13.01.09				1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%		
2.13.01.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%		
2.13.04				**2. Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Yang Baik**	**100%**	**75%**	**75%**		
2.13.04.01				2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	117 Dokumen	75 Dokumen	75%		
2.13.04.01.01				1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	117 Dokumen	75 Dokumen	75%		
2.13.05				**3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat aktif**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**		
2.13.05.01				3.1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.13.05.01.03				1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sejauh ini tidak ada permasalahan yang timbul, hanya saja tiap tahun alokasi dana yang diberikan untuk sub kegiatan ini hanya untuk membiayai salah satu LKD saja (PKK Kabupaten/Desa), sehingga tidak pernah ada data update untuk LKD lainnya, seperti : Lembaga Adat, Posyandu, LPM dan Karang Taruna di desa/kelurahan.	
2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.14		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
2.14.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**92,14**	**92,14**		
2.14.01.2.02				1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	100%		
2.14.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	28 Orang	100%		
2.14.01.2.05				1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang Dilayani	100%	86,44%	86,44%		
2.14.01.2.05.05				1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.14.01.2.06				1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	19,32%	19,32%		
2.14.01.2.06.09				1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.14.01.2.07				1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%		
2.14.01.2.07.05				1. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%		
2.14.01.2.07.06				2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%		
2.14.01.2.08				1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%		
2.14.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.14.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2.14.01.09				1.2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%		
2.14.01.2.09.06				1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100%		
2.14.02				**2. Program Pengendalian Penduduk**	**Persentase jumlah keluarga yang memiliki maksimal 2 anak**	**100%**	**82,74%**	**82,74%**		
2.14.02.01				2.1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah	100%	82,74%	82,74%		
2.14.02.01.02				1. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	5 laporan	2 Laporan	41,67%	Kegiatan belum dilaksanakan semuanya.	Kegiatan akan dianggarkan lagi di Tahun depan
2.14.02.2.02.13				2. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Pelayanan KB						
2.14.03				**3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**	**100%**	**78,70%**	**78,70%**		
2.14.03.2.01				3.1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase advokasi, komunikasi informasi dan edukasi pengendalian penduduk KB sesuai kearifan budaya lokal	100%	89,03%	89,03%		
2.14.03.2.01.10				1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Laporan	5 Laporan	88,70%		
2.14.03.2.01.011				2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	8 Laporan	88,07%		
2.14.03.2.01.12				3. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Laporan	1 Laporan	61,27%		
2.14.03.2.01.13				4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.14.03.2.01.14				5. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1 Organisasi	100%		
2.14.03.2.02				3.2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase jumlah penyuluh terhadap Pasangan Usia Subur	100%	100%	100%		
2.14.03.2.02.04				1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	119 Kader KB	119 Kader KB	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.02.05				2. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi Masyarakat	10 OrganisasiMasyarakat	100%		
2.14.03.2.03				3.3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase alat dan obat kontrasepsi yang terpakai	100%	97,13%	97,13%		
2.14.03.2.03.03				1. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	34 Orang	34 Orang	97,13%		
2.14.03.2.04				3.4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Persentase ormas yang berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber KB	100%	100%	100%	Kegiatan Belum Maksimal, hal ini berdampak kunjungan ke kampung KB belum semuanya	Kegiatan akan berlanjut di tahun depan dan akan dianggarkan Kembali (SILPA Tahun 2024)
2.14.03.2.04.06				1. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.14.04				**4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Cakupan anggota BKB, BKR, dan BKL ber KB**	**100%**	**90,54%**	**90,54%**		
2.14.04.2.01				4.1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	94,26%	94,26%		
2.14.04.2.01.18				1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 paket	25 Paket	85,81%		
2.14.04.2.01.24				2. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan)	119 Kader	119 Kader	100%		
2.14.04.2.02				4.2 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta	Persentase pelaksanaan dan peningkatan peran serta	100%	67,09%	67,09%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Oranganisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga					
2.14.04.2.02.06				1. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	1 Laporan	67,09%		
2.15	**PERHUBUNGAN**									
2.15		**DINAS PERHUBUNGAN**								
			PENGEMBANGAN SDM SERTA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFESIEN							
2.15.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**82,89%**	**82,89%**		
2.15.01.2.02				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	**100%**	**102%**	**102%**		
2.15.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	51 Orang	102%		
2.15.01.2.05.				1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kulitas SDM	100%	0%	0%		
2.15.01.2.05.09				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0 Orang	0%		
2.15.01.2.06				1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	80,94%	80,94%		
2.15.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%		
2.15.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69 Unit	61 Unit	88,41%	Termasuk Utang Belanja Tahun 2023 1 Unit Mesin Outboard Suzuki 115 Hp	
2.15.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket/ 5.600 liter BBM	1 paket/ 5.235 liter BBM	93,48%	Konsumsi Bbm Berdasarkan Operasional Kendaraan	Penganggaran Dan Optimalisasi Bahan Logistik Kantor
2.15.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.15.01.2.06.06				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket/ 400 exp	1 paket/ 140 exp	35,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.01.2.06.08				6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Paket/ 12 Bulan	1 Paket/ 12 Bulan	100%		
2.15.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	11 Laporan	50,00%	*Revolving* Permintaan Anggaran GU Terhambat Sehingga Realisasi Rendah	
2.15.01.2.07				1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	120%	120%		
2.15.01.2.07.05				1. Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	120%		
2.15.01.2.08				1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%		
2.15.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.15.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.15.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.15.01.2.09				1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Yang Dipelihara	100%	94,45%	94,45%		
2.15.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	8 Unit	88,89%		
2.15.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%		
2.15.02				**2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana LLAJ**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.15.02.2.14				2.1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penertiban Izin Angkutan Trayek	100%	100%	100%		
2.15.02.2.14.03				1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehn Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam System Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Orang	20 Orang	100%	Sejak tahun 2022 Kewenangan Penerbitan Izin Trayek Dikeluarkan Oleh Dinas PM dan PTSP Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman dan	Dinas Perhubungan Hanya Mengeluarkan Rekomendasi Tentang Pertimbangan Teknis. Kegiatan Ini Dialokasikan Biaya Honor Pegawai Non asn pada bidang lalu Lintas

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Terintegrasi Secara Elektronik					Inspektorat Daerah, Sehingga Pada Sub Kegiatan Ini Yang Dianggarkan Gaji Non Asn	Dan Angkutan
2.15.03				**3. Program Pengelolaan Pelayaran**	**Persentase Pemenuhan Layanan Transportasi Laut/Penyeberangan Serta Pemenuhan Sarana Prasarana Transportasi**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.15.03.2.01				3.1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau Yang	100%	100%	50%		
2.15.03.2.01.01				1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen 5 Orang	0 Dokumen 5 Orang	50%	Akibat Efisiensi Anggaran Maka Kegiatan Identifikasi Pada 3 Kecamatan Tidak Dilaksanakan Dan Kegiatan Ini Hanya Mengalokasi Anggaran Untuk Gaji Honorer Pada Bidang Pengembangan Dan Keselamatan	Pada tahun 2022 Dilaksanakan Pada 5 Kecamatan Tahun 2023 di 2 Kecamatan
2.15.03.2.07				3.2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pelayanan Penyebrangan Kapal Dalam Daerah Yang Tersusun	100%	56,60%	56,60%		
2.15.03.2.07.04				1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan Produksi Angkutan Penyebera-Ngan Dan 1 Laporan Produksi Angkutan Pelayaran Rakyat/Jumlah Penumpang 58.000 0rang	2 Laporan Produksi Angkutan Penyebera Ngan Dan 1laporan Produksi Angkutan Pelayaran Rakyat/Jumlah Penumpang 32.829 0rang	56,60%	Presentase Capaian Yang Rendah Akibat Biaya Operasional Kapal Pelayaran Rakyat Yang Tidak Berajalan Sesuai Target	Anggaran Operasional Kapal Telah Dialokasikan Pada Perubahan Anggaran Tetapi Akibat Keterlambatan Penetapan Anggaran Sehingga Pelayaran Regular Tidak Dapat Dilaksanakan
2.15.03.2.12				3.3. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan Perizinan Pelabuhan	100%	83,34%	83,34%		
2.15.03.2.12.02				1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan produksi angkutan penyeberan-gan dan 1 laporan	2 laporan produksi angkutan penyeberan-gan dan 1 laporan produksi	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		produksi angkutan pelayaran rakyat/ jumlah penumpang 50.000 orang	angkutan pelayaran rakyat/ jumlah penumpang 45.459 orang			
2.15.03.2.12.05				2. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Tersedia	1 unit	1 unit	100%	Sub Kegiatan Ini Adalah Kegiatan Pembagunan Kapal Cepat Penumpang Yang Pembiayaan Berasal Dari DAK Transportasi Perairan TA. 2024. Realisasi Fisik 100%, Realisasi Keuangan 30%, Akibat Gagal Bayar Pada TA. 2024	Output Capaian Sub Kegiatan Ini Berupa 1 Unit Kapal Cepat Penumpang. Sisa 30% Menjadi Utang Belanja Daerah TA. 2025
2.15.03.2.13				3.4. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Cakupan Pembangunan, Perizinan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	100%	100%	100%		
2.15.03.2.13.03				1. Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Beroperasi Dan Terpelihara	3 unit	3 unit	100%		
2.16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
			MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT							
2.16.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**52,52%**	**52,52%**		
2.16.01.2.01				1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	80%	80%	100%		
2.16.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.16.01.2.02				1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan PD berjalan sesuai standar	100%	97%	97%		
2.16.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang	33 Orang	94%	2 Pegawai Mutasi	
2.16.01.2.02.03				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.16.01.2.05				1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepegawaian yang Diadministrasi sesuai standar	10%	5,56%	5,56%		
2.16.01.2.05.02				1. Pengadaan Pakaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas	33 Paket	33 Paket	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dinas beserta Atribut kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan					
2.16.01.2.05.11				2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 Orang	1 Orang	13%		
2.16.01.2.06				1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	96%	96%		
2.16.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.16.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%		
2.16.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.16.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi tamu	10 Laporan	12 Laporan	100%		
2.16.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	8 Laporan	100%		
2.16.01.2.07				1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang yang terpenuhi	5%	5%	100%		
2.16.01.2.07.06				1. Pengadaan sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%		
2.16.01.2.08				1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa urusan yang tersedia	100%	83%	83%	Anggaran Sisa Tidak Sempat Cair	
2.16.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.16.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8 Laporan	67%		
2.16.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.16.01.2.09				1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%		
2.16.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%		
2.16.01.2.09.02				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.16.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%		
2.16.02				**2. Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Peningkatan akses dan aplikasi teknologi terapan**	**4,64%**	**4,64%**	**100%**		
2.16.02.2.01				2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,64%	4,64%	100%		
2.16.02.2.01.03				1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.16.02.2.01.06				2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.16.02.2.01.12				3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.16.03				**3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.16.03.2.01				3.1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50%	50%	100%		
2.16.03.2.01.02				1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2.16.03.2.01.03				2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	47 Unit	47 Unit	100%		
2.16.03.2.02				3.2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50%	50%	100%		
2.16.03.2.02.08				1. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100%		
2.16.03.2.02.10				2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Komunikasi Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
2.17		**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**								
2.17.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**95%**	**95%**		
2.17.01.2.02				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	94,76%	94,76%		
2.17.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	24 Orang	100%		
2.17.01.2.06				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Berjalan Sesuai Standar	100%	97,98%	97,98%		
2.17.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2 17 01 2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2 17 01 2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	100%		
2 17 01 2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	12 Paket	100%		
2 17 01 2.06.09				5. Penyelenggar-aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.17.01.2.08				1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	100%	99,98%	99,98%		
2 17 01 2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2 17 01 2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2 17 01 2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2.17.01.2.09				1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Yang Terpelihara	100%	99,89%	99,89%		
2 17 01 2.09.09				1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%		
2 17 01 2.09.11				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Bangunan Lainnya						
		BERKEMBANGNYA INVESTASI DAN KEGIATAN USAHA EKONOMI KREATIF SERTA PARIWISATA BERBASIS UMKM DAN EKONOMI KERAKYATAN								
2.17.03				**2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Pemeriksaan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.17.03.2.01				2.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dan KSP/USP yang diawasi dan diperiksa Laporan Pertanggungjawaban setiap Tahunnya	32 koperasi	32 koperasi	100%		
2 17 03 2.01.04				1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	32 Koperasi	32 Koperasi	100%		
			MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA UNGGULAN DAERAH							
2.17.07				**3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.17.07.2.01				3.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%		
2 17 07 2.01.03				1. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah Mendapatkan Perizinan	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100%		
2 17 07 2.01.14				2. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	250 Unit Usaha	674 Unit Usaha	100%		
2 17 07 2.01.15				3. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	20 Orang	20 Orang	100%		
2.17.08				**4. Program Pengembangan UMKM**	**Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**	**100%**	**95,17%**	**95,17%**		
2.17.08.2.01				4.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	100%		
2 17 08 2.01.02				1. Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.18	**PENANAMAN MODAL**									
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
2.18.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**90%**	**90%**		
2.18.01.2.02				1.1. Penyedian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	91,66%	91,66%		
2.18.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	24 Orang	22 Orang	91,66%	Realisasi Akhir Tidak Sesuai Target Di Karenakan 1 Pegawai Meninggal Dunia, 2 Pegawai Mutasi Keluar Dan Ada Penambahan 1 Pegawai.	
2.18.01.2.06				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	100%		
2.18.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
2.18.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi Anggaran Hanya Mencapai 97,76% Di Karenakan Ada Sisa Anggaran Belanja. Dimana Harga Satuan Barang Pada SSH Lebih Besar Nilainya Dari Harga Pembelian Paket.	
2.18.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi Anggaran Hanya 85,40%, Dikarenakan Kebutuhan Hanya Sekian Persen Dari Biaya Yg Di Anggarkan.	
2.18.01.2.06.08				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi Anggaran Hanya 68,76% Dikarenakan Ada Sisa Anggaran Yang Tidak Terpakai.	
2.18.01.2.06.09				5. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi Anggaran Hanya 86,04% Dikarenakan Ada Sisa Anggaran Yang Tidak Terpakai.	
2.18.01.2.07				1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase BMD Penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.01.2.07.10				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi Anggaran Hanya 49,93% Dikarenakan Unit Barang Yang Di Anggarkan Pada Nilai SSH Lebih Besar Dari Nilai Unit Yang Di Realisasi Sehingga Ada Sisa Anggaran.	
2.18.01.2.08				1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	100%	1005		
2.18.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi Anggaran Hanya 95,45% Dikarenakan Ada Sisa Kelebihan Anggaran,Harga SSH Lebih Besar Dari Harga Yang Di Realiasi	
2.18.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Target Terpenuhi Namun Pada realisasi anggaran hanya 94,16% dikarenakan ada sisa anggaran yang tidak terpakai.	
2.18.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi Anggaran Hanya 83,64% Dikarenakan Anggaran Tidak Tersedia Penuh Dan Hanya Di Realisasi Setengah Sehingga Realiasi Untuk Target Tidak Maksimal Tetapi Tetap Di Jalankan Meski Tanpa Anggaran Pendukung Yang Maksimal.	
2.18.01.2.09				1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD Penunjang urusan yang terpelihara	100%	75%	75%		
2.18.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%	Target Terpenuhi Namun Pada realisasi anggaran hanya 85,82% dikarenakan kebutuhan untuk Pemeliharaan Kendaraan 1 unit pertahun hanya di gunakan/ direalisasi sebagian	
2.18.01.2.09.10				2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	5 Unit	1 Unit	20%	Hanya 1 Unit yang di lakukan Pemeliharaan/	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				Perbaikan	
2.18.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	6 Unit	-	-	Untuk kegiatan ini di anggarkan namun sampai akhir Tahun unit yang dianggarkan tidak mengalami gangguan/ kerusakan sehingga tidak ada yang di realisasi untuk biaya pemeliharaannya	
2.18.04				**2. Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Presentase Perijinan Yang Diterbitkan**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.18.04.2.01				2.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan yang sesuai SOP	100%	100%	100%		
2.18.04.2.01.01				1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi Anggaran Hanya 22,78% Dikarenakan Anggaran Tidak Tersedia Penuh Dan Hanya Bisa Di Realisasi Sebagian, Sehingga Realiasi Untuk Target Tidak Maksimal Tetapi Tetap Di Jalankan Meski Tanpa Anggaran Pendukung Yang Maksimal.	
2.18.05				**3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Presentase kenaikan/ penurunan nilai realisasi Investasi PMDN**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.18.05.2.01				3.1. Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang dibina dengan baik	100%	100%	100%		
2.18.05.2.01.02				1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis	74 Pelaku Usaha	74 Pelaku Usaha	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi Anggaran Hanya 86,13% Dikarenakan Pada Pelaksaan Ada yang Tidak Maksimal Menjalankan Kegiatannya Sehingga Ada Sisa Anggaran yang Tidak Digunakan	
2.18.05.2.01.03				2. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang diawasi	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100%	Target Terpenuhi Namun Pada Realisasi	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Anggaran Hanya 94,83% Dikarenakan Ada Sisa Anggaran yang Tidak Terpakai Karena Perbedaan Harga Pada SSH Dengan Harga, dan Juga Sebagian yang Kurang Maksimal Menjalankan Kegiatan.	
2.18.06				**4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang tersedia dan bisa diakses secara online**	**100%**	**91,66%**	**91,66%**		
				4.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase sistem pelayanan yang terintegrasi	100%	91,66%	91,66%		
				1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	12 Laporan	11 Laporan	91,66%	Target Tidak Terpenuhi 100% Karena Anggaran Tidak Tersedia Dengan Maksimal.	
	PEMUDA DAN OLAHARAGA									
2.19		**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**								
			MENINGKATNYA PERAN DAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN							
2.19.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**88,06**	**88,06%**		
2.19.01.2.02				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	94%	94%		
2.19.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	17 Orang	94,%		
2.19.01.2.06				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	65,75%	65,75%		
2.19.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.600 KWH	817 KWH	51%		
2.19.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	0	0%		
2.19.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	0%		
2.19.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak Yang Disediakan dan Digandakan	7.920 Lembar	7.905 Lmbar	100%		
2.19.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	1.041 Orang	449 Orang	43%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.19.01.2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi PD Yang Terselenggara	43 Laporan	33 Laporan	77%		
2.19.01.2.08				1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	100%	97%	97%		
2.19.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	0%		
2.19.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	34 Orang	33 Orang	97%		
2.19.01.2.09				1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Yang Tersedia	100%	95,50	95,50%		
2.19.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100%		Minimnya penyerapan anggaran
2.19.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	2 Unit	1 Unit	85%		
2.19.02				**2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif**	**100%**	**40%**	**40%**		
2.19.02.2.01				2.1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan yang dilakukan	100%	40%	40%		
2.19.02.2.01.07				1. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	5 Kampus	2 Kampus	40%	3 Kampus Tidak Ada Pengajuan Proposal Pencairan Anggaran Dari Pihak Kampus	Perlu Diakomodir Tahun 2025
2.19.02.2.01.08				2. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawa-nan Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Ketahanan Bela Negara	1 Pelatih	-	0%		
2.19.03				**3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Persentase Kelompok Olahraga Masyarakat yang Berperanan Aktif**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.19.03.2.01				3.1. Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pada Jenjang Pendidikan Yang Dilakukan	100%	100%	100%		
2.19.03.2.01.03				1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Dibangun	15 Sarana Alat Olahraga	15 Sarana Alat Olahraga	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/kota						
2.19.03.2.04				3.2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Yang Dilakukan	100%	100%	100%		
2.19.03.2.04.01				1. Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang berjalan sesuai standar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
2.19.03.2.04.02				2. Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	1 Organisasi	-	0%		
2.19.03.2.05				3.3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan	100%	100%	100%		
2.19.03.2.05.01				1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event kegiatan olahraga rekreasi yang diikuti/dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
2.19.04				**4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Cakupan Opd Yang Mengakses Data Dan Informasi Daerah Yang Terintegrasi**	**100%**	**0%**	**0%**		
2.19.04.2.01				4.1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	0%		
2.19.04.2.01.02				1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Cakupan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang ditingkatkan	1 Kegiatan	-	0%	Anggaran Tidak Dicairkan di Tahun 2024	Perlu Diakomodir di tahun 2025
2.22	**KEBUDAYAAN**									
2.22		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**								
			MENINGKATNYA KUALITAS MODAL SOSIAL SERTA PENERAPAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL							
2.22.03				**1. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Tradisional**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.22.03.2.01				1.1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kesenian Yang Diadakan	1 Kesenian	1 Kesenian	100%		
2.22.03.2.01.01				1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	10 Orang	100%		
2.22.04				**2. Program Pembinaan Sejarah**	**Persentase Sejarah Lokal Yang Terbina**	**100%**	**0**	**0%**		
2.22.04.2.01				2.1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal Yang Dibina	1 Sejarah	-	0%		
2.22.04.2.01.01				1. Pemberdayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia	10 Orang	-	0%	Kegiatan Tidak	Kegiatan Dianggarkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota	dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				Terlaksana	Sesuai Dengan Kebutuhan Anggaran Tahun 2025
2.22.05				**3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan**	**100**	**100%**	**100%**		
2.22.05.2.01				3.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Diklaim Milik Kabupaten/Kota	1 Cagar Budaya	1 Cagar Budaya	100%		
2.22.05.2.01.02				1. Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	1 Objek	100%		
2.23	**PERPUSTAKAAN**									
2.23		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**								
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK							
2.23.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**43,4%**	**43,4%**		
2.23.01.2.02				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	100%		
2.23.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Org	24 Org	100%		
2.23.01.2.06				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Pd Berjalan Sesuai Standar	100%	84,66%	84,66%		
2.23.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	98%	98%		
2.23.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan dan Digandakan	100%	81%	81%		
2.23.01.2.06.09				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD Yang Terselenggara	8	6	75%		
2.23.01.2.07				1.3. Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	100%	0%	0%		
2.23.01.2.07.07				1. Pengandaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	100%	-	0%		
2.23.01.2.08				1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	100%	81,25%	81,25%		
2.23.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	350	250	71,43%		
2.23.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Satuan Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air dan Jasa Listrik yang Dipakai	100	55	55%		
2.23.01.2.08.03				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Satuan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100	99	99%		
2.23.01.2.08.04				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	20 Orang	20 Orang	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.23.01.2.09				1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjangurusan Urusan Yang Terpelihara	100%	33,33%	33,33%		
2.23.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	100%		
2.23.01.2.09.07				2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara	1 Unit	-	0%		
2.23.02				**2. Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentasi Pembinaan Perpustakaan**	**100%**	**63,5%**	**63,5%**		
2.23.02.2.01				2.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	40%	27%		
2.23.02.2.01.04				1. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Disatuan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten/kota	150	40%	27%		
2.23.02.2.02				2.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Yang Gemar Membaca	100%	87%	87%		
2.23.02.2.02.01				1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
2.23.02.2.02.04				2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Literasi Yang Berbasis Inklusi Sosial	100	74%	74%		
2.24	**KEARSIPAN**									
2.24		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**								
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK							
2.24.02				**1. Program Pengelolaan Arsip**	**Persentasi Arsip yang diolah**	**100%**	**73%**	**73%**		
2.24.02.2.03				1.1. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten /Kota	Persentase Simpul Informasi Kearsipan Nasional	100%	73%	73%		
2.24.02.2.03.02				1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kearsipan Yang Diberdayakan	100	73%	73%		

3.1.4. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menjalankan urusan pilihan diantaranya Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan (kewenangan Provinsi); Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; serta Transmigrasi.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru telah berhasil memaksimalkan pengembangan potensi daerah hal ini terlihat dari banyaknya program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dan capaiannya dapat dilihat pada penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pilihan pada tahun 2025 berikut ini.

Tabel 3.19
Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
		DINAS PERIKANAN								
			MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI DAERAH BERBASIS SUMBERDAYA UNGGULAN DAERAH							
3.25.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100**	**100**	**75,2%**		
3.25.01.2.01				**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu**	**100**	**0**	**0**		
3.25.01.2.01.07				1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	0	0	Target dan realisasi anggaran tidak terpenuhi dikarenkan kegiatan terebut tidak dilaksanakan	
3.25.01.2.02				**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu**	**100**	**99,45**	**99,45%**		
3.25.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	102 ASN	102 ASN	99.45%	Target terpenuhi namun realisasi anggaran hanya mencapai 95,72% karena ada permintaan penambahan tamsil 6 bulan tidak terealisasi	
3.25.01.2.05				**1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang dilayani**	**100**	**0**	**0**		
3.25.01.2.05.02				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	0	0		
3.25.01.2.06				**1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**100**	**57,03%**	**57,03%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.25.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	0	**0**	Target dan Realisasi tidak terpenuhi	
3.25.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	0	0		
3.25.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	98.63%		
3.25.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	88.21%		
3.25.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket	1 paket	95.72%		
3.25.01.2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	100	100	59.63%	Target terpenuhi namun realisasi keuangan hanya 59,63 % karena ada terjadi pemabahan pagu pada perubahan anggaran yang tidak terealisasi	
3.25.01.2.07				**1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang yang terpenuhi**	**100**	**0**	**0**		
3.25.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	**6 unit**	0	0		
3.25.01.2.08				**1.6 Penyediaan Jsaa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**PersentaseBarang Milik Daerah penunjang yang terpenuhi**	**100**	**64,99%**	**64,99%**		
3.25.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	60.61%	realisasinya tidak mencapat target dikarenakan terkena dampak efisiensi	
3.25.01.2.08.02				2. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang sesuaikan	1 laporan	1 laporan	69.38%	realisasinya tidak mencapat target dikarenakan terkena dampak efisiensi	
3.25.01.2.09				**1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia**	**100**	**79,33%**	**79,33%**		
3.25.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Kendaraan Dinas Jabatan						
3.25.01.2.09.02				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	1 Unit	1 Unit	100%		
3.25.01.2.09.06				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		15 Unit	4 Unit	38%		
3.25.01.2.09.09				4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	-		
3.25.03				**2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP**	**100**	**100**	**100%**		
3.25.03.2.02				**2.1 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota**	**Presentase Kelompok Nelayan Dibina/Jumlah Training Skil Perbaikan Mesin Kapal/Perahu untuk Nelayan**	**100**	**100**	**100%**		
3.25.03.2.02.01				1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil meningkat kapasitasnya	5 Kelompok	5 Kelompok	100%		
3.25.03.2.03				**2.2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Presentase Terlaksananya Penyelenggaraan TPI**	**100**	**100**	**100%**		
3.25.03.2.03.02				1. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**22 Orang**	**22 Orang**	**100%**		
3.25.04				**3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**	**50 kelompok**	**0**	**0**	Target dan realisasi anggaran tidak terpenuhi dikarenkan kegiatan terebut tidak dilaksanakan	
3.25.04.2.02				**3.1 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**		**50 kelompok**	**0**	**0**		
3.25.04.2.02.01				1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas	**50 kelompok**	**0**	-		
3.25.04.2.02.02				2. 2. Pemberian Pendampingan,Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,Teknologi	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan,Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan	**50 kelompok**	**0**	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					
3.25.04.2.03				**3.2 Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudiaya Ikan (TPDIK)**		**0**	**0**	**-**		
3.25.04.2..03.02				1. Pelayanan Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TPIDK)	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil	0	0	-		
3.25.05				**4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**LUASAN KAWASAN KONSERVASI**	**100**	**50**	**50%**		
3.25.05.2.01				**4.1 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air lainnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan di Wilayah sungai,danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**20 Pelaku Usaha**	**10 Pelaku Usaha**	**50%**	Target terpenuhi namun realisasi keuangan hanya 50% karena adanya sisa anggaran sebesar Rp. 30.800.000	
3.25.05.2.01.01				1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hail Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah sungai,danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat di Usahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	20 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50%		
3.25.06				**5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**ANGKA KONSUMSI IKAN**	**100**	**21,80%**	**21,80%**	Target terpenuhi namun realisasi keuangan hanya 21.80% karena adanya sisa anggaran sebesar Rp. 104.785.640	
3.25.06.2.03				***5.1* Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**		**100 Paket**	**21,8 Paket**	**21,80%**		
3.25.06.2.03.01				1. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Pembinaan dan Mutu Hasil Perikanan	100% Paket	21,8% Paket	21,80%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.26	**PARIWISATA**									
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
			BERKEMBANGNYA INVESTASI DAN KEGIATAN USAHA EKONOMI KREATIF SERTA PARIWISATA BERBASIS UMKM DAN EKONOMI KERAKYATAN							
						100	***87.07***	***87.07***		
3.26.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100**	**90.17**	**90.17**	**Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi karena target capaian terealisasi dengan baik**	
3.26.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu**	***100***	***94***	***94.00***		
3.26.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	16 Orang	96		
3.26.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	***100***	***100,00***	***100,00***		
3.26.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
3.26.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
3.26.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
3.26.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100		
3.26.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia**	***100***	***88.62***	***88.62***		
3.26.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100		
3.26.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7 Laporan	77		
3.26.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase BM Penunjang Urusan yang Terpelihara**	***100***	***78.81***	***78.81***		
3.26.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2 Unit	1 Unit	84		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					
				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	97		
3.26.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	14 Unit	13 unit	55		
3.26.02				**2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PRESENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN**	**100**	***100***	***100.00%***	**Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi karena target capaian terealisasi dengan baik**	
3.26.02.2.03				**2.1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	**100**	***100***	***100.00%***		
3.26.02.2.03.04				1. Pengadaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Paket	1 Paket	100%		
3.26.04				**3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PERSENTASE PENINGKATAN MEDIA PEMASARAN PARIWISATA**	**100**	***96***	**96**	**Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi karena target capaian terealisasi dengan baik**	
3.26.04.2.02				**3.1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase pemasaran dan pengembangan kawasan pariwisata**	***100***	***96***	***96***		
3.26.04.2.02.04				1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, danMediaLainnyaBaik Dalam	15 Unit	13 Unit	96		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Luar Negeri	dan Luar Negeri					
3.26.05				**4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**PERSENTASE PELAKU EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**0**	**0**	**0**	**Kegiatannya tidak terealisasi dikarenakan Penetapan DPPA diakhir Tahun Anggaran Sehingga Kegiatan tersebut tidak bisa dijalankan.**	
3.26.05.2				**4.1 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi yang disediakan**	***0***	***0***	***0***	**Kegiatannya tidak terealisasi dikarenakan Penetapan DPPA diakhir Tahun Anggaran Sehingga Kegiatan tersebut tidak bisa dijalankan.**	
3.26.05.2.01				1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Laporan	0	0	**Kegiatannya tidak terealisasi dikarenakan Penetapan DPPA diakhir Tahun Anggaran Sehingga Kegiatan tersebut tidak bisa dijalankan.**	
3.27	**PERTANIAN**									
		DINAS PERTANIAN								
			MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN PROSUKTIVITAS EKONOMI DAERAH BERBASIS SUMBERDAYA UNGGULAN DAERAH							
3.27.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**					
3.27.01.2.02				**1.1 Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**		
3.27.01.2.02.01			**Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian**	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	133 Orang	133 Orang	100		
3.27.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum**	**Persentase administrasi umum**	**100**	**100**	**100**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Perangkat Daerah	**PD berjalan sesuai standar**					
3.27.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Paket	20 Paket	100		
3.27.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	20 Paket	20 Paket	101		
3.27.01.2.06.08				3. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	12 Laporan (129 Tamu)	12 Laporan (129 Tamu)	100		
3.27.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	24 Laporan (24 kali Rapat)	12 Laporan (12 Kali Rapat)	50		
3.27.01.2.07			**Tersedian-ya prasaran dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan**	**1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**25**	**25**		
3.27.01.2.07.11				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	5 Unit	25		
3.27.01.2.08			**Terkendali-nya penyebaran Organisme Penggang-gu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit hewan**	**1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**	**100**	**100**		
3.27.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	12 Laporan	1 Laporan	100		
3.27.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1 Laporan	100		
3.27.01.2.09				**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100**	**100**	**100**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Daerah						
3.27.01.2.09.02			**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembaga-an Pertanian**	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100		
3.27.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100		
3.27.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100		
3.27.03				**2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					
3.27.03.2.01				**2.1 Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana pertanian yang diberikan**	**100**	**100**	**100**		
3.27.03.2.01.01				1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
3.27.03.2.02				**2.2 Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian yang diberikan**	**100**	**100**	**100**		
3.27.03.2.01				1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	5 Unit	5 Unit	100		
3.27.03.2.04				**2.3 Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum**	**Jumlah Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**					
3.27.03.2.04.02				1. Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola	5 Ha	-	-		
3.27.05				**3. PROGRAM**	**PERSENTASAE FASILITASI**					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					
3.27.05.2.01				**3.1 Pegendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Penurunan Bencana Pertanian**					
3.27.05.2.01.01				1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisem Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunana yang dikendalikan	10 Ha	10 Ha	100		
3.27.05.2.01.05				2. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	5 Laporan	0 Laporan	0		
3.27.07				**4. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**CAKUPAN PENYULUHAN PERTANIAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN (%) CAKUPAN BINA KELOMPOK PETANI**	**100**	**100**	**100**		
3.27.07.2.01				**4.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Peningkatan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Penyuluhan	**100**	**100**	**100**		
3.27.07.2.01.01				1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	10 Unit	100		
3.30	**PERDAGANGAN**									
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN								
			MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN EKONOMI MASYARAKAT							
3.30.01	**PERDAGANGAN**	**DISDAGPERIN**		**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
3.30.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**75.00**	**75.00**		
3.30.01.2.02.01			ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	38 Orang	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.30.01.2.02.02			ASN	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	5 Dokumen	50%		
3.30.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**66.00**	**66.00**		
3.30.01.2.07.09			DISDAGPERIN	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	80%		
3.30.01.2.06.04			DISDAGPERIN	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100%		
3.30.01.2.06.05			DISDAGPERIN	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100%		
				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	50%		
3.30.01.2.06.09			DISDAGPERIN	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	-	0%		
3.30.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**100%**	**100%**		
3.30.01.2.08.01			DISDAGPERIN	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	100%		
3.30.01.2.08.02			DISDAGPERIN	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%		
3.30.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**		
3.30.01.2.09.01			DISDAGPERIN	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Unit	2 Unit	100%		
3.30.01.2.09.02			DISDAGPERIN	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Operasional	2 Unit	2 Unit	100%		
3.30.01.2.09.06			DISDAGPERIN	3. Pemeiharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.30.01.2.09.09			DISDAGPERIN	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 UNit	100%		
3.30.03	**PERDAGANGAN**	**DISDAGPERIN**		**2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**PERSENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA**	**100**	**50.00**	**50.00**		
3.30.03.2.01				**2.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**100**	**50.00**	**50.00**		
3.30.03.2.01.01			Pelaku Usaha/ Pedagang/ Masyarakat	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	-	0%		
3.30.03.2.01.02			Pelaku Usaha/ Pedagang/ Masyarakat	2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 Unit	1 Unit	100%		
3.30.04	**PERDAGANGAN**	**DISDAGPERIN**		**3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**PERSENTASE STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**100%**	**91.50**	**91.50**		
3.30.04.2.01				**3.1 Menjamin Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**100%**	**100%**		
3.30.04.2.01,01				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laopranKoordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10 Laporan	12 Laporan	100%		
3.30.04.2.01.03				2. Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10 Laporan	12 Laporan	100%		
3.30.04.2.02				**3.2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		**100%**	**83%**	**83%**		
3.30.04.2.02.01			Pelaku	1. Pemantauan Harga dan	Jumlah Laporan Pemantauan	10 Laporan	12	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Usaha/ Pedagang/ Masyarakat	Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Laporan			
3.30.04.2.02.02			Pelaku Usaha/ Pedagang/ Masyarakat	2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah LaporanPemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	10 Laporan	12 Laporan	100%		
3.30.04.2.02.03			Pelaku Usaha/ Pedagang/ Masyarakat	3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	50%		
3.30.06	**PERDAGANGAN**	**DISDAGPERIN**		**4. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN**	**100%**	**100%**	**100%**		
3.30.06.2.01				**4.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**		**100%**	**100%**	**100%**		
3.30.06.2.01.01			Pelaku Usaha/ Pedagang/ Masyarakat	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Di Tera Ulang	100 Unit	764 Unit	100%		
3.30.06.2.01.02			Pelaku Usaha/ Pedagang/ Masyarakat	2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10 Pelaku Usaha	595 Pelaku Usaha	100%		
3.31	**PERINDUSTRIAN**									
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN								
			PELAKU IKM/MASYARAKAT							
3.31.02	**PERINDUSTRIAN**	**DISDAGPERIN**		**1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PERSENTASE REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI YANG DITERBITKAN**	**100%**	**100%**	**100%**		
3.30.02.2.01				**1.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguan**		**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**100%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Industri Kabupaten/Kota						
3.31.02.2.01.03			Pelaku IKM/Masyarakat	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan SumberDaya Industri	10 Dokumen	10 Dokumen	100%		
3.31.02	**PERINDUSTRIAN**	**DISDAGPERIN**		**2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DITERBITKAN**	**100%**	**100%**	**100%**		
3.31.02.2.01				**2.1 penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota**		**100%**	**100%**	**100%**		
3.31.02.2.01.01			Pelaku IKM/Masyarakat	1. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10 Dokumen	10 Dokumen	100%		
3.32	**TRANSMIGRASI**									
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
			BERKEMBANGNYA INVESTASI DAN KEGIATAN USAHA EKONOMI KREATIF SERTA PARIWISATA BERBASIS UMKM DAN EKONOMI KERAKYATAN							
3.32.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100 %**	**93,75 %**	**93,75 %**		
					PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERPENUHI					
3.32.01.2.06				**1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
3.32.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Bangunan Kantor						
3.32.01.2.06.0004				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %		
3.32.01.2.06.0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %		
3.32.01.2.06.0008				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
3.32.01.2.06.0009				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
3.32.01.2.07				**1.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
3.32.01.2.07.0006				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100 %		
3.32.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
3.32.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
3.32.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
3.32.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD Penunjang Urusan Yang Terpelihara**	**100 %**	**91,67 %**	**91,67 %**		
3.32.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2 Unit	75,00 %		
3.32.01.2.09.0006				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100 %		
3.32.01.2.09.0009				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %		
3.32.02				**2. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**PERSENTASE PROGRAM TRANSMIGRASI YANG DILAKSANAKAN**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
3.32.02.2.01				2.1 **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
3.32.02.2.01.0001				1. Identifikasi Potensi	Jumlah Dokumen Hasil	1	1 Dokumen	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Kawasan Transmigrasi	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen				
3.32.03				**3. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**PERSENTASE LUAS KAWASAN TRANSMIGRASI YANG BERKEMBANG**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
3.32.03.2.01				3.1 **Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Satuan Pemukiman Yang Dibina**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
3.32.03.2.01.0020				1. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %		

3.1.5. Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diawali dengan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Unsur Pengawasan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan serta Unsur Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.20
Capaian Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.01	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH**									
		SEKRETARIAT DAERAH								
		MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH								
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00%**	**88,65%**	**88,65%**		
4.01.01. 2.02				**1.1 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Pd Tepat Waktu**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	138 Orang	100,00%		
4. 01 .01 .2.05				**1.2 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah**	Persentase Pegawai Pd Yang Dilayani	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.05.0006				1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah ASN Yang pensiun	40 Orang	40 Orang	100,00%		
4.01.01.2.05.0008				2. Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Dipindahtugaskan	-	-	-		
4.01.01. 2.06				**1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**65,27%**	**65,27**		
4.01 .01 2.06. 0002				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit	5 Unit	41,66		
4.01.01.2.06.0004				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10 Paket	83,33		
4.01.01.2.06 0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6 Paket	50,00		
4.01.01.2.06.0006				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan	41,66		
4.01.01.2.06.0008				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100,00		
4.01.01.2.06.0009				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	300 Laporan	75,00		
01.2.08				**1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**88,33%**	**88,33%**		
4.01.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.01.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	75,00%		
4.01.01.2.08.0004				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	9 Laporan	90,00%		
4.01.01.2.09				**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**67,00%**	**67,00%**		
4.01.01.2.09.0009				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	12 Unit	8 Unit	67,00%		
4.01.01.2.11				**1.6 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
4.01.01.2.11.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100%		
4.01.01.2.11.0002				2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang menerima Pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang	2 Orang	100%		
4.01.01.2.11.0003				3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100%		
4.01.01.2.11.0004				4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100%		
4. 01. 01 .2.12				**1.7 Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah**	**Presentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**		
4.01.01.2.12.0001				1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
4.01.01.2.12.0002				2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
		BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA								
			MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00**	**87,22**	**87,22**		
4 01 01 2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.01.01.2.01.0002				1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		
4 01 01 2.01 0003				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		
4 01 01 2.01 0006				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00		
4 01 01 2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
4.01.01.2.02.0002				1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00		
4.01 01 2.02.0003				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00		
4.01 01 2.02.0005				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00		
4.01.01.2.03				**1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100,00**	**33,00**	**33,00**		
4.01.01.2.03.0001				1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	1 Dokumen	0	0		
4.01.01.2.03.0004				2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0		
4.01.01.2.03.0006				3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00		
4 01 01 2.06				**1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00**	**88,33**	**88,33**		
4.01.01 2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00		
4 01 01 2.06.0004				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00		
4 01 01 2.06.0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00		
4 01 01 2.06.0007				4. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4. 01 01 2.06.0008				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100,00		
4. 01 01 2.06.0009				6. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	3 Laporan	30,00		
4. 01 .01 .2.07				**1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
4. 01 .01 .2.07.0006				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100,00		
4. 01. 01. 2.08				**1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
4 01 01 2.08 0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00		
4 01 01 2.08 0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	12 Laporan	12 Laporan	100,00		
4. 01 01 2.08 0004				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00		
4 01 01 2.09				**1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100,00**	**76,44**	**76,44**		
4. 01 01 2.09 0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18unit	15 Unit	83,33		
4 01 01 2.09 0006				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	78 Unit	76 Unit	97,44		
4 01 01 2.09 0009				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	25,00		
4 01 01 2.09 0011				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100,00		
4 01 01 2.12				**1.8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Presentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
4 01 01 2.12 0001				1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00		
4 01 01 2.12 0002				2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4 01 01 2.12 0003				3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00		
4.01		**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA**								
			MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00%**	**78,61%**	**78,61%**		
01 01.01 2.06				**1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**95,00%**	**95,00%**		
4.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	100,00%		
4.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100,00%		
4.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan	1 paket	1 paket	100,00%		
4.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	8 Laporan	6 laporan	75,00%		
4.01.01.2.07				**1.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**-**	**Tidak ada anggaran untuk dibelanjakan**	
4.01.01.2.07.011				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0%	0%		
4 01 01 2.09				**1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100,00%**	**62,22%**	**62,22%**	**Kebutuhan tercukupi, anggaran yang disediakan melebihi kebutuhan**	
4 01 01 2.09 11				1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	225 Paket	14 paket	62,22%		
4 01 03				**2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA SEKTOR PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 03 2.02				**1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
					pembangunan					
4 01 03 2.02 01				1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah program pembangunan yang di susun	2 dokumen	2 dokumen	100,00%		
4 01 03 2.02 03				2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
4.01		**BAGIAN KERJA SAMA ANTAR WILAYAH SETDA**								
			MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 01 2.06				**1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 01 2.06 0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100,00%		
4 01 01 2.06 0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100,00%		
4 01 01 2.06 0008				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	100,00%		
4.01 01 2.06 0009				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.08				**1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4. 01. 01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	100,00%		
4. 01. 01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi,,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
4. 01. 01.2.08.0004				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	100,00%		
4 01 01 2.09				**1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 01 2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
4 01 02				**2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** .	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA SEKTOR PEMERINTAHAN DAN KESRA PERSENTASE KERJASAMA**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 02 2.04				**2.1 Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 02 2.04.0001				1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100 Dokumen	100 Dokumen	100,00%		
4.01		**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA**								
				MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH						
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**		
4 01 01 2.06				**1.1 Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100.00%**	**100.00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%		
4 01 01 2.06 05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan	1 Paket	1 Paket	100.00%		
4 01 01 2.06 08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
4 01 01 2.06 09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
4 01 01 2.08				**1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 01 2.08 04				1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
4.01.01. 2.09				**1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase BMD Penunjang Urusan yang terpelihara	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.09.11				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/di rehabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4 01 02				**2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Tingkat Capaian Kinerja pada sektor Pemerintahan dan Kesra**	**100,00%**	**95,00%**	**95,00%**		
4 01 02 2.02				**2.1 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**100,00%**	**95,00%**	**95,00%**		
4.01.02 2.02.0001				1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	9 Dokumen	90,00%		
4 01 02 2.02 0002				2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
4.01		**BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA**								
			MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00%**	**97,33%**	**97,33%**	Keterbatasan Alokasi dan dan Implementasi Pelaksanaan Anggaran sehingga pembiayaan sebagian Kegiatan dan/atau sub kegiatan tidak optimal dilaksanakan	Mengusulkan Alokasi Anggaran yang memadai serta inplementasi pelaksanaan anggaran yang maksimal kepada TPAD
4. 01. 01 .2.05				**2.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.05.0002				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	**100,00%**		
4 .01 .01 .2.06				**3.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai stand**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.06.0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	**100,00%**		
4.01.01.206.0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	**100,00%**		
4.01.01.2.06.0008				3. FasilitasI Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	**100,00%**		
4.01.01.2.06.0009				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	1 Laporan	1 Laporan	**100,00%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.01.01.2.07				**4.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan Mesain Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	**100,00%**		
4.01.01.2.08				**5.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	**100,00%**		
4.01.01.2.08 .0004				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	**100,00%**		
4.01.01.2.09				**6.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terelihara**	**100,00%**	**86.67%**	**86.67%**		
4.01.01.2.09. 0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1 Unit	50,00%		
4.01.01.2.09. 0006				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara	13 Unit	12 Unit	92,31%		
4.01.03				**2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Evektivitas Pelaksanaan kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Pengelolaan	**100,00%**	**85,42%**	**85,42%**		
4.01.03.2.01				**2.1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan**	**100,00%**	**87.50%**	**87,50%**		
4.01.03.2.01.0001				1. Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	**100,00%**		
4.01.03.2.01.0002				2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 laporan	2 laporan	100,00%		
4.01.03.2.01.0003				3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 laporan	1 laporan	50,00%		
4.01.03.2.01.0004				4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%		
4.01.03.2.04				**2.2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**100,00%**	**83,33%**	**83,33%**		
4.01.03.2.04.0001				1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2 dokumen	2 dokumen	100,00%		
4.01.03.2.04.0002				2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan	2 dokumen	2 dokumen	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup					
4.01.03.2.04.0003				3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	2 dokumen	1 Dokumen	50,00%		
4.01		**BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA**								
			MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100%**	**96,00%**	**96,00%**		
4.01.01.2.05				**1.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase administrasi kepegawaian berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01. 01. 2.05. 02				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian dinas beserta atributnya	1 Paket	1 Paket	100%		
4. 01. 01. 2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**88,75%**	**88.75%**		
4.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	11 Paket	100,00%		
4. 01.01. 2.06. 05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan	12 Paket	12 Paket	100,00%		
4. 01. 01. 2.06 08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
4.01.01. 2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	11 Laporan	6 Laporan	55,00%		
4.01.01.2.07				5. Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.07.06				6. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit dan peralatan mesin lainnya yang di sediakan	2 unit	2 unit	100,00%		
4.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 01 2.08.01				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
4. 01. 01.2.08.02				b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumb erdaya air dan jasa listrik yang dipakai	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
4. 01. 01.2.08.04				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor Disesuaiakan dengan Perpres No.53 Tahun 2023.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									Tidak menggunakan Standar Biaya Umum Pada SIPD	
4.01.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 01 2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	3 Unit	100,00%		
4 01 01 2.13				**1.5 Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi**	**100,00%**	**88,00%**	**88,00%**		
4 01 01 2.13.01				3.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	8 Dokumen	80,00%		
4 01 01 2.13.02				3.2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15 Laporan	13 Laporan	87,00%		
4 01 01 2.13.03				3.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	15 Dokumen	11 Dokumen	73,00%		
4 01 01 2.13.04				3.4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
4 01 01 2.13.05				3.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
4.01		**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA**								
			MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.06				**1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.06 .02				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	100,00%		
4. 01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100,00%		
4.01.01.2.06 08				3. FasilitasI Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.06 09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.07				**1.2 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**		
4.01.01.2.07.05				1. Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1 Unit	1 Unit	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.01.01.2.07.11				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100,00%		
4.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.08.01				1. Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lapran	2 Laporan	100,00%		
4 01 01 2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.09.0009				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00%		
4 01 01 2.09.0011				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100,00%		
4.01.02				**2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.02.2.01				**2.1 Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.02.2.01 01				1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%		
4.01.02.2.01 02				2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
4.01.02.2.01 03				3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%		
4.01		**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA**								
			MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**		
4 01 01 2.05				**2.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**		
4.01.01.2.05.11				1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 org	2 org	100.00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.01.01.2.06				**2.2 Administrasi Umum PerangkatDaerah**		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**		
4.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 pkt	1 pkt	100.00%		
4.01.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 pkt	5 pkt	100.00%		
4. 01. 01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 pkt	4 pkt	100.00%		
4. 01.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan	1 pkt	1 pkt	100.00%		
4. 01.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1 laporan	1 laporan	100.00%		
4.01 01 2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	7 laporan	7 laporan	100.00%		
4 01 01 2.08				**2.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**		
2.01 01 2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	100.00%		
4 01 01 2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100.00%		
4 01 01 2.09				**2.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**		
4 01 01 2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit	2 unit	100.00%	**Nilai Pembayaran Pajak Roda 2 pada Standar Biaya lebih besar dari nilai pajak yang dibayarkan di Samsat**	
4. 01 01 2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	7 unit	7 unit	100.00%		
4.01 03				**2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA SEKTOR PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**		
4. 01 .03 .2.01				**2.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Presentase Tingkat capaian Kinerja sektor perekonomian dan pembangunan Daerah**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**		
4. 01. 03. 2.0301				1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	32 dokumen	32 dokumen	100.00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4. 01.03. 2.03.02				2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah layanan Pengadaan barang dan jasa	30 laporan	30 laporan	100.00%		
4.01		**BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA**								
			MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
4.01.01.06				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
				2.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
				1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
4 01 01 2.06				**3.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4 01 01 2.06 0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%		
4 01 01 2.06 0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan	12 Paket	12 Paket	100,00%		
4 01 01 2.06 0009				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.08				**4.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	20 Laporan	100,00%		
4 01 01 2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.09				**5.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.09.01				1. Penyediaan jasa Pemeliharaan,BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3 Unit	3 unit	100,00%		
4. 01. 02				**2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA SEKTOR PEMERINTAHAN DAN KESRA**	**100,00%**	**73,95%**	**73,95%**		
4.01.02 2.03				**2.1 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Tingkat pemenuhan kebetuhan layanan hukum dan produk hukum**	**100,00%**	**73,95%**	**73,95%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.01022.03.0001				1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk Hukum Daerah yang disusun	25 Produk Hukum	22 Produk Hukum	88,00%		
4.0102 2.03.0002				2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yg mendapatkan Fasilitasi bantuan hukum	2 Kasus	2 Kasus	100,00%	Pengaduan Sengketa Tanah Garapan 1.Yayasan Budi Luhur 2.Sdr. Hamran Fredy	Dapat Terselesaikan Dengan Kesepakatan..Hakim Pengadilan Dobo
4.01022.03.0003				3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2.645 Dokumen	896 Dokumen	33,87%		
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								
			MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
4.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00%**	**94,87%**	**94,87%**		
4.01.01.2.06				**1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**92,85%**	**92,85%**		
4.01.01.2.06.0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	79 Paket	79 Paket	100,00%		
4.01.01.2.06.0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan	23 Paket	23 Paket	100,00%		
4.01.01.2.06.0008				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.06.0009				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	14 Laporan	10 Laporan	71,42%		
4.01.01.2.08				**1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.08.0004				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.09				**1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara/ dibayarkan pajaknya	2 unit	2 unit	100,00%		
4.01.01.2.09.0010				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.01.01.2.09.0011				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	10 unit	10 unit	100,00%		
4.01.01.2.14				**1.4 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Presentas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**86,66%**	**86,66%**		
4.01.01.2.14.0001				1. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	15 Laporan	9 Laporan	60,00%		
4.01.01.2.14.0002				2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
4.01.01.2.14.0003				3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	1 Laporan	100,00%		
4.02	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**									
4.02		**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**								
			MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH							
4. 02 .01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00%**	**81,05%**	**81,05%**		
4.02.0.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**72,08%**	**72,08%**		
4.02.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang	80 Orang	72,08%		
4 .02. 01 .2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**91,62%**	**91,62%**		
4. 02 01. .2.06 0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00%		
4.02.01.2.06.0004				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12Paket	100,00%		
4.02.01.2.06.0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan	12 Paket	12 Paket	100,00%		
4.02.01.2.06.0006				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	17 Dokumen	68,02%		
4.02.01.2.06.0008				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	24 Laporan	96,00%		
4.02.01.2.06.0009				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	6 Laporan	85,71%		
4 .02 .01 .2.07				**1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00%**	**75,00%**	**75,00%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.02.01.2.07.0010				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3 Unit	75,00%		
4. 02 .01 .2.08				**1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00%**	**77,77%**	**77,77%**		
4.02.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	25 Laporan	100,00%		
4.02.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
4.02.01.2.08.0004				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10 Laporan	83,33%		
4. 02. 01 .2.09				**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00%**	**59,03%**	**59,03%**		
4.02.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2 Unit	66,00%		
4.02.01.2.09.0002				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1 Unit	33,00%		
4.02.01.2.09.0009				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	80,00%		
4.02.01.2.09.0011				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	8 Unit	57,14%		
.02. 01 .2.15				**1.6 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100,00%**	**97,08%**	**97,08%**		
4.02.01.2.15.0001				1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	350 Dokumen	329 Dokumen	94,17%		
4.02.01.2.15.0002				2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100,00%		
4. 02. 01 .2.16				**1.7 Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**100,00%**	**94,61%**	**94,61%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.02.01.2.16.0003				1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	50 Laporan	46 Laporan	92,00%		
4.02.01.2.16.0004				2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	35 Paket	97,22%		
4. 02. 02				**2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**1. KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N 2. PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N 3. PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	**100,00%**	**86,30%**	**86,47%**		
4. 02 .02 .2.01				**2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100,00%**	**97,91%**	**97,91%**		
4.02.02.2.01.0002				1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	96 Dokumen	94 Dokumen	97,91%		
4 .02. 02 .2.04				**2.2 Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
4.02.02.2.04.0005				1. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	100,00%		
4. 02 02 .2.05				**2.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100,00%**	**97,99%**	**97,99%**		
4.02.02.2.05.0001				1. Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75 Laporan	73 Laporan	97,33%		
4.02.02.2.05.0003				2. Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	74 Dokumen	98,66%		
4 .02. 02. 2.08				**2.4 Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**100,00%**	**49,33%**	**50,00%**		
4.02.02.2.08.0001				1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	75 Dokumen	37 Dokumen	50,00%		
5.01	**PERENCANAAN**									
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
			BERKEMBANGNYA INOVASI DAERAH							
5.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100,00%**	**83,72%**	**83,72%**		
5.01.01.2.01				**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.01.01.2.01.02				1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%		
5.01.01.2.01.03				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%		
5.01.01.2.02				**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100,00%**	**91,00%**	**91,00%**		
5.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	50 Orang	91,00%		
5.01.01.2.05				2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	**100,00%**	**-**	**-**		
5.01.01.2.05.02				3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	- Paket	-	Kegiatan tidak terlaksana	
5.01.01.2.06				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	**100,00%**	**90,80%**	**90,80%**		
5.01.01.2.06.01				5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00%		
5.01.01.2.06.04				6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	100,00%		
5.01.01.2.06.05				7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%		
5.01.01.2.06.08				8. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
5.01.01.2.06.09				9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	27 Laporan	54,00%		
5.01.01.2.07				**1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5 01 01 2.07. 011				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainny	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100,00%		
5.01.01.2.08				**1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100,00%**	**89,00%**	**89,00%**		
5.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
5.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24 Laporan	67,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
5.01.01.2.09				**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100,00%**	**31,50%**	**31,50%**		
5.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3 Unit	30,00%	Pemeliharaan kendaraan & Pajak terlaksana 100% tetapi Anggaran tidak terpakai habis	
5.01.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	
5.01.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	33,00%	Kegiatan terlaksana 100% tetapi Anggaran tidak terpakai habis	
5.01.02				**2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD, RPJMD, RKPD, DAN RTRW YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERDA/PERKADA**	**100,00%**	**51,25%**	**51,25%**		
5.01.02.2.01				**2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase tahapan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai aturan**	**100,00%**	**51,25%**	**51,25%**		
5.01.02.2.01.03				1. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5 Berita Acara	2 Berita Acara	40,00%	-Kegiatan Terealisasi 100% , -Waktu pelaksanaan Anggaran Perubahan yg sangat sedikit (Perubahan jalan di Desember sehingga sebagian anggaran tidak dapat di cairkan	
5.01.02.2.01.04				2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	58 Berita Acara	48 Berita Acara	82,00%		
5.01.02.2.01.05				3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	58 Berita Acara	38 Berita Acara	66,00%		
5.01.02.2.01.07				4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	30 Dokumen	5 Dokumen	17,00%	-Kegiatan Terealisasi 100% , -Waktu pelaksanaan Anggaran Perubahan yg sangat sedikit (Perubahan jalan di Desember	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									sehingga sebagian anggaran tidak dapat di cairkan	
5.01.02.2.03				5. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen hasil evaluasi Bidang Perencanaan	100,00%	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	
5.01.02.2.03.01				6. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	
5.01.02.2.03.03				7. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	-	-	Kegiatan tidak terlaksana	
5.01.03				**3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KETERCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**	**100,00%**	**96,00%**	**96,00%**		
5.01.03.2.01				**3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan realisasi pencapaian target kinerja diatas 90 persen**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5.01.03.2.01.02				1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	11 Laporan	100,00%		
5.01.03.2.01.05				2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%		
5.01.03.2.02				**3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase OPD bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan realisasi pencapaian target kinerja diatas 90 persen**	**100,00%**	**87,50%**	**87,50%**		
5.01.03.2.02.01				1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%		
5.01.03.2.02.02				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12 Laporan	9 Laporan	75,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.01.03.2.03				**3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan dengan realisasi pencapaian target kinerja diatas 90 persen**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5.01.03.2.03.01				1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%		
5.01.03.2.03.02				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11 Laporan	11 Laporan	100,00%		
	KEUANGAN									
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
5.02.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH**	**100,00%**	**82.26%**	**82,26%**		
5.02.01.2.01				**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**		
5.02.01.2.01.0001				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
5.02.01.2.01.0003				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0,00%	0,00%	Tidak ada realisasi anggaran pada tahun berjalan.	
5.02.01.2.01.0006				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
5.02.01.2.01.0007				4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0,00%	0,00%	Tidak ada realisasi anggaran pada tahun berjalan.	
5.02.01.2.02				**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100,00%**	**79,36%**	**79,36%**		
5.02.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	63 org	50 org	79,36%		
5.02.01.2.06				**1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5.02.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Unit	1 Unit	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.02.01.2.06.0004				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%		
5.02.01.2.06.0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disedikan dan digandakan	1 Paket	1 Paket	100,00%		
5.02.01.2.06.0006				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
5.02.01.2.06.0008				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
5.02.01.2.06.0009				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
5.02.01.2.07				**1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100,00%**	**60,00%**	**60,00%**		
5.02.01.2.01.0005				1. Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	2 Unit	2 Unit	100,00%		
5.02.01.2.01.0006				2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100,00%		
5.02.01.2.01.0009				3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	0 Unit	0,00%	Tidak ada realisasi anggaran pada tahun berjalan.	
5.02.01.2.01.0010				4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	100,00%		
5.02.01.2.01.0011				5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	0 Unit	0,00%	Tidak ada realisasi anggaran pada tahun berjalan.	
5.02.01.2.08				**1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5.02.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
5.02.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	12Laporan	12Laporan	100,00%		
5.02.01.2.08.0003				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12Laporan	100,00%		
5.02.01.2.08.0004				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.02.01.2.09				**1.6 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100,00%**	**83,33%**	**83,33%**		
5.02.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Unit	1 Unit	50,00%		
5.02.01.2.09.0009				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00%		
5.02.01.2.09.0010				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00%		
5.02.02.2.01				**1.7 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5.02.02.2.01.0001				1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPASyang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
5.02.02.2.01.0002				2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
5.02.02.2.01.0007				3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
5.02.02.2.01.0008				4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
5.02.02.2.01.0009				5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
5.02.02.2.01.0013				6. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.02.02.2.02				**1.8 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5.02.02.2.02.0001				1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
5.02.02.2.02.0007				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
5.02.02.2.03				**1.9 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5.02.02.2.03.0002				1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
5.02.02.2.03.0003				2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
5.02.02.2.03.0004				3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
5.02.02.2.03.0005				4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
5.02.02.2.04				**1.10 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**		
5.02.02.2.04.0008				1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
5.02.02.2.04.0009				2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	Tidak ada realisasi anggaran pada tahun berjalan.	
5.02.03				**2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**100,00%**	**80,00%**	**80,00%**		
5.02.03.2.01				**2.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100,00%**	**80,00%**	**80,00%**		
5.02.03.2.01.0002				1. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0 Dokumern	0,00%	Tidak ada realisasi anggaran pada tahun berjalan.	
5.02.03.2.01.0003				2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
5.02.03.2.01.0007				3. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%		
5.02.03.2.01.0011				4. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%		
5.02.03.2.01.0012				5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%		
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								
						100	***52,11%***	***52,11%***		
5.02.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100**	**57,42%**	**57,42%**	**Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi karena target capaian terealisasi dengan baik**	
5.02.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu**	***100***	***94,00***	**94.55%**		
5.02.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang ASN/12 Bulan	34 Orang ASN/12 Bulan	94.55%		
5.02.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**60,72%**	**60,72%**		
5.02.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.33		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.02.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	89.67		
5.02.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.51		
5.02.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.97		
5.02.01.2.06.06				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Paket	1 Paket	35.88	Proses pencairan yang berjalan tidak normal, tidak terrealisasinya anggaran dalam mendukung kelancaran program	
5.02.01.2.06.08				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan /27 Orang	1 Laporan /27 Orang	99.84	Proses pencairan yang berjalan tidak normal, tidak terrealisasinya anggaran dalam mendukung kelancaran program	
5.02.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	1 Laporan	36.88	Proses pencairan yang berjalan tidak normal, tidak terrealisasinya anggaran dalam mendukung kelancaran program	
5.02.01.2.07				**1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**0.00**	**0.00**		
5.02.01.2.07.10				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0	0.00	Proses pencairan yang berjalan tidak normal	
5.02.01.2.08				**1.4 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia**	**100**	**50,37%**	**50,37%**		
5.02.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan/150 Lembar Meterai	1 Laporan/150 Lembar Meterai	100.00%		
5.02.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	34.42	Proses pencairan yang berjalan tidak normal	
5.02.01.2.08.03				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan/22 Unit	1 Laporan/8 Unit	16.69	Proses pencairan yang berjalan tidak normal	
5.02.01.2.09				**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase BM Penunjang Urusan yang Terpelihara**	**100**	**81,49%**	**81,49%**		
5.02.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	5 Unit	3 Unit	77.59%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					
5.02.01.2.09.10				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	2 Unit	1 Unit	85.39%		
5.02.04				**2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PERSENTASE REALISASI PAJAK DAERAH TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH**	**100**	***46,80%***	***46,80%***	**Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi karena target capaian terealisasi dengan baik**	
5.02.04.2.01				**2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**	**100**	**46,80%**	**46,80%**		
5.02.04.2.01.05				1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	1 Laporan	1 Laporan	39.22	Proses pencairan yang berjalan tidak normal sehinga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana secara maksimal	
5.02.04.2.01.08				2. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	37.97%	Proses pencairan yang berjalan tidak normal sehinga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana secara maksimal	
5.02.04.2.01.11				3. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	29.38	Proses pencairan yang berjalan tidak normal sehinga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana secara maksimal	
5.02.04.2.01.13				4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	80.66		
5.03	**KEPEGAWAIAN**									
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
			MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH							
5.03.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH**	**100,00%**	**61,59%**	**61,59%**		
5.03.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5.03.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji	40 Orang	40 Orang	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.03.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**63,00%**	**63,00%**		
5.03.01.2.06.0004				1. PenyedianBahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	25 Paket	19 Paket	76,00%		
5.03.01.2.06.0008				2. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	100 Laporan	73 Laporan	73,00%		
5.03.01.2.06.0009				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasdan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	10 Laporan	4 Laporan	40,00%	Rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara belum optimal	Adanya Evaluasi Kinerja pegawai pengelola keuangan yang lebih optimal
5.03.01.2.08.				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**		
5.03.01.2.08.0004				1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Laporan	5 Laporan	50,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan belum optimal	Adanya Evaluasi Kinerja pegawai pengelola keuangan yang lebih optimal
5.03.01.2.09.				2. Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	**100,00%**	**33,34%**	**33,34%**		
5.03.01.2.09.0002				3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15 Unit	5 Unit	33,34%	Pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan yang belum optimal dan Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas	Adanya Evaluasi Kinerja pegawai pengelola keuangan yang lebih optimal
5.03.02				**2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1. PERSENTASE PERENCANAAN KEBUTUHAN YANG SESUAI DENGAN FORMASI** **2. PERSENTASE ASN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA** **3. PERSENTASE PENGEMBANGAN KARIR ASN SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA** **4. PERSENTASE PEGAWAI DENGAN SKP BERNILAI BAIK**	**100,00%**	**64,50%**	**64,50%**		
5.03.02.2.01				**2.1 Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pengadaan Pemberhentian dan Informasi**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
5.03.02.201.0002				1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis danJumlah Jabatanuntuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.03.02.201.0006				2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian belum optimal	1. Melakukan Evaluasi kinerja Internal dinas 2. Pengawasan secara rutin/berkala terkait tata kelola administrasi sesuai SOP
5.03.02.201.0010				3. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian belum maksimal	Evaluasi kinerja pihak pelaksana pekerjaan
5.03.02.202				**2.2 Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN**	**100,00%**	**49,33%**	**49,33%**		
5.03.02.202.0001				1. Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen	32 Dokumen	32.00%	Pengelolaan Mutasi ASN belum optimal	Peningkatan mutu/kualitas pelayanan publik
5.02.01.2.02.0002				2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaiakan Pangkat ASN	3 Dokumen	2 Dokumen	66,00%		
5.02.01.2.02.0003				3. Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	Pengelolaan Promosi ASN belum optimal	Evaluasi Kinerja pegawai ASN
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5.04		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								
			MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH							
				2.3 Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal**	**100,00%**	**44,15%**	**44.15%**		
5.02.01.2.03.0006				1. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	100 Dokumen	19 Dokumen	19.00%	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat belum optimal	1. Melakukan Evaluasi kinerja Internal dinas 2. Pengawasan secara rutin/berkala terkait tata kelola keuangan daerah sesuai SOP Penata usahaan Keuangan
5.02.01.2.03.0006				2. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapat sertifikasi jabatan ASN	50 Orang	16 Orang	31,90%	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN belum optimal	1. Melakukan Evaluasi kinerja Internal dinas 2. Pengawasan secara rutin/berkala terkait tata kelola keuangan daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
										sesuai SOP Penata usahaan Keuangan
5.02.01.2.03.0014				3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	50 Orang	41 Orang	81.53%		
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02				**1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL LITBANG DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN**	**100,00%**	**62,00%**	**62,00%**		
5 05 02 2.01				**1.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase pemanfaatan hasil litbang bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan**	**100,00%**	**53,00%**	**53,00%**		
5.05.02.2.01.02				1. fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	9 Laporan	5 Laporan	56,00%		
5.05.02.2.01.12				2. Pengelolaan Data Kelitbangan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	6 Laporan	1 Laporan	17,00%	-Kegiatan Terealisasi 100% -Waktu pelaksanaan Anggaran Perubahan yg sangat sedikit (Perubahan jalan di Desember sehingga sebagian anggaran tidak dapat di cairkan	
5.05.02.2.01.14				3. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan dan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	7 Laporan	6 Laporan	86,00%		
5 05 02 2.03				**1.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**100,00%**	**100,00%**	**71,00%**		
5 05 02 2.03.07				1. Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan	7 Laporan	5 Laporan	71,00%		
6.01	**PENGAWASAN**									
		INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ARU								
6.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100 %**	**48 %**	**48 %**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
6.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	70 Orang	100 %		
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
6.01.01.2.05				**1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**100 %**	**4 Orang**	**16 %**		
6.01.01.2.05.09				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	4 Orang	16 %	Rendahnya penyerapan anggaran pada Tahun 2025 disebabkan adanya penerapan kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut mengakibatkan pembatasan terhadap beberapa jenis belanja diantaranya perjalanan dinas, pelaksanaan rapat luar kantor, kegiatan sosialisasi/ bimbingan teknis serta belanja penunjang lainnya, sehingga sebagian kegiatan tidak terealisasi	
6.01.01.2.06				2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	87,5 %	87,5 %		
6.01.01.2.06.01				3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %		
6.01.01.2.06.03				4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %		
6.01.01.2.06.04				5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6.01.01.2.06.05				6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %		
6.01.01.2.06.08				7. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan asilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1 Laporan	50 %		
6.01.01.2.06.09				8. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %		
6.01.01.2.07				**1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang disediakan**	**100 %**	**0 %**	**0 %**		
6.01.01.2.07.02				1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	0 Unit	0 %		
6.01.01.2.07.05				2. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	25 Unit	0 Unit/ Paket	0 %		
6.01.01.2.07.06				3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 %		
6.01.01.2.08				**1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**100 %**	**40 %**	**40 %**		
6.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan	50 %		
6.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1 Laporan	50 %		
6.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	1 Laporan	0 Laporan	50 %		
6.01.01.2.09				**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara**	**100 %**	**44,44 %**	**44,44 %**		
6.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100 %		
6.01.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	5 Unit	20 %		
6.01.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %		
6.01.02				**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**100 %**	**73,Persen**	**73 Persen[1]**		
6.01.02.2.01				**2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase Pengawasan Internal yang diselenggarakan**	**100 Persen**	**95,83 Persen**	**95,83 Persen**		

1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6.01.02.2.01.01				1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	2 laporan	40 %		
6.01.02.2.01.02				2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	11 laporan	73,33%		
6.01.02.2.01.03				3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	27 Laporan	225 %		
6.01.02.2.01.04				4. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
6.01.02.2.01.05				5. Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12 Laporan	% Laporan	41,66 %		
6.01.02.2.01.06				6. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	0 Kesepakatan	0 %		
6.01.02.2.01.07				7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %		
6.01.02.2.02				**2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase Pengawsan denga tujuan tertentu yang diselenggarkan**	**100 %**	**50 %**	**50 %**		
6.01.02.2.02.01				1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	0 Laporan	0 %		
6.01.02.2.02.02				2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	10 Laporan	100 %		
6.01.03				**3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**PRESENTASE KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG DIRUMUSKAN**	**100 %**	**14,60 Persen**	**14,60 Persen**		
6.01.03.2.01				**3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Presentase Kebijakan Teknis, di bidang pengawasan da fasilitasu pengawsan yang dirumuskan**	**100 %**	**0 %**	**0 %**		
6.01.03.2.01.01				1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 %		
6.01.03.2.01.01				2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 %		
6.01.03.2.02				**3.2 Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase Pendampingan dan Asistensi**	**100 %**	**14,60 %**	**14,60 %**		
6.01.03.2.02.01				1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	33,33 Persen	10 Perangkat Daerah		
6.01.03.2.02.02				2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 %		
6.01.03.2.02.03				3. Koordinasi, Monitoring dan valuasi serta	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	4 Kegiatan	1 Laporan	25 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					
6.01.03.2.02.04				4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30 Perangkat Daerah	0 perangkat Daerah	0 %		
5.06	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGELOLAAN PERBATASAN**									
5.06		**BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH**								
			TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN							
5.06.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	100%	100%	100%		
5.06.01.2.01				**1.1 Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
5.06.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
5.06.01.2.01.06				2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100%		
5.06.01.2.02				**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
5.06.01.2.02.01				1. Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	20 PNS	20 PNS	100%		
5.06.01.2.02.03				2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	40 Dokumen	40 Dokumen	100%		
5.06.01.2.05				**1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
5.06.01.2.05.02				1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
5.06.01.2.06				**1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
5.06.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bagunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	100%		
5.06.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket logistik kantor	1 Paket	1 Paket	100%		
5.06.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.06.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	100 Orang	100 Orang	100%		
5.06.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi/ konsultasi	6 Laporan	6 Laporan	100%		
5.06.01.2.08				**1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		
5.06.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai yang digunakan	800 Meterai	800 Meterai	100%		
5.06.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komonikasih, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi/ listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%		
5.06.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai honor yang terkontrak	3 Pegawai	3 Pegawai	100%		
5.06.01.2.09				**1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**		
5.06.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas	1 Paket	1 Paket	100%		
5.06.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan peralatan kantor	3 Paket	3 Paket	100%		
5.06.01.2.09.09				3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	100%		
			MENINGKATKAN AKSESSIBILITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR SERTA SARANA PRASARANA WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN							
5.06.02				**2. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase Capaian Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Daerah**	**100%**	**100%**	**80%**	1. Perubahan kebijakan pada level kementerian lembaga pusat 2. Pengalokasian anggaran pada program Pengelolaan Perbatasan yang relatif sangat kecil	Lebih meningkatkan koordinasi lintas sektor baik dalam daerah maupun luar daerah dalam hal ini dengan OPD teknis dan Kementerian Lembaga Pusat
5.06.02.2.01				**2.1 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**Persentase terlaksananya perencanaan dan fasilitasi kerjasama kewilayahan perbatasan**	**100%**	**100%**	**100%**		
5.06.02.2.01.01				1. Koordinasi , Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perbatasan	1 Laporan	1 Laporan	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.06.02.2.01.02				2. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
5.06.02.2.03				**2.2 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan**	**Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan**	**100%**	**100%**	**100%**		
5.06.02.2.03.01				1. Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah laporan pengawasan/evaluasi pembangunan kawasan perbatasan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
5.06.02.2.03.02				2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01	**KEWILAYAHAN**									
7.01		**KECAMATAN PULAU-PULAU ARU**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**87.87%**	**87.87%**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD TepatWaktu**	**100%**	**91.48%**	**91.48%**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gajidan Tunjangan	47 Orang	43 Orang	91,48	Alasanya 2 pegawai pindah dan 2 pegawai lagi pensiun	
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.05				3. Penediaan BarangCetakan danPenggandaan	JumlahPaketBarangCetakandanPenggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	JumlahLaporanFasilitasiKunjungannTamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentasejasapenunjangurusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.08.04				1. Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**60.00%**	**60.00%**		
7.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	0%	0%	Karena keterlambatan Proses permintaan GU	Diupayakan kedepannya dipercepat proses permintaan GU
7.01.01.2.09.O9				2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%		
7.01.01.2.09.10				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 unit	8 unit	88,89%		
7.01.03				**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	100%		
7.01.03.2.01				**2.1** Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%		
7.01.05.2.01.03				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.06				**3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Presentase Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar ketentuan perundang yang berlaku	100%	100%	100%		
7.01.06.2.				**3.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.06.2.01.18				1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01		**KELURAHAN GALAY DUBU**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.06				**1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase administrasi umum PD Berjalan sesuai standar**	**100**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 P aket	100%		
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.08				**1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.09				**1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.09.09				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%		
7.01.03				**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.03.2.02				**2.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.03.2.02.03				1. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%		
7.01.03.2.06				**2.2** Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejateraan Kelurahan	100%	100%	100%		
7.01.03.2.06.02				1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	50 Keluarga	100%		
7.01.03.2.06.10				2. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	20 Keluarga	100%		
7.01.03.2.06.11				3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	50 Keluarga	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01		**KELURAHAN SIWALIMA**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**98.36%**		
7.01.01.2.06				**1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**94.98%4**		
7.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.07				**1.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**93.74%**		
7.01.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	3 unit	90%		
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**98.79%**		
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	100%		
7.01.03				**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**91.41%**	**91.41%**		
				2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Presentase kegiatan pemberdayaan yang berjalan sesuai rencana**	**100%**	**100%**	**100%**		
				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyar	Presentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.03.2.02				**2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase lembaga kemasyarakatan tingkat**	**100%**				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
					kecamatan berjalan sesuai rencana		**100%**	**100%**		
7.01.03.2.01.02				1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	1 unit	100%		
7.01.03.2.03				**2.3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.03.2.03.04				1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
		KECAMATAN ARU TENGAH								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100**	**86,66**	**86,66**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	42 Orang	42 Orang	100		
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
7.01.01.2.06.05				2. Penediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
7.01.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**	**80**	**80**		
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan	66,66		
7.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.01.2.09				**1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**66,66**	**66,66**		
7.01.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1 Unit	50		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Kendaraan Dinas Jabatan						
7.01.01.2.09.0009				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100		
7.01.02				**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100**	**100**	**100**		
7.01.02.2.04				**2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Presentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan keada Camat**	**100**	**100**	**100**		
7.01.02.2.04.0003				1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.03				**3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIBERDAYAKAN**	**100**	**0**	**0**		
7.01.03.2.01				**3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**0**	**0**		
7.01.03.2.01.0003				**1.1** Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0 Laporan	0		
7.01.06				**4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**JUMLAH DESA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS DIGITAL**	**100**	**100**	**100**		
7.01.06.2.01				**4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**		
7.01.06.2.01.0017				1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01		**KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 Orang	10 Orang	10 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
7.01.01.2.06.0004				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
7.01.01.2.06.0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dan digandakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
7.01.01.2.06.0008				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
7.01.01.2.06.0009				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
7.01.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, jasa sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
7.01.02				**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.02.2.01				**2.1 KoordinasiPenyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.02.2.01.0002				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
7.01.03				**3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.03.2.06				**3.1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.03.2.06.0007				1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						
7.01.06				**4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PRESENTASE TEMUAN INSPEKTORAT SAAT AUDIT KINERJA PEMERINTAH DESA**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.06.2.01				**4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.06.2.01.0003				1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
7.01.06.2.01.0017				2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dokumen yang dikoordinasi pendamping desa di wilayahnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
7.01		**KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	12 Orang	12 Orang	100		
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
7.01.01.2.06.05				3. Penediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.01.2.09				**1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 unit	2 unit	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Dinas Operasional atau Lapangan						
7.01.03				**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIBERDAYAKAN**	**100**	**100**	**100**		
7.01.03.2.01				**2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**100**	**100**		
7.01.03.2.01.03				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	100		
7.01.04				**3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**INDEKS KRIMINALITAS**	**100**	**100**	**100**		
7.01.04.2.01				**3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**100**	**100**	**100**		
7.01.04.2.01.01				1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	100		
7.01		**KECAMATAN ARU UTARA**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100**	**91,66**	**91,66**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	13 Orang	13 Orang	100		
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.06.02				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
7.01.01.2.06.05				3. Penediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**	**66,66**	**66,66**		
7.01.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8 Laporan	66,66		
				1.4 Penataan Organisasi		**100**	**100**	**100**		
				1. Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		12 Dokumen	12 Dokumen	100		
7.01.03				**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	100	100	100		
7.01.03.2.01				**2.1** Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100		
7.01.03.2.01.0001				1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Masyarakat	12 Lembaga Masyarakat	100		
7.01		**KECAMATAN ARU UTARA TIMUR BATULEY**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	15 Orang	15 Orang	100%		
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%1**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan** Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01.03				**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIBERDAYAKAN**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100 %**		
7.01.03.2.01				**2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100 %**		
7.01.05.2.01.03				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Sangat Minim Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perhatikan Khusus Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01		**KECAMATAN SIR-SIR**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**8 Orang**	**8 Orang**	**100%**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	8 Orang	8 Orang	100%		
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
7.01		**KECAMATAN ARU SELATAN**								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTA-HAN KECAMATAN DAN DESA							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100**	**91.66**	**91.66**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	18 Orang	18 Orang	100		
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan	1 .Paket	1 .Paket	100		
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 .Paket	1 .Paket	100		
7.01.01.2.06.05				3. Penediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 .Paket	1 .Paket	100		
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	**100**	**66.66**	**66.66**		
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.01.2.08.03				2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100		
7.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0		
7.01.01.2.13				**1.4 Penataan Organisasi**	**Presentase Penataan Organisas**	**100**	**100**	**100**		
7.01.01.2.13.04				1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9 Dokumen	9 Dokumen	100		
7.01.03				**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIBERDAYAKAN**	**100**	**100**	**100**		
7.01.03.2.06				**2.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**100**	**100**	**100**		
7.01.03.2.06.07				1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	100		
		KECAMATAN ARU SELATAN UTARA								

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			MENINGKAT-NYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100**	**100**		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100**	**100%**		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar**	**1 Paket**	**1 paket**	**100%**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100**	**100**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gajidan Tunjangan	11 orang	11 orang	100%		
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**100**	**100%**		
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan	10 Paket	9 Paket	90,00%		
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan bahan logistik kantor	30 Paket	29 Paket	93.33%		
7.01.01.2.06.05				3. Penediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	5 Laporan	83.33		
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasasurat menyurat	12 Laporan	7 Laporan	58.33		
7.01.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	0 Laporan	0%		
7.01.05.2.01.03				3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%		
7.01.03.2.06				4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	100%		
7.01.05				**2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.05.2.01				**2.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7.01.05.2.01.01				1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Laporan	4 Laporan	98.7%		
		KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR								
			MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA							
7.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**84,2 %**	**84,2 %**	**84,2 %**		
7.01.01.2.02				**1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**18 Orang**	**18 Orang**	**84,7%**		
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	18 Orang	18 Orang	84,7%		
7.01.01.2.06				**1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**35%**	**35%**		
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.03				2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 %	0 %	Adanya Efesiensi Anggaran Belanja Rutin Lainnya	Telah dilakukan Koordinasi pada BPKAD untuk Tahun berikutnya dalam penyesuaian APBD
7.01.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
7.01.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan 5. Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 %	0 %	Adanya Efesiensi Anggaran Belanja Rutin Lainnya	Telah dilakukan Koordinasi pada BPKAD untuk Tahun berikutnya dalam penyesuaian APBD
7.01.01.2.06.06				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 %	0 %		
7.01.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 %	0 %		
7.01.01.2.08				**1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**1 Laporan**	**0 %**	**0 %**		
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyuraz	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 %	0 %		
7.01.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 %	0 %	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kecamatan Aru Selatan Timur telah	Telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) PPPK Terhitung TMT 1 Mei 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									di PPKan pada tahun 2025	
7.01.03				**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan**	**350 Keluarga**	**0 %**	**0 %**		
7.01.03.2.06				**2.1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga**	**350 Keluarga**	**0 %**	**0 %**		
7.01.03.2.06.03				1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	350 Keluarga	0 %	0 %	Adanya Efisiensi Anggaran untuk belanja rutin lainnya termasuk kegiatan ditingkat desa dan keluarga	
8.01	**PEMERINTAHAN UMUM**									
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERPENUHI**	**100%**	**100 %**	**100%**		
8.01.01.2.01				**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
8.01.01.2.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dookumen	6 Dookumen	100%		
8.01.01.2.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
8.01.01.2.02				**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**		
8.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	29 Orang	100%		
8.01.01.2.05				**1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**		
8.01.01.2.05.03				1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	100%		
8.01.01.2.06				**1.4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100%**		
8.01.01.2.06.03				1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		
8.01.01.2.06.04				2. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%		
8.01.01.2.06.05				3. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
8.01.01.2.06.08				4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%		
8.01.01.2.07.01				5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%		
8.01.01.2.07.01				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%		
8.01.01.2.07.10				7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%		
8.01.01.2.08.02				8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100 %s		
8.01.01.2.08				**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%		
8.01.01.2.08.04				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	1 Unit	100%		
8.01.01.2.09				**1.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara**	**1Unit**	**1 Unit**	**100%**		
8.01.01.2.09.01				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%		
8.01.01.2.09.06				**2. PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**PERSENTASE CAKUPAN PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**100%**	**100%**	**100%**		
8.01.01.2.09.09				**2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Pembaharuan Kebangsaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**Persentase dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**100%**	**100%**		
38.01.02.2.01.03				1. Pembentukan Paskibraka	Jumlah orang yang mengikuti Paskibraka	60 Orang	60 Orang	100%		
8.01.02.2.01.04				**3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Pendidikan politik pada kader partai poliik	100%	100%	100%		
8.01.02.2.01.08				**3.1** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	100%	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan					
8.01.02.2.03				1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
8.01.02.2.03.01				2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7 Orang	7 Orang	100 %		
8.01.02.2.03.02				**4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWSAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PRSENTASE CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWSAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
8.01.02.2.03.03				**4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatanlainnya**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
8.01.04				1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN / SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
8.01.05.2.01				**5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Penanganan Konflik Sosial**	**PERSENTASE CAKUPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**100**	**100**	**100**		
8.01.05.2.01.01				**5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dirumuskan**	**100%**	**100%**	**100%**		
8.01.06.				1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Perbatasan	Jumlah Kebikaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%		
8.01.06.2.01				2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi danPelaporan di Bidang KewaspadaanDini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi danPelaporan di Bidang KewaspadaanDini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%		

- BAB IV -

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan Pusat atau Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota diberikan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam Lingkup Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun Anggaran 2025 dinyatakan nihil. Hal ini dikarenakan tidak terdapat pelimpahan kewenangan dalam bentuk tugas pembantuan maupun penugasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada Pemerintah Daerah selama periode tersebut.

Dengan tidak adanya tugas pembantuan dan penugasan, maka tidak terdapat target kinerja, realisasi kegiatan, maupun serapan anggaran yang dapat diukur dan dilaporkan dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut. Seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sepenuhnya merupakan kewenangan daerah yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan nasional serta provinsi melalui upaya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program daerah. Koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan tetap dilakukan secara aktif guna memastikan keselarasan arah pembangunan serta pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh.

Dengan demikian, ketiadaan pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengurangi komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

- BAB V -

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB V
PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah mengusulkan sejumlah program, inovasi, dan capaian kinerja untuk diikutsertakan dalam berbagai ajang penilaian prestasi dan penghargaan di tingkat regional maupun nasional. Usulan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain tata Kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, serta kinerja pembangunan daerah yang dinilai telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara.

Namun demikian, proses penilaian dan verifikasi atas usulan tersebut masih berlangsung hingga akhir tahun 2025, sehingga hasil penetapan penerima penghargaan belum dapat diumumkan pada tahun yang sama. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, pengumuman dan penyerahan penghargaan dijadwalkan pada tahun 2026 setelah melalui tahapan evaluasi yang komprehensif.

Oleh sebab itu, prestasi dan penghargaan yang telah diusulkan pada tahun 2025 diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal pada tahun 2026 sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan inovasi yang telah dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas program, serta daya saing daerah dalam berbagai bidang pembangunan.

- BAB VI -

PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025 merupakan gambaran tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terkait pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru selama Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2029.

Berbagai capaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2025 diraih berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) Kabupaten Kepulauan Aru, jajaran Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kepulauan Aru dan seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan sukses.

Berbagai pencapaian pada Tahun Anggaran 2025 tidak luput dari kekurangan dan permasalahan sehingga harus ditindaklanjuti untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perencanaan berikutnya. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru membuka ruang selebar-lebarnya untuk memberikan masukan serta saran perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada pembangunan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk perbaikan pembangunan kedepan dalam mewujudkan Kepulauan Aru yang Maju, Mandiri, dan Harmonis Berbasis Ekosistem Ekonomi Laut Arafura yang Mendunia.

Dobo, 31 Maret 2026

BUPATI KEPULAUAN ARU

TIMOTIUS KAIDEL

LAMPIRAN I

REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

LAMPIRAN I REALISASI ANGGARAN
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**							
			Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan					
1.01		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**234.898.373.445**	**128,667,354,309**	**54,77**
1.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**72,86**	**151,463,165,015**	**91,170,401,923**	**60,19**
1.01.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**128.793.000**	**58.393.000**	**45,33**
1.01.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Peencanaan Perangkat Daerah	100	128.793.000	58.393.000	45,33
1.01.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**149.426.663.615**	**90.019.549.976**	**60,24**
1.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	149.426.663.615	90.019.549.976	60,24
1.01.01.2.02.05				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	28.726.000	0	0
1.01.01.2.05				**1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**90.461.400**	**20.650.000**	**22,82**
1.01.01.2.05.09				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	49.957.000	0	0
1.01.01.2.05.10				2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	40.504.400	20.650.000	50,98

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.01.01.2.06				**1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**651.479.800**	**540.274.480**	**82,93**
1.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	235.154.300	229.582.200	97,63
1.01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	113.448.000	97.433.000	85,88
1.01.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	155.382.500	146.813.000	94,48
1.01.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	147.495.000	66.446.280	45,04
1.01.01.2.07				**1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**257.850.000**	**99.009.780**	**38,39**
1.01.01.2.07.05				1. Pengadaan Mebel	100	99.100.000	99.009.780	99,90
1.01.01.2.07.11				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	158.750.000	0	0
1.01.01.2.08				**1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**399.867.200**	**291.393.087**	**72,78**
1.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	61.467.200	61.467.200	100
1.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	338.400.000	229.925.887	67,94
1.01.01.2.09				**1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60**	**508.050.000**	**141.131.600**	**27,77**
1.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50	59.500.000	14.216.100	23,89

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.01.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	295.160.000	102.360.000	34,67
1.01.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30	153.390.000	24.555.500	16
1.01.02				**2. Program Pengelolaan Pendidikan**		**81.224.357.230**	**37.000.283.866**	**45,55**
1.01.02.2.01				**2.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**98,42**	**37.233.233.250**	**20.199.999.439**	**54,25**
1.01.02.2.01.01				1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100	1.233.792.000	1.207.976.000	97,90
1.01.02.2.01.03				2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100	1.066.280.000	1.038.840.016	97,42
1.01.02.2.01.06				3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100	156.760.000	156.721.000	99,97
1.01.02.2.01.07				4. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	70	2.161.720.000	1.380.581.759	63,86
1.01.02.2.01.25				5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100	364,436,200	60.630.700	16,63
1.01.02.2.01.26				6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100	238.038.800	0	0
1.01.02.2.01.27				7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100	147.622.600	0	0
1.01.02.2.01.28				8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100	108.680.800	108.680.800	100
1.01.02.2.01.29				9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100	22.150.780.000	9.836.356.000	44,40

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.01.02.2.01.30				10. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100	227.377.800	9.000.000	3,95
1.01.02.2.01.31				11. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	100	200.000.000	199.990.000	99,99
1.01.02.2.01.34				12. Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	100	313.245.400	0	0
1.01.02.2.01.35				13. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	183.021.200	0	0
1.01.02.2.01.36				14. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	103.999.400	0	0
1.01.02.2.01.37				15. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	170.401.700	0	0
1.01.02.2.01.38				16. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100	1.223.867.000	261.604.229	21,37
1.01.02.2.01.39				17. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100	150.757.800	4.150.000	2,75
1.01.02.2.01.41				18. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	106.822.200	100.000.000	93,61
1.01.02.2.01.42				19. Penyediaan infrastruktur TIK	100	336.759.750	276.622.545	82,14
1.01.02.2.01.43				20. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	-	138.277.800	0	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				kekerasan, dan intoleransi				
1.01.02.2.01.47				21. Pembangunan Ruang Kelas Baru	100	4.613.904.000	4.289.825.212	92,97
1.01.02.2.01.49				22. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100	357.270.000	19.975.280	5,59
1.01.02.2.01.50				23. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	100	450.703.800	428.503.800	95,07
1.01.02.2.01.51				24. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100	1.028.715.000	820.542.098	79,76
1.01.02.2.02				**2.2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**88,62**	**37.769.410.000**	**15.918.575.327**	**42,15**
1.01.02.2.02.01				1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100	1,586,304,000	1,512,756,000	95,36
1.01.02.2.02.05				2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100	82.680.000	82.350.000	99,60
1.01.02.2.02.06				3. Pembangunan Laboratorium	100	158.316.000	158.311.920	100
1.01.02.2.02.09				4. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2	3.418.870.000	72.150.000	2,11
1.01.02.2.02.12				5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50	84.750.000	3.724.000	4,39
1.01.02.2.02.14				6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100	4,702,125,000	3,083,714,813	65,58
1.01.02.2.02.0038				7. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	270.381.000	0	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.01.02.2.02.40				8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	322.372.800	93.908.400	29,13
1.01.02.2.02.41				9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	416.378.000	0	0
1.01.02.2.02.42				10. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100	10.504.180.000	0	0
1.01.02.2.02.43				11. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100	360.150.000	287.400.000	79,80
1.01.02.2.02.48				12. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	131.678.000	0	0
1.01.02.2.02.49				13. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	201.354.500	0	0
1.01.02.2.02.50				14. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	314.330.800	0	0
1.01.02.2.02.51				15. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100	664.232.000	453.750.000	68,31
1.01.02.2.02.52				16. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100	216.735.800	0	0
1.01.02.2.02.54				17. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	204.551.400	0	0
1.01.02.2.02.55				18. Pemberian layanan pendampingan bagi	-	199.179.400	0	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				
1.01.02.2.02.58				19. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100	628.255.700	291.055.200	46,33
1.01.02.2.02.59				20. Pembangunan Ruang Kelas Baru	100	13.078.400.000	9.879.454.994	75,54
1.01.02.2.02.60				21. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	224.185.600	0	0
1.01.02.2.03				**2.3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**100**	**4.732.618.000**	**331.709.100**	**7,01**
1.01.02.2.03.16				1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	-	149.999.400	0	0
1.01.02.2.03.18				2. Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	2.906.690.000	0	0
1.01.02.2.03.23				3. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	199.996.200	0	0
1.01.02.2.03.24				4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	207.549.900	0	0
1.01.02.2.03.25				5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	501.910.000	0	0
1.01.02.2.03.26				6. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100	136.069.700	134.795.100	99,06

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.01.02.2.03.31				7. Penyediaan infrastruktur TIK	100	197.006.500	196.914.000	99,95
1.01.02.2.03.34				8. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	-	49.600.900	0	0
1.01.02.2.03.37				9. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	195.207.300	0	0
1.01.02.2.03.39				10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	125.815.000	0	0
1.01.02.2.03.47				11. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	-	62.773.100	0	0
1.01.02.2.04				**2.4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100**	**1.489.095.980**	**550.000.000**	**36,94**
1.01.02.2.04.17				1. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	118.710.000	0	0
1.01.02.2.04.27				2. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	348.286.000	0	0
1.01.02.2.04.28				3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	97.444.400	0	0
1.01.02.2.04.33				4. Penyediaan infrastruktur TIK	100	693.285.680	550.000.000	79,33
1.01.02.2.04.46				5. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	231.369.900	0	0
1.01.03				**3. Program Pengembangan Kurikulum**	**100**	**240.880.600**	**0**	**0**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.01.03.2.01				**3.1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**100**	**240.880.600**	**0**	**0**
1.01.03.2.01.04				1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	118.819.400	0	0
1.01.03.2.01.06				2. Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	-	122.061.200	0	0
1.01.04				**4. Program Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	**100**	**1.111.873.800**	**191.085.560**	**17,19**
1.01.04.2.01				**4.1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100**	**1.111.873.800**	**191.085.560**	**17,19**
1.01.04.2.01.01				1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	524.406.800	0	0
1.01.04.2.01.02				2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	587.467.000	191.085.560	32,53
1.01.06				**5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra**	**100**	**858.096.800**	**305.582.960**	**35,61**
1.01.06.2.01				**5.1 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan**	**100**	**858,096,800**	**305.582.960**	**35,61**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.01.06.2.01.02				1. Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	100	585.447.200	305.582.960	52,20
1.01.06.2.01.03				2. Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	-	113.492.600	0	0
1.01.06.2.01.06				3. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	159.157.000	0	0
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**							
			Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat					
1.02		**DINAS KESEHATAN**				**87.085.301.996**	**74.408.327.158**	**85,44**
1.02.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**100**	**46.280.456.150**	**43.973.106.159**	**95,01**
1.02.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**100**	**50.351.400**	**49.464.686**	
1.02.01.2.01.01				**1.** Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	100	50.351.400	49.464.686	98,23
1.02.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**79,84**	**45.379.090.050**	**43.180.706.268**	**95**
1.02.01.2.02.01				**1.** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79,84	45.379.090.050	43.180.706.268	95
1.02.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**552.168.700**	**539.110.827**	**98**
1.02.01.2.06.04				**1.** Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	277.182.700	277.103.210	99,95
1.02.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	108.724.000	108.719.042	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.02.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	52.500.000	52.346.978	100
1.02.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	113.762.000	100.941.597	89
1.02.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**203.970.000**	**123.919.557**	**65,79**
1.02.01.2.08.01				**1.** Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	17.220.000	17.175.000	100
1.02.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	123.750.000	106.744.557	86
1.02.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	63.000.000	0	0
1.02.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**94.876.000**	**79.904.821**	**84**
1.02.01.2.09.01				**1.** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	94.876.000	79.904.821	84
1.02.02				**2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100**	**38.533.125.388**	**29,221,961,779**	**75,84**
1.02.02.2.01				**2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**20.233.210.920**	**16.058.324.466**	**79,37**
1.02.02.2.01.03				**1.** Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	199.076.940	181,603,499	91,22
1.02.02.2.01.04				2. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	100	3.316.323.400	2.519.532.398	75,97
1.02.02.2.01.06				3. Pengembangan Puskesmas	100	4.153.951.200	2.682.897.846	65,59
1.02.02.2.01.07				4. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	2,021,088,000	1,981,773,099	98,05

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.02.02.2.01.09				5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	100	1.281.687.500	1.068.315.448	83,35
1.02.02.2.01.10				6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	2.948.917.800	2.012.217.010	68,23
1.02.02.2.01.11				7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	100	534.738.200	483.030.217	90,33
1.02.02.2.01.14				8. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	252.680.000	241.480.000	95,56
1.02.02.2.01.15				9. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100	120.906.000	90.685.024	75
1.02.02.2.01.23				10. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	100	4.847.535.880	4.243.424.924	87,53
1.02.02.2.01.26				11. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	100	556.306.000	553.365.000	99,47
1.02.02.2.02				**2.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**82,97**	**16.956.674.868**	**11.945.773.893**	**70,44**
1.02.02.2.02.01				**1.** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39,56	306.490.000	278.893.315	90,99
1.02.02.2.02.02				2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	45,24	288.010.000	201.640.572	70,01
1.02.02.2.02.03				3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	65,79	62.000.000	7.600.000	12,25
1.02.02.2.02.04				4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	86,27	278.720.000	193.800.000	69,53

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.02.02.2.02.05				5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	90,17	225.582.000	211.057.608	93,56
1.02.02.2.02.06				6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19,77	68.375.400	51.045.000	74,65
1.02.02.2.02.07				7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	88,30	338.940.320	313.448.500	92,74
1.02.02.2.02.08				8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16,49	112.668.790	9.640.000	8,55
1.02.02.2.02.09				9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	92,08	212.746.400	196.804.423	92,50
1.02.02.2.02.10				10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	72,92	68.298.400	62.946.000	92,16
1.02.02.2.02.11				11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	87,17	68.424.100	63.745.500	93,16
1.02.02.2.02.12				12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	70,57	68.081.400	62.780.400	92,21
1.02.02.2.02.15				13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	480.455.000	352.000.000	73,26
1.02.02.2.02.17				14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	787.850.000	773.290.000	98,15
1.02.02.2.02.18				15. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100	445.912.838	439.449.176	98,55
1.02.02.2.02.20				16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	606.092.000	511.080.000	84,32
1.02.02.2.02.25				17. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	420.067.000	213.598.556	50,84
1.02.02.2.02.26				18. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	8.068.602.960	4.884.042.361	60,53

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.02.02.2.02.29				19. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	840.183.100	761.199.008	90,59
1.02.02.2.02.32				20. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	243.590.460	216.968.500	89,07
1.02.02.2.02.33				21. Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1.249.225.900	1.239.534.000	99,22
1.02.02.2.02.34				22. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	105.367.500	93.331.892	88,57
1.02.02.2.02.42				23. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	69.139.400	0	0
1.02.02.2.02.43				24. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	100	62.339.400	0	0
1.02.02.2.02.45				25. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	100	1.246.815.000	778.623.082	62,44
1.02.02.2.02.46				26. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	182.697.500	0	0
1.02.02.2.02.48				27. Pengelolaan Layanan Imunisasi	100	50.000.000	29.256.000	58,51
1.02.02.2.03				**2.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**100**	**325.646.500**	**286.660.420**	**88,02**
1.02.02.2.03.02				1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	325.646.500	286.660.420	88,02
1.02.02.2.04				**2.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.017.593.100**	**931.203.000**	**91,51**
1.02.02.2.04.03				1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100	1.017.593.100	931.203.000	91,51
1.02.03				**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**100**	**1.308.342.200**	**1.308.342.200**	**100**
1.02.03.2.01				**3.1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**100**	**78.658.000**	**45.080.000**	**57,31**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.02.03.2.01.02				1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	78.658.000	45.080.000	57,31
1.02.03.2.02				**3.2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**100**	**96.122.800**	**95.836.008**	**99,70**
1.02.03.2.02.02				1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100	96.122.800	95.836.008	99,70
1.02.03.2.03				**3.3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.133.561.400**	**338.769.700**	**29,88**
1.02.03.2.03.01				1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	1.133.561.400	338.769.700	29,88
1.02.04				**4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**100**	**713.115.458**	**569.892.612**	**79,91**
1.02.04.2.01				**4.1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100**	**416.204.300**	**309.439.650**	**74,34**
1.02.04.2.01.01				1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	416.204.300	309.439.650	74,34
1.02.04.2.03				**4.2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**	**100**	**137.146.313**	**123.251.800**	**89,86**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
1.02.04.2.03.01				1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	137.146.313	123.251.800	89,86
1.02.04.2.06				**4.3. Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**100**	**159.764.845**	**137.201.162**	**85,87**
1.02.04.2.06.01				1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100	159.764.845	137.201.162	85,87
1.02.05				**5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**100**	**250.262.800**	**163.680.900**	**65,40**
1.02.05.2.01				**5.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**250.262.800**	**163.680.900**	**65,40**
1.02.05.2.01.01				1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	250.262.800	163.680.900	65,40

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**							
			Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat					
1.02		**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**				**53.651.858.678**	**47.826.352.012**	**89,14**
1.02.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**85,06**	**38,217,711,379**	**37,206,747,463**	**97,35**
1.02.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**20.800.900.917**	**20.403.055.453**	**98,09**
1.02.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	20.800.900.917	20.403.055.453	98,09
1.02.01.2.05				**1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**66.339.000**	**53.567.940**	**80,75**
1.02.01.2.05.09				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	66.339.000	53.567.940	80,75
1.02.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**93,33**	**410.702.200**	**366.365.500**	**89,20**
1.02.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	168.174.400	148.318.700	88,19
1.02.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	192.042.800	176.728.000	92,03
1.02.01.2.06.09				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	50.485.000	41.318.800	81,94
1.02.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**67,00**	**495.800.000**	**339.277.800**	**68,43**
1.02.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67,00	495.800.000	339.277.800	68,43
1.02.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50**	**134.140.500**	**61.730.000**	**46,02**
1.02.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	50	134.140.500	61.730.000	46,02

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
1.02.01.2.10				**1.6. Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100**	**16309.828.762**	**15.982.750.770**	**97,99**
1.02.01.2.10.01				1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	16.309.828.762	15.982.750.770	97,99
1.02.02				**2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100**	**14.451.252.299**	**9.796.138.349**	**67,79**
1.02.02.2.01				**2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**12.209.295.605**	**7.638.287.249**	**62,56**
1.02.02.2.01.03				1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	4.000.047.830	1.811.816.526	45,29
1.02.02.2.01.14				2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	4.628.329.824	3.859.026.083	83,38
1.02.02.2.01.22				3. Pengembangan Rumah Sakit	0	1.555.919.500	0	0
1.02.02.2.01.23				4. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	100	2.024.998.451	1.967.444.640	97,16
1.02.02.2.02				**2.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**2.241.956.694**	**2.157.851.100**	**96,25**
1.02.02.2.02.32				1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	2.241.956.694	2.157.851.100	96,25
1.02.03				**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**85**	**982.895.000**	**823.466.200**	**83,78**
1.02.03.2.02				**3.1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP**	**85**	**982.895.000**	**823.466.200**	**83,78**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
1.02.03.2.02.02				1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	85	982.895.000	823.466.200	83,78
1.03	**Urusan Bidang Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang**							
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**40,463,317,500**	**36,993,115,056**	91,42
1.03.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**5,605,706,036**	**5,369,047,184**	95,78
1.03.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**5,320,186,036**	**5,369,047,184**	100
1.03.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	5,320,186,036	5,369,047,184	100
1.03.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**82,309,000**	**49,090,244**	**59,64**
1.03.01.2.06.0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	26,580,000	24,152,500	90,78
1.03.01.2.06.0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	10,229,000	1,215,000	11,88
1.03.01.2.06.0008				3. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	45,500,000	23,722,744	52,14
1.03.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**118,660,000**	**66,299,733**	**55,87**
1.03.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	14,200,000	6,875,000	48,42
1.03.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	104,460,000	59,424,733	56,89
1.03.01.2.09				1.4. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**84,551,000**	**68,925,700**	**81,52**
1.03.01.2.09.0002				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	13,251,000	7,190,700	54,27

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.03.01.2.09.0006				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	26,700,000	21,430,000	80,26
1.03.01.2.09.0009				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	44,600,000	40,305,000	90,31
1.03.06				**2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	**78,09**	**367,500,000**	**367,489,400**	**99,99**
1.03.06.2.01				**2.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**78,09**	367,500,000	**367,489,400**	**99,99**
1.03.06.2.01.0019				1. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	41,14	367,500,000	367,489,400	99,99
1.03.08				**3. Program Penataan Bangunan Gedung**	**50**	**611,203,500**	**353,012,549**	**57,76**
1.03.08.2.01				**3.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**50**	**611,203,500**	**353,012,549**	**57,76**
1.03.08.2.01.0023				1. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50	611,203,500	353,012,549	57,76
1.03.09				**4. Program Penataan Bangunan Dan Lingkunganya**	**33,27**	**1,647,599,330**	**1,646,575,499**	99,94

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.03.09.2.01				**4.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**33,27**	**1,647,599,330**	**1,646,575,499**	99,94
1.03.09.2.01.0007				1. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	100	1,647,599,330	1,646,575,499	99,94
1.03.10				**5. Program Penyelenggaraan Jalan**	**83,92**	**32,231,308,684**	**29,072,674,747**	90,20
1.03.10.2.01.				**5.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**83,92**	**32,231,308,684**	**29,072,674,747**	90,20
1.03.10.2.01.0032				1. Pembangunan Jalan	94,16	5,104,929,100	4,885,768,620	95,71
1.03.10.2.01.0033				2. Rekonstruksi Jalan	92,50	26,471,804,800	24,002,258,843	90,67
1.03.10.2.01.0040				3. Pembangungan Jembatan	20	584,644,784	184,647,284	31,58
1.03.10.2.01.0043				4. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	0	69,930,000	-	0
1.04	**Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman**							
1.04		**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**				**4,612,981,370**	2,205,086,562	47,80
1.04.01				**1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	78,33	**2,507,226,37**	2,205,086,562	87,95
1.04.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	**2,207,226,370**	2,079,888,294	94,23
1.04.01.2.02.0001				**1.** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,207,226,370	2,079,888,294	94,23
1.04.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	80	**171,092,000**	63,955,300	37,38
1.04.01.2.06.0001				**1.** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	3,613,500	1,655,500	45,81
1.04.01.2.06.0002				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	69,231,300	47,534,500	68,66
1.04.01.2.06.0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	10,334,200	6,765,300	65,47
1.04.01.2.06.0008				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	12,390,000	8,000,000	64,57
1.04.01.2.06.0009				5. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	75,523,000	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.04.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**40,780,000**	16,980,968	41,42
1.04.01.2.08.0001				**1.** Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	3,280,000	2,460,000	75
1.04.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	37,500,000	14,430,968	34,48
1.04.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	33,33	**88,128,000**	44,352,000	50,33
1.04.01.2.09.0001				**1.** Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	100	59,198,000	44,352,000	74,92
1.04.01.2.09.0002				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	0	24,790,000	-	-
1.04.01.2.09.0007				3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	4,140,000	-	-
1.04.02				**2.Program Pengembangan Perumahan**	0	**198,098,000**	-	-
1.04.02.2.01				**2.1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	0	**104,520,000**	-	-
1.04.02.2.01.0004				1. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	0	30,672,000	-	-
1.04.02.2.01.0009				2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawans Bencana Kabupaten/Kota	0	73,848,000	-	-
1.04.02.2.03				**2.2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau**	0	**62,906,000**	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Relokasi Program Kabupaten/Kota				
1.04.02.2.03.0004				1. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0	62,906,000	-	-
1.04.02.2.04				**2.3. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	0	**30,672,000**	-	-
1.04.02.2.04.0005				1. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	30,672,000	-	-
1.04.03				**3.Program Kawasan Permukiman**	0	**1,051,482,000**	-	-
1.04.03.2.02				**3.1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	0	**90,192,000**	-	-
1.04.03.2.02.0014				**1.** Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0	90,192,000	-	-
1.04.03.2.03				**3.2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh denganLuas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	0	**961,290,000**	-	-
1.04.03.2.03.0007				1. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	0	211,290,000	-	-
1.04.03.2.03.0012				2. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0	750,000,000	-	-
1.04.05				**4.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	0	**856,175,000**	-	-
1.04.05.2.01				**4.1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	0	**856,175,000**	-	-
1.04.05.2.01.0002				1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	0	856,175,000	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
1.05	**Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**							
		Satuan Polisi Pamong Praja						
1.05.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**4.000.068.900**	**3.767.089.425,41**	**94,18**
1.05.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**10.432.000**	**8.520.000**	**81,67**
1.05.01.2.01.0001				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	10.432.000	8.520.000	81,67
1.05.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3.502.674.000**	**3.380.242.860,41**	**96,50**
1.05.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	3.502.674.000	3.380.242.860,41	96,50
1.05.01.2.05				**1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**20.940.000**	**20.250.000**	**96,70**
1.05.01.2.05.0002				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	20.940.000	20.250.000	96,70
1.05.01.2.06				**1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**203.785.800**	**193.597.900**	**95,00**
1.05.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.	100	5.661.000	5.661.000	100,00
1.05.01.2.06.0004				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	154.417.100	146.979.500	95,18
1.05.01.2.06.0005				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	25.935.700	23.685.400	91,32
1.05.01.2.06.0008				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	17.772.000	17.272.000	97,19
1.05.01.2.07				**1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**30.120.500**	**30.120.500**	**100,00**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.05.01.2.07.0011				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	30.120.500	30.120.500	100,00
1.05.01.2.08				**1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**87.025.600**	**84.863.200**	**97,52**
1.05.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2.935.600	2.935.600	100,00
1.05.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	69.090.000	66.927.600	96,87
1.05.01.2.08.0004				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	15.000.000	15.000.000	100,00
1.05.01.2.09				**1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74,51**	**145.091.000**	**49.494.965**	**34,11**
1.05.01.2.09.0002				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	99.800.000	39.644.965	39,72
1.05.01.2.09.0009				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	34.081.000	4.750.000	13,94
1.05.01.2.09.0011				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangu nan Lainnya	23,52	11.210.000	5.100.000	45,50
1.05.02				**2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	50	644.663.000	548.278.000	85,05
1.05.02.2.01				**2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**99,18**	**598.208.000**	**524.503.000**	**87,68**
1.05.02.2.01.0004				1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengawalan	100	27.678.000	27.453.000	99,19

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.05.02.2.01.0014				2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	100	27.630.000	27.630.000	100,00
1.05.02.2.01.0015				3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	97,55	542.900.000	469.420.000	86,47
1.05.02.2.02				**2.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**34,30**	**46.455.000**	**23.775.000**	**51,18**
1.05.02.2.02.0011				1. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57,50	26.600.000	8.400.000	31,58
1.05.02.2.02.0012				2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11,11	19.855.000	15.375.000	77,44
1.05	**Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**							
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**2,726,108,667**	**2,433,715,654**	**89,27**
1.05.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	96,67	**2,213,724,667**	**2,052,819,054**	**92,73**
1.05.01.2.01				1.1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100	**15,430,000**	**15,350,000**	**99,48**
1.05.01.2.01.0001				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	15,430,000	15,350,000	99,48
1.05.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	**1,772,131,867**	**1,736,306,998**	**97,98**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.05.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,772,131,867	1,736,306,998	97,98
1.05.01.2.05.				**1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100	**10,000,000**	**10,000,000**	**100**
1.05.01.2.05.0002				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	10,000,000	10,000,000	100
1.05.01.2.06				**1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	**163,226,300**	**97,600,205**	**59,79**
1.05.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	3,872,000	3,850,000	99,43
1.05.01.2.06.0002				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	7,744,000	6,729,605	86,90
1.05.01.2.06.0004				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	33,682,600	33,419,100	99,22
1.05.01.2.06.0005				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	5,395,000	5,300,000	98,24
1.05.01.2.06.0008				5. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	8,142,700	7,966,000	97,83
1.05.01.2.06.0009				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	104,390,000	40,335,500	38,64
1.05.01.2.08				**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	**127,507,500**	**115,254,926**	**90,39**
1.05.01.2.08.0001				**1.** Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1,640,000	1,640.,000	100
1.05.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	63,367,500	52,222,926	82,41
1.05.01.2.08.0003				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	2,500,000	1,392,000	5,68
1.05.01.2.08.0004				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	60,000,000	60,000,000	100
1.05.01.2.09				**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	80	**125,429,000**	**78,306,925**	**62,43**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.05.01.2.09.0001				**1.** Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dians Jabatan	100	15,900,000	9,795,735	61,61
1.05.01.2.09.0002				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100	84,774,000	59,022,362	69,62
1.05.01.2.09.0006				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	11,090,000	650,000	5,86
1.05.01.2.09.0010				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	100	13,665,000	8,838,828	64,68
1.05.03				**2. Program Penanggulangan Bencana**	100	**512,384,000**	**380,896,600**	**74,34**
1.05.03.2.02				**2.1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	100	**512,384,000**	**380,896,600**	**74,34**
1.05.03.2.02.08				**1.** Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100	12,384,000	12,122,000	97,88
1.05.03.2.02.16				2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100	500,000,000	368,774,600	73,75
1.05	**Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**							
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN				**4,199,733,319**	**4,102,175,096**	**97,07**
1.05.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100	**3,899,733,419**	**3,802,489,896**	**96,86**
1.05.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	**3,212,379,619**	**3,159,616,041**	**98,36**
1.05.01.2.02.0001				**1.** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	3,212,379,619	3,159,616,041	98,36

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.05.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	**292,271,100**	**252,709,406**	**86,46**
1.05.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	5,228,000	5,216,000	99,77
1.05.01.2.06.0002				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	74,091,500	64,361,500	86,87
1.05.01.2.06.0004				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	91,730,600	62,196,646	67,80
1.05.01.2.06.0005				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	9,298,00	9,289,500	99,91
1.05.01.2.06.0008				5. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	43,147,000	43,026,000	99,72
1.05.01.2.06.0009				6. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	68,776,000	68,619,400	99,77
1.05.01.2.08				1.3. **Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	**276,396,900**	**274,229,900**	**99,22**
1.05.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8,134,400	8,130,000	99,95
1.05.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	31,922,500	31,68,478	99,27
1.05.01.2.08.0003				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorKantor	100	36,420,000	34,490,000	94,70
1.05.01.2.08.0004				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	199,920,000	199,920,000	100
1.05.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**188,685,800**	**115,935,331**	**97,68**
1.05.01.2.09.0002				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	91,416,000	90,635,331	99,15

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.05.01.2.09.0006				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	12,200,000	10,350,000	84,84
1.05.01.2.09.0009				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	15,069,800	14,950,000	99,21
1.05.04				**2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	100	**299,999,900**	**299,685,200**	**99,90**
1.05.04.2.04				**2.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**	100	**299,999,900**	**299,685,200**	**99,90**
1.05.04.2.04.0001				1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100	299,999,900	299,685,200	99,90
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**							
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Sosial					
		DINAS SOSIAL				**4,914,524,179**	**4,498,036,921**	**91,53**
1.06.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**3.423.553.079**	**3.340.756.221**	**97,58**
1.06.01.2.02				1.1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.918.801.379**	**2.886.397.795**	**98,88**
1.06.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.918.801.379	2.886.397.795	98,88
1.06.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**123.455.700**	**111.734.700**	**90,50**
1.06.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	58.881.400	58.881.400	100
1.06.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	2.288.300	2.288.300	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.06.01.2.06.08				3. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	62.286.000	50.565.000	81,18
1.06.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**40.000.000**	**27.442.730**	**68,60**
1.06.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	40.000.000	27.442.730	68,60
1.06.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**341.296.000**	**315.180.996**	**92,34**
1.06.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	37.900.000	31.390.000	82,82
1.06.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	303.396.000	283.790.996	93,53
1.06.04				**2. Program Rehabilitasi Sosial**	**100**	**1.108.653.100**	**776.494.800**	**70,04**
1.06.04.2.01				**2.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**100**	**512,784,000**	**326,455,500**	**63,66**
1.06.04.2.01.05				1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0	152.784.500	0	0
1.06.04.2.01.06				2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100	129.599.500	97.399.500	75,15
1.06.04.2.01.09				3. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100	230.400.000	229.056.000	99,42
1.06.04.2.02				**2.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**	**100**	**595.869.100**	**450.039.300**	**75,52**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
1.06.04.2.02.03				1. Penyediaan Permakanan	100	157.386.500	157.386.500	100
1.06.04.2.02.04				2. Penyediaan Sandang	100	148.112.100	134.021.100	90,48
1.06.04.2.02.08				3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	100	82.263.500	59.731.700	72,61
1.06.04.2.02.10				4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100	113.591.000	98.900.000	87,06
1.06.04.2.02.13				5. Pemberian Layanan Rujukan	100	94.516.000,00	0	0
1.06.05				**3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**100**	**292.012.000**	**292.000.000**	**99,99**
1.06.05.2.02				**3.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**292.012.000**	**292.000.000**	**99,99**
1.06.05.2.02.01				1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	292.012.000	292.000.000	99,99
1.06.06				**4. Program Penanganan Bencana**	**100**	**90.306.000**	**88.785.900**	**98,31**
1.06.06.2.01				**4.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**100**	**90.306.000**	**88.785.900**	**98,31**
1.06.06.2.01.01				1. Penyediaan Makanan	100	90.306.000	88.785.900	98,31

LAMPIRAN II REALISASI ANGGARAN
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB BUKAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**							
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
2.07.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**2.401.418.660**	**2.196.312.444**	**91,46**
2.07.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.401.418.660**	**2.196.312.444**	**91,46**
2.07.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.401.418.660	2.196.312.444	91,46
2.07.05				**2. Program Hubungan Industrial**	**100**	**24.158.000**	**8.358.000**	**34,60**
2.07.05.2.01				**2.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**8.358.000**	**8.358.000**	**100**
2.07.05.2.01.01				1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100	3.958.000	3.958.000	100
2.07.05.2.01.02				2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		4.400.000	4.400.000	100
2.07.05.2.02				**2.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**15.800.000**	**0**	**0**
2.07.05.2.02.02				1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	15.800.000,	0	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.08	**Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**							
			Meningkatnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Partsisipasi Perempuan Dalam Pembangunan					
2.08		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
2.08.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.526.651.081**	**1.259.456.272**	**82,50**
2.08.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1.226.662.201**	**1.081.028.390**	**88,12**
2.08.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.226.662.201	1.081.028.390	88,12
2.08.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**90.127.400**	**67.501.700**	**74,89**
2.08.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	1.210.000	1.210.000	100
2.08.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	29.994.400	26.599.700	88,68
2.08.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	6.972.000	6.972.000	100
2.08.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	12.516.000	12.340.000	98,59
2.08.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	39.435.000	20.380.000	51,67
2.08.01.2.07				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**63.915.400**	**0**	**0**
2.08.01.2.07.11				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100	63.915.400	0	0
2.08.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**52.196.080**	**40.052.759**	**76,73**
2.08.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4.920.000	4.756.000	96,66
2.08.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	47.276.080	35.296.759	74,66
2.08.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**93.750.000**	**70.873.423**	**75,59**
2.08.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	100	65.640.000	56.454.600	86,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
2.08.01.2.09.02				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	15.000.000	5.568.823	37,12
2.08.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	13.110.000	8.850.000	67,50
2.08.03				**2. Program Perlindungan Perempuan**	**100**	**775.963.900**	**418.223.100**	**53,89**
2.08.03.2.01				**2.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**101.564.200**	**101.564.200**	**100**
2.08.03.2.01.01				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	101.564.200	101.564.200	100
2.08.03.2.02				**2.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**509.869.000**	**260.581.300**	**51,10**
2.08.03.2.02.02				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	509.869.000	260.581.300	51,10
2.08.03.2.03				**2.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**164.530.700**	**56.077.600**	**34,08**
2.08.03.2.03.02				1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	164.530.700	56.077.600	34,08
2.08.04				**3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100**	**42.194.500**	**35.308.201**	**83,67 %**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.08.04.2.02				**3.1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**42.194.500**	**35.308.201**	**83,67**
2.08.04.2.02.01				1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	42.194.500	35.308.201	83,67
2.08.06				**4. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)**	**100**	**153.785.800**	**52.671.005**	**34,24**
2.08.06.2.01				**4.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**153.785.800**	**52.671.005**	**34,24**
2.08.06.2.01.01				1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	153.785.800	52.671.005	34,24
2.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**							
		DINAS KETAHANAN PANGAN						
2.09.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**75,12**	**1.897.799.390**	**1.843.037.545**	**97,12**
2.09.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**73**	**1.658.461.890**	**1.631.348.021**	**98,37**
2.09.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73	1.658.461.890	1.631.348.021	98,37
2.09.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	**184.159.900**	**162.627.507**	**88,31**
2.09.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	3.661.100	3.650.000	99,70
2.09.01.2.06.0004				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	65.396.000	65.243.000	99,77

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.09.01.2.06.0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	6.780.000	6.780.000	100
2.09.01.2.06.0008				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	17.191.800	17.185.000	99,96
2.09.01.2.06.0009				5. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	91.131.000	69.769.507	76,56
2.09.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**26.818.000**	**23.531.017**	**87,74**
2.09.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4.018.000	4.017.000	99,98
2.09.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	22.800.000	19.514.017	85,59
2.09.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	36,77	**28.359.600**	**25.567.000**	**90,15**
2.09.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	25	12.295.000	12.295.000	100
2.09.01.2.09.0002				2. Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	75	2.250.000	0	0,00
2.09.01.2.09.0006				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	10	3.290.000	3.290.000	100
2.09.01.2.09.0011				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya.	-	10.524.600	9.982.000	94,84
2.09.03				**2. Program Peningkatan Diferifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat**	**100**	**192.287.140**	**104.244.700**	**54,21**
2.09.03.2.01				**2.1. Penyedian dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**100**	**53.017.950**	**50.521.700**	**95,29**
2.09.03.2.01.0011				1. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	100	53.017.950	50.521.700	95,29
2.09.03.2.04				**2.2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan**	100	**139.269.190**	**53.723.000**	**38,57**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
2.09.03.2.04.0002				1. Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	100	139.269.190	53.723.000	38,57
2.09.04				**3. Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**100**	**219.717.000**	**109.782.300**	**49,97**
2.09.04.2.01				**3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**100**	**219.717.000**	**109.782.300**	**49,97**
2.09.04.2.01.0001				1. Penyusunan, Pemutahiran dan Analisi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100	219.717.000	109.782.300	49,97
2.09.05				**4. Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**100**	**5.074.590**	**5.074.590**	**100**
2.09.05.2.01				**4.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**5.074.590**	**5.074.590**	**100**
2.09.05.2.01.0007				1. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kabupaten/Kota	100	5.074.590	5.074.590	100
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**							
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
2.11.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**4.372.386.379**	**4.252.109.548**	**97,25**
2.11.01,2.01.				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**32.380.000**	**32.380.000**	**100**
2.11.01,2.01.02				1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	32.380.000	32.380.000	100
2.11.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.758.648.579**	**2.697.945.850,79**	**97,80**
2.11.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.755.498.579	2.694.795.850,79	97,80
2.11.01.2.02.04				2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	3.150,000	3.150,000	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.11.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	**264.461.200**	**237.295.080**	**89,73**
2.11.01.2.06.02				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	103.734.500	103.159.500	99,45
2.11.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	26.724.100	26.124.100	97,75
2.11.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	3.595.600	1.980.000	55,10
2.11.01.2.06.08				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	46.106.000	46.088.000	99,96
2.11.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	84.303.000	59.943.480	71,10
2.11.01,2.07				**1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**73.729.200**	**73.729.200**	**100**
2.11.01,2.07.11				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	73.729.200	73.729.200	100
2.11.01.2.08				**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**1.449.600.000**	**1.415.395.310**	**97,64**
2.11.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	14.790.000	14.222.468	96,16
2.11.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	900.000.000	900.000.000	100
2.11.01.2.09				**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**328.377.400**	**296.536.950**	**90,30**
2.11.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	266.778.400	239.072.950	89,61
2.11.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	10.030.000	5.895.000	58,77
2.11.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	51.569.000	51.569.000	100
2.11.03				**2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	50	**73.627.000**	**72.280.090**	**98,17**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.11.03.2.01				**2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	100	**52.996.000**	**51.649.090**	**97,46**
2.11.03.2.01.01				1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100	52.996.000	51.649.090	97,46
2.11.03.2.02				**2.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100**	**20.631.000**	**20.631.000**	**100**
2.11.03.2.02.01				1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100	20.631.000	20.631.000	100
2.11.05				**3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	0	**53.793.800**	**53.793.800**	**0**
2.11.05.2.01				**3.1. Penyimpanan sementara Limbah B3**	**0**	**26.373.000**	**0**	**0**
2.11.05.2.01.01				**1.** Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	16.581.400	0	0
2.11.05.2.01.02				**2.** Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	0	9.791.600	0	0
2.11.06				**4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)**	**0**	**277.925.600**	**0**	**0**
2.11.06.2.01				**4.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH**	0	277.925.600	0	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.11.06.2.01.05				1. Pengawasan Perizinan Berusaha atauPersetujuan Pemerintah terkaitPersetujuan Lingkungan yangditerbitkan oleh Pemerintah DaerahProvinsi dan PeraturanPerundang-undangan di bidangPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup	0	277.925.600	0	0
2.11.08				**5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**100**	**198.902.500**	**198.902.500**	**100**
2.11.08.2.01				**5.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**198.902.500**	**198.902.500**	**100**
2.11.08.2.01.02				1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100	91.278.500	91.278.500	100
				2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	100	107.624.000	107.624.00	100
2.11.10				**6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**0**	**6.610.000**	**0**	**0**
2.11.10.2.01				**6.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**0**	**6.610.000**	**0**	**0**
2.11.10.2.01.01				1. Pengelolaan Pengaduanpermasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkatKabupaten/Kota	0	6.610.000	0	0
2.11.11				**7. Program Pengelolaan Persampahan**	**0**	**13.178.300**	**0**	**0**
2.11.11.2.03				**7.1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**0**	**13.178.300**	**0**	**0**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.11.11.2.03.02				1. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	0	6.832.200	0	0
2.11.11.2.03.03				2. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	0	6.346.100	0	0
		UPTD PENGELOLA PERSAMPAHAN				**5,556,672,528**	**5,460,602,900**	**98,27**
2.11.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**273,623,528**	**205,752,900**	**75,20**
2.11.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**176,834,588**	**127,039,900**	**71,84**
2.11.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	978,000	510,000	52,15
2.11.01.2.06.0002				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	139,208,988	98,467,000	70,73
2.11.01.2.06.0004				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	6,560,000	1,905,000	29,04
2.11.01.2.06.0005				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	1,524,600	540,000	35,42
2.11.01.2.06.0009				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	28,563,000	25,617,9000	89,69
2.11.01.2.08				**1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**9,619,140**	**4,964,000**	**51,61**
2.11.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	5,619,140	3,550,000	63,18
2.11.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	4,000,000	1,414,000	35,35
2.11.01.2.09				**1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**87,169,800**	**73,749,000**	**84,60**
2.11.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100	87,169,800	73,749,000	84,60
2.11.11				**2. Program Pengelolaan Persampahan**	**95**	**5,283,049,000**	**5,254,850,000**	**99,47**
2.11.11.2.01				**2.1. Pengelolaan Sampah**	**92,47**	**5,283,049,000**	**5,254,850,000**	**99,47**
2.11.11.2.01.17				1. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan	92,47	5,283,049,000	5,254,850,000	99,47

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan,biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**							
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**4.313.472.656**	**3.458.460.478**	**80,18**
2.12.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**87**	**4.163.521.656**	**3.324.375.078**	**79,85**
2.12.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3.076.853.656**	**2.738.271.807**	**89,00**
2.12.01. 2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	3.076.853.656	2.738.271.807	89,00
2.12.01. 2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81**	**351.897.800**	**131.373.460**	**37,33**
2.12.01. 2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47	96.507.300	76.528.700	79,30
2.12.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	1.157.500	1.150.000	99,35
2.12.01.2.06.06				3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	504.000	350.000	69,44
2.12.01. 2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	253.729.000	53.344.760	21,02
2.12.01. 2.07				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**72**	**545.470.200**	**336.500.000**	**61,69**
2.12.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	545.470.200	336.500.000	61,69
2.12.01. 2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85**	**116.640.000**	**89.524.811**	**76,75**
2.12.01. 2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85	1.640.000	1.400.000	85,37
2.12.01. 2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	115.000.000	88.124.811	76,63
2.12.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**72.660.000**	**28.705.000**	**39,51**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.12.01.2.09.06				1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	52.960.000	9.960.000	18,81
2.12.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	100	19.700.000	18.745.000	95,15
2.12.03				**2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**100**	**149.951.000**	**134.085.400**	**89,42**
2.12.03.2.03				**2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100**	**149.951.000**	**134.085.400**	**89,42**
2.12.03.2.03.04				1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	100	149.951.000	134.085.400	89,42
2.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**							
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**5.083.836.015**	**4.675.055.539**	**91,96**
2.13.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**3.480.959.615**	**3.321.949.729**	**95,43**
2.13.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**58.814.000**	**21.000.000**	**35,71**
2.13.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	58.814.000	21.000.000	35,71
2.13.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3.136.920.515**	**3.072.772.295**	**97,96**
2.13.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	3.136.920.515	3.072.772.295	97,96
2.13.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**94**	**200.673.500**	**151.186.300**	**75,33**
2.13.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	48.713.500	48.713.500	100
2.13.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	27.060.000	27.060.000	100
2.13.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	36.155.000	35.912.000	99,33
2.13.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,32	88.745.000	39.500.800	44,51
2.13.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**39.560.000**	**34.819.439**	**88,02**
2.13.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	6.560.000	6.560.000	100
2.13.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	33.000.000	28.259.439	85,63

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.13.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**44.991.600**	**44.991.600**	**100**
2.3.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	33.771.600	31.101.695	92,09
2.13.01.2.09.11				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	11.220.000	11.070.000	98,66
2.13.04				**2. Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**41,00**	**95.131.000**	**94.905.400**	**99,76**
2.13.04.2.01				**2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**41,00**	**95.131.000**	**94.905.400**	**99,76**
2.13.04.2.01.07				1. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	41,00	95.131.000	94.905.400	99,76
2.13.05				**3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**100**	**1.507.745.400**	**1.258.200.410**	**83,44**
2.13.05.2.01				**3.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.507.745.400**	**1.258.200.410**	**83,44**
2.13.05.2.01.01				1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	100	225.668.000	4.500.000	1,99
2.13.05.2.01.03				2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	100	1.282.077.400	1.253.700.410	97,38

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**							
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**6.289.038.944**	**5.069.019.462**	**80,60**
2.14.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**96,66**	**2.692.839.744**	**2.493.310.162**	**92,59**
2.14.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.371.352.044**	**2.308.699.242**	**97,35**
2.14.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.371.352.044	2.308.699.242	97,35
2.14.01.2.05				**1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**40.503.200**	**0**	**0**
2.14.01.2.05.05				1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	40.503.200	0	0
2.14.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**122.618.500**	**79.517.500**	**64,85**
2.14.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	68.670.500	64.302.700	93,64
2.14.01.2.06.09				2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	53.948.000	15.214.800	28,20
2.14.01.2.07				**1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**14.448.000**	**14.448.000**	**100**
2.14.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	14.448.000	14.448.000	100
2.14.01.2.08				**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**53.680.000**	**36.505.610**	**68,00**
2.14.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7.380.000	7.380.000	100
2.14.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	46.300.000	29.125.610	62,90
2.14.01.2.09				**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**90.238.000**	**54.139.810**	**59,99**
2.14.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	100	11.215.000	5.158.810	45,99

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
2.14.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	40.950.000	40.950.000	100
2.14.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	38.073.000	8.031.000	21,09
2.14.02				**2. Program Pengendalian Penduduk**	**100**	**206.949.600**	**206.338.700**	**99,70**
2.14.02.2.01				**2.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**100**	**99.999.600**	**99.388.700**	**99,38**
2.14.02.2.01.19				1. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	100	99.999.600	99.388.700	99,38
2.14.02.2.02				**2.2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**106.950.000**	**106.950.000**	**100**
2.14.02.2.02.12				1. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100	35.550.000	35.550.000	100
2.14.02.2.02.13				2. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100	71.400.000	71.400.000	100
2.14.03				**3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**100**	**2.478.247.800**	**1.458.368.800**	**58,85**
2.14.03.2.01				**3.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**100**	**435.164.400**	**346.238.400**	**79,56**
2.14.03.2.01.10				1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	100	193.158.700	108.020.300	55,92
2.14.03.2.01.11				2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100	100.000.000	100.000.000	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.14.03.2.01.12				3. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100	100.005.700	96.218.100	96,21
2.14.03.2.01.13				4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	42.000.000	42.000.000	100
2.14.03.2.02				**3.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**100**	**152.040.000**	**152.040.000**	**100**
2.14.03.2.02.04				1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100	152.040.000	152.040.000	100
2.14.03.2.03				**3.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**269.967.000**	**139.268.000**	**51,58**
2.14.03.2.03.03				1. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	269.967.000	139.268.000	51,58
2.14.03.2.04				**3.4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**100**	**1.621.076.400**	**820.822.400**	**50,63**
2.14.03.2.04.05				1. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	100	368.520.000	93.820.000	25,45
2.14.03.2.04.06				2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	100	1.252.556.400	727.002.400	58,04
2.14.04				**4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)**	**100**	**906.099.800**	**906.099.800**	**100**
2.14.04.2.01				**4.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**785.400.000**	**785.400.000**	**100**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.14.04.2.01.24				1. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100	785.400.000	785.400.000	100
2.14.04.2.02				**4.2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**120.699.800**	**120.699.800**	**100**
2.14.04.2.02.06				1. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	100	120.699.800	120.699.800	100
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**							
		DINAS PERHUBUNGAN						
2.15.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**95,85**	**4,124,415,017**	**3.835.036.532**	**92,98**
2.15.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3,425,573,817**	**3.309.514.177**	**96,61**
2.15.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	3,425,573,817	**3.309.514.177**	**96,61**
2.15.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95,92**	**432,932,400**	**315.592.367**	**72,90**
2.15.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	14,404,900	13.965.000	96,95
2.15.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	14,770,000	11.985.000	81,14
2.15.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	125,000,000	88.328.191	70,66
2.15.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	36,050,000	32.455.500,	90,03

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.15.01.2.06.06				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	3,000,000	3.000.000	100
2.15.01.2.06.08				6. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	15,352,500	15.350.000	99,98
2.15.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,42	224,355,000	153.508.676	68,42
2.15.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**143,744,800**	**129.134.988**	**89,82**
2.15.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8,200,000	8.195.000	99,94
2.15.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	84,500,000	69.884.988	82,70
2.15.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	51,074,800	51.055.000	99,96
2.15.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87,50**	**122,134,000**	**80.795.000**	**66,15**
2.15.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75	77,980,000	57.465.000	73,69
2.15.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	44,154,000	23.330.000	52,84
2.15.02				**2. Program PenyelenggaraanLalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**100**	**4,415,000,000**	**9.000.000**	**100**
2.15.02.2.02				**2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**100**	**4,406,000,000**	**-**	**0**
2.15.02.2.02.02				1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	4,406,000,**000**	**-**	**0**
2.15.02.2.14				**2.2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalamTrayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**9,000,000**	**9.000.000**	**100**
2.15.02.2.14.03				1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	9,000,000	9.000.000	**100**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.15.03				**3. Program Pengelolaan Pelayaran**	**88,33**	**9,374,889,002**	**5.247.734.508**	**55,98**
2.15.03.2.07				**3.1. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**760,954,400**	**605.863.560**	**79,62**
2.15.03.2.07.02				1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Daerah Kabupaten/Kota	100	760,954,400	605.863.560	79,62
2.15.03.2.12				**3.2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**68**	**4,676,011,601**	**4.641.870.948**	**99,27**
2.15.03.2.12.02				1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	100	947,663,237	913.522.584	96,40
				2. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	30	3,728,670,364	3.728.348.364	100
2.15.03.2.13				**3.3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**100**	**3,937,920,001**	**-**	**0**
2.15.03.2.13.03				1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	100	3,937,920,001	-	0
2.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**							
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.16.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**2,745,522,685**	2,657,835,797	96,81
2.16.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**71,703,800**	60,709,800	84,67
2.16.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	27,000,000	18,000,000	66,67
2.16.01.2.01.06				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	100	5,248,000	3,254,000	62

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	100	39,455,800	39,455,800	100
2.16.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2,390,076,185**	2,363,684,193	98,90
2.16.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,390,076,185	2,363,684,193	98,90
2.16.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**187,463,900**	143,645,800	76,63
2.16.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100	2,978,100	2,978,100	100
2.16.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	9,000,000	9,000,000	100
2.16.01.2.06.03				3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	23,994,000	20,600,000	85,85
2.16.01.2.06.04				4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	65,046,600	62,479,100	96,08
2.16.01.2.06.05				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	8,164,100	7,044,100	86,28
2.16.01.2.06.08				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	19,588,300	19,528,300	99,69
2.16.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	58,692,800	21,998,200	37,48
2.16.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**73,058,800**	66,926,004	91,61
2.16.01.208.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	3,558,800	3,558,800	100
2.16.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	48,500,000	42,367,204	87,36
2.16.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	21,000,000	21,000,000	100
2.16.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**23,220,000**	22,870,000	98,49
2.16.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	12,870,000	12,870,000	100
2.16.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	10,350,000	10,000,000	96,62
2.16.02				**2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**83,33**	**332,379,600**	296,217,200	89,12

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.16.02.201				**2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	**83,33**	**332,379,600**	296,217,200	89,12
2.16.02.2.01.01				1. Media Relasi	100	150,000,000	150,000,000	100
2.16.02.2.01.02				2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	100	59,516,800	59,291,800	99,62
2.16.02.2.01.03				3. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100	54,564,800	26,482,400	48,53
2.16.02.2.01.05				4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	100	20,176,400	19,951,400	98,88
2.16.02.2.01.07				5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100	40,491,600	40,491,600	100
2.16.02.2.01.08				6. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	-	7,630,000	0	0
2.16.03				**3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**100**	**806,835,000**	791,617,000	98,11
2.16.03.2.01				**3.1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**38,640,000**	38,640,000	100
2.16.03.2.01.02				1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	100	38,640,000	38,640,000	100
2.16.03.2.02				**3.2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah**	**100**	**768,195,000**	752,977,000	98,02
2.16.03.2.02.01				1. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	100	36,750,000	24,500,000	66,67
2.16.03.2.02.03				2. Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	100	11,445,000	8,477,000	74,07
2.16.03.2.02.04				3. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	100	720,000,000	720,000,000	100
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**							
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.17.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**89,13**	**2.473.196.707**	**2.389.442.029**	96,61
2.17.01.2.02				**1.1. Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**92,30**	**1.956.006.707**	**1.896.064.407**	**96,94**
2 17 01 2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92,30	1.956.006.707	1.896.064.407	96,94
2.17.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97,83**	**339.964.100**	**320.661.222**	**94,32**
2 17 01 2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	21.773.000	21.773.000	100
2 17 01 2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	92.704.300	92.235.500	100
2 17 01 2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	30.586.800	30.586.200	100
2 17 01 2.06.06				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	100	6.000.000	6.000.000	100
2 17 01 2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	43.680.000	43.680.000	100
2 17 01 2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,03	145.220.000	126.386.522	87,03
2.17.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**119.216.400**	**119.216.400**	**100**
2 17 01 2.08 01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8.216.400	8.216.400	100
2 17 01 2.08 02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	21.000.000	21.000.000	100
2 17 01 2.08 04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	100	90.000.000	90.000.000	100
2.17.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66,38**	**58.009.500**	**53.500.000**	**92,23**
2 17 01 2.09.01				1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak	0	4.254.000	0	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
2 17 01 2.09.02				2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	99,15	24.205.500	24.000.000	100
2 17 01 2.09 09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	29.550.000	29.500.000	100
2.17.03				**2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**100**	**270.433.200**	**270.433.200**	**100**
2.17.03.2.01				**2.1. Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalamdaerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**270.433.200**	**270.433.200**	**100**
2.17.03.2.01.03				**1.** Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100	20.403.200	20.403.200	100
2.17.03.2.01.04				**2.** Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalamdaerah Kabupaten/ Kota	100	250.030.000	250.030.000	100
2.17.05				**3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**86**	**59.689.800**	**51.289.800**	**85,93**
2.17.05.2.01				**3.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota**	**86**	**59.689.800**	**51.289.800**	**85,93**
2.17.05.2.01.01				1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	86	59.689.800,00	51.289.800	85,93
2.17.06				**4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	**40**	**253.044.800**	**119.436.400**	47,20

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.17.06.2.01				**4.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**40**	**253.044.800**	**119.436.400**	**47,20**
2.17.06.2.01.02				1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40	253.044.800	119.436.400	47,20
2.17.07				**5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)**	**66,67**	**290.480.200**	**280.480.200**	**96,56**
2.17.07.2.01				**5.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan ddan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**66,67**	**290.480.200**	**280.480.200**	**96,56**
2 17 07 2.01. 0003				1. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100	250.030.000	250.030.000	100
2 17 07 2.01 08				2. Pemulihan Usaha Mikro	0	10.000.000	0	0
2 17 07 2.01 015				3. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	100	30.450.200	30.450.200	100
2.17.08				**6. Program Pengembangan Umkm**	**100**	**94.310.500**	**94.310.500**	**100**
2.17.08.2.01				**6.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**100**	**94.310.500**	**94.310.500**	**100**
2.17 08 2.01.02				1. Pengembangan Usaha Mikro	100	63.476.200	63.476.200	100
2.17 08 2.01.06				2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	100	30.834.300	30.834.300	100
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**							
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.18.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**73,38**	**2,085,702,459,17**	**1.784.234.328,77**	**87,16**
2.18.01.2.02				**1.1. Penyedian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**56,07**	**1.767,041,259,17**	**1,601,900,863,77**	**90,65**
2.18.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.637.103.859,17	1.586.110.863.77	96,89
2.18.01.2.02.02				2. Penyediaan Administrasi Pelaksaanaan Tugas ASN	12,15	129,937,400	15.790.000	12,15
2.18.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66,67**	**68,105,100**	**43.115.650**	**63,31**
2.18.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	100	605.000	605.000	100
2.18.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83,33	36.612.500	26.381.900	72,06
2.18.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	11.453.600	9.051.750	79,03
2.18.01.2.06.08				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	50	19.434.000	7.077.000	36,42
2.18.01.2.06.0003				5. Penyediaan Pelatan Rumah Tangga	0	575.000	0	0
2.18.01.2.08				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**58,34**	**43.973.100**	**4.865.000**	**11,06**
2.18.01.2.07.0010				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,67	41.973.100	3.965.000	9,45
2.18.01.2.07.0011				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	2.000.000	900.000	45
2.18.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**138,450,000**	**84.268.075**	**60,87**
2.18.01.2.08.0002				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	86.700.000	52.568.075	60,63
2.18.01.2.08.0004				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	51.750.000	32.000.000	61,84
2.18.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85,83**	**67.558.000**	**50.084.740**	**74,14**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.18.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	42.900.000	42.134.740	98,22
2.18.01.2.09.0002				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	5.260.000	2.335.000	44,39
2.18.01.2.09.0009				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	10.258.000	315.000	3,07
2.18.01.2.09.0010				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66,67	4.260.000	2.500.000	58,69
2.18.01.2.09.0011				5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62,5	4.880.000	2.800.000	57,38
2.18.04				**2. Program Pelayanan Penanaman Modal**	**58,25**	**59.110.000**	**34.640.000**	**58,61**
2.18.04.2.01				**2.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**58,25**	**59.110.000**	**34.640.000**	**58,61**
2.18.04.2.01.0006				1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	58,25	59.110.000	34.640.000	58,61
2.18.05				**3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**44,16**	**82.980.000**	**24.200.000**	**47,17**
2.18.05.2.01				**3.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**44,16**	**82.980.000**	**24.200.000**	**47,17**
2.18.05.2.01.0005				1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	33,33	51.300.000	5.720.000	11,15
2.18.05.2.01.0006				2. Pengawasan Penanaman Modal	55	31.680.000	18.480.000	58,33
2.18.06				**4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100**	**10.000.000**	**5.450.000**	**54,50**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.18.06.2.01				**4.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**100**	**10.000.000**	**5.450.000**	**54,50**
2.18.06.2.01.0002				1. Pengolahan,Penyajiandan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronok	100	10.000.000	5.450.000	54,50
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga**							
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				**6.983.592.569**	**3.507.629.483**	**50,23**
2.19.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**96,95**	**2.011.500.420**	**1.802.629.483**	**89,62**
2.19.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1.589.897.420**	**1.413.178.325**	**88,88**
2.19.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.589.897.420	1.413.178.325	88,88
2.19.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87,80**	**286.120.500**	**259.368.658**	**90,65**
2.19.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70,19	32.100.000	22.527.858	70,18
2.19.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,44	56.695.700	43.086.000	76,00
2.19.01.2.06.03				3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	9.760.000	9.760.000	100
2.19.01.2.06.04				4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	66.301.100	66.301.100	100
2.19.01.2.06.05				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	6.346.200	6.346.200	100
2.19.01.2.06.08				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	78.635.500	78.635.500	100
2.19.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	36.282.000	32.712.000	90,16
2.19.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**73.004.000**	**67.604.000**	**92,60**
2.19.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	10.004.000	10.004.000	100
2.19.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	63.000.000	57.600.000	91,43

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.19.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**62.478.500**	**62.478.500**	**100**
2.19.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	48.160.000	48.160.000	100
2.19.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	4.283.500	4.283.500	100
2.19.01.2.09.10				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	10.035.000	10.035.000	100
2.19.02				**2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**77,78**	**4.592.092.149**	**1.325.000.000**	**28,85**
2.19.02.2.01				**2.1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**77,78**	**4.592.092.149**	**1.325.000.000**	**28,85**
2.19.02.2.01.12				1. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	77,78	4.592.092.149	1.325.000.000	28,85
2.19.03				**3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**100**	**380.000.000**	**380.000.000**	**100**
2.19.03.2.03				**3.1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**100**	**380.000.000**	**380.000.000**	**100**
2.19.03.2.03.06				1. Seleksi Atlet Daerah	100	380.000.000	380.000.000	100
2.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**							
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.21.02				**1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**100**	**12,510,000.00**	**10,210,000**	**81,61**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.21.02.2.01				**1.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**12,510,000.00**	**10,210,000**	**81,61**
2.21.02.2.01.04				1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	12,510,000.00	10,210,000	81,61
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**							
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**749.948.214**	**19.103.200**	**2,55**
2.22.02				**1. Program Pengembangan Kebudayaan**	**0**	**394.611.014**	**0**	**0**
2.22.02.2.01				**1.1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**394.611.014**	**0**	**0**
2.22.02.2.01.02				1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0	394.611.014	0	0
2.22.05				**2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100**	**355.337.200**	**19.103.200**	**5,38**
2.22.05.2.01				**2.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100**	**355.337.200**	**19.103.200**	**5,38**
2.22.05.2.01.02				1. Penetapan Cagar Budaya	100	355.337.200	19.103.200	5,38
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**							
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**2.340.964.655**	**2.041.063.054**	**87,19**
2.23.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.890.503.555**	**1.701.305.654**	**89,99**
2.23.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63,33**	**1.646.059.255**	**1.529.002.559**	**92,88**
2.23.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63,33	1.646.059.255	1.529.002.559	92,88
2.23.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**102.402.300**	**95.160.400**	**92,92**
2.23.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.	100	44.751.500	44.542.800	99,53
2.23.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	29.087.800	29.082.900	99,98
2.23.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	28.563.000	21.534.700	75,39

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.23.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**45.420.000**	**39.859.376**	**87,75**
2.23.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	13.940.000	13.940.000	100
2.23.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	31.480.000	25.919.376	82,33
2.23.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**96.622.000**	**37.283.319**	**38,58**
2.23.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	81.402.000	29.973.319	36,82
2.23.01.2.09.07				2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100	15.220.000	7.310.000	48,02
2.23.02				**2. Program Pembinaan Perpustakaan**	**100**	**450.461.100**	**339.757.400**	**75,42**
2.23.02.2.01				**2.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**223.459.900**	**170.350.000**	**94,11**
2.23.02.2.01.04				1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	100	181.000.000	170.350.000	94,11
2.23.02.2.01.18				2. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	100	42.459.900	0	0
2.23.02.2.02				**2.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**227.001.200**	**169.407.400**	**74,62**
2.23.02.2.02.07				1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100	134.930.700	119.178.900	88,32
2.23.02.2.02.09				2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	100	74.010.500	32.168.500	43,46
2.23.02.2.02.10				3. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	100	18.060.000	18.060.000	100
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**							
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
2.24.02				**1. Program Pengelolaan Arsip**	**100**	**73.138.200**	**67.502.000**	**92,29**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.24.02.2.03				**1.1. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**100**	**73.138.200**	**67.502.000**	**92,29**
2.24.02.2.03.02				1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100	73.138.200	67.502.000	92,29

LAMPIRAN II

REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

LAMPIRAN II REALISASI ANGGARAN
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB BUKAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**							
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
2.07.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**2.401.418.660**	**2.196.312.444**	**91,46**
2.07.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.401.418.660**	**2.196.312.444**	**91,46**
2.07.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.401.418.660	2.196.312.444	91,46
2.07.05				**2. Program Hubungan Industrial**	**100**	**24.158.000**	**8.358.000**	**34,60**
2.07.05.2.01				**2.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**8.358.000**	**8.358.000**	**100**
2.07.05.2.01.01				1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100	3.958.000	3.958.000	100
2.07.05.2.01.02				2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		4.400.000	4.400.000	100
2.07.05.2.02				**2.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**15.800.000**	**0**	**0**
2.07.05.2.02.02				1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	15.800.000,	0	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.08	**Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**							
			Meningkatnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Partsisipasi Perempuan Dalam Pembangunan					
2.08		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
2.08.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.526.651.081**	**1.259.456.272**	**82,50**
2.08.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1.226.662.201**	**1.081.028.390**	**88,12**
2.08.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.226.662.201	1.081.028.390	88,12
2.08.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**90.127.400**	**67.501.700**	**74,89**
2.08.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	1.210.000	1.210.000	100
2.08.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	29.994.400	26.599.700	88,68
2.08.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	6.972.000	6.972.000	100
2.08.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	12.516.000	12.340.000	98,59
2.08.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	39.435.000	20.380.000	51,67
2.08.01.2.07				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**63.915.400**	**0**	**0**
2.08.01.2.07.11				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100	63.915.400	0	0
2.08.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**52.196.080**	**40.052.759**	**76,73**
2.08.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4.920.000	4.756.000	96,66
2.08.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	47.276.080	35.296.759	74,66
2.08.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**93.750.000**	**70.873.423**	**75,59**
2.08.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	100	65.640.000	56.454.600	86,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
2.08.01.2.09.02				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	15.000.000	5.568.823	37,12
2.08.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	13.110.000	8.850.000	67,50
2.08.03				**2. Program Perlindungan Perempuan**	**100**	**775.963.900**	**418.223.100**	**53,89**
2.08.03.2.01				**2.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**101.564.200**	**101.564.200**	**100**
2.08.03.2.01.01				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	101.564.200	101.564.200	100
2.08.03.2.02				**2.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**509.869.000**	**260.581.300**	**51,10**
2.08.03.2.02.02				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	509.869.000	260.581.300	51,10
2.08.03.2.03				**2.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**164.530.700**	**56.077.600**	**34,08**
2.08.03.2.03.02				1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	164.530.700	56.077.600	34,08
2.08.04				**3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100**	**42.194.500**	**35.308.201**	**83,67 %**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.08.04.2.02				**3.1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**42.194.500**	**35.308.201**	**83,67**
2.08.04.2.02.01				1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	42.194.500	35.308.201	83,67
2.08.06				**4. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)**	**100**	**153.785.800**	**52.671.005**	**34,24**
2.08.06.2.01				**4.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**153.785.800**	**52.671.005**	**34,24**
2.08.06.2.01.01				1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	153.785.800	52.671.005	34,24
2.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**							
		DINAS KETAHANAN PANGAN						
2.09.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**75,12**	**1.897.799.390**	**1.843.037.545**	**97,12**
2.09.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**73**	**1.658.461.890**	**1.631.348.021**	**98,37**
2.09.01.2.02.0001				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73	1.658.461.890	1.631.348.021	98,37
2.09.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	**184.159.900**	**162.627.507**	**88,31**
2.09.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	3.661.100	3.650.000	99,70
2.09.01.2.06.0004				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	65.396.000	65.243.000	99,77

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.09.01.2.06.0005				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	6.780.000	6.780.000	100
2.09.01.2.06.0008				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	17.191.800	17.185.000	99,96
2.09.01.2.06.0009				5. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	91.131.000	69.769.507	76,56
2.09.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**26.818.000**	**23.531.017**	**87,74**
2.09.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4.018.000	4.017.000	99,98
2.09.01.2.08.0002				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	22.800.000	19.514.017	85,59
2.09.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	36,77	**28.359.600**	**25.567.000**	**90,15**
2.09.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	25	12.295.000	12.295.000	100
2.09.01.2.09.0002				2. Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	75	2.250.000	0	0,00
2.09.01.2.09.0006				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	10	3.290.000	3.290.000	100
2.09.01.2.09.0011				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya.	-	10.524.600	9.982.000	94,84
2.09.03				**2. Program Peningkatan Diferifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat**	**100**	**192.287.140**	**104.244.700**	**54,21**
2.09.03.2.01				**2.1. Penyedian dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**100**	**53.017.950**	**50.521.700**	**95,29**
2.09.03.2.01.0011				1. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	100	53.017.950	50.521.700	95,29
2.09.03.2.04				**2.2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan**	100	**139.269.190**	**53.723.000**	**38,57**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
2.09.03.2.04.0002				1. Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	100	139.269.190	53.723.000	38,57
2.09.04				**3. Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**100**	**219.717.000**	**109.782.300**	**49,97**
2.09.04.2.01				**3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**100**	**219.717.000**	**109.782.300**	**49,97**
2.09.04.2.01.0001				1. Penyusunan, Pemutahiran dan Analisi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100	219.717.000	109.782.300	49,97
2.09.05				**4. Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**100**	**5.074.590**	**5.074.590**	**100**
2.09.05.2.01				**4.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**5.074.590**	**5.074.590**	**100**
2.09.05.2.01.0007				1. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kabupaten/Kota	100	5.074.590	5.074.590	100
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**							
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
2.11.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**4.372.386.379**	**4.252.109.548**	**97,25**
2.11.01,2.01.				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**32.380.000**	**32.380.000**	**100**
2.11.01,2.01.02				1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	32.380.000	32.380.000	100
2.11.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.758.648.579**	**2.697.945.850,79**	**97,80**
2.11.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.755.498.579	2.694.795.850,79	97,80
2.11.01.2.02.04				2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	3.150,000	3.150,000	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.11.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	**264.461.200**	**237.295.080**	**89,73**
2.11.01.2.06.02				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	103.734.500	103.159.500	99,45
2.11.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	26.724.100	26.124.100	97,75
2.11.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	3.595.600	1.980.000	55,10
2.11.01.2.06.08				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	46.106.000	46.088.000	99,96
2.11.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	84.303.000	59.943.480	71,10
2.11.01,2.07				**1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**73.729.200**	**73.729.200**	**100**
2.11.01,2.07.11				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	73.729.200	73.729.200	100
2.11.01.2.08				**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**1.449.600.000**	**1.415.395.310**	**97,64**
2.11.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	14.790.000	14.222.468	96,16
2.11.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	900.000.000	900.000.000	100
2.11.01.2.09				**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**328.377.400**	**296.536.950**	**90,30**
2.11.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	266.778.400	239.072.950	89,61
2.11.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	10.030.000	5.895.000	58,77
2.11.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	51.569.000	51.569.000	100
2.11.03				**2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	50	**73.627.000**	**72.280.090**	**98,17**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.11.03.2.01				**2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	100	**52.996.000**	**51.649.090**	**97,46**
2.11.03.2.01.01				1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100	52.996.000	51.649.090	97,46
2.11.03.2.02				**2.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100**	**20.631.000**	**20.631.000**	**100**
2.11.03.2.02.01				1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100	20.631.000	20.631.000	100
2.11.05				**3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	0	**53.793.800**	**53.793.800**	**0**
2.11.05.2.01				**3.1. Penyimpanan sementara Limbah B3**	**0**	**26.373.000**	**0**	**0**
2.11.05.2.01.01				**1.** Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	16.581.400	0	0
2.11.05.2.01.02				**2.** Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	0	9.791.600	0	0
2.11.06				**4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)**	**0**	**277.925.600**	**0**	**0**
2.11.06.2.01				**4.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH**	0	277.925.600	0	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.11.06.2.01.05				1. Pengawasan Perizinan Berusaha atauPersetujuan Pemerintah terkaitPersetujuan Lingkungan yangditerbitkan oleh Pemerintah DaerahProvinsi dan PeraturanPerundang-undangan di bidangPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup	0	277.925.600	0	0
2.11.08				**5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**100**	**198.902.500**	**198.902.500**	**100**
2.11.08.2.01				**5.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**198.902.500**	**198.902.500**	**100**
2.11.08.2.01.02				1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100	91.278.500	91.278.500	100
				2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	100	107.624.000	107.624.00	100
2.11.10				**6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**0**	**6.610.000**	**0**	**0**
2.11.10.2.01				**6.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**0**	**6.610.000**	**0**	**0**
2.11.10.2.01.01				1. Pengelolaan Pengaduanpermasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkatKabupaten/Kota	0	6.610.000	0	0
2.11.11				**7. Program Pengelolaan Persampahan**	**0**	**13.178.300**	**0**	**0**
2.11.11.2.03				**7.1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**0**	**13.178.300**	**0**	**0**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.11.11.2.03.02				1. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	0	6.832.200	0	0
2.11.11.2.03.03				2. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	0	6.346.100	0	0
		UPTD PENGELOLA PERSAMPAHAN				**5,556,672,528**	**5,460,602,900**	**98,27**
2.11.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**273,623,528**	**205,752,900**	**75,20**
2.11.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**176,834,588**	**127,039,900**	**71,84**
2.11.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	978,000	510,000	52,15
2.11.01.2.06.0002				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	139,208,988	98,467,000	70,73
2.11.01.2.06.0004				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	6,560,000	1,905,000	29,04
2.11.01.2.06.0005				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	1,524,600	540,000	35,42
2.11.01.2.06.0009				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	28,563,000	25,617,9000	89,69
2.11.01.2.08				**1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**9,619,140**	**4,964,000**	**51,61**
2.11.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	5,619,140	3,550,000	63,18
2.11.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	4,000,000	1,414,000	35,35
2.11.01.2.09				**1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**87,169,800**	**73,749,000**	**84,60**
2.11.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100	87,169,800	73,749,000	84,60
2.11.11				**2. Program Pengelolaan Persampahan**	**95**	**5,283,049,000**	**5,254,850,000**	**99,47**
2.11.11.2.01				**2.1. Pengelolaan Sampah**	**92,47**	**5,283,049,000**	**5,254,850,000**	**99,47**
2.11.11.2.01.17				1. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan	92,47	5,283,049,000	5,254,850,000	99,47

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan,biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**							
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**4.313.472.656**	**3.458.460.478**	**80,18**
2.12.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**87**	**4.163.521.656**	**3.324.375.078**	**79,85**
2.12.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3.076.853.656**	**2.738.271.807**	**89,00**
2.12.01. 2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	3.076.853.656	2.738.271.807	89,00
2.12.01. 2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81**	**351.897.800**	**131.373.460**	**37,33**
2.12.01. 2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47	96.507.300	76.528.700	79,30
2.12.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	1.157.500	1.150.000	99,35
2.12.01.2.06.06				3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	504.000	350.000	69,44
2.12.01. 2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	253.729.000	53.344.760	21,02
2.12.01. 2.07				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**72**	**545.470.200**	**336.500.000**	**61,69**
2.12.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	545.470.200	336.500.000	61,69
2.12.01. 2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85**	**116.640.000**	**89.524.811**	**76,75**
2.12.01. 2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85	1.640.000	1.400.000	85,37
2.12.01. 2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	115.000.000	88.124.811	76,63
2.12.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**72.660.000**	**28.705.000**	**39,51**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.12.01.2.09.06				1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	52.960.000	9.960.000	18,81
2.12.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	100	19.700.000	18.745.000	95,15
2.12.03				**2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**100**	**149.951.000**	**134.085.400**	**89,42**
2.12.03.2.03				**2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100**	**149.951.000**	**134.085.400**	**89,42**
2.12.03.2.03.04				1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	100	149.951.000	134.085.400	89,42
2.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**							
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**5.083.836.015**	**4.675.055.539**	**91,96**
2.13.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**3.480.959.615**	**3.321.949.729**	**95,43**
2.13.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**58.814.000**	**21.000.000**	**35,71**
2.13.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	58.814.000	21.000.000	35,71
2.13.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3.136.920.515**	**3.072.772.295**	**97,96**
2.13.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	3.136.920.515	3.072.772.295	97,96
2.13.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**94**	**200.673.500**	**151.186.300**	**75,33**
2.13.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	48.713.500	48.713.500	100
2.13.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	27.060.000	27.060.000	100
2.13.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	36.155.000	35.912.000	99,33
2.13.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,32	88.745.000	39.500.800	44,51
2.13.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**39.560.000**	**34.819.439**	**88,02**
2.13.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	6.560.000	6.560.000	100
2.13.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	33.000.000	28.259.439	85,63

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.13.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**44.991.600**	**44.991.600**	**100**
2.3.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	33.771.600	31.101.695	92,09
2.13.01.2.09.11				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	11.220.000	11.070.000	98,66
2.13.04				**2. Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**41,00**	**95.131.000**	**94.905.400**	**99,76**
2.13.04.2.01				**2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**41,00**	**95.131.000**	**94.905.400**	**99,76**
2.13.04.2.01.07				1. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	41,00	95.131.000	94.905.400	99,76
2.13.05				**3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**100**	**1.507.745.400**	**1.258.200.410**	**83,44**
2.13.05.2.01				**3.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.507.745.400**	**1.258.200.410**	**83,44**
2.13.05.2.01.01				1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	100	225.668.000	4.500.000	1,99
2.13.05.2.01.03				2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	100	1.282.077.400	1.253.700.410	97,38

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**							
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**6.289.038.944**	**5.069.019.462**	**80,60**
2.14.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**96,66**	**2.692.839.744**	**2.493.310.162**	**92,59**
2.14.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.371.352.044**	**2.308.699.242**	**97,35**
2.14.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.371.352.044	2.308.699.242	97,35
2.14.01.2.05				**1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**40.503.200**	**0**	**0**
2.14.01.2.05.05				1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	40.503.200	0	0
2.14.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**122.618.500**	**79.517.500**	**64,85**
2.14.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	68.670.500	64.302.700	93,64
2.14.01.2.06.09				2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	53.948.000	15.214.800	28,20
2.14.01.2.07				**1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**14.448.000**	**14.448.000**	**100**
2.14.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	14.448.000	14.448.000	100
2.14.01.2.08				**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**53.680.000**	**36.505.610**	**68,00**
2.14.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7.380.000	7.380.000	100
2.14.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	46.300.000	29.125.610	62,90
2.14.01.2.09				**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**90.238.000**	**54.139.810**	**59,99**
2.14.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	100	11.215.000	5.158.810	45,99

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
2.14.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	40.950.000	40.950.000	100
2.14.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	38.073.000	8.031.000	21,09
2.14.02				**2. Program Pengendalian Penduduk**	**100**	**206.949.600**	**206.338.700**	**99,70**
2.14.02.2.01				**2.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**100**	**99.999.600**	**99.388.700**	**99,38**
2.14.02.2.01.19				1. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	100	99.999.600	99.388.700	99,38
2.14.02.2.02				**2.2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**106.950.000**	**106.950.000**	**100**
2.14.02.2.02.12				1. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100	35.550.000	35.550.000	100
2.14.02.2.02.13				2. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100	71.400.000	71.400.000	100
2.14.03				**3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**100**	**2.478.247.800**	**1.458.368.800**	**58,85**
2.14.03.2.01				**3.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**100**	**435.164.400**	**346.238.400**	**79,56**
2.14.03.2.01.10				1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	100	193.158.700	108.020.300	55,92
2.14.03.2.01.11				2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100	100.000.000	100.000.000	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.14.03.2.01.12				3. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100	100.005.700	96.218.100	96,21
2.14.03.2.01.13				4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	42.000.000	42.000.000	100
2.14.03.2.02				**3.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**100**	**152.040.000**	**152.040.000**	**100**
2.14.03.2.02.04				1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100	152.040.000	152.040.000	100
2.14.03.2.03				**3.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**269.967.000**	**139.268.000**	**51,58**
2.14.03.2.03.03				1. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	269.967.000	139.268.000	51,58
2.14.03.2.04				**3.4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**100**	**1.621.076.400**	**820.822.400**	**50,63**
2.14.03.2.04.05				1. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	100	368.520.000	93.820.000	25,45
2.14.03.2.04.06				2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	100	1.252.556.400	727.002.400	58,04
2.14.04				**4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)**	**100**	**906.099.800**	**906.099.800**	**100**
2.14.04.2.01				**4.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**785.400.000**	**785.400.000**	**100**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.14.04.2.01.24				1. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100	785.400.000	785.400.000	100
2.14.04.2.02				**4.2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**120.699.800**	**120.699.800**	**100**
2.14.04.2.02.06				1. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	100	120.699.800	120.699.800	100
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**							
		DINAS PERHUBUNGAN						
2.15.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**95,85**	**4,124,415,017**	**3.835.036.532**	**92,98**
2.15.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3,425,573,817**	**3.309.514.177**	**96,61**
2.15.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	3,425,573,817	**3.309.514.177**	**96,61**
2.15.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95,92**	**432,932,400**	**315.592.367**	**72,90**
2.15.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	14,404,900	13.965.000	96,95
2.15.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	14,770,000	11.985.000	81,14
2.15.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	125,000,000	88.328.191	70,66
2.15.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	36,050,000	32.455.500,	90,03

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.15.01.2.06.06				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	3,000,000	3.000.000	100
2.15.01.2.06.08				6. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	15,352,500	15.350.000	99,98
2.15.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,42	224,355,000	153.508.676	68,42
2.15.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**143,744,800**	**129.134.988**	**89,82**
2.15.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8,200,000	8.195.000	99,94
2.15.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	84,500,000	69.884.988	82,70
2.15.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	51,074,800	51.055.000	99,96
2.15.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87,50**	**122,134,000**	**80.795.000**	**66,15**
2.15.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75	77,980,000	57.465.000	73,69
2.15.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	44,154,000	23.330.000	52,84
2.15.02				**2. Program PenyelenggaraanLalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**100**	**4,415,000,000**	**9.000.000**	**100**
2.15.02.2.02				**2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**100**	**4,406,000,000**	**-**	**0**
2.15.02.2.02.02				1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	4,406,000,**000**	**-**	**0**
2.15.02.2.14				**2.2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalamTrayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**9,000,000**	**9.000.000**	**100**
2.15.02.2.14.03				1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	9,000,000	9.000.000	**100**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.15.03				**3. Program Pengelolaan Pelayaran**	**88,33**	**9,374,889,002**	**5.247.734.508**	**55,98**
2.15.03.2.07				**3.1. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**760,954,400**	**605.863.560**	**79,62**
2.15.03.2.07.02				1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Daerah Kabupaten/Kota	100	760,954,400	605.863.560	79,62
2.15.03.2.12				**3.2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**68**	**4,676,011,601**	**4.641.870.948**	**99,27**
2.15.03.2.12.02				1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	100	947,663,237	913.522.584	96,40
				2. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	30	3,728,670,364	3.728.348.364	100
2.15.03.2.13				**3.3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**100**	**3,937,920,001**	**-**	**0**
2.15.03.2.13.03				1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	100	3,937,920,001	-	0
2.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**							
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.16.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**2,745,522,685**	2,657,835,797	96,81
2.16.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**71,703,800**	60,709,800	84,67
2.16.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	27,000,000	18,000,000	66,67
2.16.01.2.01.06				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	100	5,248,000	3,254,000	62

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	100	39,455,800	39,455,800	100
2.16.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2,390,076,185**	2,363,684,193	98,90
2.16.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,390,076,185	2,363,684,193	98,90
2.16.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**187,463,900**	143,645,800	76,63
2.16.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100	2,978,100	2,978,100	100
2.16.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	9,000,000	9,000,000	100
2.16.01.2.06.03				3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	23,994,000	20,600,000	85,85
2.16.01.2.06.04				4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	65,046,600	62,479,100	96,08
2.16.01.2.06.05				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	8,164,100	7,044,100	86,28
2.16.01.2.06.08				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	19,588,300	19,528,300	99,69
2.16.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	58,692,800	21,998,200	37,48
2.16.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**73,058,800**	66,926,004	91,61
2.16.01.208.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	3,558,800	3,558,800	100
2.16.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	48,500,000	42,367,204	87,36
2.16.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	21,000,000	21,000,000	100
2.16.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**23,220,000**	22,870,000	98,49
2.16.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	12,870,000	12,870,000	100
2.16.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	10,350,000	10,000,000	96,62
2.16.02				**2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**83,33**	**332,379,600**	296,217,200	89,12

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.16.02.201				**2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	**83,33**	**332,379,600**	296,217,200	89,12
2.16.02.2.01.01				1. Media Relasi	100	150,000,000	150,000,000	100
2.16.02.2.01.02				2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	100	59,516,800	59,291,800	99,62
2.16.02.2.01.03				3. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100	54,564,800	26,482,400	48,53
2.16.02.2.01.05				4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	100	20,176,400	19,951,400	98,88
2.16.02.2.01.07				5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100	40,491,600	40,491,600	100
2.16.02.2.01.08				6. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	-	7,630,000	0	0
2.16.03				**3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**100**	**806,835,000**	791,617,000	98,11
2.16.03.2.01				**3.1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**38,640,000**	38,640,000	100
2.16.03.2.01.02				1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	100	38,640,000	38,640,000	100
2.16.03.2.02				**3.2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah**	**100**	**768,195,000**	752,977,000	98,02
2.16.03.2.02.01				1. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	100	36,750,000	24,500,000	66,67
2.16.03.2.02.03				2. Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	100	11,445,000	8,477,000	74,07
2.16.03.2.02.04				3. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	100	720,000,000	720,000,000	100
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**							
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.17.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**89,13**	**2.473.196.707**	**2.389.442.029**	96,61
2.17.01.2.02				**1.1. Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**92,30**	**1.956.006.707**	**1.896.064.407**	**96,94**
2 17 01 2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92,30	1.956.006.707	1.896.064.407	96,94
2.17.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97,83**	**339.964.100**	**320.661.222**	**94,32**
2 17 01 2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	21.773.000	21.773.000	100
2 17 01 2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	92.704.300	92.235.500	100
2 17 01 2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	30.586.800	30.586.200	100
2 17 01 2.06.06				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	100	6.000.000	6.000.000	100
2 17 01 2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	43.680.000	43.680.000	100
2 17 01 2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,03	145.220.000	126.386.522	87,03
2.17.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**119.216.400**	**119.216.400**	**100**
2 17 01 2.08 01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8.216.400	8.216.400	100
2 17 01 2.08 02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	21.000.000	21.000.000	100
2 17 01 2.08 04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	100	90.000.000	90.000.000	100
2.17.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66,38**	**58.009.500**	**53.500.000**	**92,23**
2 17 01 2.09.01				1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak	0	4.254.000	0	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
2 17 01 2.09.02				2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	99,15	24.205.500	24.000.000	100
2 17 01 2.09 09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	29.550.000	29.500.000	100
2.17.03				**2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**100**	**270.433.200**	**270.433.200**	**100**
2.17.03.2.01				**2.1. Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalamdaerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**270.433.200**	**270.433.200**	**100**
2.17.03.2.01.03				**1.** Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100	20.403.200	20.403.200	100
2.17.03.2.01.04				**2.** Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalamdaerah Kabupaten/ Kota	100	250.030.000	250.030.000	100
2.17.05				**3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**86**	**59.689.800**	**51.289.800**	**85,93**
2.17.05.2.01				**3.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota**	**86**	**59.689.800**	**51.289.800**	**85,93**
2.17.05.2.01.01				1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	86	59.689.800,00	51.289.800	85,93
2.17.06				**4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	**40**	**253.044.800**	**119.436.400**	47,20

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.17.06.2.01				**4.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**40**	**253.044.800**	**119.436.400**	**47,20**
2.17.06.2.01.02				1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40	253.044.800	119.436.400	47,20
2.17.07				**5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)**	**66,67**	**290.480.200**	**280.480.200**	**96,56**
2.17.07.2.01				**5.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan ddan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**66,67**	**290.480.200**	**280.480.200**	**96,56**
2 17 07 2.01. 0003				1. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100	250.030.000	250.030.000	100
2 17 07 2.01 08				2. Pemulihan Usaha Mikro	0	10.000.000	0	0
2 17 07 2.01 015				3. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	100	30.450.200	30.450.200	100
2.17.08				**6. Program Pengembangan Umkm**	**100**	**94.310.500**	**94.310.500**	**100**
2.17.08.2.01				**6.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**100**	**94.310.500**	**94.310.500**	**100**
2.17 08 2.01.02				1. Pengembangan Usaha Mikro	100	63.476.200	63.476.200	100
2.17 08 2.01.06				2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	100	30.834.300	30.834.300	100
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**							
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.18.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**73,38**	**2,085,702,459,17**	**1.784.234.328,77**	**87,16**
2.18.01.2.02				**1.1. Penyedian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**56,07**	**1.767,041,259,17**	**1,601,900,863,77**	**90,65**
2.18.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.637.103.859,17	1.586.110.863.77	96,89
2.18.01.2.02.02				2. Penyediaan Administrasi Pelaksaanaan Tugas ASN	12,15	129,937,400	15.790.000	12,15
2.18.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66,67**	**68,105,100**	**43.115.650**	**63,31**
2.18.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	100	605.000	605.000	100
2.18.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83,33	36.612.500	26.381.900	72,06
2.18.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	11.453.600	9.051.750	79,03
2.18.01.2.06.08				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	50	19.434.000	7.077.000	36,42
2.18.01.2.06.0003				5. Penyediaan Pelatan Rumah Tangga	0	575.000	0	0
2.18.01.2.08				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**58,34**	**43.973.100**	**4.865.000**	**11,06**
2.18.01.2.07.0010				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,67	41.973.100	3.965.000	9,45
2.18.01.2.07.0011				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	2.000.000	900.000	45
2.18.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**138,450,000**	**84.268.075**	**60,87**
2.18.01.2.08.0002				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	86.700.000	52.568.075	60,63
2.18.01.2.08.0004				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	51.750.000	32.000.000	61,84
2.18.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85,83**	**67.558.000**	**50.084.740**	**74,14**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.18.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	42.900.000	42.134.740	98,22
2.18.01.2.09.0002				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	5.260.000	2.335.000	44,39
2.18.01.2.09.0009				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	10.258.000	315.000	3,07
2.18.01.2.09.0010				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66,67	4.260.000	2.500.000	58,69
2.18.01.2.09.0011				5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62,5	4.880.000	2.800.000	57,38
2.18.04				**2. Program Pelayanan Penanaman Modal**	**58,25**	**59.110.000**	**34.640.000**	**58,61**
2.18.04.2.01				**2.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**58,25**	**59.110.000**	**34.640.000**	**58,61**
2.18.04.2.01.0006				1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	58,25	59.110.000	34.640.000	58,61
2.18.05				**3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**44,16**	**82.980.000**	**24.200.000**	**47,17**
2.18.05.2.01				**3.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**44,16**	**82.980.000**	**24.200.000**	**47,17**
2.18.05.2.01.0005				1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	33,33	51.300.000	5.720.000	11,15
2.18.05.2.01.0006				2. Pengawasan Penanaman Modal	55	31.680.000	18.480.000	58,33
2.18.06				**4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100**	**10.000.000**	**5.450.000**	**54,50**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.18.06.2.01				**4.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**100**	**10.000.000**	**5.450.000**	**54,50**
2.18.06.2.01.0002				1. Pengolahan,Penyajiandan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronok	100	10.000.000	5.450.000	54,50
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga**							
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				**6.983.592.569**	**3.507.629.483**	**50,23**
2.19.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**96,95**	**2.011.500.420**	**1.802.629.483**	**89,62**
2.19.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1.589.897.420**	**1.413.178.325**	**88,88**
2.19.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.589.897.420	1.413.178.325	88,88
2.19.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87,80**	**286.120.500**	**259.368.658**	**90,65**
2.19.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70,19	32.100.000	22.527.858	70,18
2.19.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,44	56.695.700	43.086.000	76,00
2.19.01.2.06.03				3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	9.760.000	9.760.000	100
2.19.01.2.06.04				4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	66.301.100	66.301.100	100
2.19.01.2.06.05				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	6.346.200	6.346.200	100
2.19.01.2.06.08				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	78.635.500	78.635.500	100
2.19.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	36.282.000	32.712.000	90,16
2.19.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**73.004.000**	**67.604.000**	**92,60**
2.19.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	10.004.000	10.004.000	100
2.19.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	63.000.000	57.600.000	91,43

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.19.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**62.478.500**	**62.478.500**	**100**
2.19.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	48.160.000	48.160.000	100
2.19.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	4.283.500	4.283.500	100
2.19.01.2.09.10				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	10.035.000	10.035.000	100
2.19.02				**2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**77,78**	**4.592.092.149**	**1.325.000.000**	**28,85**
2.19.02.2.01				**2.1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**77,78**	**4.592.092.149**	**1.325.000.000**	**28,85**
2.19.02.2.01.12				1. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	77,78	4.592.092.149	1.325.000.000	28,85
2.19.03				**3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**100**	**380.000.000**	**380.000.000**	**100**
2.19.03.2.03				**3.1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**100**	**380.000.000**	**380.000.000**	**100**
2.19.03.2.03.06				1. Seleksi Atlet Daerah	100	380.000.000	380.000.000	100
2.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**							
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.21.02				**1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**100**	**12,510,000.00**	**10,210,000**	**81,61**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.21.02.2.01				**1.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**12,510,000.00**	**10,210,000**	**81,61**
2.21.02.2.01.04				1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	12,510,000.00	10,210,000	81,61
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**							
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**749.948.214**	**19.103.200**	**2,55**
2.22.02				**1. Program Pengembangan Kebudayaan**	**0**	**394.611.014**	**0**	**0**
2.22.02.2.01				**1.1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**394.611.014**	**0**	**0**
2.22.02.2.01.02				1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0	394.611.014	0	0
2.22.05				**2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100**	**355.337.200**	**19.103.200**	**5,38**
2.22.05.2.01				**2.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100**	**355.337.200**	**19.103.200**	**5,38**
2.22.05.2.01.02				1. Penetapan Cagar Budaya	100	355.337.200	19.103.200	5,38
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**							
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**2.340.964.655**	**2.041.063.054**	**87,19**
2.23.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.890.503.555**	**1.701.305.654**	**89,99**
2.23.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63,33**	**1.646.059.255**	**1.529.002.559**	**92,88**
2.23.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63,33	1.646.059.255	1.529.002.559	92,88
2.23.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**102.402.300**	**95.160.400**	**92,92**
2.23.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.	100	44.751.500	44.542.800	99,53
2.23.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	29.087.800	29.082.900	99,98
2.23.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	28.563.000	21.534.700	75,39

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.23.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**45.420.000**	**39.859.376**	**87,75**
2.23.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	13.940.000	13.940.000	100
2.23.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	31.480.000	25.919.376	82,33
2.23.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**96.622.000**	**37.283.319**	**38,58**
2.23.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	81.402.000	29.973.319	36,82
2.23.01.2.09.07				2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100	15.220.000	7.310.000	48,02
2.23.02				**2. Program Pembinaan Perpustakaan**	**100**	**450.461.100**	**339.757.400**	**75,42**
2.23.02.2.01				**2.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**223.459.900**	**170.350.000**	**94,11**
2.23.02.2.01.04				1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	100	181.000.000	170.350.000	94,11
2.23.02.2.01.18				2. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	100	42.459.900	0	0
2.23.02.2.02				**2.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**227.001.200**	**169.407.400**	**74,62**
2.23.02.2.02.07				1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100	134.930.700	119.178.900	88,32
2.23.02.2.02.09				2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	100	74.010.500	32.168.500	43,46
2.23.02.2.02.10				3. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	100	18.060.000	18.060.000	100
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**							
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
2.24.02				**1. Program Pengelolaan Arsip**	**100**	**73.138.200**	**67.502.000**	**92,29**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.24.02.2.03				**1.1. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**100**	**73.138.200**	**67.502.000**	**92,29**
2.24.02.2.03.02				1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100	73.138.200	67.502.000	92,29

LAMPIRAN III

REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

LAMPIRAN III REALISASI ANGGARAN
PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**							
		DINAS PERIKANAN						
3.25.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**100**	**5,037,374,317,61**	**4,638,161,605.00**	**92.07**
3.25.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**155,611,200**	**-**	**-**
3.25.01.2.01.07				1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	**155,611,200**	**-**	**-**
3.25.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**4,281,947,417,61**	**4,258,610,253**	**99.45**
3.25.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100	4,281,947,417,61	4,258,610,253	99.45
3.25.01.2.05				**1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**0**	**-**	**-**
3.25.01.2.05.02				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	0	-	-
3.25.01.2.06				**1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**387,180,700**	**264,754,577.00**	**68.38**
3.25.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi	100	3,943,000	2,813,000	**71.34**
3.25.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-	-	**-**
3.25.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	60,711,800	59,878,800	**98.63**
3.25.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	9,310,000	8,212,500	**88.21**
3.25.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	19,618,900	18,779,900.00	**95.72**
3.25.01.2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	293,597,000	175,070,377	**59.63**
3.25.01.2.07				**1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**30,151,000**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
3.25.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	**0**	**30,151,000**	-	**-**
3.25.01.2.08				**1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**151,362,000**	**104,546,775**	**69.07**
3.25.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	5,412,000.00	3,280,000.00	60.61
3.25.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	145.950.000	101,266,775.00	69.38
3.25.01.2.09				**1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**59,50**	**31,122,000**	**10,250,000.00**	**32.93**
3.25.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	100	14,536,000	3,100,000	21.33
3.25.01.2.09.02				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100	6,436,000	3,200,000	49.72
3.25.01.2.09.06				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	38	10,150,000	3,950,000	38.92
3.25.01.2.09.09				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	-	-	-
3.25.03				**2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**100**	**1,081,677,400**	**851,842,508**	**78.75**
3.25.03.2.02				**2.1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota**	**100**	**993,677,400**	**775,842,508**	**78.08**
3.25.03.2.02.01				1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	100	993,677,400	775,842,508	78.08
3.25.03.2.03				**2.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**100**	**88,000,000**	**76,000,000**	**86.36**
3.25.03.2.03.02				1. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100	88,000,000	76,000,000	86.36
3.25.04				**3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**0**	**554,195,700**	**-**	**-**
3.25.04.2.02				**3.1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**0**	**390,550,000**	**-**	**-**
3.25.04.2.02.01				1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	0	216,915,000	**-**	-
3.25.04.2.02.02				2. Pemberian Pendampingan,Kemudahan	0	173,635,000	**-**	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
				Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
3.25.04.2.03				**3.2. Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudiaya Ikan (TPDIK)**	**0**	**163,645,700**	**-**	**-**
3.25.04.2.04.03.0002				1. Pelayanan Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TPIDK)	0	163,645,700	-	-
3.25.05				**4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**	**50**	**61,600,000**	**30,800,000**	**50.00**
3.25.05.2.01				**4.1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	**50**	**61,600,000**	30,800,000	**50.00**
3.25.05.2.01.01				1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	50	61,600,000	30,800,000	50.00
3.25.06				**5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**100**	**133,994,160**	**29,208,520**	**21.80**
3.25.06.2.03				**5.1. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	**100**	**133,994,160**	**29,208,520**	**21.80**
3.25.06.2.03.01				1. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	100	133,994,160	29,208,520	21.80
3.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**							
			Meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset daerah					
3.26		**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**1,994,165,699**	**1,726,758,516**	**87**
3.26.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**	**85,23**	**1,685,231,149**	**1,604,050,816**	95
3.26.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**100**	**1,474,825,249**	**1,423,109,600**	**96**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
3.26.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,474,825,249	1,423,109,600	96
3.26.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**55,187,000**	**54,410,000**	**99**
3.26.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2,568,100	2,544,000	99
3.26.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik	100	43,789,900	43,054,900	98
3.26.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	6,517,000	6,499,100	100
3.26.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	2,312,000	2,312,000	100
3.26.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76,67**	**63,996,400**	**50,923,256**	**80**
3.26.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	6,576,400	6,576,400	100
3.26.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,33	57,420,000	44,346,856	77
3.26.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64,28**	**91,222,500**	**75,607,960**	**83**
3.26.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	50	59,396,500	49,832,960	84
3.26.01.2.09.19				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50	19,476,000	18,965,000	97
3.26.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	92,85	12,350,000	6,810,000	55
			Meningkatnya Nilai Tambah dan Pendapatan Pariwisata					
3.26.02				**2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**100**	**13,028,700**	**9,777,700**	75
3.26.02.2.03				**2.1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100**	**13,028,700**	**9,777,700**	**75**
3.26.02.2.03.04				1. Pengadaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100	13,028,700	9,777,700	75

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
3.26.03				**3. Program Pemasaran Pariwisata**	**86,67**	**117,315,550**	**112,930,000**	**96**
3.26.03.2.01				**3.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**86,67**	**117,315,550**	**112,930,000**	**96**
3.26.03.2.01.07				1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	86,67	117,315,550	112,930,000	96
3.26.04				**4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**0**	**178,590,300**	**-**	**0**
3.26.04.2.01				**4.1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**178,590,300**	**-**	**0**
3.26.04.2.01.01				1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	0	178,590,300	-	0
3.27	**Urusan Pilihan Bidang Pertanian**							
3.27		**DINAS PERTANIAN**				**10,855,306,357**	**10,231,790,659**	**94**
3.27.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	96	**9,634,180,822**	**9,270,771,186**	**96**
3.27.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**97**	**9,062,115,622**	**8,794,583,299**	**97**
3.27.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97	9,062,115,622	8,794,583,299	**97**
3.27.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**76**	**280,668,200**	**214,235,667**	**76**
3.27.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	91,401,000	91,078,000	**100**
3.27.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	15,176,200	15,170,000	**100**
3.27.01.2.06.08				3. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	58,549,000	58,530,000	**100**
3.27.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43	115,542,000	49,457,667	**43**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
3.27.01.2.07				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**55.950.000**	**55.916.250**	**100**
3.27.01.2.07.11				1. Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	**55.950.000**	**55.916.250**	**100**
3.27.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94**	**126,625,000**	**82.447.260**	**94**
3.27.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91	90,625,000	82,447,260	**91**
3.27.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	36,000,000	0	**100**
3.27.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80**	**107,302,000**	**86,068,710**	**80**
3.27.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	78	69,361,000	53,838,310	**78**
3.27.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	82	30,141,000	24,580,400	**82**
3.27.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	98	7,800,000	7,650,000	**98**
3.27.03				**2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	97	**228,008,700**	**222,236,700**	**97**
3.27.03.2.01				**2.1. Pengembangan Prasarana Pertanian**	**97**	**221,838,700**	**216,076,700**	**97**
3.27.03.2.01.15				1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	97	221,838,700	216,076,700	**97**
3.27.03.2.02				**2.2. Pembangunan Prasarana Pertanian**	**100**	**3,040,000**	**3,040,000**	**100**
3.27.03.2.10				1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100	3,040,000	3,040,000	**100**
3.27.03.2.04				**2.3. Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum**	**100**	**3,130,000**	**3,120,000**	**100**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
3.27.03.2.04.02				1. Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	100	3,130,000	**3,120,000**	**100**
3.27.05				**3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	67	**513,116,835**	**343,772,773**	**67**
3.27.05.2.01				**3.1. Pegendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**67**	**513,116,835**	**343,772,773**	**67**
3.27.05.2.01.01				1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	343,799,735	343,772,773	**100**
3.27.05.2.01.06				2. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan	-	169,317,100	0	**-**
3.27.07				**4. Program Penyuluhan Pertanian**	82	**480,000,000**	**395,000,000**	**82**
3.27.07.2.01				**4.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**82**	**480,000,000**	**395,000,000**	**82**
3.27.07.2.01.01				1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desaa	82	480,000,000	395,000,000	**82**
3.30	**Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**							
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						
3.30.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**85**	**3,635,906,712**	**2,813,178,330**	**77**
3.30.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**75**	**2,957,168,052**	**2,623,292,946**	**89**
3.30.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,775,248,052	2,546,372,946	92
3.30.01.2.02.02				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	181,920,000	76,920,000	42
3.30.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66**	**331,918,660**	**166,269,804**	**50**
3.30.01.2.06.02				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80	106,076,660	44,799,104	42
3.30.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	74,140,000	74,122,400	100
3.30.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	31,111,000	30,988,800	100
3.30.01.2.06.08				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	50	40,100,000	16,359,500	41

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
3.30.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	80,491,000	-	-
3.30.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**115,560,000**	**46,672,319**	**40**
3.30.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	6,560,000	4,920,000	75
3.30.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	109,000,000	41,752,319	38
3.30.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**231,260,000**	**198,657,000**	**86**
3.30.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	6,750,000	2,207,000	33
3.30.01.2.09.02				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	42,370,000	27,900,000	66
3.30.01.2.09.06				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	30,450,000	17,050,000	56
3.30.01.2.09.09				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	151,690,000	151,500,000	100
3.30.03				**2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**50**	**434,004,000**	**385,901,121**	**89**
3.30.03.2.01				**2.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**50**	**434,004,000**	**385,901,121**	**89**
3.30.03.2.01.01				1. Penyediaan sarana distribusi perdagangan	0	16,800,000	-	0
3.30.03.2.01.02				2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	417,204,000	385,901,121	92
3.30.04				**3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**92**	**278,474,000**	**179,474,000**	**64**
3.30.04.2.01				**3.1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**100**	**123,250,000**	**38,500,000**	**31**
3.30.04.2.02.01				1. Koordinasi dan singkronisasi ketersediaan ketersediaan barang	100	21,000,000	19,250,000	**92**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
				kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				
3.30.04.2.02.03				2. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	100	102,250,000	19,250,000	19
3.30.04.2.02				**3.2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**83**	**155,224,000**	**140,974,000**	**91**
3.30.04.2.02.01				1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100	21,000,000	15,750,000	75
3.30.04.2.02.02				2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar rakyat yang terintergrasi dalam sistem informasi perdagangan	100	21,000,000	15,750,000	75
3.30.04.2.02.03				3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	50	113,224,000	109,474,000	97
3.30.06				**4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**100**	**150,547,000**	**101,184,146**	**67**
3.30.06.2.01				**4.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**100**	**150,547,000**	**101,184,146**	**67**
3.30.06.2.01.01				1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100	49,297,000	37,684,146	76
3.30.06.2.01.02				2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	484	101,250,000	63,500,000	63
3.31	**Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**							
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						
3.31.02				**1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**100**	**46,750,000**	**32,500,000**	**70**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
3.30.02.2.01				**1.1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab./Kota**	**100**	**46,750,000**	**32,500,000**	**70**
3.30.02.2.01.03				1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan sumber daya industri	100	46,750,000	32,500,000	70
3.31.03				**2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**100**	**40,580,000**	**39,740,000**	**98**
3.31.03.2.01				**2.1. Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**40,580,000**	**39,740,000**	**98**
3.31.03.2.01.03				1. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	100	40,580,000	39,740,000	98
3.32	**Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi**							
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
3.32.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	93,75	**251.923.000**	**162.165.034**	**64,37**
3.32.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**121.271.500**	**88.844.900**	**73,26**
3.32.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	3.273.600	3.273.600	100
3.32.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	48.091.400	44.449.800	92,43
3.32.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	7.080.100	7.080.100	100
3.32.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	28.512.400	25.518.000	89,50
3.32.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	34.314.000	8.523.400	24,84
3.32.01.2.07				**1.2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**39.926.000**	**39.926.000**	**100**
3.32.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	39.926.000	39.926.000	**100**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
3.32.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**100**	**33.860.000**	**7.340.134**	**21,68**
3.32.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4.100.000	4.100.000	100
3.32.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	29.760.000	3.240.134	10,89
3.32.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75**	**56.865.500**	**26.054.000**	**45,82**
3.32.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75	31.544.500	1.092.500	3,46
3.32.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	8.760.000	8.760.000	100
3.32.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	16.561.000	16.201.500	97,83
3.32.02				**2. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**100**	**16.700.000**	**16.700.000**	**100**
3.32.02.2.01				**2.1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**100**	**16.700.000**	**16.700.000**	**100**
3.32.02.2.01.01				1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	100	16.700.000	16.700.000	100
3.32.03				**3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**100**	**16.475.000**	**15.800.000**	**95,90**
3.32.03.2.01				**3.1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**16.475.000**	**15.800.000**	**95,90**
3.32.03.2.01.20				1. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	100	16.475.000	15.800.000	95,90

LAMPIRAN IV

REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

LAMPIRAN IV REALISASI ANGGARAN
PELAKSANAAN URUSAN PELAKSANAAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN, UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN, UNSUR KEWILAYAHAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		SEKRETARIAT DAERAH			**50,00**	**80.900.900.627.00**	**68.819.002.669.00**	**85,06**
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**88,65**	80.300.900.627.00	68.569.002.669.00	85,39
4.01.01.2.02				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100**	62.833.997.627.00	54.599.803.756.00	86,90
4.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	62.833.997.627.00	54.599.803.756.00	86,90
4.01.01.2.05				1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	912.500.000.00	745.203.320.00	81,67
4.01.01.2.05.06				1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	100	807.500.000.00	745.203.320.00	92,29
4.01.01.2.05.08				2. Pemindahan Tugas ASN	-	105.000.000.00	0.00	0
4.01.01.2.06				1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**65,27**	8.747.652.700.00	6.456.063.519.00	73,80
4.01.01.2.06.02				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,66	480.340.000.00	190.670.000.00	39,69
4.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83,33	677.110.900.00	567.756.920.00	83,85
4.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,00	1.206.337.800.00	608.900.000.00	50,49
4.01.01.2.06.06				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41,66	475.000.000.00	192.460.000.00	40,52
4.01.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	1.880.750.000.00	1.878.462.213.00	99,88
4.01.01.2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,00	4.028.114.000.00	3.017.814.386.00	74,92
4.01.01.2.08				1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**88,33**	5.625.725.000.00	4.891.493.201.00	86,95

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	19.680.000.00	19.600.000.00	99,59
4.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75	1.335.900.000.00	1.011.056.621.00	75,68
4.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90	4.270.145.000.00	3.860.836.580.00	90,41
4.01.01.2.09				1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**67**	348.500.000.00	234.175.500.00	67,20
4.01.01.2.09.09				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67	348.500.000.00	234.175.500.00	67,20
4. 01 01 2.11				1.6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**100**	827.525.300.00	637.263.373.00	77,01
4. 01 01 2.11.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	250.825.300.00	213.590.473.00	85,16
4. 01 01 2.11.02				2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	229.200.000.00	166.489.900.00	72,64
4. 01 01 2.11.03				3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100.000.000.00	9.683.000.00	9,68
4. 01 01 2.11.04				4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	247.500.000.00	247.500.000.00	100
4.01 01 2.12				1.7. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**100**	1.005.000.000.00	1.005.000.000.00	100
4 01 01 2.12.01				1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100	570.000.000.00	570.000.000.00	100
4.01 01 2.12.02				2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100	435.000.000.00	435.000.000.00	100
2.10.05				**2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**50**	600.000.000.00	250.000.000.00	41,67
2.10.05.2.01				2.1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah Untuk	**50**	600.000.000.00	250.000.000.00	41,67

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
				Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten /Kota				
2.10.05.2.01.05				1. Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	600.000.000.00	250.000.000.00	41,67
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA						
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**87,22**	**6.727.631.600.00**	**3.638.902.781.00**	**54,08**
4.01.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**40.399.100.00**	**27.056.100.00**	**66,97**
4.01.01.2.01.02				1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	13.343.000.00	0.00	
4.01.01.2.01.03				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	13.343.000.00	13.343.000.00	100,00
4.01.01.2.01.06				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	13.713.100.00	13.713.100.00	100.00
4.01.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**196.057.800.00**	**146.904.600.00**	**74,93**
4.01.01.2.02.02				1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	20.280.000.00	20.280.000.00	100,00
4.01.01.2.02.03				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	127.371.600.00	124.134.600.00	97,46
4.01.01.2.02.05				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	48.406.200.00	2.490.000.00	5,14
4.01.01.2.03				**1.3. Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah**	**33**	276.023.400.00	2.475.000.00	8,96
4.01.01.2.03.01				1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	98.008.000.00	0.00	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.01.2.03.04				2. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	0	167.506.000.00	0.00	0
4.01.01.2.03.06				3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	10.509.400.00	2.475.000.00	23,50
4.01.01.2.06				**1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**88,33**	**1.045.792.900.00**	**833.466.127.00**	**79,70**
4.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	17.330.500.00	17.290.500.00	99,76
4.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	39.679.400.00	34.124.800.00	86,00
4.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	9.482.000.00	4.788.600.00	50,50
4.01.01.2.06.07				4. Penyediaan Bahan/Material	100	785.619.000.00	716.295.927.00	91,17
4.01.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	13.674.000.00	13.674.000.00	100,00
4.01.01.2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30	180.008.000.00	47.292.300.00	26.27
4.01.01.2.07				**1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	1.275.030.000.00	1.049.029.554.00	82,27
4.01.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	1.275.030.000.00	1.049.029.554.00	82,27
4.01.01.2.08				**1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	719.175.200.00	707.087.600.00	98,31
4.01.01.2.08.01				2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2.575.200.00	1.287.600.00	50,00
4.01.01.2.08.02				3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	129.200.000.00	124.400.000.00	96,28
4.01.01.2.08.04				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	587.400.000.00	581.400.000.00	98,97
4.01.01.2.09				**1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**76,44**	3.078.212.400.00	775.943.000.00	25,21
4.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	83,33	716.100.000.00	356.030.000.00	49,71

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	97,44	79.350.000.00	15.925.200.00	20,06
4.01.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	25,00	2.149.608.000.00	398.622.000.00	18,54
4.01.01.2.09.11				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	133.154.400.00	5.365.800.00	40,29
4.01.01.2.12				**1.8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.**	**100**	**96.940.800.00**	**96.940.800.00**	**100**
4.01.01.2.12.01				1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100	32.313.600.00	32.313.600.00	100
4.01.01.2.12.02				2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100	32.313.600.00	32.313.600.00	100
4.01.01.2.12.03				3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaria Daerah	100	32.313.600.00	32.313.600.00	100
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA						
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**96**	**999.999.900,00**	**825.620.300,00**	**82,56**
4.01.01.2.05				1.1. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**3.543.600.00**	**3.543.600.00**	**100**
4.01.01.2.05.02				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkpannya	100	3.543.600.00	3.543.600.00	100
4.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**88.75**	**191.984.100.00**	**127.942.212.00**	**66.64**
4.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	28.740.000.00	28.367.500.00	98.70
4.01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	4.967.100.00	4.966.600.00	99.98
4.01.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	16.578.000.00	16.562.900.00	99.90
4.01.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	141.699.000.00	78.045.212.00	55.07
4.01.01.2.07				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**29.000.000.00**	**28.927.928.00**	**100,00**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.01.2.07.11				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	29.000.000.00	28.927.928.00	100
4.01.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**37.780.000.00**	**18.508.170.00**	**48.99**
4.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	3.280.000.00	3.278.000.00	99.94
4.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	12.000.000.00	8.930.170.00	74,00
4.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	22.500.000.00	6.300.000.00	28,00
4.01.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**83.670.000.00**	**67.522.810.00**	**80.70**
4.01.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	83.670.000.00	67.522.810.00	80.70
4.01.01.2.13				**1.6. Penataan Organisasi**	**88**	**654.022.200.00**	**579.175.580.00**	**88.56**
4.01.01.2.13.01				1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2.	80	222.972.000.00	197.275.980.00	88.48
4.01.01.2.13.02				3. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	87	170.286.000.00	155.486.400.00	91.31
4.01.01.2.13.03				4. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	73	90.324.000.00	63.304.400.00	70.09
4.01.01.2.13.04				5. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	89.506.600.00	89.304.400.00	99.77
4.01.01.2.13.05				6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	80.933.600.00	73.804.400.00	91.19
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNUKASI PIMPINAN						
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**94,87**	**733.299.200**	**607.592.411**	**82,86**
4.01.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92,85**	**317.024.200**	**217.648.411**	**68,65**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.01.2.06.0004				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	35.660.900	35.591.500	99,81
4.01.01.2.06.0005				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	26.310.500	25.310.000	96,20
4.01.01.2.06.0008				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	40.088.800	38.172.800	95,22
4.01.01.2.06.0009				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	71,42	214.964.000	118.574.111	55,16
4.01.01.2.08				**1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**52.816.000**	**52.816.000**	**100**
4.01.01.2.08.0001				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7.216.000	7.216.000	100
4.01.01.2.08.0004				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	45.600.000	45.600.000	100
4.01.01.2.09				**1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**62.109.000**	**54.878.000**	**88,36**
4.01.01.2.09.0001				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	12.606.000	5.443.000	43,18
4.01.01.2.09.0010				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	33.673.000	33.605.000	99,80
4.01.01.2.09.0011				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	15.830.000	15.830.000	100
4.01.01.2.14				**1.4. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**86,66**	**301.350.000**	**282.250.000**	**93,66**
4.01.01.2.14.0001				1. Fasilitasi Keprotokolan	60	33.750.000	20.250.000	60
4.01.01.2.14.0002				2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100	200.100.000	194.500.000	97,20
4.01.01.2.14.0003				3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	67.500.000	67.500.000	100
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA				**649.948.600**	**521.333.222**	**80.21**
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**334.460.600**	**265.501.022**	**79.38**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**208.684.600**	**152.982.522**	**73.31**
4.01.01.2.06.02				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	29.398.600	22.313.800	75.90
4.01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	7.243.500	5.494.300	78.85
4.01.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	11.180.500	10.649.500	95.25
4.01.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	160.862.000	114.524.922	71.19
4.01.01.2.07				**1.2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**52.306.000**	**43.305.500**	**82.79**
4.01.01.2.07.05				1. Pengadaan Mebel	100	12.774.000	3.774.000	29.54
4.01.01.2.07.11				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	39.352.000	39.351.500	100
4.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	45.640.000	43.590.000	95.51
4.01.01.2.08.01				1. Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	100	1.640.000	1.640.000	100
4.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	9.000.000	6.950.000	77.22
4.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	35.000.000	35.000.000	100
4.01.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	27.830.000	25.623.000	92.07
4.01.01.2.09.09				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	20.070.000	20.063.000	99.97
4.01.01.2.09.11				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	7.760.000	5.560.000	71.65
4.01.02				**2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	315.488.000	255.832.200	81.09
4.01.02.2.01				**2.1. Administrasi Tata Pemerintahan**	**100**	315.488.000	255.832.200	81.09

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.02.2.01.01				1. Penataan Administrasi Pemerintahan	100	104.100.000	104.100.000	100
4.01.02.2.01.02				2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100	105.200.000	105.200.000	100
4.01.02.2.01.03				3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	106.188.000	46.532.200	43.82
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA				**5.745.649.600.00**	**5.672.642.600.00**	**98,73**
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**360.649.600.00**	**360.579.600.00**	**99,98**
4.01.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**215.082.100.00**	**215.082.100.00**	**100**
4.01.01.2.06. 04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	44.710.300.00	44.710.300.00	100
4.01.01.2.06. 05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	3.587.800.00	3.587.800.00	100
4.01.01.2.06. 08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	14.988.000.00	14.988.000.00	100
4.01.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	151.796.000.00	151.796.000.00	100
4.01.01.2.08				**1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**80.100.000.00**	**80.030.000.00**	**99,91**
4.01.01.2.08.04				1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	80.100.000.00	80.030.000.00	99,91
4.01.01.2.09				**1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**65.467.500.00**	**65.467.500.00**	**100**
4.01.01.2.09.11				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	65.467.500.00	65.467.500.00	100
4.01.02				**2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**95**	**5.385.000.000.00**	**5.312.063.063.00**	**98,65**
4.01.02.2.02				**2.1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	95	5.385.000.000.00	5.312.063.063.00	98,65
4.01.02.2.02.01				1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	90	5.183.483.000.00	5.110.549.063.00	98,59

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.02.2.02.03				2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100	201.514.000.00	201.514.000.00	100
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		BAGIAN KERJA SAMA ANTAR WILAYAH SETDA				**940.772.400**	**939.428.204**	**99,85**
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**715.571.700**	**714.227.504**	**99,81**
4.01.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**268.495.800**	**267.866.604**	**99,77**
4.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	23.523.000	23.505.000	99,89
4.01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	3.321.400	3.321.400	100
4.01.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	17.152.400	17.152.400	100
4.01.01.2.06.09				4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	224.499.000	223.887.804	99,72
4.01.01.2.08				**1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**291.760.900**	**291.760.900**	**100**
4.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2.476.400	2.476.400	100
4.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	18.500.000	18.500.000	100
4.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	270.784.500	270.784.500	100
4.01.01.2.09				**1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**155.315.000**	**154.600.000**	**99,64**
4.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	155.315.000	154.600.000	99,64
4.01.02				**2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**225.200.700**	**225.200.700**	**100**
4.01.02.2.04				**2.1. Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**100**	**225.200.700**	**225.200.700**	**100**
4.01.02.2.04.01				1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	225.200.700	225.200.700	100
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA				**699,499,400**	**619,295,532**	**88,53**
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**97,33**	**202,689,300**	**176,552,732**	**87.11**
4.01.01.2.05				**1.1. Administrasi Kepegawaian Daerah**	**100**	**2,500,000**	**2,500,000**	**100**
4.01.01.2.05.02				1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribt Kelengkapannya	100	2,500,000	2,500,000	**100**
4.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**87,675,400**	**67,959,982**	**77.51**
4.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	42,222,200	41,239,300	97.67
4.01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	3,441,200	3,441,000	99.99
4.01.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	11,072,000	11,072,000	**100**
4.01.01.2.06.09				4. Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	30,940,000	12,207,682	39.46
4.01.01.2.07				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**43,075,500**	**43,075,500**	**100**
4.01.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan Mesain Lainnya	100	43,075,500	43,075,500	**100**
4.01.01.2.08				**2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**42,248,400**	**39,248,400**	**92.90**
4.01.01.2.08.01				3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	6,248,400	6,248,400	**100**
4.01.01.2.08.04				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	36,000,000	33,000,000	91.67
4.01.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86.67**	**27,190,000**	**23,768,850**	**87.42**
4.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.00	13,500,000	10,098,850	74.81
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92,31	13.690.000,00	13.670.000,00	99,85
4.01.03				**2. Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**85,42**	**496,810,100**	**442,742,800**	**89.12**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.03.2.01				**2.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**87,50**	**474,275,900**	**425,038,800**	**89.62**
4.01.03.2.01.01				1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLU	100	201,991,100	201,663,600	99.84
4.**01**.03.2.01.02				2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100	163,942,300	116,321,900	70.95
4.01.03.2.01.03				3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	50	95,295,000	95,084,800	99.78
4.01.03.2.01.04				4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	100	13,047,500	11,968,500	91.73
4.01.03.2.04				**2.2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**83,33**	**22,534,200**	**17,704,000**	**78.57**
4.01.03.2.04.01				1. Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan,kelautan,dan Perikanan	100	7,450,700	7,450,700	**100**
4.01.03.2.04.02				2. Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanPertambangan dan Lingkungan Hidup	100	7,720,600	5,620,400	72.80
4.01.03.2.04.03				3. Koordinasi Sinkronisasidan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	50	7,362,900	4,632,900	62.92
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA				**900.000.000.00**	**772.409.564.00**	**85,82**
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**78,61**	**363.150.400.00**	**235.639.564.00**	64,88
4.01.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95**	**240.257.900.00**	**174.518.895.00**	**72.63**
4.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	12.622.000.00	12.600.000.00	99,82
4.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	45.401.500.00	45.318.800.00	99,81

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	33.503.200.00	33.444.400.00	99,82
4.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	33.685.200.00	33.654.900.00	99,91
4.01.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	75	115.046.000.00	49.500.795.00	43,02
4.01.01.2.07				**1.2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
4.01.01.2.07.11				1. Pengaadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	0,00	0
4.01.01.2.09				**1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62,22**	**118.700.000.00**	**61.120.669.00**	**51,49**
4.01.01.2.09.11				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62,22	118.700.000.00	61.120.669.00	51,49
4.01.03				**2. Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**100**	**536.849.600.00**	**536.770.000.00**	99,98
4.01.03.2.02				**2.1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	100	536.849.600.00	536.770.000.00	99,98
4.01.03.2.02.01				1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100	288.275.000.00	288.220.000.00	99,98
4.01.03.2.02.03				2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100	248.574.600.00	248.550.000.00	99,90
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA				**1.243.271.380,00**	**1.167.280.355,00**	**93,88**
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**265.174.480,00**	**236.117.250,00**	**89,04**
4.01.01.2.02				**1.4. Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**100,00**
4.01.01.2.02,02				1. Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	100	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
4.01.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**127.792.280,00**	**101.771.000,00**	**79,63**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	19.823.280,00	19.747.000,00	99,61
4.01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	16.150.000,00	16.149.600,00	99,99
4.01.01.2.06.09				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	91.819.000,00	65.874.400,00	71,74
4.01.01.2.08				**1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**94.637.200.00**	**92.449.700.00**	**97,68**
4.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	541.200,00	541.200,00	100,00
4.01.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	94.096.000,00	91.908.500.00	97,67
4.01.01.2.09				**1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**30.745.000,00**	**29.896.550,00**	**97,24**
4.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	30.745.000,00	29.896.550,00	97,24
4.01.02				**2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat**	**73,95**	**978.096.900,00**	**931.163.105,00**	**95,20**
4.01.02.2.03				**2.1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**73,95**	**978.096.900,00**	**931.163.105,00**	**95,20**
4.01.02.2.03.01				1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	88	447.480.200,00	421.182.305.00	94,12
4.01.02.2.03.02				2. Fasilitasi Bantuan Hukum	100	427.105.000,00	406.817.100,00	95,24
4.01.02.2.03.03				3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	33,87	103.511,700,00	103.163.700,00	99,66
4.01	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA				**999,997,300,00**	**961,775,968,00**	**96.18**
4.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**353,758,300,00**	**341,559,188,00**	**96.55**
4.01.01.2.05				**1.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**43,202,000,00**	**38,475,560,00**	**89.06**
4.01.01.2.05.11				1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	43,202,000,00	38,475,560,00	89.06

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**272,676,300,00**	**266,483,570,00**	**97,73**
4.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	3,584,600,00,00	3,581,400,00	99.91
4.01.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	55,785,000,00	51,285,000,00	91.93
4.01.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	87,618,600,00	87,095,000,00	99.40
4.01.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	5,504,900,00	5,500,000,00	99.91
4.01.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	16,625,200,00	16,617,700,00	99.95
4.01.01.2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	103,558,000,00	102,404,470,00	98.89
4.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**23,200,000,00**	**23,199,200,00**	**100.00**
4.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	3,280,000,00	3,279,200,00	99.98
4.01.01.2.08.04				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	19,920,000,00	19,920,000,00	100.00
4.01.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**14,680,000,00**	**13,400,858,00**	**91.29**
4.01.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	1,500,000,00	280,858,00	18.72
4.01.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	13,180,000,00	13,120,000	99.54
4.01.03				**2. Program Perekonomian Pembangunan**	**100**	**646,239,000,00**	**620,216,780,00**	**95.97**
4.01.02.2.03				**2.1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**646,239,000,00**	**620,216,780,00**	**95.97**
4.01.02.2.03.01				1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	326,319,000	300,306,780,00	92.03
4.01.03.2.03.02				2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	-	-	-	-
4.02	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			**81,05**	**42.567.368.866.00**	**36.344.604.717.52**	**85,38**
4.02.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**81,05**	22.317.487.466,00	19.928.353.531,52	89,29
4.02.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**72,08**	**3.665.864.497,00**	**2.645.379.074,52**	**72,16**
4.02.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72,08	3.665.864.497,00	2.645.379.074,52	72,16
4.02.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91,62**	**1.121.175.700,00**	**1.048.388.393,00**	**93,51**
4.02.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	19.340.000,00	19.320.750,00	99,90
4.02.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	105.609.400,00	105.484.680,00	99,88
4.02.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	123.066.300,00	123.046.124,00	99,98
4.02.01.2.06.06				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68,02	62.500.000,00	42.510.000,00	68,02
4.02.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	96	542.980.000,00	523.194.000,00	96,36
4.02.01.2.06.09				6. Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85,71	267.680.000,00	234.832.839,00	87,73
4.02.01.2.07				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75,00**	**16.650.000,00**	**12.350.000,00**	**74,17**
4.02.01.2.07.10				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,00	16.650.000,00	12.350.000,00	74,17
4.02.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77,77**	**1.216.827.000,00**	**942.810.676,00**	**77,48**
4.02.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	11.972.000,00	11.910.000,00	99,48
4.02.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	478.855.000,00	266.400.676,00	55,63
4.02.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83,33	726.000.000,00	664.500.000,00	91,53
4.02.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59,03**	**527.542.560.00**	**452.626.200,00**	**85,79**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.02.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66	189.537.500,00	151.885.360,00	80,13
4.02.01.2.09.02				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33	24.000.000,00	2.907.840,00	12,12
4.02.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80	283.115.060.00	279.482.000,00	346,44
4.02.01.2.09.11				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57,14	30.890.000,00	18.351.000,00	59,41
4.02.01.2.15				**1.6.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**97,08**	**14.158.104.605,00**	**13.026.443.288,00**	**92,01**
4.02.01.2.15.01				1. Penyelenggara-an Administrasi Keuangan DPRD	94,17	13.701.500.176,00	12.903.280.788,00	94,17
4.02.01.2.15.02				2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100	456.604.429,00	123.162.500,00	26,97
4.02.01.2.16				**1.7.Layanan Administrasi DPRD**	**94,61**	**1.830.415.604,00**	**1.800.355.900,00**	**98,36**
4.02.01.2.16.03				1. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	92	305.855.000,00	282.085.900,00	92,23
4.02.01.2.16.04				2. Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	97,22	1.524.560.604,00	1.518.270.000,00	99,59
4.02.02				**2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**86,47**	20.030.788.900,00	16.416.251.186.00	81,96
4.02.02.2.01				**2.1.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**97,91**	**12.948.000,00**	**12.775.000,00**	**98,66**
4.02.02.2.01.02				1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	97,91	12.948.000,00	12.775.000,00	98,66
4.02.02.2.04				**2.2.Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100**	**240.000.000,00**	**240.000.000,00**	**100**
4.02.02.2.04.05				1. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100	240.000.000,00	240.000.000,00	100
4.02.02.2.05				**2.3.Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**97,99**	**12.791.091.900,00**	**12.653.172.900,00**	**98,92**
4.02.02.2.05.01				1. Kunjungan Kerja dalam Daerah	97,33	8.431.664.400,00	8.307.245.400,00	98,52
4.02.02.2.05.03				2. Pelaksanaan Reses	98,66	4.359.427.500,00	4.345.927.500,00	99,69

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
4.02.02.2.08				**2.4. Fasilitasi Tugas DPRD**	**50**	**6.986.749.000,00**	**3.510.303.286,00**	**50,24**
4.02.02.2.08.01				1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	50	6.986.749.000,00	3.510.303.286,00	50,24
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**							
5.01	**Perencanaan**							
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**9.412.686.630.00**	**6.689.097.731.00**	**71,06**
5.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**83,72**	5.456.622.130.00	4.521.146.421.00	82,85
5.01.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**10.928.000.00**	**10.928.000.00**	**100**
5.01.01.2.01.02				1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	5.704.000,00	5.704.000,00	100
5.01.01.2.01.03				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	5.224.000,00	5.224.000,00	100
5.01.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**91,**	**3.807.402.890.00**	**3.460.756.708.00**	**90,89**
5.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91	3.807.402.890.00	3.460.756.708.00	90,89
5.01.01.2.05				**1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**31.311.000,00**	**0.00**	**0.00**
5.01.01.2.05.02				1. PengadaanPakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	0	31.311.000,00	0.00	0.00
5.01.01.2.06				**1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90,80**	**616.443.500.00**	**421.197.732.00**	**68,32**
5.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	24.386.500.00	24.386.500.00	100
5.01.01.2.06.02				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	43.456.100.00	43.456.100.00	100
5.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	34.999.900.00	34.999.900.00	100
5.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	51.593.000.00	51.593.000.00	100
5.01.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54	462.008.000,00	266.762.232.00	57,73

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.01.01.2.07				**1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**441.891.500.00**	**441.537.200.00**	**99,91**
5.01.01.2.07.11				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	100	441.891.500.00	441.537.200.00	99,91
5.01.01.2.08				**1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**89**	**221.395.240.00**	**155.397.481.00**	**70,19**
5.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	30.012.000,00	30.012.000,00	100
5.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67	173.383.240.00	107.385.481.00	61,93
5.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	18.000.000.00	18.000.000.00	100
5.01.01.2.09				**1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31,50**	**327.250.000.00**	**31.329.300.00**	**10,00**
5.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30	61,100,000,00	16.390.000.00	26,82
5.01.01.2.09..09				2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	0	214.000.000.00	0.00	0.00
5.01.01.2.09.11				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33	52.150.000.00	14.939.300.00	28,64
5.01.02				**2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**51,25**	**1.592.475.400.00**	**510.866.700.00**	**32,08**
5.01.02.2.01				**2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**51,25**	**1.195.977.400.00**	**510.866.700.00**	**42,71**
5.01.02.2.01.03				1. Pelaksanaan Konsultasi Publik	40	92.528.400.00	39.016.400.00	40,84
5.01.02.2.01.04				2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat ahDaerah/Lintas Perangkat Daer	82	236.386.000.00	195.970.000.00	82.90
5.01.02.2.01.05				3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	66	263.229.700.00	173.681.000.00	65,98

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.01.02.2.01.07				4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	17	603.833.300.00	102.199.300.00	16,92
5.01.02.2.03				**2.2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**0**	**396.498.000.00**	**0.00**	**0.00**
5.01.02.2.03.01				1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembanguanan daerah di Kabupaten/Kota	0	42.732.000	0.00	0.00
5.01.02.2.03.03				2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	353.766.00.00	0.00	0.00
5.01.03				**3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**96**	155.412.400.00	147.802.400.00	95,10
5.01.03.2.01				**3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**44.400.000.00**	**44.400.000.00**	**100**
5.01.03.2.01.02				1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100	22.200.000.00	22.200.000.00	100
5.01.03.2.01.05				2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	22.200.000.00	22.200.000.00	100
5.01.03.2.02				**3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**87,50**	**51.805.000.00**	**44.205.000.00**	**85,32**
5.01.03.2.02.01				1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	20.716.000.00	20.716.000.00	100
5.01.03.2.02.02				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	75	31,089,000,00	23.489.000.00	75,55

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
				Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
5.01.03.2.03				**3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**59.207.400.00**	**59.197.400.00**	**99,98**
5.01.03.2.03.01				1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	29.648.000.00	29.643.000.00	99,98
5.01.03.2.03.02				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100	29.559.400.00	29.554.400.00	99,98
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
5.02	**KEUANGAN**							
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			**82,26**	**21,261,417,630,00**	**19,380,789,191,00**	91
5.02.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**82,26**	**17.100.399.430,00**	**16.057.095.508,46**	**93,90**
5.02.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**123.494.000,00**	**47.937.000,00**	**38,82**
5.02.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**50**	31.163.000,00	23.300.000,00	74,77
5.02.01.2.01.03				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	24.637.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.06				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	24.637.000,00	24.637.000,00	100,00
5.02.01.2.01.07				4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	43.057.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0**	**12.294.610.530,00**	**12.132.997.544.46**	**98,68**
5.02.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79,36	12.294.610.530,00	12.132.997.544.46	98,68
5.02.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	2.259.387.100,00	2.089.132.602,00	92,46

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.02.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan Kantor	100	240.242.900,00	240.239.000,00	99,00
5.02.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan logistik	100	703.652.600,00	695.204.000,00	98,80
5.02.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	100	198.998.600,00	198.998.000,00	100,00
5.02.01.2.06.06				4. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	100	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00
5.02.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	611.930.000,00	611.060.500,00	99,86
5.02.01.2.06.09				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	454.563.000,00	313.631.102,00	69,00
5.02.01.2.07				**1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**782.492.000,00**	**563.282.000,00**	**71,99**
5.02.01.2.07.05				1. Pengadaan Mebel	100	220.747.000,00	220.177.000,00	99,74
5.02.01.2.07.06				2. Pengadaaan Peralatan dan mesin Lainnya	100	134.865.000,00	134.865.000,00	100,00
5.02.01.2.07.09				3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	15.800.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.10				4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	395.240.000,00	208.240.000,00	52,69
5.02.01.2.07.11				5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	15.840.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08				**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**868.153.500,00**	**796.222.362,00**	**91,71**
5.02.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100.216.000,00	49.020.000,00	48,91
5.02.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	501.250.000,00	480.514.862,00	95,86
5.02.01.2.08.03				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	61.300.000,00	61.300.000,00	100,00
5.02.01.2.08.04				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	205.387.500,00	205.387.500,00	100,00
5.02.01.2.09				**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**83,33**	**772.262.300,00**	**427.524.000,00**	**53,36**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.02.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50	242.283.000,00	215.270.000,00	88,85
5.02.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	469.979.300,00	157.654.000,00	33,54
5.02.01.2.09.10				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	60.000.000,00	54.600.000,00	91,00
5.02.02				**2. Program Pengelolaan Keuangan**	**100**	**3.407.721.900,00**	**2.833.110.919,00**	**83,14**
5.02.02.2.01				**2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**1.299.788.900,00**	**835.992.800,00**	**64,32**
5.02.02.2.01.01				1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100	36.567.000,00	35.856.500,00	98,06
5.02.02.2.01.02				2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100	36.567.000,00	35.790.000,00	97,88
5.02.02.2.01.07				3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	415.376.200,00	251.996.100,00	60,67
5.02.02.2.01.08				4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	212.659.700,00	144.396.800,00	67,90
5.02.02.2.01.09				5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	396.607.000,00	283.348.000,00	71,44
5.02.02.2.01.13				6. Pembinaan Perencanaan Pengaanggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	202.012.000,00	84.605.400,00	41,88
5.02.02.2.02				**2.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100**	**106.435.000,00**	**103.633.000,00**	**97,37**
5.02.02.2.02.01				1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	38.335.000,00	35.885.000,00	93,61

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.02.02.2.02.07				2. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Ralisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan pelaksanan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	**100**	68.100.000,00	67.748.000,00	94,48
5.02.02.2.03				**2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100**	**724.325.000,00**	**616.312.119,00**	**85,09**
5.02.02.2.03.02				1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100	21.950.000,00	21.950.000,00	100,00
5.02.02.2.03.03				2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	52.850.000,00	42.078.100,00	79,62
5.02.02.2.03.04				3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	477.868.000,00	437.304.619,00	91,51
5.02.02.2.03.05				4. Koordinasi dan PenyusunanRancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan BD Kabupaten/Kota danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100	171.657.000,00	114.979.400,00	66,98
5.02.02.2.04				**2.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**50**	**1.277.173.000,00**	**1.277.173.000,00**	**100,00**
5.02.02.2.04.08				1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100	1.277.173.000,00	1.277.173.000,00	100,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.02.02.2.04.09				2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0,00	0,00	0,00
5.02.03				**3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**80**	**753.296.300,00**	**490.582.764,00**	**65,12**
5.02.03.2.01				**3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**80**	**753.296.300,00**	**490.582.764,00**	**65,12**
5.02.03.2.01.02				1. Penyusunan Standar barang Milik daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	0	238.312.800,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03				2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	33.657.200,00	33.616.000,00	99,88
5.02.03.2.01.07				3. Pengamanan Barang Milik Daerah	100	281.719.000,00	281.719.000,00	100,00
5.02.03.2.01.11				4. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100	44.323.000,00	44.210.200,00	99,75
5.02.03.2.01.12				5. Penyusunan Lapran Barang Milik Daerah	100	155.284.300,00	131.037.564,00	84,39
5.02	**KEUANGAN**							
5.02		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**				**4,134,467,150.00**	**3,249,811,056.00**	78.60
5.02.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**	**57,42**	**3,669,640,077.00**	**3,060,380,356.00**	83.40
5.02.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**94.55**	**2,679,034,525.00**	**2,532,900,568.00**	**94.55**
5.02.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.55	2,679,034,525.00	2,532,900,568.00	94.55
5.02.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60,72**	**446,628,300.00**	**231,488,830.00**	**51.83**
5.02.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.33	10,540,200.00	6,886,000.00	65.33
5.02.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.67	30,538,700.00	27,385,300.00	89.67
5.02.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik	100	124,608,100.00	66,680,200.00	53.51
5.02.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	60,706,300.00	26,691,500.00	43.97

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.02.01.2.06.06				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.88	4,000,000.00	1,435,000.00	35.88
5.02.01.2.06.08				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.84	35,991,000.00	35,932,000.00	99.84
5.02.01.2.06.09				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.88	180,244,000.00	66,478,830.00	36.88
5.02.01.2.07				**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0.00**	**70,600,625.00**	**-**	**0.00**
5.02.01.2.07.10				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	70,600,625.00	-	0.00
5.02.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50,37**	**202,980,000.00**	**68,884,568.00**	**33.94**
5.02.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2,460,000.00	2,460,000.00	100.00
5.02.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.42	185,900,000.00	63,984,568.00	34.42
5.02.01.2.08.03				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.69	14,620,000.00	2,440,000.00	16.69
5.02.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81,49**	**270,396,900.00**	**227,106,390.00**	**83.99**
5.02.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	77.59	48,420,000.00	37,571,390.00	77.59
5.02.01.2.09.10				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	85.39	221,976,900.00	189,535,000.00	85.39
5.02.04				**2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**46,80**	**464,827,000.00**	**189,430,700.00**	40.75
5.02.04.2.01				**2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**46,80**	**464,827,000.00**	**189,430,700.00**	**40.75**
5.02.04.2.01.05				1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	39.22	91,800,000.00	36,000,000.00	39.22
5.02.04.2.01.08				2. Penetapan Wajib Pajak Daerah	37.97	32,412,000.00	12,306,700.00	37.97
5.02.04.2.01.11				3. Penagihan Pajak Daerah	29.38	260,590,000.00	76,574,000.00	29.38

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.02.04.2.01.13				4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	80.66	80,025,000.00	64,550,000.00	80.66
5.03	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**							
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**61,59**	**5.382.190.210,00**	**4.260.384.347,00**	**79,16**
5.03.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**61,59**	**3.047.981.910,00**	**2.681.304.313,00**	**87.97**
5.03.01. 2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.345.221.810,00**	**2.292.241.474,00**	**97,74**
5.03.01. 2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.345.221.810,00	2.292.241.474,00	97,74
5.03.01. 2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**63**	**588.990.100,00**	**345.134.536,00**	**58,60**
5.03.01. 2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76	176.938.100,00	139.692.800,00	78.95
5.03.01. 2.06.08				2. Fasilitasi Kunjungan Tamu	73	54.900.000,00	40.193.000,00	73.21
5.03.01. 2.06.09				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	357.152.000,00	165.248.736,00	46.27
5.03.01. 2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50**	**36.000.000,00**	**18.000.000,00**	**50,00**
5.03.01. 2.08.04				1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	36.000.000,00	18.000.000,00	50,00
5.03.01. 2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33,34**	**77.770.000,00**	**25.928.303,00**	**33,34**
5.03.01. 2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,34	77.770.000,00	25.928.303,00	33,34
5.03.02				**2. Program Kepegawaian Daerah**	**64,50**	**2.334.208.300,00**	**1.579.080.034.00**	**67,64**
5.03.02.2.01				**2.1. Pengadaan,Pemberhentian dan informasi kepegaweaian ASN**	**100**	**804.513.300,00**	**649.411.696,00**	**80,72**
5.03.02.2.01.02				1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100	607.441.300,00	598.326.724,00	98.50
5.03.02.2.01.06				2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	90.332.000,00	12.294.772,00	13.61

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.03.02.2.01.10				3. Pengelolaan Sistim Informasi Kepegawaian	100	106.750.000,00	38.790.200,00	36.34
5.03.02.2.02				**2.2. Mutasi dan Promosi ASN**	**49,33**	**1.124.226.000,00**	**715.623.565.00**	**63.65**
5.03.02.2.02.01				1. Pengelolaan Mutasi ASN	32	86.961.000,00	28.457.809,00	32.72
5.03.02.2.02.02				2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	66	372.666.000,00	289.712.676,00	77.74
5.03.02.2.02.03				3. Pengelolaan Promosi ASN	50	664.599.000,00	397.453.080.00	59.80
5.03.02.2.03				**2.3. Pengembangan Kompetensi ASN**	31,90	**405.469.000,00**	**214.044.773,00**	**52,79**
5.03.02.2.03.05				1. Koordinasi dan Kerja Sama Pelelaksanaan Diklat	81.53	68.915.000,00	13.742.900,00	19.94
5.03.02.2.03.06				2. Fasilitasi Sertifikasi jabatan ASN	31,90	149.281.000,00	47.618.133,00	31.90
5.03.02.2.03.14				3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	81.53	187.273.000,00	152.683.740,00	81.53
5.05	**Penelitian dam Pengembangan**							
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
5.05.02				**1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**62**	2.208.176.700.00	1.509.282.210.00	68,34
5.05.02.2.01				**1.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**53**	**1.661.751.100.00**	**1.086.344.975.00**	**65,37**
5.05.02.2.01.02				1. Fasilitasi ,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	56	1.098.587.100.00	631.529.062.00	57,48
5.05.02.2.01.12				2. Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	17	59.475.000.00	9.247.000.00	15,54
5.05.02.2.01.14				3. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	86	503.689.000,00	.445.568.913.00	88,46
5.05.02.2.03				**1.2. Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**71**	**546.425.600.00**	**422.937.235.00**	**77,40**
5.05.02.2.03.07				1. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	71	546.425.600.00	422.937.235.00	77,40
5.06	**Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Perbatasan**							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
		BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH				2.319.157.288	2.068.427.253	89,19
5.06.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**2,147,601,888.00**	**1.973.718.583**	**91,9**
5.06.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**22,563,500.00**	**22.338.500**	**99**
5.06.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	1,394,200.00	1.394.200	100
5.06.01.2.01.06				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	21,169,300.00	20.944.300	98,94
5.06.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1,765,583,588.00**	**1.646.170.725**	**93,24**
5.06.01.2.02.01`				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,718,353,788.00	1.598.940.925	93,05
5.06.01.2.02.03`				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	47,229,800.00	47.229.800	100
5.06.01.2.05				**1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**45,000,000.00**	**41.000.000**	**91,11**
5.06.01.2.05.01				1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	45,000,000.00	41.000.000	91,11
5.06.01.2.06				**1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**183,564,800.00**	**150.172.002**	**81,81**
5.06.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2,062,500.00	2.062.500	100
5.06.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	26,873,500.00	23.500.700	87,45
5.06.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	4,186,000.00	4.186.000	100
5.06.01.2.06.08				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	11,384,800.00	11.384.800	100
5.06.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	139,058,000.00	109.038.002	78,41
5.06.01.2.08				**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**101,200,000.00**	**84.348.380**	**83,35**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
5.06.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8,200,000.00	8.195.400	99,94
5.06.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	39,000,000	22.152.980	56,80
5.06.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	54,000,000	54.000.000	100
5.06.01.2.09				**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**29,690,000**	**29.688.976**	**100**
5.06.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	17,160,000	17.159.976	100
5.06.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	2,680,000	2.680.000	100
5.06.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	9,850,000	9.849.000	99,99
5.06.02				**2. Program Pengelolaan Perbatasan**	**80**	**171,555,400**	**94.708.670**	**55,21**
5.06.02.2.01				**2.1. Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**100**	**122,240,400**	**48.014.400**	**39,28**
5.06.02.2.01.01				1. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	100	101,023,000	26.797.000	26,53
5.06.02.2.01.02				2. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	100	21,217,400	21.217.400	100
5.06.02.2.03				**2.2. Pemantauan dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan**	**100**	**49,315,000**	**46.694.270**	**94,69**
5.06.02.2.03.0001				1. Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	100	37,586,000	34.965.270	93,03
5.06.02.2.03.0002				2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	100	11,729,000	11.729.000	100
6	**UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN**							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
6.01	**PENGAWASAN**							
		INSPEKTORAT						
6.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**48**	**5.667.826.333**	**4.231.617.161**	**74,66**
6.01.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3.308.709.833**	**3.179.124.003**	**96,i08**
6.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	3.015.025.442	2.924.505.925	97,00
6.01.01.2.02.02				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	293.684.391	254.618.078	86.70
6.01.01.2.05				**1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**16**	**361.626.000**	**66.555.615**	**18,40**
6.01.01.2.05.09				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16	.361.626.000	66.555.615	18,40
6.01.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87,50**	**990.096.000**	**768.339.042**	**77,60**
6.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	7.122.500	6.110.000	85,78
6.01.01.2.06.03				2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	79.690.000	40.336.800	50,62
6.01.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50	300.297.900	264.426.500	88,05
6.01.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	67.188.600	60.829.500	90,54
6.01.01.2.06.08				5. Fasilitas Kunjungan Tamu	50	111.417.000	72.007.800	64,63
6.01.01.2.06.09				6. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	424.380.000	324.628.442	76,49
6.01.01.2.07				**1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**118.124.500**	**-**	**-**
6.01.01.2.07.02				1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	-	-	-
6.01.01.2.07.05				2. Pengadaan Mebel	0	-	-	-
6.01.01.2.07.06				3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
6.01.01.2.08				**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40**	**257.700.000**	**82.549.487**	**32,03**
6.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	37.100.000	29.567.705	79,70
6.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	196.600.000	52.981.782	49,29
6.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	24.000.000	-	-
6.01.01.2.09				**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44,44**	**631.570.000**	**135.049.014**	**21,38**
6.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	476.760.000	110.254.014	10,57
6.01.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	43.310.000	14.950.000	34,52
6.01.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	111.500.000	9.845.000	8,83
6.01.02				**2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**73**	**2.771.045.800**	**1.698.634.235**	**61,30**
6.01.02.2.01				**2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	95,83	**1.789.915.800**	**846.614.235**	**47,30**
6.01.02.2.01.01				1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40	103.894.000	18.350.000	17,66
6.01.02.2.01.02				2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	73,33	375.750.000	357.250.000	95,08
6.01.02.2.01.03				3. Reviu Laporan Kinerja	100	436.200.000	146.000.000	33,47
6.01.02.2.01.04				4. Reviu Laporan Keuangan	100	18.350.000	18.350.000	100
6.01.02.2.01.05				5. Pengawasan Desa	41,66	425.100.000	211.500.000	49,75
6.01.02.2.01.06				6. Kerjasama Pengawasan Internal	0	-	-	-
6.01.02.2.01.07				7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	430.621.800	95.164.235	22,10
6.01.02.2.02				**2.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**50**	**981.130.000**	**852.020.000**	**86,84**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
6.01.02.2.02.01				1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	0	48.450.000	-	-
6.01.02.2.02.02				2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	932.680.000	852.020.000	91,35
6.01.03				**3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**14,60**	**188.582.000**	**16.500.000**	**8,75**
6.01.03.2.01				**3.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**0**	**49.778.000**	**-**	**-**
6.01.03.2.01.01				1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	0	30.389.000	-	-
6.01.03.2.01.02				2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	0	19.389.000	-	-
6.01.03.2.02				**3.2. Pendampingan dan Asistensi**	**14,60**	**138.804.000**	**16.500.000**	**11,89**
6.01.03.2.02.01				1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33,33	50.704.000	5.500.000	10,85
6.01.03.2.02.02				2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0	23.500.000	-	-
6.01.03.2.02.03				3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan 4. Pemberantasan Korupsi	25	45.500.000	11.000.000	24,18
6.01.03.2.02.04				5. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	19.100.000	-	-
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							
	KECAMATAN		Meningkat-nya Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Desa					
7.01		**Kecamatan Pulau-Pulau Aru**				3.228.828.945	3.107.482.257	**96.24**
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	87,87	**3.151.079.045**	**3.029.737.957**	**96.15**
7.01.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**91,84**	**2.993.828.745**	**2.916.882.116**	**97.43**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.49	2.993.828.745	2.916.882.116	97.43
7.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**84.345.300**	**62.325.100**	**73.89**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	4.975.800	4.975.800	100
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	35.871.100	53.727.30	99.60
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan enggandaan	100	6.105.400	6.105.400	100%
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	9.958.000	7.879.000	67.81
7.01.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	27.435.000	8.763.600	31.94%
7.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**49.350.000**	**33.655.741**	**68.20**
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4.100.000	4.100.000	100
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	100	42.250.000	29.555.741	68.20%
7.01.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60**	**23.555.000**	**16.875.000**	**71.64**
7.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0%	6.000.000	-	0%
7.01.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	100	6.895.000	6.895.000	100
7.01.01.2.09.10				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.89	10.660.000	9.980.000	93.62
7.01.03				**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**34.999.900**	**34.999.900**	**100**
7.01.03.2.01				**2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**34.999.900**	**34.999.900**	**100**
7.01.03.2.01.03				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	34.999.900	34.999.900	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.06				**3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**42.750.000**	**42.744.400**	**99.99**
7.01.06.2.01				**3.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**42.750.000**	**42.744.400**	**99.99**
7.01.06.2.01.03				1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100	42.750.000	42.744.400	99.99
	Urusan Kecamatan	**Kelurahan Siwalima**			**100**	**2.383.679.800**	**2.280.390.876**	**99.66**
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**2.268.004.200**	**2.170.848.056**	**95.72**
7.01.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**64.450.000**	**62.713.900,**	**67.08**
7.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	56.745.600	55.009.500	74.16
7.01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	2.094.400	2.094.400	100
7.01.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	5.610.000,	5.610.000	100
7.01.01.2.07				**1.2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**6.100.000**	**6.100.000**	**27.39**
7.01.01.2.07.06				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	6.100.000	6.100.000	14.09
7.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**2.101.025.400**	**2.096.400.621**	**99.67**
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1.820.400,00	1.820.400	63.79
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	15.525.000	10.900.221	64.98
7.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	2.083.680.000	2.083.680.000	100
7.01.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**12.220.000**	**6.343.035**	**26.89**
7.01.01.2.09.02				1. penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	100	12.220.000	6.343.035	26.89

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
7.01.03				**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**199.884.400**	**180.833.320**	**37.77**
7.01.03.2.01				**2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**22.187.400**	**22.187.400**	**11.24**
7.01.03.2.01.03	\			1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	22.187.400	22.187.400	100
7.01.03.2.02				**2.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100**	**87.000.000**	**-**	**0**
7.01.03.2.01.02				2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	90.697.000	-	0
7.01.03.2.03				**2.3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100**	**90.697.000**	**86.645.920,**	**95.53**
7.01.03.2.03.04				3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100	90.697.000	86.645.920,	95.53
	Urusan kecamatan	**Kelurahan Galaydubu**			**100**	**1.413.359.500**	**1.382.455.544**	**97.81**
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/ Kota**	**100**	**1.213.359.500**	**1.182.455.554**	**97.45**
7.01.01.2.06				**1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**62.444.500**	**47.363.800**	**75.85**
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	5.237.600	5.237.600	100
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	33.32.500	25.374.300	76.15
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	12.030.900	11.803.400	98.11
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	11.855.500	4.948.500	41.74
7.01.01.2.08				**1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**1.133.185.000**	**1.117.361.744**	**98.60**
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8.200.000	1.640.000	20
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	11.625.000	2.361.744	20.32
7.01.01.2.08.04				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	1.113.360.000	1.113.360.000	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.01.2.09				**1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**17.730.000**	**17.730.000**	**100**
7.01.01.2.09.09				1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	17.730.000	17.730.000	100
7.01.03				**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**200.000.000**	**200.000.000**	**100**
7.01.03.2.02				**2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100**	**50.759.600**	**50.759.600**	**100**
7.01.03.2.02.03				1. Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	100	50.759.600	50.759.600	100
7.01.03.2.06				**2.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100**	**149.204.400**	**149.204.400**	**100**
7.01.03.2.06.02				1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100	51.817.800	51.817.800	100
7.01.03.2.06.03				2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	51.190.200	51.190.200	100
7.01.03.2.06.10				3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100	46.196.400	46.196.400	100
7.01	**Urusan Kecamatan**							
			Meningkat-nya Kinerja Pemerinta-han Kecamatan dan Desa					
		KECAMATAN SIR- SIR						
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100	**787,884,207.00**	**776,714,419.88**	**98,58**
7.01.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**640,741,407.00**	**631,506,819.88**	**98,56**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	640,741,407.00	631,506,819.88	98,56
7.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**144,404,000.00**	**144,404,000.00**	**100**
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	120,544,200.00	120,544,200.00	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	22,801,400.00	22,801,400.00	100
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	1,058,400.00	1,058,400.00	100
7.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**2,738,800.00**	**803,600.00**	**29,34**
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2,738,800.00	803,600.00	29,34
7.01	**Urusan Kecamatan**							
		KECAMATAN ARU UTARA						
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**91,66**	**1.028.354.639**	**997.651.917**	**97.01**
7.01.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**878.610.239**	**850.987.117**	**96.85**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	878.610.239	850.987.117	96.85
7.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**130.544.400**	**129.444.800**	**99.15**
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	16.450.700	16.230.700	98.66
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	65.120.900	64.309.000	98.75
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	3.217.200	3.217.200	100
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	6.270.000	6.270.000	100
7.01.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	39.485.600	39.417.900	99.82
7.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66,66**	**3.000.000**	**1.020.000**	**34**
7.01.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,66	3.000.000	1.020.000	34
				1.4. Penataan Organisasi	**100**	**16.200.000**	**16.200.000**	**100**
				1. Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	16.200.000	16.200.000	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.03				**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**22.960.200**	**18.239.000**	**79.43**
7.01.03.2.02				**2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**22.960.200**	**18.239.000**	**79.43**
7.01.03.2.02.03				1. Peningkatan Partisipasi Masyaraka dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	22.960.200	18.239.000	79.43
7.01	**Urusan Kecamatan**							
			Meningkat-nya Kinerja Pemerinta-han Kecamatan dan Desa					
		KECAMATAN ARU UTARA TIMUR BATULEY						
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1,250,313,009,00**	**1,185,003,132.00**	**94,78**
7.01.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1,143,053,409.00**	**1,088,311,788.00**	**95,21**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,143,053,409.00	1,088,311,788.00	95,21
7.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**64,359,600.00**	**64,291,344.00**	**99,89**
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	8,302,000.00	8,302,000.00	100
7.01.01.2.06.02				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	20,253,000.00	20,253,000.00	100
7.01.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	30,047,900.00	30,041,344.00	100
7.01.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	2,841,700.00	2,780,000.00	97,83
7.01.01.2.06.08				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	2,915,000.00	2,915,000.00	100
7.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**42,900,000.00**	**32,400,000.00**	**75,52**
7.01.01.2.08.02				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	42,900,000.00	32,400,000.00	75,52
7.01.03				**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**34,997,600.00**	**34,997,600.00**	**100**
7.01.03.2.01				**2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**34,997,600.00**	**34,997,600.00**	**100**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.05.2.01.03				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	34,997,600.00	34,997,600.00	100
7.01	**Kecamatan**							
			Meningkat-nya Kinerja Pemerinta-han Kecamatan dan Desa					
		KECAMATAN ARU TENGAH				**1.907.255.894**	**1.761.313.658**	**92.34**
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**86,66**	**1.644.154.894**	**1.528.890.658**	**92.98**
7.01.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan PerangkatDaerah**	**100**	**1.351.559.094**	**1.318.926.458**	**97.58**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.351.559.094	1.318.926.458	97.58
7.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**100**	**79.433.000**	**78.364.200**	**98.65**
7.01.01.2.06.04				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	32.351.100	32.351.100	100
7.01.01.2.06.05				2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	13.661.900	12.662.300	92.68
7.01.01.2.06.08				3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	33.420.000	33.350.800	99.79
7.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80**	**97.436.000**	**57.800.000**	**59.32**
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12.300.000	12.300.000	100
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,66	14.636.000	9.500.000	64.90
7.01.01.2.08.05				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	70.500.000	36.000.000	51.06
7.01.01.2.09				**1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66,66**	**115.726.800**	**73.800.000**	**63.77**
7.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50	98.410.500	57.500.000	58.42
7.01.01.2.09.09				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	17.316.300	16.300.000	94.13

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.02				**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	100	**169.378.400**	**169.294.600**	**99.95**
7.01.02.2.01				**2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**169.378.400**	**169.294.600**	**99.95**
7.01.02.2.01.01				1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	169.378.400	169.294.600	99.95
7.01.03				**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**0**	**30.594.200**	-	**-**
7.01.03.2.06				**3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**0**	**30.594.200**	**-**	**-**
7.01.03.2.06.02				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	30.594.200	-	-
7.01.06				**4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**63.128.400**	**63.128.400**	**100**
7.01.06.2.01				**4.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**63.128.400**	**63.128.400**	**100**
7.01.06.2.01.17				1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100	63.128.400	63.128.400	100
7.01	**Urusan Kecamatan**							
		Kecamatan Aru Tengah Timur						
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100	**780.986.935**	**748.754.332**	**95,87**
7.01.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	**695.838.435**	**665.854.332**	**95,69**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	695.838.435	665.854.332	95,69
7.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	**61.133.500**	**59.289.000**	**96,98**
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	1.397.000	1.300.000	93,06
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	2.779.500	1.865.000	67,10

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	315.000	225.000	71,43
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	1.922.000	1.179.000	61,34
7.01.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	54.720.000	54.720.000	100,00
7.01.01.2.08				**1.3.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**24.015.000**	**23.611.000**	**98,32**
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1.230.000	975.000	79,27
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	22.785.000,	22.636.000	99,35
7.01.02				**2.Program penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	100	**16.396.000**	**15.926.000**	**97,13**
7.01.02.2.01				**2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100	**16.396.000**	**15.926.000**	**97,13**
7.01.02.2.01.02				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	16.396.000	15.926.000	97,13
7.01.03				**3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	100	**34.995.000**	**34.903.000**	**100,00**
7.01.03.2.06				**3.1.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	100	**34.995.000**	**34.903.000**	**100,00**
7.01.03.2.06.07				1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	34.995.000	34.903.000	100,00
7.01.06				**4.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100	**37.736.000**	**36.487.000**	**96,69**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.06.2.01				**4.1.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100	**37.736.000**	**36.487.000**	**96,69**
7.01.06.2.01.03				1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	22.811.500	21.626.000	94,80
7.01.06.2.01.17				2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100	14.924.500	14.861.000	99,57
7.01	**Urusan Kecamatan**							
		Kecamatan Aru Tengah Selatan						
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**985.434.924**	**937.083.747**	**95.09**
7.01.01.2.02				**1.1.Administrasi Keuangan PerangkatDaerah**	**100**	**844.245.424**	**825.305.047**	**97.75**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	844.245.424	825.305.047	97.75
7.01.01.2.06				**1.2.Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**100**	**62.310.300**	**32.915.300**	**52.82**
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	3.311.700	3.311.700	100
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	24.759.500	11.471.300	46.33
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	9.189.100	4.182.300	45.51
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	25.050.000	13.950.000	55.68
7.01.01.2.09				**1.3.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**78.879.200**	**78.863.400**	**99.97**
7.01.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	78.879.200	78.863.400	99.97
7.01.02				**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**16.096.000**	**16.096.000**	**100**
7.01.02.2.01				**2.1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**16.096.000**	**16.096.000**	**100**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.02.2.01.02				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	16.096.000	16.096.000	100
				3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**100**	**15.821.300**	**15.821.000**	**100**
				3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**100**	**15.821.300**	**15.821.000**	**100**
				1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	15.821.300	15.821.000	100
7.01	**Urusan Kecamatan**							
			Meningkat-nya Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Desa					
		Kecamatan Aru Selatan Utara				**960.210.366**	**911.386.960**	**94.91**
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**859.640.366**	**816.679.160**	**94.91**
7.01.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**1.416.000**	**1.416.000**	**100**
7.01.01.2.01.0001				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	1.416.000	1.416.000	100
7.01.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**795.718.566,**	**757.916.360**	**95.24**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	100	847.148.509	715.600.168	84.47
7.01.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**30.214.000**	**25.920.200**	**85.78**
7.01.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalas Penerangan Bangunan Kantor	90.00	7.744.000	6.796.000	87.75
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.33	7.106.300	6.703.700	94.33
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	100	6.800.500	4.884.800	71.83
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	83.33	8.563.200	7.535.700	88
7.01.01.2.08				**1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**1.352.800**	**492.000**	**36.36**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.33	1.352.800	492.000	36.36
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	500.000	-	0
7.01.01.2.09				**1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**32.355.000**	**32.350.6000**	**99.98**
7.01.01.2.09.02				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	32.355.000	32.350.6000	99.98
7.01.06				**2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100	**99.154.000**	**93.91.800**	**94.8**
7.01.06.2.01				**2.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**99.154.000**	**93.91.800**	**94.8**
7.01.06.2.01.17				1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	98,7	99.154.000	93.91.800	94.8
7.01	**Urusan Kecamatan**							
		Kecamatan Aru Selatan				**1.408.989.122**	**1.316.845.724**	**93.46**
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**91,66**	**1.374.002.922**	**1.281.859.524**	**93.29**
7.01.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan PerangkatDaerah**	**100**	**1.281.255.622**	**1.203.289.924**	**93.91**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.281.255.622	1.203.289.924	93.91
7.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**45.794.500**	**44.907.700**	**98.06**
7.01.01.2.06.0001				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	1.072.500	1.072.500	100
7.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	5.942.500	5.055.700	85.07
7.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	1.615.000	1.615.000	100
7.01.01.2.06.08				4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	37.164.500	37.164.500	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66,66**	**17.634.800**	**4.343.900**	**24.63**
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1.640.000	820.000	50
7.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	3.994.800	3.523.900	88.21
7.01.01.2.08.05				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	12.000.000	-	-
				1.4. Penataan Organisasi	**100**	**29.318.000**	**29.318.000**	**100**
				1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	29.318.000	29.318.000	100
				2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**100**	**34.986.200**	**34.986.200**	**100**
				2.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**100**	**34.986.200**	**34.986.200**	**100**
				1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	34.986.200	34.986.200	100
7.01	**Urusan Kecamatan**							
		Kecamatan Aru Selatan Timur						
7.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**46.67**	**1,317,806,210.00**	**1,232,951,820.00**	**93,56**
7.01.01.2.02				**1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1,251,213,610.00**	**1,187,869,345.00**	**94,94**
7.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,251,213,610.00	1,187,869,345.00	94,94
7.01.01.2.06				**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40**	**62,842,600.00**	**47,984,975.00**	**76,36**
7.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	23,615,600.00	22,925,600.00	97,08
7.01.01.2.06.03				2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	1,483,500.00	-	0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
7.01.01.2.06.04				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	25,064,400.00	25,068,375.00	100
7.01.01.2.06.05				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	2,437,300.00	-	0
7.01.01.2.06.06				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	10,241,800.00	-	0
7.01.01.2.08				**1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**3,750,000.00**	**-**	**0**
7.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	3,750,000.00	-	0
7.01.03				**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**0**	**34,991,000.00**	**-**	**0**
7.01.03.2.06				**2.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**0**	**34,991,000.00**	**-**	**0**
7.01.03.2.06.03				1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarg	0	34,991,000.00	-	0
8	**Pemerintahan Umum**							
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**4.333.404.218**	**4.053.091.757**	**93,53**
8.01.01				**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**2.628.449.968**	**2.453.662.657**	**93,35**
8.01.01.2.01				**1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**18.038.600**	**18.038.600**	**100**
8.01.01.2.01.01				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	18.038.600	18.038.600,00	100
8.01.01.2.02				**1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.179.221.286**	**2.069.169.775**	**94,95**
8.01.01.2.02.01				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.179.221.286	2.069.169.775	94,95
8.01.01.2.06				**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**220.890.882**	**156.154.082**	**70,69**
8.01.01.2.06.01				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	1.404.150	1.404.150	100
8.01.01.2.06.04				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	44.148.232	44.148.232	100
8.01.01.2.06.05				3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	16.600.000	16.600.000	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
8.01.01.2.06.08				4. Fasilitas Kunjungan Tamu	100	15.189.500	15.189.500	100
8.01.01.2.06.09				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	143.548.000	78.812.200	54,90
8.01.01.2.07				**1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**32.699.000**	**32.699.000**	**100**
8.01.01.2.07.10				1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	32.699.000	32.699.000	100
8.01.01.2.08				**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**46.280.400**	**46.280.400**	**100**
8.01.01.2.08.01				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4.280.400	4.280.400	100
8.01.01.2.08.02				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	42.000.000	42.000.000	100
8.01.01.2.09				**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**131.320.800**	**131.320.800**	**100**
8.01.01.2.09.01				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	69.200.000	69.200.000	100
8.01.01.2.09.06				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	22.045.000	22.045.000	100
8.01.01.2.09.09				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	40.075.800	40.075.800	100
8.01.02				**2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	100	**831.235.360**	**831.076.210**	**99,98**
8.01.02.2.01				**2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**831.235.369**	**831.076.210**	**99,98**
8.01.02.2.01.04				1. Pembentukan Paskibraka	100	831.235.360	831.076.210	99,98
8.01.02.2				**3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100**	**773.784.490**	**668.419.490**	**86,38**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
8.01.02.2.03				**3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**100**	**773.784.490**	**668.419.490**	**86,38**
8.01.02.2.03.01				1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	72.096.900	16.731.900	23,21
8.01.02.3.01.02				2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	701.687.590	651.687.590	92,87
8.01.04.2.04				**3.2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100**	**25.000.000**	**25.000.000**	**100**
8.01.04.2.04.01				1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	100	25.000.000	25.000.000	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN /SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE ANGGARAN (%)
				Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
8.01.05				**4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**100**	**74.933.400**	**74.933.400**	**100**
8.01.06.				**4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**100**	**74.933.400**	**74.933.400**	**100**
8.01.06.2.01.02				1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	74.933.400	74.933.400	100

LKPJ
TAHUN 2025